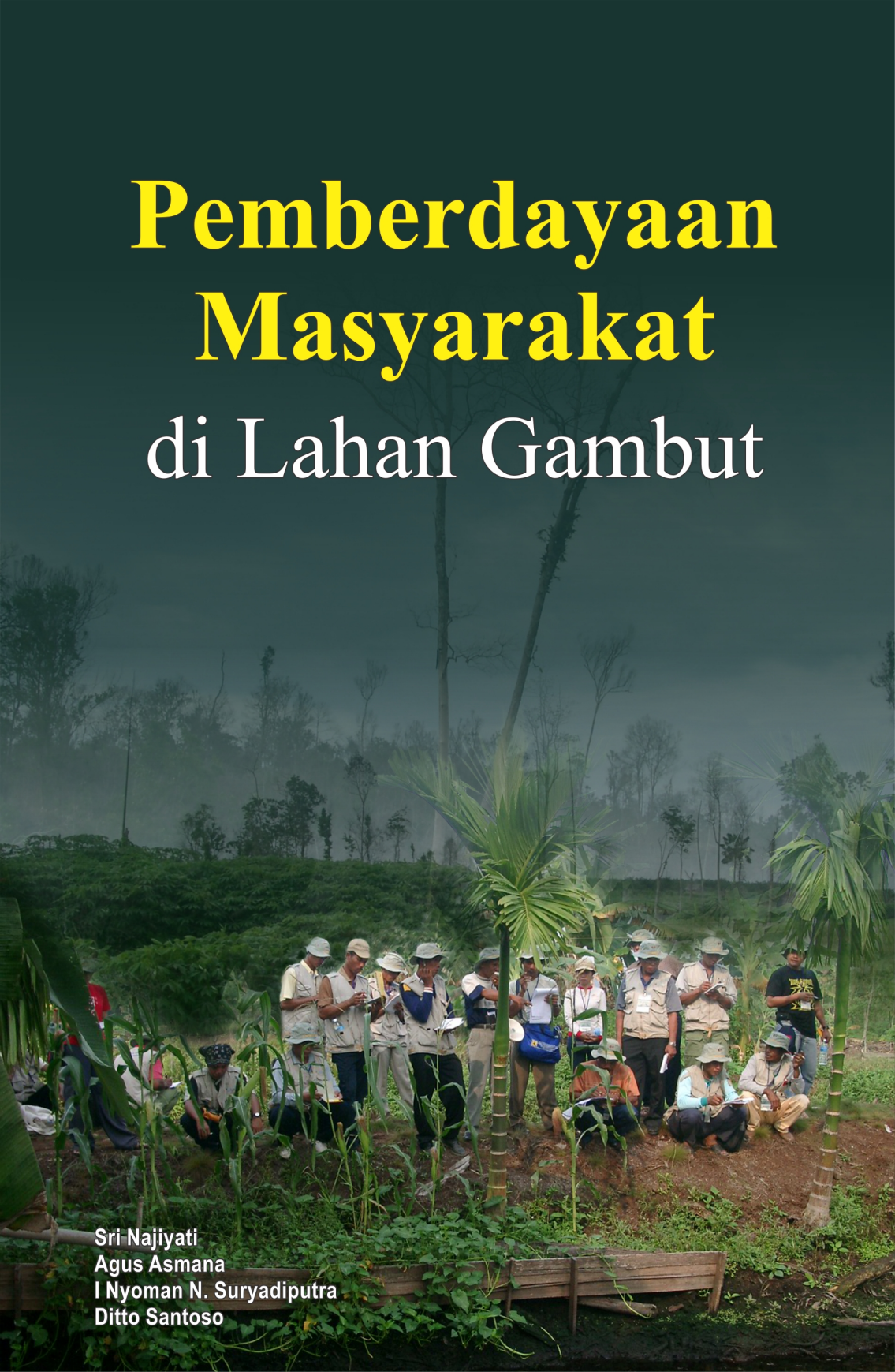


Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut



Sri Najiyati
Agus Asmana
I Nyoman N. Suryadiputra
Ditto Santoso

Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut

Dipublikasikan oleh:

Wetlands International – Indonesia Programme

PO. Box 254/BOO – Bogor 16002

Jl. A. Yani 53 – Bogor 16161

INDONESIA

Fax.: +62-251-325755

Tel.: +62-251-312189

General e-mail: admin@wetlands.or.id

Web site: www.wetlands.or.id

www.wetlands.org

Dibiayai oleh:



Canadian
International
Development
Agency

Agence
canadienne de
développement
international

Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut

Sri Najiyati
Agus Asmana
I Nyoman N. Suryadiputra
Ditto Santoso



Bogor, Desember 2005

Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut

© Wetlands International - Indonesia Programme

Penyusun : Sri Najiyati
Agus Asmana
I Nyoman N. Suryadiputra
Ditto Santoso

Editor : Daniati

Desain sampul : Triana

Tata Letak : Triana

Foto sampul depan : Lilis Herlisah (Dokumentasi WI-IP)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, dan Ditto Santoso
Pemberdayaan Masyarakat
di Lahan Gambut.
Bogor: Wetlands International - IP, 2005
xxxii + 244 hlm; illus.; 15 x 23 cm
ISBN: 979-99373-6-1

Saran kutipan :

Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, dan Ditto Santoso.
2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Proyek *Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.

Silahkan mengutip isi buku ini untuk kepentingan studi dan/atau kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan menyebut sumbernya.

Kata Pengantar

Rapuh dan marjinalnya lahan gambut ternyata menyebabkan sebagian besar masyarakat yang menjaga dan menggantungkan hidup di lahan gambut mengalami kemiskinan. Mengapa petani lahan gambut miskin, mengapa lahan gambut cenderung mengalami kerusakan secara progresif? Kita dapat saja mengatakan minimnya teknologi, pendidikan petani rendah, dan segudang alasan klasik lainnya. Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Ternyata dunia belum banyak memberikan perhatian terhadap keberdayaan masyarakat di lahan gambut.

Gambut memiliki peran penting dalam menjaga iklim global. Jika iklim global menjadi terjaga oleh lahan gambut yang lestari, kenikmatannya akan dirasakan oleh manusia diseluruh dunia. Tetapi, tanpa disadari, pelestarian lahan gambut, dibiayai oleh kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di lahan gambut. Perjuangan petani lahan gambut untuk menjaga kelestarian lahan gambut memiliki kontribusi yang luar biasa bagi kemaslahatan dunia dan kelangsungan hidup penghuninya. Oleh sebab itu, kita semua, masyarakat dunia, berkepentingan dan bergantung dalam bentuk yang berbeda terhadap kelestarian lahan gambut. Jika masyarakat luas dapat menikmati hidup karena ekosistem lahan gambut terjaga oleh petani yang miskin, berapakah yang sudah mereka kembalikan atau bayar dan insentif apa yang diterima oleh masyarakat jika mereka dapat menjaga lahan gambut.

Oleh sebab itu, dunia harus memberikan imbalan (*reward*) kepada masyarakat yang telah menjaga ekosistem lahan gambut melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan petani di lahan gambut harus dibiayai

oleh setiap orang yang menikmati manfaat langsung maupun tak langsung atas ketidakrusakan lahan itu. Pemberdayaan petani lahan gambut perlu dimulai oleh sebuah pemahaman bersama bahwa kemakmuran petani lahan gambut adalah demi kelangsungan hidup dan kemakmuran seluruh isi bumi. Kerja besar tersebut juga harus dibangun dalam sudut pandang yang lebih besar, yaitu menyadarkan masyarakat luas dan dunia agar peduli terhadap kelangsungan ekosistem lahan gambut, sama persis seperti tanggung jawab yang diberikan kepada petani lahan gambut itu sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di lahan gambut merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dunia terhadap kelestarian ekosistem lahan gambut.

Secara mikro, pemberdayaan masyarakat lahan gambut memiliki dua pertimbangan. Pertama, karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. Kedua, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam konservasi lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumberdaya alam tanpa merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari solusi agar masyarakat memiliki pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan.

Buku ini disajikan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat di lahan gambut yang diintegrasikan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Penyajian tersebut diawali dengan uraian mengenai ekosistem lahan gambut dan permasalahannya untuk memperoleh kesepahaman tentang pentingnya menjaga sumberdaya alam ini dari kerusakan. Pentingnya pemberdayaan

masyarakat di lahan gambut ditampilkan dalam bab berikutnya. Konsep tersebut dirangkai dengan pemaparan rinci tentang strategi pemberdayaan masyarakat, serta hikmah yang diperoleh dari pengalaman memberdayakan masyarakat. Materi-materi tersebut dikemas secara sistematis dalam sembilan buah bab.

Penyusunan dan penerbitan buku panduan ini dibiayai oleh Dana Pembangunan dan Perubahan Iklim Kanada-CIDA (*Canadian International Development Agency*) melalui Proyek CCFPI (*Climate Change, Forests and Peatland in Indonesia*) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh *Wetlands International-Indonesia Programme* bekerjasama dengan *Wildlife Habitat Canada*.

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga selesainya penyusunan buku ini. Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi kerja besar pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan keberdayaan masyarakat di lahan gambut.

Bogor, Desember 2005

Penulis



Daftar Istilah dan Singkatan

Animasi:	merupakan proses penyadaran/pencerahan dan penumbuhan motivasi untuk membangun kemampuan intelektual dan dasar pengetahuan masyarakat agar dapat berfikir, berefleksi, dan bertindak secara otonomi.
BKD:	Badan Kredit Desa
BKKBN:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKKSM:	Badan Koordinasi Kelompok Swadaya Masyarakat
BPR:	Bank Perkreditan Rakyat
BMT:	Balai Mandiri Terpadu (Baitul Maal Wat Tamwil)
CCFPI:	<i>Climate Change Forests and Peatlands in Indonesia</i> , merupakan suatu proyek kehutanan yang berkaitan erat dengan isu perubahan iklim, dimana hutan berperan penting sebagai penyerap karbon (<i>carbon sequestration</i>). Proyek ini dilaksanakan oleh WI-IP bekerjasama dengan Wildlife Habitat Canada (WHC) dan didanai oleh hibah dari pemerintah Kanada (CIDA, <i>Canadian International Development Agency</i>) melalui Dana Pembangunan Kanada untuk Perubahan Iklim (<i>Canada Climate Change Development Fund</i>) selama 5 tahun (Agustus 2001 – September 2006). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Proyek ini melibatkan partisipasi masyarakat maupun

pemerintah dalam rangka pelestarian dan rehabilitasi lahan dan hutan gambut di Indonesia. Proyek ini secara spesifik dirancang untuk mendukung penyelenggaraan Kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) bagi Kanada maupun Indonesia.

CD: *community development*

Ekosistem: adalah kesatuan unsur-unsur lingkungan secara utuh, menyeluruh, saling mempengaruhi, dan saling tergantung.

Gambut: atau Tanah organosol atau tanah histosol merupakan tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanah Gambut umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali didrainase. Beberapa ahli mendefinisikan gambut dengan cara yang berbeda-beda. Berikut beberapa definisi yang sering digunakan sebagai acuan:

Menurut Driessen, 1978 : gambut adalah tanah yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 65 % (berat kering) dan ketebalan gambut lebih dari 0.5 m.

Menurut Soil Taxonomy : gambut adalah tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm atau 60 cm, tergantung dari berat jenis (BD) dan tingkat dekomposisi bahan organiknya.

GRK: Gas Rumah Kaca (seperti karbon dioksida/ CO_2 , metana/ CH_4 dan nitrous oksida/ N_2O) merupakan gas-gas yang terdapat dalam atmosfer bumi dan memiliki kemampuan menyerap radiasi gelombang panjang yang bersifat panas sehingga suhu bumi akan semakin panas jika jumlah gas tersebut meningkat di atmosfer.

Handil: atau parit adalah saluran-saluran primer berukuran kecil di lahan rawa yang dibuat secara tradisional oleh Suku Banjar di Kalimantan

- Hara makro:** adalah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah besar. Contoh: Nitrogen (N), Calsium (Ca), Kalium (K), Posfor (P), Magnesium (Mg), dan Sulfur (S)
- Hara mikro:** adalah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah sangat sedikit. Contoh: Zeng (Zn), Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Boron (Bo), dan Molibdenum (Mo).
- Illegal logging:*** merupakan pengambilan kayu hutan secara tidak sah sehingga merugikan negara dan cenderung tidak dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan pelestarian lingkungan.
- Institusi/Kelembagaan/Pranata sosial:** adalah serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang berkembang dan mengurat-akar serta diterima oleh suatu komunitas untuk mengatur kegiatan hidup secara individu atau kolektif (Koentjaraningrat, 2004)
- JICA:** *Japan International Cooperative Agency*
- KAT:** Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan dari pemerintah baik sosial, ekonomi, maupun politik (Kepres R.I. Nomor 111 tahun 1999).
- Kapasitasi:** adalah proses pembentukan kemampuan untuk berpartisipasi agar masyarakat memiliki peluang berpindah dari status obyek (dimanipulasi oleh kekuatan eksternal dan korban pasif suatu proses sosial) ke status subyek.
- Kemandirian:** merupakan kemampuan pada diri manusia untuk bangkit dan melepaskan diri dari keterasingan, ketergantungan, eksploitasi, dan sub ordinasi.
- Kemiskinan:** merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat (Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009)

Ketidakberdayaan: adalah ketidak-mampuan untuk mengelola perasaan, pengetahuan, dan potensi sumber daya material yang ada karena faktor-faktor dalam diri sendiri atau faktor dari luar (Solomon, 1979) dalam Wahyudinata, S, 2000)

Kering tak balik: merupakan suatu kondisi tanah gambut yang mengalami kekeringan secara ekstrim sehingga sulit menyerap air kembali.

KLBI: Kredit Lunak Bank Indonesia

Konservasi lahan: merupakan upaya untuk mempertahankan atau mengawetkan kualitas lahan dari bahaya kerusakan

KPKU: Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha

KPS: Koperasi Simpan-Pinjam

KSM: Kelompok Swadaya Masyarakat; adalah sekumpulan orang pemilik atau pelaku usaha skala mikro dalam suatu ikatan pemersatu yang saling mengenal dan percaya satu sama lain serta bersepakat untuk bekerjasama meningkatkan kesejahteraan (Bank Indonesia, 2002).

KSK: Kredit Setia Kawan

KT: Kelompok Tani, adalah perkumpulan beberapa petani (umumnya 15-50 orang/kelompok) yang memiliki hamparan lahan berdekatan, yang dibentuk sebagai sarana belajar, penyebarluasan teknologi, mengakses modal dan/atau mengakses sarana produksi.

KTH: Kelompok Tani Hutan

KUB: Kelompok Usaha Bersama, adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk dengan maksud melaksanakan suatu usaha ekonomi yang dibiayai bersama, dilaksanakan bersama, dan keuntungannya dibagi bersama

KUD: Koperasi Unit Desa, adalah koperasi yang dibentuk dengan maksud sebagai sarana perekonomian pedesaan, dibentuk oleh warga desa dan beranggotakan warga desa dari suatu desa atau beberapa desa, dengan ketatalaksanaan yang diatur oleh pemerintah

- Kukesra:** Kredit Keluarga Sejahtera
- Lapisan Pirit:** adalah lapisan tanah yang mengandung bahan sulfidik (FeS_2) lebih dari 0,75%. Apabila tanah marin yang mengandung pirit direklamasi (misalnya dengan dibukanya saluran-saluran drainase sehingga air tanah menjadi turun dan lingkungan pirit menjadi terbuka dalam suasana aerobik) maka akan terjadi oksidasi pirit, yang menghasilkan asam sulfat sehingga reaksi tanah menjadi sangat masam.
- LDKP:** Lembaga Dana Kredit Pedesaan
- LKM:** Lembaga Keuangan Mikro; adalah jasa keuangan berupa penghimpunan dana pinjaman dalam jumlah kecil dan penyediaan jasa-jasa terkait yang ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (RUU RI tentang keuangan mikro).
- LKM formal:** adalah LKM yang memiliki izin operasional dari pemerintah dan diatur oleh Undang-Undang (termasuk dalam hal ini adalah Bank dan koperasi).
- LPD:** Lembaga Perkreditan Desa
- LSM:** Lembaga Swadaya Masyarakat
- MAP:** Modal Awal Padanan
- Modal Sosial:** adalah aspek struktur hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat menciptakan nilai-nilai baru (James Coleman, 1988) dalam Zulkifli Lubis, 1999.
- Partisipasi masyarakat:** merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara berfikir masyarakat sendiri sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif.
- Partisipasi aktif:** merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah yang bertolak dari kemampuan memutuskan, bertindak, dan berefleksi atas tindakan mereka sebagai subyek yang sadar.

Partisipasi pasif: masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain.

Pemberdayaan: dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu atau kolektif guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial (Onny S Priono dan Pranarka, 1997).

Pelarian: adalah istilah bagi orang Melayu Jambi untuk sistem gotong royong dalam mengelola budidaya padi seperti memabat dan membersihkan semak, mengolah tanah, dan panen.

Pendampingan: merupakan kegiatan memfasilitasi proses pembelajaran secara nonformal untuk mencapai keberdayaan masyarakat.

Pemkab: Pemerintah kabupaten

PD: Pedoman Dasar

PIR: Perkebunan Inti Rakyat

PIR Trans: Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi adalah pola kerjasama di bidang perkebunan dengan komoditas tertentu antara Perusahaan selaku inti atau bapak angkat dengan transmigran selaku plasma

PINBUK: Pusat Inkubator Usaha Kecil

PKK: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

PPL: Petugas Penyuluh Lapangan

PPS: Program Perhutanan Sosial

PRA: *Participatory Rural Appraisal*, merupakan salah satu metode penelitian secara partisipatif untuk menggali potensi dan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat.

- PRT:** Pedoman Rumah Tangga
- Pustu:** Puskesmas Pembantu, adalah sarana kesehatan (semacam klinik) yang dibentuk oleh pemerintah di setiap desa.
- PWR:** *Participatory Wealth Ranking* dapat diterjemahkan sebagai Pemeringkatan Kesejahteraan (Sosial Ekonomi) Masyarakat secara Partisipatif, yakni sebuah metode yang merupakan pengembangan dari teknik-teknik PRA
- RPH:** Resort Pemangkuan Hutan
- RRA:** *Rapid Rural Appraisal*
- RT:** Rukun Tetangga, adalah perkumpulan orang-orang yang bertetangga dalam skala tertentu.
- Sanak:** yaitu istilah hubungan kekerabatan bagi orang Melayu Jambi menurut garis keturunan hingga generasi ketiga.
- Sekat bakar (*Fire Break*):** adalah bagian dari lahan yang berguna untuk memisahkan, menghentikan, dan mengendalikan penyebaran api akibat kebakaran lahan atau hutan. Sekat bakar dapat berupa keadaan alami seperti jurang sungai, dan tanah kosong; atau dibuat oleh manusia seperti jalan, waduk, parit, dan jalur yang bersih dari serasah dan pepohonan.
- Senguyun:** adalah istilah bagi Suku Dayak untuk sistem gotong-royong dalam melakukan pembukaan lahan untuk perladangan.
- SEF:** *Small Enterprise Foundation*, sebuah LSM yang bergerak di bidang keuangan mikro di Afrika
- SHU:** Sisa Hasil Usaha
- Tabat:** (dari bahasa Dayak) adalah sekat atau bendungan air yang dibuat pada saluran/parit drainase dengan maksud untuk menahan laju drainase air sehingga lahan tidak mengalami kekeringan di musim kemarau.

Tahap fasilitasi: merupakan salah satu tahap dalam proses pendampingan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis masyarakat.

Tahap terminasi atau penghapusan diri atau tahap pengakhiran: yaitu penyerahan pengelolaan kegiatan/program pada masyarakat karena masyarakat dinilai sudah mencapai taraf mandiri.

Tegak rumah: adalah sistem gotong royong bagi orang Melayu Jambi dalam menegakkan tiang pada proses pembuatan rumah.

Transmigrasi: adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (UU No 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian)

Transek: adalah teknik penelusuran lokasi untuk mengamati secara langsung keadaan sumberdaya dan lingkungan desa. Teknik ini dilakukan dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang telah disepakati bersama.

TNB: Taman Nasional Berbak (di Jambi)

TSK: Tabungan Setia Kawan

UPT: Unit Permukiman Transmigrasi

WI-IP: Wetlands International-Indonesia Programme, sebuah lembaga non-profit internasional yang bergerak dibidang pelestarian lahan basah

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Istilah dan Singkatan	ix
Daftar Isi	xvii
Daftar Tabel	xxvi
Daftar Gambar	xxvii
Daftar Kotak	xxxii
Bab 1. Peran Ekosistem Lahan Gambut dan Permasalahannya	1
A. Ekosistem yang Unik	2
B. Ekosistem yang Multifungsi	5
1. Pengatur hidrologi	6
2. Sarana konservasi keanakeragaman hayati	6
3. Penjaga iklim global	7
4. Sarana budidaya	8
C. Sebaran dan Ancaman Kerusakan	9

Bab 2. Mengenal Budaya Masyarakat di Lahan Gambut	15
A. Suku Dayak dan Banjar di Kalimantan	15
1. Suku Dayak	16
2. Suku Banjar	18
B. Suku Melayu dan Kubu di Jambi	19
1. Suku Melayu Jambi	19
2. Suku Kubu	20
C. Komunitas Plural di Pemukiman Transmigrasi	24
Bab3. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut	27
A. Tanggung Jawab Masyarakat Dunia	28
B. Kemiskinan dan Ketidakberdayaan	30
1. Lahan yang marjinal dan fragil	31
2. Keterisolasian	32
3. Rendahnya modal sosial	32
4. Kompetensi sumber daya manusia	34
5. Kerentanan	34
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Gambut	37
1. Kontribusi bagi kerusakan	37
2. Kontribusi bagi Pelestarian	41
Bab 4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	51
A. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	51

B.	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	54
1.	Kesetaraan	54
2.	Partisipatif	58
3.	Keswadayaan	59
4.	Berkelanjutan	59
C.	Strategi Pemberdayaan	60
1.	Mulailah dari apa yang masyarakat miliki	61
2.	Berlatih dalam kelompok	62
3.	Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok	63
4.	Pelatihan khusus	66
5.	Mengangkat kearifan budaya lokal	67
6.	Bantuan sarana	67
7.	Dilaksanakan secara bertahap	69
D.	Bias Orang Luar dalam Memahami Kondisi Faktual Masyarakat	72
1.	Bias ruang	72
2.	Bias proyek	73
3.	Bias kepentingan	73
4.	Bias belas kasihan	73
5.	Bias kelompok sasaran	74
6.	Bias musim	74
7.	Bias diplomatis	75
8.	Bias profesi	75

Bab 5. Mengkaji dan Menyusun Rencana Secara Partisipatif	79
A. Dasar Pertimbangan	80
B. Konsep PRA	81
1. Keberpikahan	82
2. Penguatan masyarakat	82
3. Masyarakat sebagai pelaku utama	82
4. Saling belajar dan menghargai perbedaan	82
5. Santai dan informal	82
6. Triangulasi	82
7. Optimalisasi hasil	83
8. Orientasi praktis	83
9. Keberlanjutan dan selang waktu	83
10. Belajar dari kesalahan	83
11. Terbuka	83
C. Sikap Fasilitator	84
1. Bersikap sabar	84
2. Menghargai peserta tanpa memihak	84
3. Kreatif dan humoris	84
D. Keterampilan Fasilitator	85
1. Metode analisis sosial	85
2. Keterampilan komunikasi dua arah	86
3. Keterampilan memfasilitasi	86
4. Kemampuan menangani situasi ketegangan dan konflik	86
E. Perangkat PRA	86
1. Kalender musim	87
2. Pola penggunaan waktu	88

3.	Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan)	88
4.	Peta potensi	90
5.	Transek	91
6.	Participatory Wealth Ranking (PWR)	93
F.	Tahapan Kajian	95
1.	Pembentukan tim	95
2.	Penyamaan persepsi	96
3.	Analisis data sekunder	96
4.	Observasi lapang	96
5.	Diskusi kelompok	96
6.	Penyusunan laporan	98
G.	Rapid Rural Appraisal (RRA)	99
H.	Perencanaan Partisipatif Berorientasi Hasil	100
1.	Proses perencanaan	101
2.	Skala perencanaan	105
I.	Tindak Lanjut	109
1.	Penyidikan kelayakan	109
2.	Penyusunan Laporan	110
Bab 6.	Pendampingan Masyarakat	113
A.	Pertimbangan Penggunaan Metode Pendampingan	114
B.	Tujuan Pendampingan	115
C.	Fungsi Pendamping	116
1.	Fungsi edukator	116
2.	Fungsi motivator	117

3.	Fungsi fasilitator, dinamisator, dan inspirator	118
4.	Fungsi konselor	118
5.	Fungsi mediator	118
6.	Fungsi advokasi	119
D.	Kompetensi Pendamping	119
1.	Sikap pendamping	119
2.	Pengetahuan dan keterampilan	123
E.	Tahap-tahap Pendampingan	124
1.	Tahap persiapan	125
2.	Tahap kapasitas	126
3.	Tahap terminasi	128
F.	Penyusunan Laporan	129
1.	Laporan pendahuluan	130
2.	Laporan berkala	130
3.	Laporan insidentil	131
4.	Laporan akhir	132
G.	Catatan untuk Pendamping	133
Bab 7.	Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat	137
A.	Manfaat Kelompok	137
B.	Ukuran Kelompok	139
C.	Syarat Penumbuhan Kelompok	140
1.	Tumbuh atas kesadaran masyarakat	141
2.	Dibentuk dan diawasi oleh masyarakat	142
3.	Sikap saling percaya	143
4.	Modal swadaya	143

5.	Faktor perekat	144
6.	Memiliki norma yang jelas dan dipatuhi	145
7.	Kepemimpinan yang efektif	145
8.	Pendampingan yang efektif	146
D.	Unsur-unsur dalam Kelompok	146
1.	Organisasi	146
2.	Administrasi	146
3.	Modal	146
4.	Kegiatan produktif	147
5.	Akseptasi dan jejaring	147
E.	Penyusunan Peraturan Kelompok	149
F.	Struktur Organisasi	150
1.	Struktur organisasi KSM dampingan Bina Swadaya	150
2.	Struktur Organisasi LKM Model PINBUK	151
G.	Pembiayaan	152
H.	Tahap Perkembangan Kelompok	153
1.	Tahap pertumbuhan atau pembenahan kelompok	153
2.	Tahap perkembangan kelompok	154
3.	Tahap kemandirian	154
I.	Pengembangan LKM	155
1.	Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan	156
2.	Melayani masyarakat miskin	156
3.	Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel	156

J.	Keterkaitan Pengembangan Kelompok dan Pelestarian Lingkungan	158
1.	Spektrum kelestarian lingkungan mewarnai tujuan kelompok	158
2.	Pelestarian lingkungan sebagai salah satu kegiatan kelompok	158
3.	Pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan pelestarian lingkungan	158
4.	Pembangunan jalur hijau terpadu	168
5.	Pelatihan konservasi lahan gambut	169
6.	Pembentukan regu pemadam kebakaran	169
Bab 8.	Pencerahan dan Penumbuhan Motivasi dalam Tahap Animasi	171
A.	Tinjauan Teoritis	172
1.	Kepribadian dalam teori psikoanalisa	172
2.	Teori kepribadian behaviorisme	173
3.	Kebutuhan berjenjang	173
4.	Perkembangan kesadaran komunitas	175
B.	Kesadaran dalam Realitas	176
C.	Pendekatan	178
1.	Pendekatan psikologis	179
2.	Pendekatan fisik	184
Bab 9.	Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat	187
A.	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Aur – Jambi	188
1.	Kondisi fisik lahan	190
2.	Kondisi sosial	191

3.	Kondisi perekonomian	192
4.	Proses pemberdayaan	195
B.	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pematang Raman	206
1.	Kegiatan mencari ikan	206
2.	Proses pemberdayaan	207
C.	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rambut dan Rantau Rasau	209
1.	Kondisi lokasi	210
2.	Proses pemberdayaan	211
D.	Pemberdayaan Masyarakat di Pemukiman Transmigrasi Sungai Gelam - Jambi	216
E.	Pemberdayaan Masyarakat oleh WI-IP dengan Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung/ Tanjab Barat - JAMBI	218
F.	Program Kehutanan Sosial	229
1.	Kondisi lokasi	230
2.	Proses pemberdayaan	230
G.	Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan KSM di Heurgeulis	231
H.	Pengembangan LKM di Desa Marga Sakti Provinsi Bengkulu	234
	Daftar Pustaka	239

Daftar Tabel

Tabel 1. Perkiraan luas dan penyebaran lahan gambut di Indonesia menurut beberapa sumber	9
Tabel 2. Perbedaan model pelatihan konvensional dan model pendampingan kelompok	65
Tabel 3. Contoh kalender musim untuk kajian musim tanam Desa Sukatani	87
Tabel 4. Pola penggunaan waktu nelayan di Taman Nasional Berbak	88
Tabel 5. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan oleh masyarakat di lahan gambut dan alternatif solusinya	97
Tabel 6. Contoh bagan seleksi prioritas kegiatan	103
Tabel 7. Perbandingan pernyataan sasaran	104
Tabel 8. Contoh instrumen untuk melakukan <i>checklist</i> unsur-unsur kelompok	148
Tabel 9. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTBB	221
Tabel 10. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTKB	226
Tabel 11. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTSG	229

Daftar Gambar

Gambar 1.	Faktor penyebab kebakaran lahan gambut dan ancaman yang dapat ditimbulkan	12
Gambar 2.	Lahan gambut yang gersang akibat terbakar	13
Gambar 3.	Berbagai sayuran (caisin, bawang dan seledri) tumbuh subur di lahan gambut-dalam Desa Kalamancangan, Kalimantan Tengah	26
Gambar 4.	<i>Illegal logging</i> . Memerlukan alternatif usaha lain yang ramah lingkungan dan menghasilkan <i>cash income</i>	39
Gambar 5.	Pertanaman Sistem Lorong atau Wanatani (tumpangsari antara tanaman kehutanan dan tanaman pangan) di lahan gambut dangkal Desa Basarang, Kalteng	46
Gambar 6.	Perpaduan kolam ikan patin dengan tanaman pinang dan pisang sebagai penguat pematang kolam di lahan gambut, digabungkan dengan kandang ternak di atasnya di Desa Tangkit Baru, Jambi	47
Gambar 7.	Produk lahan gambut (misal purun, rotan dan pandan) memberi alternatif usaha bagi masyarakat. Bahan baku, rumput purun dapat dijadikan tikar lampit dan rotan/pandan dijadikan keranjang	66
Gambar 8.	Penabatan saluran di lahan gambut oleh masyarakat di Sumatera Selatan untuk mencegah kebakaran lahan di sekitarnya	69
Gambar 9.	Bagan alir tahapan pemberdayaan	71

Gambar 10.	Suasana banjir di desa lahan gambut Sungai Aur, Jambi. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam program pemberdayaan	74
Gambar 11.	Contoh Diagram Venn	89
Gambar 12.	Contoh peta potensi desa	90
Gambar 13.	Suasana kegiatan pemetaan di lapangan (kiri), lalu dipindahkan ke atas kertas flipchart (kanan)	91
Gambar 14.	Contoh bagan transek	92
Gambar 15.	Bagan alur perencanaan	101
Gambar 16.	Memfasilitasi diskusi kelompok merupakan salah satu fungsi pendamping	117
Gambar 17.	Transportasi air. Pendamping harus dapat mengikuti gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal menggunakan sarana transportasi	123
Gambar 18.	Suasana diskusi kelompok di Desa Sungai Merang, Sumatera Selatan	138
Gambar 19.	Bagan organogram KSM	150
Gambar 20.	Bagan struktur LKM BMT binaan PINBUK	152
Gambar 21.	Program rehabilitasi pantai dengan tanaman cemara laut (<i>Cassuarina</i> sp) oleh KT Mitra Bahari di Pematang -Jawa Tengah (binaan WI-IP) sejak tahun 1998. Kegiatan ini dipadukan dengan usaha ternak kambing oleh anggota KT MB	161

Gambar 22.	Program rehabilitasi tambak dan pantai dengan tanaman bakau (<i>Rhizophora</i> sp) oleh KT Desa Belendung, Pemalang -Jawa Tengah (binaan WI-IP) sejak tahun 2001. Kegiatan ini dipadukan dengan usaha pembuatan terasi oleh anggota kelompok	162
Gambar 23.	Bagan multipihak dalam rangka menyelamatkan kondisi lahan gambut di Taman Nasional Berbak, Jambi	165
Gambar 24.	Empat tahap perkembangan kesadaran komunitas	176
Gambar 25.	Demonstrasi plot (demplot) digunakan untuk memperagakan teknologi di bidang pertanian	185
Gambar 26.	Lokasi desa-desa di sekitar Taman Nasional Berbak, Jambi	189
Gambar 27.	Hasil kerajinan anyaman produksi anggota PKK di Sungai Aur (Jambi) sesudah memperoleh pelatihan	197
Gambar 28.	Bibit tanaman kompensasi yang siap di tanam di lahan kelompok tani diletakkan dalam perahu untuk mencegah hanyut oleh banjir (kiri) dan tanaman kakao, berumur 1 tahun, sebagai kompensasi yang telah ditanam anggota kelompok masyarakat binaan PINSE di muara sungai Air Hitam Dalam, Desa Sungai Rambut, Jambi	199
Gambar 29.	Pembibitan tanaman tahunan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat	203
Gambar 30.	Pemukiman sementara para penangkap ikan di dalam TN Berbak (kiri), hasil tangkapan (tengah) dan alat tangkap (kanan)	207

- Gambar 31. Struktur jalur hijau terpadu (Otsuka, M. 1997) 212
- Gambar 32. Tanaman pohon pinang di jalur hijau dan parit pengatur muka air tanah berfungsi sebagai sekat bakar di Desa Sungai Rambut, Jambi 213
- Gambar 33. Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kepala TN Berbak (kiri, tengah) meresmikan fasilitas Taman Nasional Berbak (kanan) yang dibangun oleh masyarakat Desa Sungai Rambut atas dukungan dana proyek CCFPI 216
- Gambar 34. Kepala Taman Nasional Berbak (baju abu-abu) bersama masyarakat menyaksikan peresmian fasilitas TNB di Resort Air Hitam Dalam (kiri). Tugu peringatan dibangun dari hasil tangkapan kayu tebangan liar (kanan) 216
- Gambar 35. Permukaan air di parit sudah naik (kiri), sebagai hasil pengelolaan pintu air (kanan) 223
- Gambar 36. Tangki penampungan air di lahan gambut yang dipompakan dari parit 223
- Gambar 37. Tanaman kacang panjang di lahan gambut. Tanpa tutupan mulsa (kiri), dengan tutupan mulsa (kanan) 224


Daftar Kotak

Kotak 1	Kebakaran lahan gambut sulit diatasi	5
Kotak 2	Trend suksesi yang terjadi di lahan gambut setelah terbakar	10
Kotak 3	Potret Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sepanjang Sungai Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah	35
Kotak 4	Nasib penebang liar di rawa gambut Sumsel	40
Kotak 5	Pembentukan Tim Pemadam Kebakaran di Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Rambut, Jambi	43
Kotak 6	Pengalaman rehabilitasi hutan bekas terbakar di Taman Nasional Berbak (TNB), Jambi	45
Kotak 7	Pemanfaatan saluran/parit yang ditabat sebagai sarana budi daya perikanan	48
Kotak 8	Bertanam Melon di Lahan Gambut Catatan Pak Suyandi, Petani di Desa Kalampangan, Kalimantan Tengah	49
Kotak 9	Banjir di hari raya qurban (sebuah renungan)	75
Kotak 10	Hasil PRA di Desa Sungai Rambut, Provinsi Jambi	108
Kotak 11	Hasil PRA di Desa Merang	112
Kotak 12	Guru yang arif, petani itu sendiri	135
Kotak 13	<i>Small Grant Funds</i> Sumatera	166
Kotak 14	Penabatan parit di Sumatera Selatan & Kalimantan Tengah	168
Kotak 15	Studi banding petani gambut Kalimantan Tengah ke Jambi dan Sumatra Selatan dan sebaliknya	186
Kotak 16	Pak Izak Insyaf	194
Kotak 17	Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Desa Sungai Aur	200
Kotak 18	Pak Mahyudin dan Semangatnya	205




Bab 1

Peran Ekosistem Lahan Gambut dan Permasalahannya



Bab ini mengupas peran ekosistem lahan gambut dan permasalahan yang dihadapi. Bagian ini sengaja ditempatkan pada bagian awal tulisan agar pembaca memperoleh pemahaman akan pentingnya menjaga ekosistem yang unik dan rapuh ini dari kerusakan.



Masyarakat di lahan gambut hidup dalam ekosistem yang rapuh. Namun, ekosistem tersebut memiliki peran penting bagi lingkungan, terutama dalam mengendalikan perubahan iklim dunia. Oleh karenanya, diperlukan konsep dan metode pemberdayaan bagi masyarakat di lokasi tersebut yang berorientasi pada upaya konservasi lahan gambut. Tujuannya, agar ekosistem yang rapuh ini dapat tetap menopang kehidupan masyarakat secara layak dan berkesinambungan, sementara masyarakat dengan penuh kesadaran mampu menjaganya dari proses pengrusakan. Artinya, peningkatan keberdayaan masyarakat harus disertai dengan peningkatan kesadaran dan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan. Mengapa demikian? Karena masyarakat diharapkan tidak terpancing pada kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif.

A. EKOSISTEM YANG UNIK

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah/tergenang tersebut.

Secara fisik, lahan gambut merupakan tanah *organosol* atau tanah *histosol* yang umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali didrainase. Beberapa ahli mendefinisikan gambut dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa definisi yang sering digunakan sebagai acuan antara lain:

- ❑ Gambut adalah tanah yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 65 % (berat kering) dan ketebalan gambut lebih dari 0.5 m (Driessen, 1978)
- ❑ Gambut adalah tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm atau 60 cm, tergantung dari berat jenis (BD) dan tingkat dekomposisi bahan organiknya (*Soil Taxonomy*).

Pembentukan gambut di beberapa daerah pantai Indonesia diperkirakan dimulai sejak zaman glasial akhir, sekitar 3.000 - 5.000 tahun yang lalu. Proses pembentukan gambut pedalaman bahkan lebih lama lagi, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu (Brady 1997 dalam Daniel Murdiyarsodkk, 2004)

Seperti gambut tropis lainnya, gambut di Indonesia dibentuk oleh akumulasi residu vegetasi tropis yang kaya akan kandungan Lignin dan Selulosa (Andriessse, 1988). Karena lambatnya proses dekomposisi, di dalam tanah gambut sering dijumpai adanya timbunan batang, cabang dan akar tumbuhan besar yang terawetkan dan strukturnya relatif masih nampak jelas.

Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, gambut memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan ekosistem-ekosistem lainnya. Itulah sebabnya, setiap pelaku pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus memahami sifat-sifat unik ini agar program-program yang dikembangkan bersama masyarakat tidak berujung pada kerusakan lahan gambut.

Sifat unik gambut dapat dilihat dari sifat kimia dan fisiknya. Sifat kimia gambut lebih merujuk pada kondisi kesuburannya yang bervariasi, tetapi secara umum ia memiliki kesuburan rendah. Hal ini ditandai dengan tanah yang masam (pH rendah), ketersediaan sejumlah unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan Bo) rendah, mengandung asam-asam organik beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar Kation (KTK) yang tinggi tetapi Kejenuhan Basa (KB) rendah.

Sifat fisik gambut yang perlu dipahami antara lain menyangkut kematangan, warna, berat jenis, porositas, kering tak balik, subsidensi, dan mudah terbakar. Dari sisi kematangan, gambut memiliki tingkat kematangan bervariasi karena dibentuk dari bahan, kondisi lingkungan, dan waktu yang berbeda. Gambut yang telah matang (tipe saprik) akan cenderung lebih halus dan lebih subur. Sebaliknya yang belum matang (tipe fibrik), banyak mengandung serat kasar dan kurang subur.

Gambut memiliki warna yang bervariasi pula. Meskipun bahan asal gambut berwarna kelabu, coklat atau kemerahan tetapi setelah dekomposisi muncul senyawa-senyawa yang berwarna gelap (Nurhayati dkk, 1986) sehingga gambut umumnya berwarna coklat sampai kehitaman. Warna gambut menjadi salah satu indikator kematangan gambut. Semakin matang, gambut semakin berwarna gelap. Fibrik berwarna coklat, hemik berwarna coklat tua, dan saprik berwarna hitam Darmawijaya, 1990. Dalam keadaan basah, warna gambut biasanya semakin gelap.

Gambut memiliki berat jenis yang jauh lebih rendah dari pada tanah aluvial. Makin matang gambut, semakin besar berat jenisnya. Selain itu, gambut memiliki daya dukung atau daya tumpu yang rendah karena mempunyai ruang pori besar sehingga kerapatan tanahnya rendah dan bobotnya ringan. Ruang pori total untuk bahan fibrik/hemik adalah 86-91

% (volume) dan untuk bahan hemik/saprik 88-92 %, atau rata-rata sekitar 90 % volume (Suhardjo dan Dreissen, 1977). Sebagai akibatnya, pohon yang tumbuh di atasnya menjadi mudah rebah. Rendahnya daya tumpukan menjadi masalah dalam pembuatan saluran irigasi, jalan, pemukiman dan pencetakan sawah.

Gambut juga memiliki daya hantar hidrolik (penyaluran air) secara horisontal (mendatar) yang cepat sehingga memacu percepatan pencucian unsur-unsur hara ke saluran drainase. Sebaliknya, gambut memiliki daya hidrolik vertikal (ke atas) yang sangat lambat. Akibatnya, lapisan atas gambut sering mengalami kekeringan, meskipun lapisan bawahnya basah. Hal ini juga menyulitkan pasokan air ke lapisan perakaran. Selain itu, gambut juga mempunyai sifat **kering tak balik**. Artinya, gambut yang sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap air kembali.

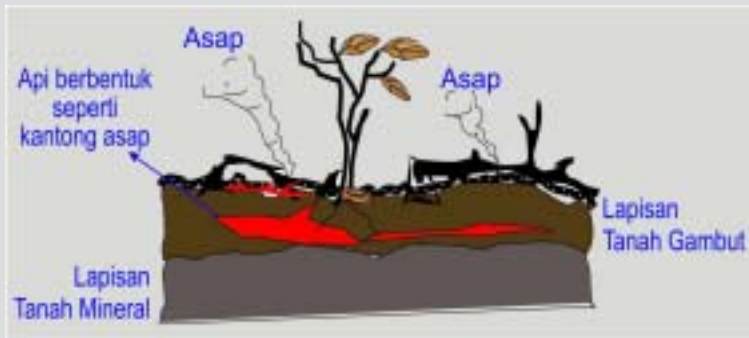
Setelah dilakukan drainase atau reklamasi, gambut berangsur akan *kempes* dan mengalami *subsidence/ambelas* yaitu penurunan permukaan tanah. Kondisi ini disebabkan oleh proses pematangan gambut dan berkurangnya kandungan air. Lama dan kecepatan penurunan tersebut tergantung pada kedalaman gambut. Semakin tebal gambut, penurunan tersebut semakin cepat dan berlangsungnya semakin lama. Rata-rata kecepatan penurunan adalah 0,3-0,8 cm/bulan, dan terjadi selama 3-7 tahun setelah drainase dan pengolahan tanah.

Lahan gambut cenderung mudah terbakar karena kandungan bahan organik yang tinggi dan memiliki sifat kering tak balik, porositas tinggi, dan daya hantar hidrolik vertikal yang rendah. Kebakaran di tanah gambut sangat sulit untuk dipadamkan karena dapat menembus di bawah permukaan tanah (lihat Kotak 1). Bara api yang dikira sudah padam ternyata masih tersimpan di dalam tanah dan menjalar ke tempat-tempat sekitarnya tanpa disadari. Bara di lahan gambut dalam biasanya hanya dapat dipadamkan oleh air hujan yang lebat. Oleh sebab itu, kebakaran gambut harus dicegah dengan cara tidak membakar lahan, tidak membuang bara api sekecil apapun seperti puntung rokok secara sembarangan terutama di musim kemarau, dan menjaga kelembaban tanah gambut dengan tidak membuat drainase secara berlebihan.

KOTAK 1

Kebakaran lahan gambut sulit diatasi

Kebakaran gambut tergolong dalam kebakaran bawah (*ground fire*). Pada tipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan karena tanpa dipengaruhi oleh angin. Api membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak diatas permukaan. Kebakaran bawah ini tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori gambut. Potongan-potongan kayu yang tertimbun gambut sekalipun akan ikut terbakar melalui akar semak belukar yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbetuk seperti cerobong asap. Akar dari suatu tegakan pohon di lahan gambutpun dapat terbakar, sehingga jika akarnya hancur pohonnya pun menjadi labil dan akhirnya tumbang. Gejala tumbang pohon yang tajuknya masih hijau dapat atau bahkan sering dijumpai pada kebakaran gambut. Mengingat tipe kebakaran yang terjadi di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul dipermukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. (Adinugroho, W.C. et al, 2005).



B. EKOSISTEM YANG MULTIFUNGSI

Gambut mulai gencar dibicarakan orang sejak sepuluh tahun terakhir, ketika dunia mulai menyadari bahwa sumberdaya alam ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai pengatur hidrologi, sarana konservasi keanekaragaman hayati, tempat budidaya, dan sumber energi; tetapi juga memiliki peran yang lebih besar lagi dalam perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan cadangan karbon dunia.

1. Pengatur hidrologi

Gambut memiliki porositas yang tinggi sehingga mempunyai daya menyerap air yang sangat besar. Apabila jenuh, gambut saprik, hemik dan fibrik dapat menampung air berturut-turut sebesar 450%, 450 – 850%, dan lebih dari 850% dari bobot keringnya atau hingga 90% dari volumenya. Karena sifatnya itu, gambut memiliki kemampuan sebagai penambat (*reservoir*) air tawar yang cukup besar sehingga dapat menahan banjir saat musim hujan dan sebaliknya melepaskan air tersebut pada musim kemarau sehingga dapat mencegah intrusi air laut ke darat.

Fungsi gambut sebagai pengatur hidrologi dapat terganggu apabila mengalami kondisi drainase yang berlebihan karena material ini memiliki sifat kering tak balik, porositas yang tinggi, dan daya hantar vertikal yang rendah. Gambut yang telah mengalami kekeringan sampai batas kering tak balik, akan memiliki bobot isi yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, strukturnya lepas-lepas seperti lembaran serasah, mudah terbakar, sulit menyerap air kembali, dan sulit ditanami kembali.

2. Sarana konservasi keanakeragaman hayati

Gambut hanya terdapat di sebagian kecil permukaan bumi. Lahan gambut di dunia diperkirakan seluas 400 juta ha atau hanya sekitar 2,5% daratan di permukaan bumi ini. Jumlahnya yang terbatas dan sifatnya yang unik menyebabkan gambut merupakan habitat unik bagi kehidupan beraneka macam flora dan fauna. Beberapa macam tumbuhan ternyata hanya dapat hidup dengan baik di lahan gambut, sehingga apabila lahan ini mengalami kerusakan, dunia akan kehilangan beraneka macam jenis flora karena tidak mampu tumbuh pada habitat lainnya. Di Sumatera, lebih dari 300 jenis tumbuhan dijumpai di hutan rawa gambut (Giesen W, 1991). Contoh tumbuhan spesifik lahan gambut yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah Jelutung (*Dyera costulata*), Ramin (*Gonystylus bancanus*), dan Meranti (*Shorea spp*), Kempas (*Kompassia malaccensis*), Punak (*Tetramerista glabra*), Perepat (*Combretocarpus royundatus*), Pulai rawa (*Alstonia pneumatophor*), Terentang (*Campospherma spp*), Bungur (*Lagestroemia spesiosa*), dan Nyatoh

(*Palaquium spp*) (Iwan Tricahyo W, Labueni Siboro, dan Suryadiputra, 2004). Sedangkan satwa langka pada habitat ini antara lain buaya sinyulong (*Tomistoma schlegelii*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), mentok rimba (*Cairina scutulata*), dan bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*) yang merupakan salah satu spesies burung air yang dilindungi, dan terdaftar dalam *Appendix I* CITES, serta masuk dalam kategori *Vulnerable* dalam *Red Databook* IUCN.

Keanekaragaman hayati yang hidup di habitat lahan gambut merupakan sumber plasma nutfah yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat varietas atau jenis flora dan fauna komersial sehingga diperoleh komoditas yang tahan penyakit, berproduksi tinggi, atau sifat-sifat menguntungkan lainnya.

3. Penjaga iklim global

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan berubahnya suhu dan distribusi curah hujan. Kontributor terbesar bagi terjadinya perubahan tersebut adalah gas-gas di atmosfer yang sering disebut Gas Rumah Kaca (GRK) seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan Nitrus oksida (N₂O) yang konsentrasinya terus mengalami peningkatan (Daniel Murdiyarso dan Suryadiputra, 2004). Gas-gas tersebut memiliki kemampuan menyerap radiasi gelombang panjang yang bersifat panas sehingga suhu bumi akan semakin panas jika jumlah gas-gas tersebut meningkat di atmosfer.

Meningkatnya suhu udara secara global akan merubah peta iklim dunia seperti perubahan distribusi curah hujan serta arah dan kecepatan angin. Kesemuanya itu akan berdampak langsung pada berbagai kehidupan di bumi seperti berkembangnya penyakit pada hewan, manusia maupun tanaman; perubahan produktivitas tanaman; kekeringan, banjir dan sebagainya.

Gambut memiliki kandungan unsur Carbon (C) yang sangat besar. Menurut perhitungan Matby dan Immirizi (1993) dalam Daniel Murdiyarso dan Suryadiputra (2004). Kandungan karbon yang terdapat dalam gambut

di dunia sebesar 329-525 Gt atau 35% dari total C dunia. Sedangkan gambut di Indonesia memiliki cadangan karbon sebesar 46 GT (catatan 1 GT sama dengan 10^9 ton) atau 8-14% dari karbon yang terdapat dalam gambut di dunia. Dengan demikian, gambut memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global. Apabila gambut tersebut terbakar atau mengalami kerusakan, materi ini akan mengeluarkan gas terutama CO₂, N₂O, dan CH₄ ke udara dan siap menjadi perubah iklim dunia. Jika hal ini terjadi, kita harus siap-siap menanggung dan merasakan dampaknya.

4. Sarana budidaya

Pemanfaatan lahan gambut sebagai sarana budidaya tanaman, peternakan, dan perikanan sudah sejak lama dikenal oleh petani. Di Indonesia, budidaya pertanian di lahan gambut secara tradisional sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu oleh Suku Dayak, Bugis, Banjar, dan Melayu dalam skala kecil. Mereka memilih lokasi dengan cara yang cermat, memilih komoditas yang telah teruji, dan dalam skala yang masih terdukung oleh alam.

Ketika kebutuhan komoditas pertanian makin besar karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penduduk, terjadi perluasan areal pertanian secara cepat. Sayangnya, perluasan areal ini sering kali kurang memperhatikan daya dukung dan sifat-sifat lahan gambut. Seiring dengan perencanaan yang kurang matang, terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, kurangnya implementasi kaidah-kaidah konservasi lahan, dan penggunaan teknologi yang cenderung kurang tepat. Akibatnya, terjadi kerusakan dimana-mana dan pengembangan pertanian acap mengalami kegagalan. Sebaliknya, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan teknologi yang tepat terbukti mampu menghasilkan produktivitas yang memadai dan menyejahterakan petani.

C. SEBARAN DAN ANCAMAN KERUSAKAN

Luas lahan gambut di dunia diperkirakan sekitar 400 juta ha. Indonesia merupakan negara keempat dengan lahan rawa gambut terluas di dunia (Euroconsult, 1984), yaitu sekitar 17,2 juta ha, setelah Kanada (170 juta ha), Uni Soviet (150 juta ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha). Namun, dari berbagai laporan (lihat Tabel 1), Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan kawasan gambut tropika terluas di dunia, yaitu antara 13,5-26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Jika luas gambut Indonesia 20 juta ha, maka sekitar 50% gambut tropika dunia yang luasnya sekitar 40 juta ha berada di Indonesia. Sebagai catatan, hingga kini data luas lahan gambut di Indonesia belum dibakukan, karena itu data luasan yang dapat digunakan masih dalam kisaran 13,5 – 26,5 juta ha.

Tabel 1. Perkiraan luas dan penyebaran lahan gambut di Indonesia menurut beberapa sumber

Penulis/Sumber	Penyebaran gambut (dalam juta hektar)				Total
	Sumatera	Kalimantan	Papua	Lainnya	
Driessen (1978)	9,7	6,3	0,1	-	16,1
Puslittanah (1981)	8,9	6,5	10,9	0,2	26,5
Euroconsult (1984)	6,84	4,93	5,46	-	17,2
Soekardi & Hidayat (1988)	4,5	9,3	4,6	<0,1	18,4
Deptrans (1988)	8,2	6,8	4,6	0,4	20,1
Subagyo <i>et al.</i> (1990)	6,4	5,4	3,1	-	14,9
Deptrans (1990)	6,9	6,4	4,2	0,3	17,8
Nugroho <i>et al.</i> (1992)	4,8	6,1	2,5	0,1	13,5*
Radjaguguk (1993)	8,25	6,79	4,62	0,4	20,1
Dwiyono& Racman (1996)	7,16	4,34	8,40	0,1	20,0

* Tidak termasuk gambut yang berasosiasi dengan lahan salin dan lahan lebak (2,46 juta hektar)

Luasnya lahan gambut dan fungsinya yang kompleks, menunjukkan betapa gambut memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tetapi kesadaran semacam ini ternyata belum dimiliki oleh semua pihak sehingga kerusakan gambut cenderung mengalami peningkatan. Disamping penebangan kayu beserta aktivitas ikutannya

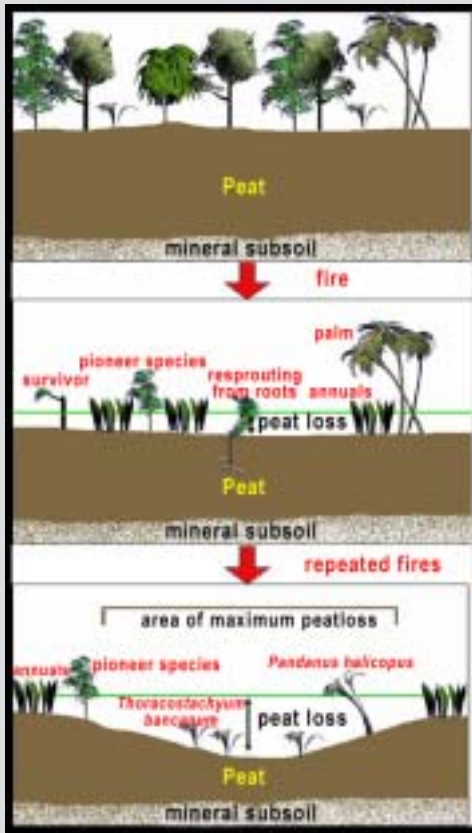
yang tidak terkendali, kegiatan pertanian dan perkebunan (termasuk hutan tanaman industri dan kelapa sawit) juga memberikan kontribusi bagi rusaknya ekosistem gambut. Dalam hal ini, reklamasi dengan sistem drainase berlebihan yang menyebabkan keringnya gambut, dan kegiatan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar, menjadi faktor penyebab kerusakan lahan gambut yang cukup signifikan. Pada tahun 1997/1998 tercatat sekitar 2.124.000 ha hutan gambut di Indonesia terbakar (Tacconi, 2003). Sejumlah wilayah lahan gambut bekas terbakar tersebut di musim hujan tergenangi air dan membentuk habitat danau-danau yang bersifat sementara (lihat Kotak 2). Sedangkan di musim kemarau, lahan ini berbentuk hamparan terbuka yang gersang dan kering sehingga sangat mudah terbakar kembali (Iwan Tricahyo Wibisono et al, 2004).

Kotak 2

Trend suksesi yang terjadi di lahan gambut setelah terbakar

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan tropis di Indonesia. Pada tahun 1997/98 tercatat sekitar 2,124,000 ha hutan rawa gambut di Indonesia terbakar (Tacconi, 2003). Bahkan banyak sekali dijumpai kasus terbakarnya kembali lokasi yang sama hingga beberapa kali (multiple fire). Sebagian besar kebakaran yang terjadi di hutan gambut tergolong berat mengingat karakteristik gambut itu sendiri yang tersusun dari serasah bahan organik yang sudah lapuk dengan vegetasi di atasnya sangat berpotensi sebagai bahan bakar. Timbunan bahan organik lapuk yang menyusun lapisan gambut menyebabkan terjadinya ground fire, yaitu kebakaran di bawah permukaan, sedangkan permukaan gambut yang rata memudahkan merembetnya api dari satu pohon ke pohon lain pada saat terjadinya kebakaran di atas permukaan. Akibatnya, di lahan gambut sering terjadi kebakaran secara serempak di bawah dan di atas permukaan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati menjadi lebih buruk. Setelah kebakaran, vegetasi di atas permukaan gambut menghilang dan lapisan tanah gambutnya berkurang dan membentuk cekungan sehingga pada musim hujan terjadi genangan air menyerupai danau. Genangan ini merupakan media dalam penyebaran benih-benih, namun hanya beberapa jenis tumbuhan tertentu yang mampu bertahan dengan kondisi genangan yang berat tersebut, misalnya Pandanus helicopus dan Thoracostachyum bancanum. Gambar di bawah ini memperlihatkan suatu hipotesa tentang suksesi yang akan terjadi di lahan gambut setelah mengalami kebakaran di TN Berbak Jambi (Giesen, 2003).

Kotak 2 (lanjutan)



Hutan rawa gambut yang belum terganggu dicirikan oleh adanya berbagai jenis pohon dan semak, namun herba terbatas.

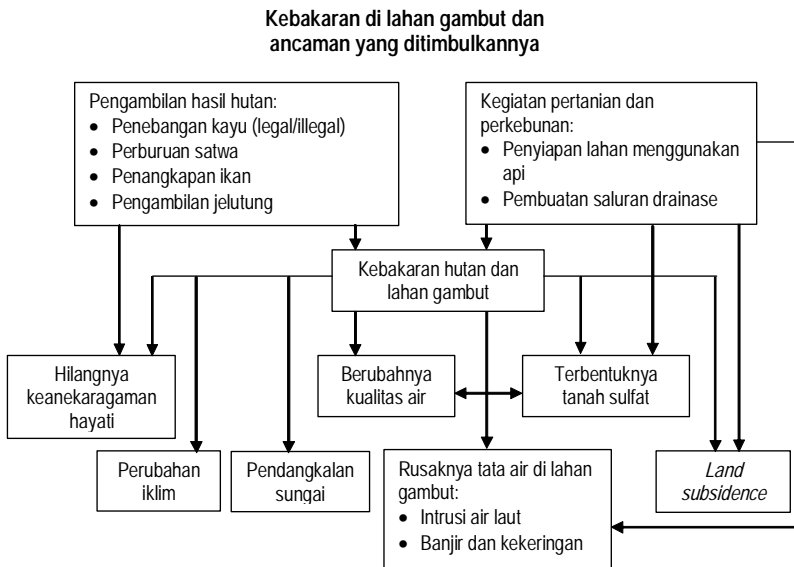
Kebakaran di hutan rawa gambut menyebabkan berkurangnya ketebalan gambut. Habitat semacam ini dirajai oleh tumbuhan yang mampu bertahan seperti *Combretocarpus rotundatus*, jenis-jenis palma, trubus dari akar yang masih hidup, tumbuhan herba atau perdu pionir dan tumbuhan tahunan lainnya.

Kebakaran berulang menyebabkan hilangnya jenis-jenis primer gambut dan meningkatkan jenis-jenis pionir dan sekunder. Jika kebakaran mengakibatkan hilangnya lapisan gambut dalam jumlah besar, maka akan terbentuk cekungan menyerupai danau yang bersifat sementara (berair hanya pada musim hujan) dan pada kondisi demikian hanya *Pandanus helicopus* dan *Thracostachyum bancanum* yang muncul.

Hipotesa Suksesi Lahan Gambut setelah terbakar.
(Ilustrasi: Wim Giesen, 2003)

Penelitian tentang penyebab kebakaran di lahan gambut dan dampak yang ditimbulkan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Diantaranya oleh CIFOR, ICRAF, Departemen Kehutanan, Wetlands International-Indonesia Programme, Perguruan Tinggi dsb. Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa kebakaran hutan di hutan gambut umumnya disebabkan oleh: (1) pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara pembakaran untuk perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar, (2) penyiapan lahan pertanian dengan cara bakar oleh petani (umumnya

peladang berpindah), (3) kecerobohan para penebang kayu secara liar di dalam hutan yang membuat api untuk memasak makanan dan minuman (4) penangkapan ikan di daerah *floodplain* (lebak-lebung) pada musim kemarau dimana rumput yang tumbuh di sekitar kolam dibakar terlebih dahulu agar ikan mudah di panen, dan (5) konflik lahan antara masyarakat dengan pihak pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri). Gambar 1 memperlihatkan suatu ilustrasi tentang penyebab kebakaran lahan gambut dan ancaman yang dapat ditimbulkan. Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa kebakaran lahan gambut menimbulkan akibat yang sangat luas, seperti terjadinya perubahan tata air (hidrologi) dan kualitas air, pendangkalan di sungai, terbentuknya tanah sulfat masam, ambelasnya gambut, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Selain itu, lahan gambut yang terbakar meninggalkan kondisi gersang dan menyisakan tumpukan-tumpukan kayu serta tonggak-tonggak pohon yang kering dan siap terbakar kembali pada musim kemarau berikutnya (Gambar 2).



Gambar 1. Faktor penyebab kebakaran lahan gambut dan ancaman yang dapat ditimbulkan



Gambar 2. Lahan gambut yang gersang akibat terbakar (Dokumentasi oleh: Ingrid Gevers, 2003)

Kebakaran lahan gambut jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan dengan kebakaran hutan biasa. **Pertama**, kebakaran di lahan gambut sangat sulit untuk dipadamkan, mengingat bara apinya dapat berada di bawah permukaan tanah (lihat Kotak 1). Bara ini selanjutnya menjalar kemana saja tanpa disadari dan sulit diprediksi. Oleh sebab itu, hanya hujan lebat yang bisa memadamkannya. **Kedua**, rehabilitasi hutan gambut bekas terbakar sulit dilakukan. Biayanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan hutan biasa, karena banyaknya hambatan, seperti adanya genangan, sulitnya aksesibilitas, rawan terbakar, dan membutuhkan jenis tanaman spesifik yang tahan genangan dan tanah asam (Iwan Tricahyo Wibisono *et al*, 2004)

Ketiga, jika materi gambut habis dan dibawahnya terdapat lapisan pasir, maka akan terbentuk kawasan padang pasir baru yang gersang dan sulit untuk dipulihkan kembali. Jika di bawah gambut terdapat tanah mineral yang mengandung pirit, maka tersingkapnya tanah mineral berpirit ini akan mengakibatkan pirit teroksidasi menjadi suatu senyawa yang sangat asam sehingga keasaman tanah meningkat. **Keempat**, meskipun secara alami areal gambut bekas kebakaran ringan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri secara alami, beberapa riset membuktikan bahwa habitat


asli sulit untuk timbul kembali. **Kelima**, kandungan karbon pada lahan gambut yang terbakar dapat memberi kontribusi besar bagi menurunnya kualitas atmosfer bumi.

Disamping berpengaruh buruk terhadap iklim global, kerusakan lahan gambut berpengaruh terhadap lingkungan setempat. Terganggunya kesehatan masyarakat, munculnya senyawa-senyawa kimia berbahaya, dan terganggunya jadwal penerbangan; merupakan akibat kebakaran gambut yang dapat langsung dirasakan. Hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati, berubahnya kualitas air, terbentuknya tanah sulfat masam, pendangkalan sungai, intrusi air laut, penurunan permukaan tanah, banjir di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau; merupakan contoh nyata kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan lahan gambut.


Fenomena kerusakan lahan gambut yang terus meningkat menarik keprihatian dunia, terutama setelah disadari bahwa gambut memiliki fungsi penting dalam pengaturan iklim secara global yang dampaknya sangat luas terhadap berbagai bentuk kehidupan di bumi. Gambut dinilai sebagai habitat lahan basah yang mampu menyerap (*sequester*) dan menyimpan (*sink*) karbon dalam jumlah besar, sehingga dapat mencegah larinya gas rumah kaca (terutama CO₂) ke atmosfer bumi. Apabila gas rumah kaca masuk ke atmosfer bumi, maka dampak yang terlihat adalah perubahan iklim. Perhatian dunia yang semakin besar ditunjukkan dengan diratifikasinya Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bab 2

Mengenal Budaya Masyarakat di Lahan Gambut



Bab ini memuat deskripsi singkat tentang budaya beberapa suku atau etnis yang banyak menempati lahan gambut. Materi ini disajikan agar gambaran mengenai budaya lokal secara umum dapat dijadikan bekal/acuan dalam pelaksana pemberdayaan masyarakat di lahan gambut.



Kawasan lahan gambut dihuni oleh banyak etnis dengan beragam budaya. Mengenal dan memahami budaya masing-masing komunitas merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk kesuksesan program pemberdayaan masyarakat.

A. SUKU DAYAK DAN BANJAR DI KALIMANTAN

Suku Dayak dan Banjar merupakan etnis asli yang jumlahnya cukup dominan di Pulau Kalimantan. Mereka tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

1. Suku Dayak

Suku Dayak terbagi atas beberapa subsuku yang tersebar dan mendiami sepanjang bagian hulu sungai besar dan kecil di Kalimantan, seperti Sungai Barito (Kalimantan Selatan), Kapuas dan Kahayan (Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah), serta Mahakam (Kalimantan Timur). Suku Dayak yang banyak mendiami kawasan lahan gambut terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan asal-usul dan kedatangannya di Kalimantan, suku Dayak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar dan 2 kelompok kecil (Maunati, 2004). Kelompok besar pertama adalah suku Punan yang merupakan suku tertua di Kalimantan. Orang Punan yang masih di pedalaman (pemerintah menyebutnya “Komunitas Adat Terpencil”) hidup berpindah, sebagai peramu dan tidak mengenal budidaya pertanian.

Kelompok kedua adalah Suku Murut yang berasal dari Filipina. Mereka berkulit kuning, mata sipit, rambut hitam, dan ciri-ciri mongoloid lain yang cukup nyata. Umumnya, mereka tinggal di perbukitan.

Kelompok ketiga adalah Suku Iban. Mereka diduga berasal dari Sumatera karena bahasanya mirip dengan Bahasa Melayu Tua. Suku ini banyak mendiami Kalimantan Barat dan telah mengenal tradisi bercocok tanam secara sederhana.

Kelompok keempat adalah Suku Kahayan. Suku ini berasal dari daratan Irawadi di Burma. Ciri-ciri spesifiknya adalah budaya rumah panjang atau lamin. Orang Kahayan adalah peladang dan tinggal di tepi-tepi sungai. Mereka tersebar luas di Kalimantan dan mengalami diferensiasi etnis.

Suku Dayak Ngaju dan Ot Danum di Kalimantan Tengah merupakan salah satu keturunan Suku Kahayan. Suku Dayak Ngaju tinggal di sekitar hilir Sungai Kahayan, sedangkan Suku Dayak Ot-Danum tinggal di daerah hulu. Semakin ke hilir tempat tinggalnya, semakin bercampur pula mereka dengan suku-suku lain seperti Banjar dan Bugis.

Meskipun terdiri atas sub-subsuku yang bervariasi, secara umum Suku Dayak, khususnya yang tinggal di pedalaman, memiliki beberapa unsur budaya yang hampir sama. Homogenitas kultural tampak dalam hal mata pencaharian dengan sistem perladangan, prinsip keturunan, upacara kematian, dan agama asli berupa pemujaan kepada roh leluhur yang kemudian dikenal dengan nama “Agama Kaharingan”.

Dalam masyarakat Dayak, berkembang norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan menjadi pengendali sosial bagi segala tindakan dan perilaku masyarakat sehingga tidak saling merugikan. Meskipun kemudian mereka memeluk agama monoteis (Islam atau Kristen), upacara adat, kepercayaan pada leluhur, dan norma-norma sosial masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Umumnya orang Dayak bermata pencaharian sebagai peladang, berburu, mencari ikan, kayu, rotan, dan damar di hutan. Pekerjaan berladang dilakukan secara berpindah dan berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 12-20 orang yang secara bergiliran membuka hutan dan menebas ladang masing-masing anggota. Rumah tangga yang telah menerima bantuan tenaga harus membayar kembali dengan tenaga. Jika 1 rumah tangga kekurangan tenaga laki-laki, tenaga wanita menggantikannya untuk bekerja gotong royong yang biasa disebut sebagai adat *Senguyun* (Eghenter dan Sellato, 1992).

Karakteristik budaya masyarakat Dayak, terutama yang berada di pedalaman, ditandai oleh ikatan komunal yang cukup kuat. Ikatan tersebut didasarkan pada keluarga dan keterikatan pada tanah leluhur. Bagi masyarakat Dayak, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai kawasan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Jenazah nenek moyang dikuburkan di tanah komunal dengan serangkaian upacara tertentu. Roh-roh keluarga yang telah meninggal dipercayai sebagai pelindung yang dapat memberikan pengaruh pada kemakmuran dan ketenteraman.

2. Suku Banjar

Suku Banjar pada awalnya merupakan percampuran antara suku Melayu, suku Maayan, suku Lawangan, dan suku Bukit di Sungai Tabaling Kalimantan Selatan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, 1996). Orang Banjar memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Mereka tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan bahkan banyak yang bermigrasi ke luar Kalimantan. Wilayah Kalimantan yang dihuni oleh orang Banjar biasanya merupakan dataran rendah, daerah rawa atau daerah yang dilalui oleh sungai. Mereka tidak suka hidup di pedalaman, tapi lebih suka hidup di pinggir sungai. Di Kalimantan Tengah, orang Banjar umumnya mendiami bagian hilir Sungai Kapuas, Barito, Kahayan, dan Sungai Murung.

Orang Banjar umumnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan sebagai petani. Sebagai petani, orang banjar dapat dikatakan sebagai perintis budi daya di lahan rawa, dengan membuat saluran-saluran (sebagai sarana irigasi dan akses menuju lahan pertanian) yang sering disebut *handil* atau *handel*.

Pola perkampungan orang Banjar membentuk kelompok yang berderet menghadap ke sungai. Rumah berbentuk panggung dan sebagian berada di atas sungai yang juga merupakan media transportasi utama. Itulah sebab orang Banjar lebih banyak memilih sungai sebagai lokasi transaksi jual-beli atau pasar. Di beberapa tempat, rumah terapung juga digunakan untuk memelihara itik.

Dalam bertani, hingga saat ini sebagian besar orang Banjar masih menyelenggarakan upacara-upacara tradisional seperti bubungan tahun dan sesajian sebagai bentuk ungkapan syukur, meskipun telah memeluk agama Islam.

B. SUKU MELAYU DAN KUBU DI JAMBI

Sejak ratusan tahun yang lalu, daerah Jambi telah dihuni oleh Suku Kerinci, Suku Melayu, dan suku Kubu (sering disebut sebagai suku Anak Dalam). Suku Kerinci diperkirakan telah mendiami Jambi sejak 10.000-2.000 SM. Suku Melayu yang berasal dari ras Mongoloid, diperkirakan masuk wilayah pantai dan pedalaman Jambi sejak 2000–500 SM. Mereka mendiami dataran rendah sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari bagian hilir. Suku Kubu yang juga berasal dari ras Mongoloid mendiami sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari mulai dari pedalaman Jambi. Mereka memiliki sistem nilai budaya yang khas dan berbeda dengan suku lain.

1. Suku Melayu Jambi

Suku Melayu Jambi umumnya tinggal di dataran rendah sepanjang Sungai Batanghari yang terbentang dari Kabupaten Tanjung Jabung, Batanghari, hingga Bungo Tebo. Mereka membentuk dusun-dusun yang letaknya agak berjauhan, dengan rumah-rumah yang dibangun di pinggir sungai besar atau kecil.

Sungai merupakan sumberdaya yang sangat vital bagi orang Melayu Jambi. Transportasi utama orang Melayu pedesaan adalah melalui sungai, meskipun sekarang sebagian sudah menggunakan jalan darat. Sungai juga merupakan sumber air, tempat untuk mandi, cuci, dan membuang kotoran.

Orang Melayu Jambi umumnya beragama Islam dengan memegang prinsip “*adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*”. Artinya, segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang dan bersumber dari ajaran-ajaran agama yaitu *Alquran* dan *Hadits* (Sitanggang *et al*, 1983).

Prinsip keturunan yang digunakan oleh orang Melayu Jambi adalah prinsip bilateral dengan menempatkan faktor keluarga *batih* sebagai dasar perhitungan hubungan kekeluargaan. Karena itu, seorang individu selalu memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu maupun bapak. Mereka mengenal sistem kekerabatan tersebut dengan istilah “*sanak*”, yaitu keturunan hingga generasi ketiga. Kelompok inilah yang biasanya saling

membantu kalau ada hal-hal penting dalam keluarga seperti perkawinan, kematian, dan lain-lain.

Stratifikasi sosial didasarkan pada prinsip perbedaan usia. Perbedaan umur membawa perbedaan hak dan kewajiban, terutama dalam rangkaian upacara adat. Stratifikasi sosial dapat dikatakan tidak konkret, meskipun kadang-kadang segolongan orang-orang tertentu dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Yang biasanya menjadi dasar ukuran adalah pendidikan, harta, dan jabatan. Seorang kepala desa di kalangan orang Melayu disebut sebagai “*datuk*”. Ia relatif dijadikan panutan oleh masyarakat.

Mata pencaharian utama orang Melayu Jambi adalah menangkap ikan, bertani, dan mencari hasil hutan. Musim baik untuk menangkap ikan adalah musim kemarau. Dalam waktu yang bersamaan, mereka harus menanam padi. Guna mempercepat proses penanaman padi, mereka membentuk sistem gotong royong yang disebut “*pelarian*”. Istilah tersebut berasal dari kata “*ari*” atau “*hari*”. Artinya, setiap anggota kelompok kerja akan memperoleh bantuan tenaga kerja dalam waktu 1 hari dari anggota lainnya secara bergiliran. Pekerjaan-pekerjaan yang digotongroyongkan antara lain membabat dan membersihkan semak, mengolah tanah, dan panen. Banyaknya anggota dalam kelompok berkisar antara 5-15 orang. Makanan untuk orang yang bekerja disediakan oleh petani tuan rumah.

Selain gotong royong dalam bertani, mereka juga mengenal sistem gotong royong dalam membuat rumah yang disebut “*tegak rumah*”. Kegiatannya antara lain menggali lubang untuk menanam tiang dan menegakkan tiang. Sedangkan pekerjaan lanjutannya dilakukan sendiri oleh pemilik rumah dengan dibantu oleh kerabat dekat atau diupahkan pada pekerja (tukang atau buruh bangunan).

2. Suku Kubu

Suku Anak Dalam atau sering disebut Suku Kubu dipandang oleh pemerintah sebagai “Komunitas Adat Terpencil” (KAT). Dalam kesehariannya, mereka sering disebut sebagai “Orang Rimbo”. Pemerintah mendefinisikan KAT sebagai komunitas masyarakat yang hidupnya

secara berkelompok dalam kesatuan-kesatuan (unit) sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar di dalam hutan dan pinggiran sungai, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan sosial, ekonomi, dan politik dari pemerintah (SK Mensos RI No. 60/HUK/1988). Saat ini suku Anak Dalam yang belum dimukimkan oleh pemerintah diperkirakan sebanyak 2.120 keluarga tersebar di 5 kabupaten, 13 kecamatan, dan 49 lokasi. Di Kabupaten Batanghari terdapat sekitar 780 keluarga yang tersebar di 21 lokasi, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 678 keluarga tersebar di 13 lokasi, Kabupaten Tebo sebanyak 175 keluarga tersebar di 3 lokasi, Kabupaten Sorolangun sebanyak 387 keluarga tersebar di 9 lokasi, dan Kabupaten Merangin sebanyak 100 keluarga yang tersebar di 3 lokasi (Dinas Sosial Jambi, 2004).

Sistem sosial masyarakat Suku Anak Dalam dipimpin oleh kepala dusun yang sekaligus berperan sebagai kepala adat dan dukun. Mereka menggunakan Bahasa Melayu dalam berkomunikasi sehari-hari. Hidupnya semula “*melangun*” (berpindah-pindah) dan sepenuhnya menggantungkan hidup pada kekayaan hutan dan sungai. Sebagian dari mereka, sekarang sudah hidup menetap dalam lokasi yang dibangun oleh Dinas Sosial.

Rumah sebagai tempat tinggal Suku Anak Dalam dibangun seadanya dari bahan yang diperoleh di hutan. Ukurannya sangat bervariasi, tergantung dari banyaknya anggota keluarga yang akan tinggal. Semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula rumah yang mereka bangun dan begitu pula sebaliknya. Rumah yang dibangun tidak menjadi tempat tinggal untuk selamanya, tergantung pada alam dan iklim yang dapat menopang kehidupan mereka. Mereka akan pindah apabila terjadi musibah seperti anggota keluarga yang meninggal dunia, sakit, atau sejenisnya, yang membawa ketidakbahagiaan di lokasi yang mereka tempati itu. Mereka akan pergi *melangun* atau berpindah ke lokasi lain di sekitar kawasan hutan dengan harapan akan membawa kebahagiaan.

Di daerah aslinya, Suku Anak Dalam masih berjalan kaki untuk menuju suatu lokasi atau berpindah ke lokasi lain. Bahkan untuk berkunjung ke tempat keluarga di luar pemukiman, mereka juga berjalan kaki, meskipun jaraknya jauh (antara 3 hari sampai 1 minggu perjalanan). Namun pola kehidupan tersebut tidak dipandang sebagai suatu hal yang mengurangi

kebahagiaan dan keakraban mereka. Perjalanan tersebut justru berpotensi menambah wawasan mereka dalam mencari lahan apabila suatu saat harus berpindah meninggalkan lahan yang ditempati saat ini.

Kelembagaan sosial Suku Anak Dalam umumnya diatur oleh hukum-hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka dan dipatuhi dengan baik. Mereka hidup berkelompok dan dipimpin oleh seorang “*tumenggung*”. Mereka bebas untuk tinggal bersama dengan kelompok lain, namun harus mempunyai keyakinan siapa *tumenggungnya*. Berganti-ganti kelompok tidaklah mudah, karena terdapat hukum yang mengaturnya. Pemilihan pemimpin didasarkan atas pengajuan anggota masyarakat.

Mata pencaharian Suku Anak Dalam umumnya bersifat tradisional. Mereka hidup secara berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian besar waktunya dihabiskan di hutan untuk berburu, mencari madu, atau rotan. Sebagian lagi mencari ikan di sungai atau menyadap getah di kebun karet. Pekerjaan menebas semak untuk membuka lahan dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan membersihkan dan membakar hasil tebasan. Di daerah asalnya, Suku Anak Dalam belum mengenal mata uang. Mereka menggunakan sistem barter untuk keperluan hidupnya. Dan karena minimnya pengetahuan, ada kalanya nilai yang mereka terima jauh lebih kecil daripada yang mereka tukarkan.

Kepemilikan lahan di kalangan Suku Anak Dalam merupakan warisan dari tanah *ulayat* yang telah turun-temurun mereka garap. Pengalihan lahan kepada orang lain harus memperoleh persetujuan ketua adat.

Pada dasarnya mereka juga sudah melakukan kerja sama yang baik antara yang satu dengan lainnya. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam membuka lahan pertanian atau *merawas* dengan melibatkan orang-orang tertentu yang mengetahui tanda-tanda alam. Bentuk gotong royong dan solidaritas dilaksanakan bilamana ada 1 keluarga tertimpa musibah atau mengadakan acara selamatan, atau sejenisnya. Mereka bekerja bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena musibah atau yang mengadakan selamatan dengan cara mengumpulkan barang-barang yang ada pada mereka untuk dijual atau ditukar dengan barang lain sesuai dengan kebutuhan.

Suku Anak Dalam di daerah asalnya belum mengenal pendidikan formal. Pendidikan non formal dapat dilihat dari peran orang tua dalam mengasuh anaknya. Biasanya anak laki-laki selalu ikut orang tua laki-laki kemanapun pergi kecuali ke tempat yang jauh, sedangkan anak perempuan mengikuti ibunya kemanapun pergi. Tujuannya agar anak dapat melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kepercayaan mereka terhadap alam gaib yang disebut “*Dewo-dewo*” masih sangat kuat. Dalam kepercayaan ini, setiap pekerjaan harus dikaitkan dengan kondisi alam dan iklim. Misalnya, untuk membuka lahan pertanian yang pertama sekali dilakukan adalah menanyakan kepada paranormal (dukun), apakah lahan yang akan digarap dapat dijadikan lahan pertanian atau tidak. Bila paranormal mengatakan tidak bisa, maka kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Menurut mereka, lahan yang ada penghuninya (*ghaib*) tidak boleh diganggu atau dibuka. Bila ketentuan ini dilanggar, akan timbul malapetaka dalam kehidupannya sampai kepada anak-buyutnya.

Pengetahuan tentang kesehatan Suku Anak Dalam di pemukiman lama masih sangat minim. Mereka masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mengobati segala jenis penyakit. Pengobatan tradisional merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dengan perantaraan dukun. Pengobatan beberapa jenis penyakit, seperti demam, hanya dilakukan dengan menggunakan ramuan-ramuan yang terbuat dari akar, batang, kulit batang, daun, bunga, dan buah tertentu yang banyak terdapat di sekitar permukiman. Untuk beberapa penyakit parah, mereka mengadakan upacara tradisional “*besale*” dengan bantuan paranormal.

Sebagian dari Suku Anak Dalam sudah dimukimkan oleh pemerintah melalui program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atau Dinas Transmigrasi. Di tempatnya yang baru, mereka memperoleh lahan, rumah, serta 1 unit fasilitas MCK untuk 5 keluarga. Selain itu, mereka juga memperoleh bahan makanan berupa beras, minyak tanah, minyak goreng, ikan asin, pakaian, obat-obatan, bibit pertanian, ternak, alat-alat pertanian, dan alat-alat rumah tangga selama masih dalam pembinaan. Mereka juga memperoleh bimbingan berupa penyuluhan sosial, budaya, maupun dalam hal pengembangan usaha dan bercocok tanam. Sarana pendidikan umumnya juga dibangun di pemukiman baru.

Mata pencaharian Suku Anak Dalam di pemukiman baru umumnya mengalami perubahan. Beberapa pola tradisional yang selama ini mereka anut sudah mulai ditinggalkan. Mereka tidak lagi sepenuhnya mencari nafkah di dalam hutan, melainkan telah mengenal teknologi budidaya dengan mengelola lahan perkebunan dan lahan usaha pertanian. Mereka sudah mengelola kebun karet sendiri dan menjadi buruh di kebun karet orang lain. Beternak ayam, itik, kambing, dan bercocok tanam (palawija, buah-buahan, ubi-ubian), dan *bebalok* (mencari kayu) juga mereka lakukan. Mereka sudah menjalani kehidupan seperti masyarakat yang sudah maju di sekitar permukiman baru. Namun, aktivitas memancing dan berburu masih dilakukan.

Perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi di pemukiman baru suku Anak Dalam telah menunjukkan kemajuan berarti. Mereka sudah mulai terlibat dalam hubungan sosial di luar komunitasnya dan mulai mengenal sistem perniagaan (pasar), nilai mata uang, serta politik. Pendidikan formal juga telah dikenal, sehingga sebagian sudah bisa membaca. Namun, sarana MCK (mandi-cuci-kakus) yang sehat belum dimanfaatkan dengan baik. Mereka masih memanfaatkan air sungai untuk berbagai aktivitas MCK. Air bersih biasanya diambil dari sumur atau mata air. Dalam proses kelahiran, orang Anak Dalam sudah mau datang ke bidan terdekat di sekitar lokasi (Danarti dkk, 2004).

C. KOMUNITAS PLURAL DI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pemukiman transmigrasi di lahan gambut banyak terdapat di Sumatera Selatan (contoh di: Delta Upang, Karang Agung Tengah, Karang Agung Ulu), Riau (Pulau Burung), Sumatera Barat (Silaut), Jambi (Tanjung Jabung, Kuala Tungkal, Rantau Rasau, Sungai Gelam, Mendahara Hulu), Kalimantan Barat (Rasau Jaya, Jangkang, Olak-olak Kubu), Kalimantan Tengah (Tumbang Tahe, Pulang Pisau, kawasan eks Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar PLG), dan Kalimantan Selatan (Barambai, Kalampangan dan Basarang)

Komunitas yang menghuni pemukiman transmigrasi berasal dari beragam etnis seperti etnis Jawa dan Bali, bercampur dengan penduduk setempat. Mereka berkembang secara terintegrasi dengan etnis lain dalam komunitas yang sama. Secara kultural, umumnya mereka masih membawa tradisi daerah asalnya. Sedangkan secara sosial, mereka membaaur dan membentuk norma-norma baru yang disepakati bersama.

Norma-norma baru di pemukiman transmigrasi umumnya tidak membedakan etnis dan daerah asal. Mereka membentuk kelompok tani, Rukun Tetangga (RT), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Unit Desa (KUD), organisasi keagamaan, dan organisasi sosial lainnya. Meskipun demikian, hanya kelompok tani, RT, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial yang umumnya berjalan sebagaimana diharapkan. Sedangkan KUB dan KUD umumnya tidak berfungsi, kecuali pada pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Di setiap desa transmigrasi, dibangun Sekolah Dasar (SD) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai bagian dari layanan pemerintah kepada masyarakat. Sarana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi transmigran, melainkan dimaksudkan pula sebagai sarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya.

Transmigran umumnya bekerja sebagai petani dengan memperoleh lahan dengan luasan tertentu dari pemerintah. Transmigrasi di lahan gambut umumnya menggunakan pola tanaman pangan atau PIR. Pada pola tanaman pangan, transmigran biasanya hanya menanam tanaman pangan pada periode awal penempatan. Sesudah beberapa tahun, mereka mengusahakan tanaman tahunan sebagai komoditas utama yang ditumpangsarikan dengan tanaman semusim, kecuali bila tata airnya cukup baik untuk terus mengusahakan tanaman semusim sebagai komoditas utama. Biasanya tanaman sayuran hanya diusahakan dalam skala terbatas, kecuali beberapa orang yang sengaja menekuni jenis tanaman ini secara intensif. Budidaya sayuran secara intensif biasanya hanya dilakukan pada lokasi-lokasi yang strategis sehingga pemasaran tidak mengalami kendala.



Gambar 3. *Berbagai sayuran (caisin, bawang dan seledri) tumbuh subur di lahan gambut-dalam Desa Kalamangan, Kalimantan Tengah. (Dokumentasi oleh: Yus Rusila Noor, 2004)*


Tanaman tahunan ditanam di pekarangan dan lahan usaha. Tanaman di pekarangan biasanya untuk konsumsi sendiri atau dipasarkan secara terbatas. Sedangkan tanaman di lahan usaha yang menjadi komoditas utama, antara lain tanaman perkebunan (kelapa, kelapa sawit, coklat, salak, kopi) dan tanaman kehutanan (sungkai, jelutung dsb.).

Pada awalnya, setiap transmigran memiliki lahan dengan luas yang sama. Sesudah pemukiman tidak dibina melalui program transmigrasi, luas lahan masing-masing keluarga mengalami degradasi. Sebagian transmigran menjual sebagian atau seluruh lahannya kepada transmigran lain atau kepada pendatang baru. Proses itu berlanjut hingga kepemilikan lahan pada pemukiman yang sudah lama berkembang, memiliki luas lahan yang tidak sama.


Selain sebagai petani, banyak di antara transmigran yang berprofesi sebagai pedagang, buruh tani, dan buruh bangunan. Sebagian lagi menjadi pencari kayu di hutan. Menjadi buruh dan mencari kayu biasanya dilakukan di luar musim tanam dan musim panen. Pada masa-masa itu, transmigran tidak memiliki penghasilan sehingga harus mencari penghasilan di luar usaha taninya.

Bab 3

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut



Bab ini memuat uraian mengapa masyarakat di lahan gambut perlu diberdayakan dengan mengangkat bahasan mengenai: tanggung jawab masyarakat dunia, faktor kemiskinan dan keberdayaan serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.



Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut sangat penting artinya dalam menunjang keberhasilan konservasi lahan gambut. Sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang dapat dikemukakan. **Pertama**, pemberdayaan masyarakat gambut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan kontribusi masyarakat dunia terhadap pelestarian ekosistem gambut. **Kedua**, karena kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di lahan gambut, seringkali menjadi penyebab ketidakpedulian mereka terhadap kualitas lingkungan. **Ketiga**, upaya penyadaran dan penumbuhan motivasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian lahan terbukti sulit dilakukan apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

A. TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DUNIA

Lahan gambut memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang tidak mungkin dapat dielakkan. Di dalam kawasan lahan ini, terdapat masyarakat yang harus meneruskan hidup dan mencari penghidupan yang layak dengan segala macam norma yang telah mereka lakukan. Dengan sifatnya yang marjinal dan teknik pengelolaan yang dikembangkan oleh masyarakat, gambut acap kali kurang mampu memberikan daya dukung ekonomi secara layak. Dalam situasi demikian, ancaman kerusakan lingkungan sering terabaikan. Akibatnya, sebagian masyarakat dengan sadar atau terpaksa harus melakukan eksploitasi lahan yang lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dapat dengan mudah mengikuti arus untuk merambah hutan, menebang kayu, dan kegiatan-kegiatan lain yang secara cepat mendatangkan penghasilan namun berpotensi merusak ekosistem gambut.

Melarang masyarakat untuk menebang kayu di hutan atau anjuran melakukan budidaya yang ramah lingkungan, tidak akan efektif selagi mereka masih beranggapan itulah satu-satunya jalan agar tetap hidup. Upaya konservasi lahan gambut sering dihadapkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang tidak berdaya, yang terpaksa, atau justru sadar atas kontribusinya bagi kerusakan lahan gambut. Padahal, sebenarnya masyarakat memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penjaga kelestarian lingkungan. Bagaimanapun juga, merekalah yang pertama akan menuai dampak apabila lahan gambut tempatnya menggantungkan kehidupan mengalami kerusakan. Kuncinya, mereka harus berdaya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mandiri terhadap pengaruh pihak-pihak eksternal yang memiliki peran potensial dalam kerusakan lingkungan.

Gambut - sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I - memiliki peran penting sebagai penjaga iklim dunia, sehingga kelestarian lahan gambut perlu dijaga. Yang paling mudah dilakukan untuk menjaga kelestarian gambut adalah upaya penyadaran di kalangan masyarakat. Namun, kerapuhan dan marjinalitas lahan gambut justru menyebabkan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup di lahan gambut dan menjaganya mengalami kemiskinan. Mengapa petani lahan gambut

miskin, mengapa lahan gambut cenderung mengalami kerusakan secara progresif? Jawaban klasik yang biasanya muncul adalah teknologi yang kurang memadai rendahnya pendidikan petani, dan beberapa alasan lainnya. Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati, yaitu: Ternyata dunia belum banyak memberikan perhatian terhadap keberdayaan masyarakat di lahan gambut.

Jika iklim global menjadi terjaga oleh lahan gambut yang lestari, kenikmatannya akan dirasakan oleh manusia di seluruh dunia. Tetapi, tanpa disadari, pelestarian lahan gambut, dibiayai oleh kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di lahan gambut. Perjuangan petani lahan gambut untuk menjaga lahan gambut memiliki kontribusi yang luar biasa bagi kemaslahatan dunia dan kelangsungan hidup penghuninya. Oleh sebab itu, kita semua, masyarakat dunia, berkepentingan dan bergantung dalam bentuk yang berbeda terhadap kelestarian lahan gambut. Jika masyarakat luas dapat menikmati hidup karena ekosistem lahan gambut terjaga oleh petani yang miskin, berapakah yang sudah mereka kembalikan atau bayar dan insentif apa yang diterima oleh masyarakat jika mereka dapat menjaga lahan gambut.

Oleh sebab itu, dunia harus memberikan imbalan (*reward*) kepada masyarakat yang telah menjaga ekosistem lahan gambut melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan petani di lahan gambut harus dibiayai oleh setiap orang yang menikmati perkembangan secara optimal karena ketidakrusakan lahan itu. Pemberdayaan petani lahan gambut perlu dimulai oleh sebuah pemahaman bersama bahwa kemakmuran petani lahan gambut adalah demi kelangsungan hidup dan kemakmuran seluruh isi bumi. Kerja besar tersebut juga harus dibangun dalam sudut pandang yang lebih besar, yaitu menyadarkan masyarakat luas dan dunia agar peduli terhadap kelangsungan ekosistem lahan gambut, sama persis seperti tanggung jawab yang diberikan kepada petani lahan gambut itu sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di lahan gambut merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat dunia terhadap kelestarian ekosistem lahan gambut.

B. KEMISKINAN DAN KETIDAKBERDAYAAN

Kemiskinan (*poverty*) dan ketidakberdayaan (*powerless*) merupakan 2 kondisi yang keterkaitannya sangat erat dan saling mempengaruhi. Ibarat ayam dan telur, mana yang lebih dulu muncul, sulit untuk dijawab, karena keduanya bisa betul. Yang pasti, kemiskinan dapat menyebabkan ketidakberdayaan, dan ketidakberdayaan dapat menyebabkan kemiskinan.

Ketidakberdayaan seseorang atau masyarakat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengelola perasaan, pengetahuan, dan potensi sumber daya material yang ada karena faktor-faktor dalam diri sendiri atau faktor dari luar (Solomon, 1979, dalam Wahyudinata, 2001). Ini berarti, sebenarnya masyarakat memiliki potensi atau sumber daya, tapi mereka tidak mampu mengelolanya.

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya, antara lain ketidakmampuan secara ekonomi (kemiskinan), perasaan rendah diri dan tidak berdaya, tidak menyadari bahwa dirinya miskin, kebiasaan bergantung, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain terbatasnya informasi, akses terhadap sumber daya, ketidakadilan, dan adanya kekuasaan yang tidak berpihak pada orang miskin. Semua itu membuat mereka tidak memiliki posisi tawar (Migly, 1986).

Sekalipun upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan, kualitas hidup orang miskin masih rendah. Mereka masih terbalut oleh berbagai kondisi yang satu sama lain saling berkaitan, seperti lemahnya hasil tukar produksi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses terhadap hasil-hasil pembangunan, minimnya modal, lemahnya posisi tawar, dan lemahnya organisasi.

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat (Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2004). Hak-hak dasar itu antara lain pekerjaan yang layak, pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik. Namun dalam hal ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada persoalan-persoalan ekonomi.

Patut dipahami bahwa kemiskinan tidak dapat hanya dipahami dari dimensi ekonomi semata, karena dalam kenyataannya, kemiskinan banyak disebabkan oleh dimensi-dimensi non-ekonomi seperti sosial, budaya, dan politik. Faktor-faktor tersebut secara bersinergis memunculkan serangkaian masalah yang menimbulkan kemiskinan masyarakat di bidang ekonomi.

Sekalipun upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dan berhasil mengurangi angka kemiskinan, kualitas hidup orang miskin di sebagian besar lahan gambut masih rendah. Mereka masih terbalut oleh berbagai kondisi yang satu sama lain saling berkaitan, seperti lemahnya hasil tukar produksi, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses terhadap hasil-hasil pembangunan, minimnya modal, lemahnya posisi tawar, dan lemahnya organisasi yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Secara lebih nyata, beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di lahan gambut mengalami kemiskinan secara ekonomi antara lain lahan yang tidak subur (marjinal) dan rentan (fragil), keterisolasian, rendahnya modal sosial, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan kerentanan.

1. Lahan yang marjinal dan fragil

Sebagian besar masyarakat yang hidup di kawasan (pedesaan) lahan gambut bermata pencaharian sebagai petani dengan mengusahakan budi daya tanaman, memelihara ternak, dan membudidayakan atau mencari ikan. Budidaya pertanian di lahan gambut ternyata kurang memberikan keuntungan yang memadai dibanding dengan budidaya pertanian pada lahan mineral. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pertanian di lahan gambut meliputi:

- a. Kesuburan yang relatif rendah.
- b. Kondisi air yang sulit dikendalikan.
- c. Kematangan dan ketebalan gambut yang bervariasi.
- d. Penurunan permukaan gambut.
- e. Rendahnya daya tumpu.
- f. Adanya lapisan pirit dan pasir

- g. Tanah dan air yang sangat masam dan mengandung asam-asam organik yang tinggi.
- h. Kondisi gambut yang jenuh air (tergenang/banjir) pada musim hujan dan kekeringan (mudah terbakar) saat kemarau.

Kendala-kendala di atas pada akhirnya mengakibatkan ongkos budidaya pertanian di lahan gambut relatif lebih mahal dan produksinya relatif rendah.

Persoalan lain yang dihadapi adalah risiko kegagalan. Gambut yang fragil menyebabkan bertani di lahan gambut menghadapi risiko kegagalan lebih besar daripada lahan lain. Kebakaran lahan, banjir, dan kekeringan seolah menjadi persoalan silih-berganti yang menjadi momok bagi petani di lahan gambut.

2. Keterisolasian

Masyarakat di lahan gambut umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat perekonomian. Untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut, diperlukan biaya yang relatif besar. Mahalnya biaya transportasi dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakan transportasi air untuk mencapai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terdekat. Untuk menempuh jarak yang sama, transportasi air memerlukan biaya lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan transportasi darat. Oleh karenanya, harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian menjadi lebih mahal. Mahalnya biaya transportasi, menyebabkan sulitnya menjangkau layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi. Akibatnya, sekalipun penghasilan petani lebih banyak, nilainya lebih rendah dan biaya hidup menjadi lebih tinggi karena tingginya harga kebutuhan pokok serta biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Rendahnya modal sosial

Konsep modal sosial (*social capital*) dimunculkan pertama kali oleh James Coleman (1988) dalam Zulkifli Lubis (1999) yang mengartikannya sebagai aspek struktur hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat menciptakan nilai-nilai baru. Konsep tersebut kemudian dielaborasi oleh sejumlah ahli dalam kaitannya dengan isu-isu pembangunan ekonomi maupun politik. Elinor Ostrom (1992) menyatakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan.

Keberadaan modal sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut institusi atau pranata yang menjadi acuan tindak bagi mereka. "Institusi" diartikan sebagai seperangkat aturan atau kesepakatan yang diciptakan oleh masyarakat dan menjadi acuan untuk bertindak.

Menurut Soeryono Soekanto (1990), tumbuhnya organisasi-organisasi kemasyarakatan merupakan indikasi bagi terbentuknya modal sosial. Putnam (1993) dalam Zulkifli Lubis (1999) menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada aspek utama dari organisasi yaitu kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan integrasi sosial budaya.

Pada pemukiman-pemukiman baru seperti pemukiman transmigrasi, pemerintah telah menstimulasi munculnya organisasi-organisasi sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam komunitas yang heterogen. Namun, berbagai hasil penelitian dan identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa hanya organisasi sosial yang tumbuh pesat, sedangkan organisasi ekonomi seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) umumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini disebabkan kegiatan ekonomi yang rendah dan lamban serta sistem organisasi yang dibangun kurang baik. Minimnya pengetahuan maupun adanya budaya "manut" (Bahasa Jawa, artinya "menurut" atau "patuh") memudahkan para pengelola organisasi melakukan penyelewengan. Kondisi semacam itu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dan menunjukkan bahwa modal sosial masih rendah.

4. Kompetensi sumber daya manusia

Rendahnya produksi dan tingkat perekonomian menjadi salah satu indikator dari rendahnya kompetensi SDM masyarakat di lahan gambut. Kondisi ini didukung oleh minimnya akses terhadap informasi, sulitnya mengakses pengetahuan atau keterampilan dari para ahli atau praktisi lain yang membuat mereka hanya menggantungkan pada proses *trial and error* (coba-coba). Proses ini tidak hanya mengakibatkan lambatnya perkembangan kemampuan mereka, melainkan juga tidak mampu mengantisipasi kondisi lingkungan lahan gambut yang rentan.

5. Kerentanan

Pelaku usaha di pedesaan, terutama petani pada umumnya, melakukan usaha secara subsisten dan belum mengembangkan budaya memupuk modal. Pada musim-musim panen, mereka kerap mengalami surplus produksi. Namun, sebagian besar masih dihabiskan untuk membeli aset-aset yang tidak produktif dan berpesta (temuan di beberapa lokasi). Mereka hampir selalu kesulitan modal setiap kali akan mengawali proses produksi. Hanya 6,6% pendapatan yang dialokasikan kembali untuk modal usaha, sedangkan sisanya untuk konsumsi dan membeli aset non produktif (Danarti *et al*, 2001). Mereka juga jarang menjual hasil produksinya ke pasar. Bukan hanya karena jauh dari pasar, melainkan karena kebiasaan menyimpan hasil produksi untuk konsumsi sendiri. Akibatnya, perputaran modal menjadi terbatas.

Dalam kondisi subsisten, petani tidak memiliki “pengaman”, sehingga rentan terhadap gejolak yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sakit berat, mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk berobat. Ketika gagal panen secara massal, desa menjadi rawan pangan. Jika hal ini terjadi berulang, masyarakat menjadi semakin tidak berdaya dan kemiskinan pun semakin dalam.

Pertanyaannya, mengapa orang miskin cenderung menghabiskan pendapatannya untuk keperluan konsumtif dan tidak melakukan akumulasi modal? Benarkah mereka sama sekali tidak memiliki potensi pendapatan yang dapat ditabung? Ternyata tingkat kesadaran masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk kegiatan produktif masih sangat rendah. Mereka tidak menyadari bahwa pola pengeluaran semacam itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kondisinya terus terpuruk dan terkungkung dalam belenggu kemiskinan. Pengalaman beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Bina Swadaya, PINBUK (Pusat Inkubator Usaha Kecil), dan WI-IP (Wetlands International-Indonesia Programme), membuktikan, apabila masyarakat miskin telah menyadari adanya kesalahan dalam pola konsumsinya, ternyata mereka pun mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung.

Kotak 3

**Potret Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sepanjang Sungai Mantangai
Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah**

[Catatan Alue Dohong, Sabirin dan Lilia, 2004]

Mantangai adalah satu nama sungai di Kabupaten Kapuas, yang dulunya merupakan salah satu lumbung ikan yang mensuplai kebutuhan penduduk di Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. Sungai yang panjangnya mencapai ± 64 km., dapat di telusuri selama $\pm 3 - 4$ jam perjalanan dengan menggunakan klotok (perahu kecil memakai mesin berkapasitas 5-10 orang).

Penduduk yang bermukim di sepanjang Sungai Mantangai umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan mereka sepenuhnya tergantung pada sumber ikan yang terdapat di sungai tersebut. Hampir 82% nelayan sungai Mantangai ternyata hanya memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar dan Tamat Sekolah Dasar. Mereka yang berhasil menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat tidak lebih dari 9% dan sekitar 9% lainnya diketahui tidak pernah mengenyam bangku sekolah sama sekali. Tingkat pengetahuan para nelayan terhadap teknik budi daya ikan menetap ternyata juga sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Padahal mereka sangat berkeinginan untuk melakukan kegiatan budidaya menetap dan berharap ada pihak lain yang peduli dan mendengarkan keluhan mereka. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan diperkirakan karena beberapa faktor antara lain (1) minimnya penghasilan dari menangkap ikan sehingga tidak cukup uang untuk menyekolahkan anaknya; (2) akses ke sarana pendidikan yang relatif sulit; dan (3) persepsi yang keliru dari para nelayan terhadap pentingnya pendidikan.

Pola penyebaran pemukiman nelayan umumnya berkelompok di sepanjang Sungai Mantangai. Sebagai contoh adalah kelompok Mantangai Hilir, Jayanti, Danau Uju, Gajah dan Danau Telo dengan total penduduk sebanyak 22 keluarga atau 60 jiwa. Kondisi fisik perumahan mereka umumnya terbilang sangat sederhana dengan bahan utama dari kayu tidak tahan lama dan beratap daun rumbia. Beberapa rumah bahkan beratap plastik dan hanya satu unit rumah yang beratap seng. Rumah para nelayan berukuran rata-rata 4×4 meter (16 m^2) dengan luas tanah berkisar antara 20-25 m², kendati sebetulnya para nelayan memiliki keleluasaan untuk membangun rumah di sepanjang alur Sungai Mantangai. Usia rumah nelayan tidak lebih dari 5 tahun dan setelah itu harus dilakukan perbaikan. Dari wawancara diperoleh informasi sekitar 68% bangunan rumah nelayan yang ada berumur 4-6 tahun dan sisanya berusia 1-3 tahun serta tidak ditemukan rumah yang secara fisik berusia diatas 7 tahun.

Kotak 3 (Lanjutan)

Usaha menangkap ikan di Sungai Mantangai ternyata dilakukan secara turun temurun oleh para nelayan. Hampir seluruh nelayan memiliki dan menggunakan perahu tanpa mesin (jukung) atau bermesin (kelotok) dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Sementara itu alat tangkap yang digunakan para nelayan umumnya alat tangkap tradisional seperti tampirai, bubu (kawat dan bambu), rengge, rawai, pancing/banjur, pangilar, kabam, dan haup. Sedangkan jenis ikan yang dominan tertangkap antara lain tampahas (tapah), tahoman (toman), kerandang, kakapar (kapar), miau, tabakang, dan baung

Pendapatan nelayan ternyata sangat fluktuatif dan tergantung pada kondisi musim. Penangkapan ikan umumnya dilakukan pada akhir musim kemarau hingga awal musim hujan yakni antara bulan September hingga Januari. Hasil tangkapan pada musim banjir ikan umumnya mencapai 2 atau 3 kali lipat dibandingkan pada musim-musim biasa. Pada musim biasa nelayan hanya mampu memperoleh hasil tangkapan rata-rata 30 kg per bulan atau senilai Rp. 300.000,-/bulan, sedangkan pada musim banjir ikan rata-rata mereka dapat memperoleh 70 kg per bulan dengan harga rata-rata Rp. 9.000,- per kg. Dengan demikian, penghasilan per bulan setiap nelayan, pada musim ikan mencapai Rp. 630.000,-.

Hasil tangkapan ikan rata-rata pada tahun tahun 2003 adalah sebanyak 562 kg/nelayan. Jumlah ini kalau dikonversi (dijual) setara dengan Rp.5.210.000,-. Berarti perolehan rata-rata tiap bulan sebanyak 46,8 kg atau Rp.434.167,-. Kalau dihitung secara kasar, jumlah penghasilan kotor rata-rata per bulan rumah tangga nelayan adalah sebesar Rp. 434.167,-. Sedangkan pendapatan dari usaha dan kegiatan lain sama sekali tidak ada. Pendapatan para nelayan sebagian besar (50%) untuk membeli kebutuhan pokok yang bersifat subsisten berupa pangan sedangkan sebagian kecil sisanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan papan dan pembelian alat tangkap.

Pola pemasaran hasil ikan tangkapan umumnya bersifat lokalistik yaitu dijual ke pasar Desa Mantangai dengan jarak tempuh antara 30 – 64 km atau ke desa-desa lain di sekitarnya. Pemasaran lain adalah kepada pedagang pengumpul yang juga menetap sebagai nelayan setempat. Selisih harga jual antara pedagang pengumpul dengan harga di pasar Desa Mantangai berkisar antara Rp. 1.000-Rp. 3.000/kg.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN GAMBUS

Pertanyaan apakah masyarakat yang hidup di kawasan lahan gambut menyebabkan kerusakan lingkungan atau justru sebaliknya, sering menjadi perdebatan panjang. Yang jelas, ada sebagian masyarakat yang aktivitasnya (secara langsung atau tidak, secara sadar atau tidak) turut memberikan kontribusi bagi kerusakan ekosistem lahan gambut. Sementara sebagian lainnya (secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak) justru telah memberikan kontribusi bagi kelestarian ekosistem tersebut.

1. Kontribusi bagi kerusakan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk aktivitas masyarakat yang ditengarai secara langsung atau tidak dapat menyebabkan kerusakan ekosistem gambut:

a. Pemilihan lahan budidaya pertanian yang kurang tepat

Karena keterbatasan lahan, sebagian petani di lahan gambut menggunakan lahan untuk budidaya dengan komoditas yang kurang sesuai dengan tipologinya. Sebagai contoh, penggunaan lahan gambut yang sangat tebal untuk budidaya tanaman semusim. Petani cenderung melakukan drainase lahan secara intensif untuk budidaya tanaman semacam itu. Selain itu, budidaya tanaman semusim secara monokultur menyebabkan lahan terbuka. Akibatnya gambut akan mudah mengalami kekeringan di musim kemarau. Gambut dengan ketebalan lebih dari 3 m tidak tepat untuk budidaya pertanian karena kendala-kendalanya yang sangat besar.

b. Teknik budidaya yang kurang tepat

Teknik budidaya tanaman seperti pembukaan lahan, tata air, penataan lahan, dan pemilihan komoditas yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan lahan gambut. Bentuk kerusakannya antara lain kekeringan, penurunan permukaan tanah secara drastis, dan kebakaran.

Sebagian masyarakat petani di lahan gambut masih menggunakan metode pembukaan lahan dengan cara membakar. Pembakaran lahan juga sering dilakukan untuk mengusir hama. Lahan tidur pada umumnya ditutupi oleh semak belukar dan menjadi tempat bersarangnya hama, terutama babi. Untuk mengusir dan mengurangi serangan hama tersebut, petani membersihkan lahan tidur dengan cara membakarnya.

Pembakaran lahan yang bertujuan untuk membuka lahan atau mengusir hama sering kurang terkontrol. Dampaknya kebakaran lahan meluas. Tidak hanya dalam lingkup lahan yang dimaksudkan, tapi tanpa disadari juga meluas ke lahan lain di sekitarnya dan sulit untuk dipadamkan. Di Malaysia, pembakar lahan yang menyebabkan kebakaran lahan lainnya akan didenda dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan lain yang lahannya terbakar.

c. *Pembalakan liar (Illegal Logging)*

Illegal logging merupakan pengambilan kayu hutan secara tidak sah (sehingga merugikan negara) dan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan pelestarian lingkungan. Kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga kerapatan tanaman dan keanekaragaman hayatinya menjadi terusik. Pohon yang seharusnya dilindungi, ditebang sebanyak-banyaknya tanpa memilah dan memperhatikan kerapatan hutan. Akibatnya, ekosistem lahan gambut menjadi terusik dan sulit dipulihkan kembali.

Aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan para penebang kayu juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, memasak di dalam hutan dan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau, disinyalir menjadi salah satu penyulut kebakaran hutan gambut. Selain itu, kayu hasil tebangan diangkut melalui parit-parit yang dibuat tanpa memperhatikan konsep konservasi air dan lahan. Pada musim kemarau, parit-parit tersebut cenderung menguras air gambut dan menyebabkan kekeringan.

Sebagian besar *illegal logging* memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tapi masyarakat sekitar berpeluang besar turut berkontribusi. Biasanya mereka bekerja sebagai tenaga penebang, pemotong, dan pengangkut kayu. Masyarakat yang tingkat ekonominya lebih mapan bahkan tidak jarang memiliki peralatan penebangan dan penggergajian seperti *chainsaw* (gergaji mesin).

Pengalaman WI-IP (bekerja sama dengan LSM lokal, Yayasan Pinang Sebatang/Pinse) di Desa Sungai Rambut dan Sungai Aur (dekat Taman Nasional Berbak di Provinsi Jambi), menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pelaku *illegal logging* dapat ditingkatkan melalui pendekatan pemberdayaan. Masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha yang dapat memberikan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan dasar itu terpenuhi, mereka pun dapat berkonsentrasi pada usaha-usaha lain yang lebih ramah lingkungan.



Gambar 4. *Illegal logging. Memerlukan alternatif usaha lain yang ramah lingkungan dan menghasilkan cash income (Dokumentasi oleh: Wibisono, 2004)*

Kotak 4

Nasib penebang liar di rawa gambut Sumsel

Kawasan hutan rawa gambut Sungai Merang-Kepahyang memiliki kedalaman gambut yang bervariasi antara 1-10 m. Sebelum tahun 2000, isu penebangan liar di lokasi ini belum banyak mencuat ke permukaan. Tapi, ketika orang-orang (sekitar 2000-an orang) dari Kecamatan Selapan (Kabupaten Kayu Agung, Sumatra Selatan) datang “menyerbu” lokasi Sungai Merang dan Sungai Kepayang untuk menebang kayu, maka warga di tiga dusun di sekitar daerah aliran sungai itupun mulai ikut-ikutan menjarah kayu di rawa gambut yang terletak di kiri-kanan sungai.

Orang-orang dari Selapan hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di tepi-tepi sungai dan di dalam hutan untuk menebang kayu (membalok). Mereka baru pulang ke Selapan ketika musim kemarau tiba. Kegiatan membalok umumnya dilakukan pada musim hujan agar kayu hasil tebangan mudah ditarik dari hutan melalui parit-parit di rawa atau sungai. Kalaupun ada yang membalok di musim kemarau, biasanya hasil tebangan baru ditarik dari hutan saat musim hujan.

Selama kegiatan di dalam hutan mereka menghadapi tantangan keras seperti diterkam harimau dan tertimpa pohon tumbang. Ketika menggeret balok lewat sungai mereka menghadapi “oknum” yang siap siaga untuk menarik upeti. Kegiatan dalam hutan juga diikuti dengan masak-memasak (beras, minyak, dan lauk biasanya dimodali atau berutang dari cukong dengan harga beli berlipat ganda dari harga di pasar) dan sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Nah, demikianlah ironisnya nasib para penebang liar ini. Terterkam harimau, tertimpa pohon tumbang, dipalak oknum, dan diperas cukong. Walhasil, pendapatan yang bisa dibawa pulang untuk anak-istri tak lebih dari Rp 10.000,- per hari. (catatan: saat itu 1 USD = Rp 8.750)

Para penebang liar umumnya bekerja secara berkelompok (1 kelompok terdiri atas 8-10 anggota). Untuk bekerja di dalam hutan selama sekitar 90 hari (3 bulan), mereka perlu membawa solar sekitar 5 drum dan persediaan bahan makanan yang disiapkan cukong. Kayu yang dihasilkan sekitar 135–300 m³) dengan upah sekitar Rp 50.000/m³ atau upah maksimum bagi seluruh pembalok Rp 15 juta selama 3 bulan. Dengan kata lain, setiap orang memperoleh sekitar Rp 1,5 juta per 3 bulan atau Rp 500.000 per bulan per orang. Ini masih kotor, karena para pembalok harus membayar bahan makanan yang disuplai cukongnya. Kalau setiap pembalok butuh bahan makanan selama membalok sekitar Rp 200.000,- per bulan (atau Rp 600.000 selama 90 hari), maka sisa yang dibawa pulang untuk keluarga tercinta hanya Rp 300.000 atau Rp 10.000/orang/ hari.

Jika harga balok rata-rata di Sumsel Rp 150.000/m³, maka nilai total kayu liar ini sebesar 300 m³ x Rp 150.000,- = Rp 45.000.000,-. Berapakah untung cukong, berapa pula yang masuk kantong oknum ?

Kotak 4 (Lanjutan)

Jadi, dari kegiatan yang sangat merusak lingkungan tersebut, sesungguhnya penghasilan pembalok sangat rendah. Untuk menanggulangi penebangan liar di Indonesia (khususnya Kalimantan dan Sumatra), bisakah pemerintah menciptakan lapangan kerja alternatif (yang menghasilkan upah dengan nilai sekurangnya Rp 10,000/orang/hari) bagi para pembalok ini? Kalau tidak bisa, apakah kita akan membiarkan saudara-saudara kita ini tetap membalok, padahal menurut ramalan Bank Dunia, hutan Sumatra akan habis pada tahun 2005 dan hutan Kalimantan pada tahun 2010?

(Disarikan dari hasil pengamatan INN Suryadiputra, pada tahun 2003. WKLB Vol 11 no. 1 edisi Januari 2003)

2. Kontribusi bagi Pelestarian

Persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat miskin dan terbelakang adalah ketidaktersediaan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan (Primahendra, 2004). Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Keterbatasan daya dukung ekonomi lahan gambut dari sisi pertanian, harus menjadi tantangan dalam mencari potensi lain agar masyarakat memiliki pilihan sumber penghidupan yang layak dan ramah lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan ekonomi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa hal itu, peningkatan kondisi ekonomi justru dapat berbalik menjadi faktor perusak karena dapat menjadi modal bagi sebagian masyarakat yang tidak sadar untuk lebih banyak lagi melakukan kerusakan lingkungan.

Gambut merupakan sumber daya alam yang unik, memiliki peran yang kompleks, dan sifat fragil. Kondisi itu sebenarnya menjadi peluang bagi tumbuhnya beragam kesempatan kerja dan berusaha. Berikut beberapa kegiatan yang berpeluang menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut.

a. Peran gambut sebagai penjaga iklim

Peran gambut sebagai penjaga iklim secara global dan memiliki keanekaragaman hayati yang khas (seperti bekantan, orang utan, ikan siluk, buaya sinyulong dan berbagai jenis palem) menyebabkan sumber daya alam ini banyak memperoleh perhatian dari para pemerhati lingkungan ditingkat nasional maupun internasional. Sifat unik dan marjinal yang dimilikinya menyebabkan gambut banyak menarik minat peneliti dan wisatawan. Kunjungan para pemerhati lingkungan, peneliti, dan wisatawan ke kawasan gambut memerlukan pemandu, informan, sarana transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Kesempatan kerja yang tercipta karena kegiatan tersebut dapat diisi oleh masyarakat di lahan gambut. Dalam dunia pariwisata, ini disebut sebagai “ekowisata” (*ecotourism*). Ekowista merupakan bentuk pariwisata alternatif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi masyarakat lokal.

b. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kebakaran lahan gambut

Kebakaran lahan gambut sangat mudah meluas dan menimbulkan dampak yang sangat merisaukan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah dihimbau memiliki satuan pemadam kebakaran lahan dan hutan. Dalam hal, ini masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut dapat berperan sebagai anggota satuan pemadam kebakaran di tingkat desa seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pematang Raman di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak di Jambi (lihat Kotak 5).

Kotak 5

Pembentukan Tim Pemadam Kebakaran di Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Rambut, Jambi

Kegiatan masyarakat Desa Pematang Raman di sekitar dan di dalam kawasan Taman Nasional Berbak (luas 162.700 ha dengan 100.000 ha di antaranya adalah hutan rawa gambut), Jambi, cukup beragam, diantaranya: berladang, mencari kayu (membalok), ikan, getah jelutung dan sebagainya. Aktivitas yang telah dijalankan sejak berdirinya desa tersebut (1953) seringkali menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi keutuhan ekosistem dan habitat flora-fauna di taman nasional. Peristiwa paling merusak yang berlangsung sejak 10 tahun belakangan ini adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut yang berulang kali sebagai akibat ketelodoran masyarakat dalam menggunakan api saat mempersiapkan lahan pertanian maupun saat melakukan kegiatannya di dalam hutan. Untuk menanggulangi hal demikian, pihak TN Berbak telah berulang kali menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan akan pentingnya arti hutan sebagai sumberdaya kehidupan, pemberi jasa lingkungan seperti pencegah banjir dan intrusi air laut, sumber air bagi kegiatan pertanian dan air minum dsbnya. Namun upaya ini agaknya kurang memberikan hasil yang memadai karena pada kenyataannya kebakaran masih tetap terjadi. Untuk itu, dalam rangka program pemberdayaan masyarakat yang berkenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana dan berkelanjutan, maka oleh Proyek CCFPI-WI-IP yang bekerjasama dengan LSM lokal-Yayasan Pinang Sebatang- PINSE dan unit pengelola TN Berbak, pada bulan Oktober 2004, telah difasilitasi terbentuknya sebuah tim pemadam kebakaran ditingkat desa yang diberi nama "Sekintang dayo" yang berarti kekuatan, kesatuan bersama yang dilakukan sesuai kemampuan secara sukarela tanpa paksaan. Tim ini selain memiliki struktur organisasi yang jelas, ia juga diberikan tehnik pelatihan pencegahan dan pemadaman api (termasuk cara-cara menggunakan peralatan pemadaman kebakaran milik TN Berbak) sehingga ia senantiasa siap dilibatkan pada setiap kegiatan pemadaman kebakaran terutama di sekitar dan di dalam Taman Nasional Berbak. [catatan: Selain Tim di atas, pada bulan April 2003, oleh LSM Pinse yang difasilitasi oleh proyek CCFPI, di Ds Sungai Rambut Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur Jambi juga telah dibentuk kelompok brigade kebakaran hutan dan lahan yang berbasiskan masyarakat lokal. Kelompok ini diberi nama Fire Brigade Teluk Harimau. Brigade ini mempunyai 4 pengurus inti yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta 24 anggota. Misi organisasi ini adalah melakukan pencegahan, pemantauan, penanggulangan kebakaran serta penanganan pasca kebakaran hutan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Latar belakang pembentukannya adalah untuk mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah TN Berbak yang dilaporkan telah mengalami kerusakan mencapai 27.062 ha akibat kebakaran]

Kotak 5 (Lanjutan)

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMADAM KEBAKARAN
SEKINTANG DAYO**



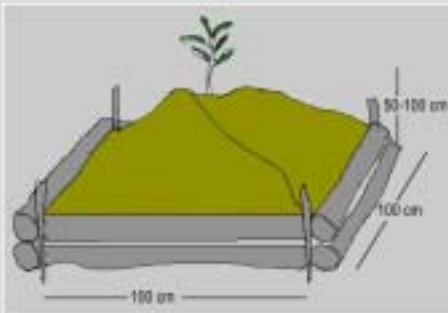
c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan gambut

Upaya rehabilitasi hutan memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak terutama di bidang pembibitan tanaman, penanaman, dan pemeliharaan. Masyarakat di lahan gambut dapat mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Peningkatan keterampilan teknis dan manajemen, permodalan, serta mediasi dengan sektor-sektor terkait dan mitra kerja lain, sangat diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat mengisi kesempatan kerja tersebut (lihat Kotak 6).

Kotak 6

Pengalaman rehabilitasi hutan bekas terbakar di Taman Nasional Berbak (TNB), Jambi

Antara September 2003 – Desember 2004, telah dilakukan suatu kegiatan rehabilitasi di lahan gambut bekas terbakar di Taman Nasional Berbak oleh Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP) bekerjasama dengan Unit Pengelola Teknis -Taman Nasional Berbak (UPT-TNB), Masyarakat pencari ikan, dan HPH PT.Putra Duta Indah Wood (PIW). Kegiatan ini dibiayai oleh CIDA melalui Proyek Climate Change Forest and Peatlands in Indonesia (CCFPI). Dalam hal ini, masyarakat membangun gundukan-gundukan berukuran 50x100x50 cm (sebanyak 20.000 unit), HPH PIW menyiapkan bibit tanaman (Ramin *Gonystylus bancanus*, Rengas tembaga *Mellanorhoea walichii*, Meranti *Shorea pauciflora*, Perepat *Combretocarpus rotundatus*, Jambu-jambuan *Eugenia spp.*, Jelutung *Dyera lowii*, dan Pulau *Alstonia pneumatophora*), UPT-TNB membantu menetapkan lokasi rehabilitasi dan WI-IP menyalurkan dana dan memberikan bimbingan teknis di lapangan. Meskipun kegiatan ini kurang memberikan hasil yang memuaskan (tingkat kematian bibit, 15-90%, masih tinggi akibat banjir yang parah), namun dari kegiatan ini dapat ditarik suatu proses pembelajaran yang berarti dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa kecerobohan dalam menggunakan api berdampak parah terhadap kerusakan hutan dan sangat sulit untuk diperbaiki.



Gundukan tempat menanam bibit



Pembuatan gundukan oleh masyarakat



Lokasi penanaman di TN Berbak, Jambi (Dokumentasi oleh: Jill Heyde, 2004)

d. Optimalisasi pemanfaatan lahan gambut melalui agroforestry

Sistem agroforestry yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh pemerintah akan membuka kesempatan kerja petani untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan (gambut) bagi komoditas pertanian yang lebih produktif dengan sistem wanatani. Di samping itu, perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh swasta di lahan gambut dangkal, membuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani di sekitar perkebunan.



Gambar 5. *Pertanaman sistem lorong atau wanatani (tumpangsari antara tanaman kehutanan dan tanaman pangan) di lahan gambut dangkal desa Basarang, Kalteng (Dokumentasi oleh: Suryadiputra, 2004)*

e. Optimalisasi pemanfaatan lahan gambut melalui Usaha Tani Terpadu

Usaha tani terpadu (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan) yang berkelanjutan cukup berpeluang untuk dikembangkan di lahan gambut, karena sebagian lahan gambut (khususnya yang dangkal) merupakan lahan yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian. Tanaman kehutanan dan perkebunan dapat dipanen dalam jangka panjang. Sementara tanaman pangan dan hortikultura dapat dipanen dalam jangka pendek. Perairan di lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Demikian pula, komoditas ternak seperti ayam, itik, kerbau, dan sapi dapat dipelihara untuk *cash income* atau tabungan. Sementara kotoran ternak tersebut dapat digunakan sebagai pupuk atau bahan pembuat kompos.



Gambar 6. *Perpaduan kolam ikan patin dengan tanaman pinang dan pisang sebagai penguat pematang kolam di lahan gambut, digabungkan dengan kandang ternak di atasnya di Desa Tangkit Baru, Jambi. (Dokumentasi oleh: Suryadiputra, 2004)*

Karena sifatnya yang marginal dan fragil, bertani di lahan gambut harus dilakukan hanya pada lahan yang sesuai dengan peruntukannya dan dilaksanakan dengan sistem usahatani terpadu yang didukung oleh jaringan tata air yang tidak menyebabkan kekeringan lahan, penataan lahan yang sesuai, pemilihan komoditas yang sesuai, dan penggunaan teknologi budi daya yang tepat. Untuk mengisi kesempatan kerja demikian, petani di lahan gambut memerlukan diseminasi teknologi dan manajemen usaha serta dukungan sarana permodalan.

f. *Optimalisasi pemanfaatan saluran di lahan gambut untuk perikanan*

Penabatan terhadap saluran-saluran/parit di lahan gambut yang ditinggalkan pemilik/pengelolanya berpotensi sebagai sarana budi daya perikanan. Di beberapa lokasi dalam kawasan hutan gambut, banyak dibuat parit/saluran yang berfungsi sebagai sarana transportasi kayu hasil tebangan. Jika kayu di kawasan tersebut sudah habis, saluran air ini akan ditinggalkan oleh para pemiliknya.

Saluran ini berpotensi menguras air gambut sehingga menyebabkan lahan gambut kekeringan di musim kemarau dan mudah terbakar. Pembuatan tabat atau bendungan pada saluran-saluran semacam itu, akan menciptakan genangan air semacam kolam memanjang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana budidaya ikan dan akhirnya meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Kotak 7

Pemanfaatan saluran/parit yang ditabat sebagai sarana budidaya perikanan

Di Desa Muara Puning (terletak di Kabupaten Barito Selatan-Kalteng), saluran/parit di lahan gambut biasanya disewakan oleh pemilik kepada para penebang liar untuk mengangkut kayu. Setelah aktivitas illegal logging tidak ada (karena kayu di hutan habis), parit-parit ini ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian WI-IP bersama LSM lokal (Yayasan Komunitas Sungai/Yakomsu) dan masyarakat setempat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara membuat sekat atau tabat pada saluran/parit dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekeringan/kebakaran gambut di musim kemarau. Penyekatan saluran tersebut, ternyata selain membuat permukaan air di saluran meningkat, sehingga terbentuk semacam kolam berukuran panjang (seperti kolam "Beje" yang umum dibangun oleh masyarakat Dayak), ia juga mampu memerangkap ikan. Hasil tangkapan ikan (dominan betok, gabus, sepat dan lele) dilaporkan mencapai 100 kg untuk tiap ruas parit yang tersekat sepanjang 500 m selebar 1,2 m dan dalam sekitar 1 m.



Parit sebelum ditabat



Parit setelah ditabat



Ikan terperangkap di dalam parit yang ditabat (Dokumentasi oleh: Suryadiputra, 2004)

Kotak 8

Bertanam Melon di Lahan Gambut
Catatan Pak Suyandi, Petani di Desa Kalamangan, Kalimantan Tengah

Saya adalah seorang petani, yang mengerjakan seluas lahan gambut di Desa Kalamangan, Kalimantan Tengah. Selama ini, komoditas pertanian yang saya tanam terbatas pada jenis-jenis sayuran saja. Sering terbersit dalam pikiran saya keinginan untuk melakukan usaha tani yang menguntungkan dan belum pernah dikembangkan, apalagi saat ini kondisi harga sayuran di tingkat petani cenderung merosot terus.

Setelah mengobrol dengan berbagai pihak dan adanya dukungan teknis dan biaya dari beberapa pihak, saya kemudian memutuskan untuk melakukan penanaman buah melon varietas Eksen di lahan gambut dengan ketebalan gambut sekitar 4 meter. Keputusan tersebut saya ambil dengan pertimbangan bahwa sejauh ini kelihatannya belum ada petani melon di Kalimantan, sehingga melon harus didatangkan dari Jawa. Sementara itu, saya amati kebutuhan pasar semakin meningkat dan nilai ekonominya pun cukup menggiurkan.

Usaha pertama saya lakukan dengan menanam sebanyak 500 tanaman contoh dengan sistem mulsa plastik hitam perak. Dengan mengacu kepada arahan teknis yang diberikan serta kegigihan, perjuangan dan ketekunan yang saya lakukan, rupanya kegiatan ini membuahkan hasil yang sangat menjanjikan. Buah melon tumbuh dengan sangat baik, dan kemudian mendapat pujian dari Dinas Pertanian Kota Palangka Raya dan para penyuluh lapangannya. Beberapa petani Pulau Jawa yang sempat berkunjung ke Kalamangan bahkan juga memuji tingkat pertumbuhan tanaman yang sangat baik ini.

Namun rupanya cobaan lain harus saya terima. Pada awal Juni 2004, terjadi hujan deras disertai angin kencang. Curah hujan beserta angin yang sangat tinggi ini mengakibatkan tanaman melon mengalami kelayuan permanen dan mati, karena perakaran serabut putus-putus akibat terjangan dan terangkat angin. Kesedihan begitu kental menyelimuti kami. Sempat terlintas keinginan untuk berhenti saja.


Saya kemudian menyadari bahwa hidup saya sebenarnya sangat bergantung kepada hasil pertanian, sehingga kemudian timbul tekad kembali untuk tidak putus asa, tak surut langkah, dan pantang menyerah. Atas kepercayaan dan semangat tersebut, saya kembali melakukan penanaman melon. Kali ini saya melakukannya dengan modal sendiri, meskipun masih terus mendapatkan bimbingan teknis dari berbagai pihak. Kerja keras inipun kembali berbuah manis. Buah melon yang manis, segar dan renyahpun tumbuh dengan baik dan siap dipanen. Kabar baik ini rupanya terdengar pula oleh Walikota Palangka Raya. Saya sangat bangga dan terharu ketika Walikota melakukan panen perdana melon di lahan saya.

Untuk menarik pembeli, saya kemudian mempersilakan para pembeli untuk memetik sendiri buah melon yang akan dibeli. Nampaknya, tawaran ini disambut baik, terbukti dari banyaknya pembeli yang langsung datang ke kebun.




Bab 4

Konsep Pemberdayaan Masyarakat



Bab ini menyajikan konsep pemberdayaan secara umum, untuk selanjutnya dianalisis guna mencari konsep yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lahan gambut. Uraian ini dilengkapi prinsip-prinsip dan strategi pemberdayaan yang disajikan secara lugas dan operasional.



A. PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Istilah “pemberdayaan” (*empowerment*) berasal dari kata “power” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah, “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan.

Konsep pemberdayaan dikembangkan pertama kali pada tahun 1970-an yang bergulir dan mengalami berbagai penyesuaian. Konsep ini berasal dari pemikiran masyarakat Barat yang lahir karena adanya ketimpangan kekuasaan, dimana sebagian manusia sangat berkuasa terhadap sebagian lainnya. (*homo homini lupus*). Menurut Priono dan Pranarka (1997), konsep pemberdayaan perlu disesuaikan dengan alam pikiran dan budaya Indonesia.

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Secara konseptual, pemberdayaan dapat didefinisikan dalam banyak pengertian tergantung dari lingkup dan sudut pandang orang yang mendefinisikannya. Namun, ide dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, dan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Secara lebih spesifik, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik bagi individu atau kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Sekalipun istilah pemberdayaan berkonotasi adanya “pemberdaya” (subyek) dan “pihak yang diberdayakan” (obyek), apa boleh buat, baru pada tingkat itu pemahaman yang dapat dibangun. Namun, yang terpenting ialah adanya kesadaran bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan berkelanjutan secara bersama antara sang pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan. Hal-hal yang menjadi sasaran kerja bersama tidak dalam kerangka membawa masyarakat menuju tingkat wawasan yang telah dimiliki oleh sang pemberdaya. Selain tidak perlu, juga tidak ada yang menjamin bahwa tingkat kesadaran sang pemberdaya lebih baik daripada mereka yang diberdayakannya.

Terdapat 2 kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat (Priono dan Pranarka, 1997). **Pertama**, kecenderungan primer, yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, kemampuan, dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Proses ini biasanya dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. **Kedua**, kecenderungan sekunder, yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tapi yang sering terjadi adalah kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.

Pada tataran implemementasi di lapang, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan “*community development*” (biasa disingkat “CD”, artinya “pengembangan komunitas/masyarakat”). Dalam hal ini, beberapa LSM menganggap bahwa peluang ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan, serta penyediaan modal bagi pengembangan usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan pintu masuk yang efektif untuk melakukan pemberdayaan. Yayasan Bina Swadaya dan PINBUK telah mengembangkan konsep semacam ini di beberapa lokasi dan telah diujicobakan pula di pemukiman transmigrasi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di lahan gambut, tujuan pemberdayaan tidak semata-mata peningkatan kesejahteraan rakyat. Ide dasar memberdayakan masyarakat gambut adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam hal ini, tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum tetapi juga dimaksudkan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat di kawasan lahan gambut. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat di lahan gambut sulit untuk diwujudkan. Dengan kata lain, keberdayaan harus dicapai melalui peningkatan kapasitas dan masyarakat serta kelestarian lingkungannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat

di lahan gambut ditujukan untuk membangun kesadaran, motivasi, kompetensi, dan kemandirian masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut harus merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri sehingga secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu menjaga lingkungannya dengan penuh kesadaran.

B. PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.

Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memosisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer

pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai “kearifan lokal” (*indigenous wisdom*).

Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah anggapan bahwa pemberdayaan cukup dilakukan pada laki-laki saja karena merekalah kepala rumah tangga yang menentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penanggung jawab keluarga. Sehingga ada anggapan, jika laki-laki sudah bisa dan mau menularkannya kepada anggota keluarga yang lain termasuk perempuan, berarti telah melakukan pemberdayaan pada seluruh anggota keluarga. Sedangkan perempuan selaku ibu rumah tangga hanya dipandang sebagai figur yang selalu menurut pada kata kepala rumah tangga. Karenanya, ungkapan salah kaprah yang umum ditemukan adalah perempuan hanya berurusan dengan “3 Ur” dalam hidupnya, yaitu sumur, kasur, dan dapur. Perempuan tidak perlu pintar, yang penting bisa mengurus rumah, melayani suami, dan mendidik anak. Namun, realitanya tidaklah selalu demikian.

Perempuan memiliki peran yang cukup penting sebagai tenaga kerja di pedesaan Indonesia. Berbagai hasil penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi transmigrasi lahan kering maupun lahan rawa menemukan bahwa alokasi waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja perempuan sebanding dengan alokasi waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja laki-laki dalam aktivitas usaha tani di pedesaan, meskipun jenis pekerjaan yang didominasi oleh wanita berbeda dengan laki-laki. Dominasi pengambilan keputusan oleh wanita cukup seimbang dibandingkan pria, meskipun jenis keputusannya berbeda (Ghalib dan Ramli, 1999; Supriadi *et al*, 1999; Rina dan Djamhuri, 1999).

Terdapat perbedaan alokasi waktu dan dominasi pengambilan keputusan oleh perempuan dan laki-laki untuk masing-masing daerah, tapi ada kecenderungan yang hampir sama. Dalam hal alokasi waktu, umumnya wanita dominan melakukan pekerjaan-pekerjaan berikut:

- a. Kegiatan rumah tangga, mulai dari memasak, merawat anak, melayani suami, serta membersihkan rumah dan perabotannya.
- b. Kegiatan budi daya tanaman yang tidak banyak memerlukan tenaga tapi memerlukan waktu yang panjang dan ketelitian, seperti menanam, memupuk, menyiang, panen dalam skala kecil (misalnya panen sayur), dan memproses hasil produksi. Selain sebagai tenaga kerja keluarga, perempuan juga menjadi buruh tani dalam kegiatan seperti itu.
- c. Merawat ternak unggas seperti ayam dan itik. Perawatan ternak kecil (kambing) dan ternak besar (sapi, kerbau) dilakukan oleh perempuan untuk menggantikan laki-laki yang sedang sakit atau tidak sempat melakukan tugas perawatan tersebut.
- d. Memberikan pakan pada ikan di kolam yang berdekatan dengan rumah. Memasarkan hasil produksi dalam skala kecil. Pemasaran hasil dalam skala besar biasanya dilakukan oleh laki-laki atau bersama-sama.
- e. Melakukan kegiatan sosial seperti arisan RT, PKK, dan kegiatan keagamaan.
- f. Menjaga warung bagi mereka yang memiliki warung. Tugas berbelanja untuk kegiatan warung dilakukan secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Di bidang budi daya tanaman, laki-laki biasanya mengerjakan pembukaan lahan, pengolahan tanah, belanja sarana produksi, pengendalian hama/penyakit, serta panen berskala besar. Panen tanaman tahunan seperti karet, sawit, dan kelapa, dilakukan oleh laki-laki. Dalam kaitannya dengan kegiatan perikanan, pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki adalah membangun kolam dan mencari ikan. Pekerjaan di luar usaha tani yang banyak dilakukan oleh laki-laki antara lain menjadi buruh tani untuk pembukaan lahan, penataan lahan, dan pengolahan tanah, memanjat pohon untuk memetik hasil, menebang kayu, mengangkut kayu atau hasil panen dari lahan.

Dalam hal pengambilan keputusan, terdapat kecenderungan sebagai berikut:

- a. Perempuan lebih dominan mengambil keputusan dalam hal penentuan proses dan penyimpanan produksi, pemasaran, produksi, kesehatan, konsumsi keluarga, serta alokasi pendapatan. Pemasaran produksi dan alokasi pendapatan pada komunitas-komunitas tertentu yang lebih terisolir, cenderung ditentukan oleh laki-laki.
- b. Dalam hal penentuan jenis usaha, komoditas, skala usaha, dan permodalan, keputusan diambil secara musyawarah antara wanita dan laki-laki.
- c. Dalam hal penggunaan teknologi dan implementasi teknologi baru, laki-laki lebih berperan. Ini berkaitan dengan kurangnya kesempatan pelatihan dan pendidikan bagi perempuan, sehingga pengetahuannya cenderung lebih sedikit daripada laki-laki. Kesempatan pelatihan usaha tani, pengelolaan permodalan, dan keterampilan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya lebih banyak diberikan kepada laki-laki.

Mempertimbangkan besarnya peran perempuan dalam aspek ekonomi dan sosial keluarga, maka fokus pemberdayaan masyarakat seyogyanya tidak semata-mata ditujukan pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Perempuan juga dapat menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan masyarakat di lahan gambut. Hasil penelitian Najiyati (2002) terhadap keberhasilan pengembangan LKM di pedesaan menunjukkan bahwa LKM yang dikelola oleh perempuan cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan LKM yang dikelola oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan cenderung lebih telaten, cermat, dan tidak sembrono dalam mengelola keuangan. Mereka senang melakukan kegiatan sosial yang diwarnai dengan kegiatan ekonomi, seperti kegiatan pengajian yang kemudian didalamnya juga melakukan arisan atau koperasi atau juga kegiatan usaha.

2. Partisipatif

Dalam praktek, pemerintah dan praktisi pemberdayaan masyarakat belum bersedia sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan merumuskan kebutuhannya (Ndraha, 1990). Mereka terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin melihat hasil pemberdayaan secara fisik. Sementara itu, masyarakat dibebani target untuk mencapai kemajuan yang sangat cepat tanpa memperhitungkan kemampuannya. Tenaga pendamping yang melakukan kegiatan pemberdayaan melihatnya sebagai tugas kelembagaan yang penuh dengan nuansa target dan kontrol yang ketat. Berbagai bantuan datang bertubi-tubi dan dirasakan membebani, karena mereka harus mempertanggungjawabkannya, meskipun sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan proyek tersebut. Mereka mau menerima proyek karena merasa diiming-imingi suatu bantuan tanpa harus bersusah payah memperolehnya. Akibatnya, tiada tantangan atau kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan prakarsa dan keswadayaannya.

Dengan pendekatan semacam itu, perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat seolah-olah dilakukan secara efisien, namun sesungguhnya kemandirian masyarakat tidak dapat tumbuh secara sehat. Itulah sebabnya sering ditemukan proyek-proyek yang dibiayai pemerintah kurang terpelihara dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, proyek-proyek swadaya murni yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat jarang terbengkalai.

Broody dan Rogers dalam Sutrisno dan Widodo, 1993, mengatakan bahwa kemandirian masyarakat akan tumbuh dalam lingkungan yang banyak menawarkan pilihan sekaligus tantangan dalam mencapai kesempurnaan kepribadian. Selanjutnya, masyarakat akan terbiasa berpikir kreatif untuk menentukan pilihan yang dianggapnya terbaik dan terbiasa memikul tanggung jawab atas konsekuensi yang timbul karena pilihannya.

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan

Banyak program pengembangan masyarakat yang memanifestasikan strategi membagi-bagikan bantuan cuma-cuma (*charity*) daripada penumbuhan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya membangun dirinya sendiri. Dalam hal ini, kemandirian hanya merupakan kata-kata klise yang tidak diterjemahkan secara manusiawi.

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit (*the have little*) [Verhagen, 1996]. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “*mulailah dari apa yang mereka punya*”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

4. Berkelanjutan

Banyak kegiatan *pemberdayaan* masyarakat berskala proyek yang tegas batas waktu serta pendanaannya. Apabila proyek usai, pelaksana tidak mau tahu apakah kegiatan dapat berkelanjutan atau tidak. Proyek-proyek semacam itu biasanya hanya akan meninggalkan “monumen fisik” yang justru kerap membuat masyarakat trauma dan apatis. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada masyarakat yang sudah sadar. Masyarakat seperti ini biasanya sudah memiliki keberanian untuk menolak proyek-proyek yang akan turun di wilayahnya.

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

C. STRATEGI PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat, karena kesalahan pendekatan justru dapat berakibat fatal. Demikian juga kesalahan dalam menangkap permasalahan, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan cara pemecahannya. Apabila ini terjadi, maka program pemberdayaan tidak berjalan efektif, mubazir, dan yang lebih buruk lagi adalah terciptanya masyarakat peminta-minta alias masyarakat yang hidupnya tergantung dari uluran tangan.

Dalam praktek, ketika program pemberdayaan dijalankan, biasanya ada fenomena “seolah-olah” telah terjadi peningkatan taraf hidup. Lalu, sesudah dihentikan, program menjadi terbengkalai dan kemandirian masyarakat semakin terpuruk. Apabila ini terjadi, maka bukan perbaikan kondisi kehidupan yang terjadi, melainkan marginalisasi dan pemiskinan yang semakin meluas.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995), implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga upaya. Pertama dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

Secara operasional, pemberdayaan dapat dilakukan melalui perbaikan kondisi internal maupun eksternal. Secara internal, antara lain dilakukan dengan membangun kesadaran, membangkitkan kepercayaan diri,

peningkatan kemampuan mengelola potensi yang ada, dan membangun budaya mandiri. Sementara, perbaikan faktor eksternal dilakukan melalui pembangunan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan dan demokratis, perbaikan lingkungan, serta perbaikan akses terhadap layanan permodalan usaha, layanan sarana produksi, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Memberdayakan masyarakat di lahan gambut memang bukan sesuatu hal yang mudah. Permasalahan yang umumnya dihadapi antara lain lokasi yang umumnya sulit dijangkau, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, layanan permodalan, layanan informasi, dan pengembangan pasar. Tenaga praktisi sering pesimis menghadapi marjinalnya sumber daya alam di kawasan lahan gambut. Kondisi tersebut sering menciptakan masyarakat apatis yang meyakini bahwa kemiskinan merupakan suratan, sehingga mereka hanya perlu bertahan untuk hidup atau pasrah. Masyarakat semacam ini membutuhkan pendekatan yang dapat menumbuhkan dan membangkitkan semangat untuk hidup lebih baik dengan mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri. Beragamnya kultur, kapasitas, dan tingkat kesadaran masyarakat memerlukan keragaman strategi pemberdayaan yang efektif.

1. Mulailah dari apa yang masyarakat miliki

Memulai dari apa yang masyarakat miliki berarti menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini bisa dibuktikan dengan menerima pandangan, pendapat, pengalaman, pengetahuan, atau memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Mereka mungkin tidak memiliki uang, tapi mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sumberdaya lain. Untuk itu, tumpulalah dukungan yang bisa mereka berikan. Jangan menganggap remeh sumbangan mereka yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Buatlah mereka bangga atas apa bisa mereka sumbangkan. Mengabaikan apa yang mereka miliki berarti menjadikan pendamping sebagai sentral pembangunan. Segala kegagalan menjadi tanggung jawab pendamping. Mengabaikan kepemilikan mereka berarti juga menempatkan mereka menjadi pemanfaat atau obyek dari kegiatan pemberdayaan.

2. Berlatih dalam kelompok

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendekatan individu dan/atau melalui pendekatan kelompok. Pendekatan individu dilakukan karena masalahnya sangat individual atau tidak dialami banyak orang, atau untuk tujuan lebih fokus. Sementara pendekatan kelompok dilakukan berdasarkan persoalan yang dialami dan dirasakan banyak orang, atau karena pendekatan ini dipandang lebih efektif. Dalam pendekatan kelompok untuk pelaku usaha, anggota diperlakukan sebagai individu, namun memperoleh fasilitas pendampingan dan permodalan melalui kelompok. Dalam kelompok pula mereka akan berproses dan dengan sendirinya terjadi proses pembelajaran untuk pengembangan usahanya.

Menurut Bambang Ismawan dan Kartjono (1985), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan wadah proses pembelajaran di antara anggotanya. Pendekatan kelompok untuk pengembangan usaha mikro pada masyarakat marjinal dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan individu. Karena kelompok dapat menjadi media atau sarana pembelajaran, berinteraksi untuk saling berbagi pengalaman, meningkatkan kepercayaan diri dan mitra usaha, serta sarana memupuk dan mengakses sumber modal. Pendekatan kelompok sering digunakan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, terutama yang dikaitkan dengan penyaluran kredit. Contohnya kredit untuk kelompok petani dan nelayan kecil (P4K) dan Kredit Taskin Agribisnis dari Departemen Pertanian, kredit Modal Awal Padanan (MAP) dan kompensasi dana BBM dari Kementerian Koperasi, Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra) dan Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) dari BKKBN, Kredit Pemberdayaan Koperasi dan LKM dari Pemda Kabupaten Bengkulu Utara, serta program kredit dari beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pelatihan dalam kelompok juga mempertimbangkan efisiensi dan keterbatasan kemampuan rentang kendali yang dimiliki oleh pendamping (Najiyati *et al*, 2003). Tidak mungkin pendamping melakukan pendampingan secara keseluruhan atau per individu. Sebaliknya, tidak

mungkin pula pendamping melakukan bimbingan secara massal sekaligus dalam satu desa. Dilihat dari sisi masyarakat, pendampingan massal juga kurang efektif dalam meningkatkan ketrampilan dibanding dengan pendampingan kelompok yang lebih kecil.

Di dalam kelompok, masyarakat akan berlatih berorganisasi, mengenali peluang dan kendala usaha, teknis dan manajemen usaha, serta berlatih melakukan konservasi lahan. Mereka juga akan berlatih mengakses lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun non bank untuk memperoleh dukungan permodalan bagi anggotanya. Pada perkembangan lebih lanjut, KSM diharapkan mampu mengembangkan fungsinya sebagai lembaga yang mampu melayani anggotanya termasuk dalam hal kebutuhan permodalan. Bahkan, jika memungkinkan dapat pula melayani masyarakat sekitarnya. Pada titik tersebut, KSM yang benar-benar berdaya dapat menjelma menjadi bentuk-bentuk LKM seperti koperasi.

Apabila ketrampilan teknis usaha masyarakat yang perlu dikembangkan tidak dikuasai oleh pendamping, maka kelompok akan diarahkan untuk mengakses sumber daya lain, seperti menghubungi instansi teknis atau tenaga ahli yang lebih kompeten dalam rangka memperoleh bimbingan. Dalam hal ini, masyarakat juga berlatih untuk mengakses sumberdaya yang dapat memberikan bimbingan atau pelatihan yang diperlukan.

3. Pembelajaran dengan metode pendampingan kelompok

Bagi masyarakat pedesaan, sistem pelatihan model lama yang standar, formal, dan dilaksanakan dalam waktu yang terbatas terbukti kurang mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat. Di sisi lain, pendampingan yang hanya menempatkan pendampingnya sebagai fasilitator saja dinilai kurang memadai, karena masyarakat biasanya masih memerlukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Model pelatihan yang ditawarkan adalah pelatihan dengan metode pendampingan kelompok (Najiyati *et al* 2003). Model ini merupakan perpaduan antara faktor pelatihan, pendampingan, dan dinamika kelompok.

Metode pelatihan alternatif tersebut mempunyai perbedaan yang jelas dibandingkan dengan pelatihan model konvensional.

Dalam model konvensional, pelatihan dipersepsikan sebagai “*training*” dengan materi tertentu sesuai standar yang telah dibakukan, dilakukan dalam jangka waktu tertentu, terbatas dan formal, dilakukan secara individu (*individual-based training*), dan umumnya berorientasi pada penambahan pengetahuan. Penelusuran kebutuhan pelatihan (*training need assessment*) dilakukan pada tahap tertentu dengan waktu terbatas dan dilakukan oleh petugas selain *trainer*. Sumber informasi dalam pelatihan model ini biasanya adalah *trainer* yang datang dari luar beberapa saat sebelum dilakukannya pelatihan. Dalam model ini, pelatihan dan pendampingan merupakan kegiatan yang terpisah dan selalu bergantung pada program pemerintah atau lembaga dana, khususnya dalam hal pembiayaan.

Dalam model pendampingan kelompok, pelatihan lebih dipahami sebagai sarana peningkatan kapasitas, kompetensi, motivasi, dan kesadaran. Didalamnya tercakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan sesuai kebutuhan riil masyarakat. *Training need assessment* dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kemampuan dan aspirasi masyarakat. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus dan berkelanjutan, dilakukan di lokasi, dalam kelompok, dan tidak formal. Pelatihan ini dipandu oleh pendamping yang tinggal di lokasi bersama masyarakat. Sumber informasi dalam pelatihan adalah berbagai pihak yang relevan dan kompeten, antara lain pendamping, instansi teknis di lingkungan pemerintah, lembaga-lembaga pengembang keswadayaan masyarakat, mitra usaha, dan masyarakat itu sendiri.

Tabel 2. Perbedaan model pelatihan konvensional dan model pendampingan kelompok (Najiyati *et al*, 2003)

Model Konvensional	Model Pendampingan Kelompok
Penelusuran kebutuhan pelatihan dilakukan dalam waktu terbatas dan pada tahap tertentu.	Penelusuran kebutuhan pelatihan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kemampuan dan aspirasi masyarakat.
Pelatihan dipersepsikan sebagai <i>training</i> , pemberian informasi satu arah	Pelatihan lebih dipahami sebagai peningkatan kapasitas (<i>capacity building</i>) yang terdiri dari berbagai kegiatan
Jangka waktu pelatihan terbatas dan tertentu	Pelatihan merupakan proses terus menerus (<i>on going process</i>)
Materi pelatihan sesuai standar pemerintah/paket	Materi pelatihan sesuai kebutuhan riil masyarakat (need assessment)
<i>Individual-based training</i>	<i>Group-based training</i>
<i>Trainer</i> datang dari luar dan pada saat pelatihan saja	<i>Trainer</i> hidup bersama masyarakat masyarakat
Peranan <i>trainer</i> mengajar	Peranan <i>trainer</i> memandu dan memfasilitasi (fasilitator)
Sumber informasi adalah <i>trainer</i> dan lembaga pemerintah (di luar masyarakat)	Sumber informasi dari berbagai pihak yang relevan dan kompeten termasuk warga masyarakat sendiri
Kedudukan masyarakat sebagai penerima pesan dan pengguna	Masyarakat sebagai subjek belajar yang aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajar
Format pelatihan formal	Format pelatihan informal
<i>Knowledge/skill based</i>	<i>Competence based</i>
Pelatihan dan pengembangan masyarakat masyarakat adalah kegiatan yang terpisah	Pelatihan dan pengembangan masyarakat masyarakat adalah satu pendekatan menyeluruh

Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah diimplementasikan oleh Departemen Pertanian melalui Proyek P4K, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), Bina Swadaya, PINBUK, WI-IP, dan banyak LSM lainnya.

4. Pelatihan khusus

Sebagian masyarakat tertarik dan memiliki potensi untuk mengisi lapangan kerja spesifik pada bidang usaha yang ramah lingkungan seperti pemandu wisata, perajin anyaman, perbengkelan, penjahit, anggota pemadam kebakaran, dan pengolahan hasil tanaman. Keterbatasan keterampilan teknis dan manajemen masyarakat di lahan gambut sering menyebabkan mereka tidak mampu mengisi lapangan kerja tersebut. Di sisi lain, pendamping umumnya tidak menguasai keterampilan tersebut sehingga tidak dapat diharapkan bantuannya. Meningkatkan keterampilan pendamping di bidang tersebut agar dapat mentransfernya kepada masyarakat juga tidak efisien karena jumlah tenaga kerja yang diperlukan di bidang usaha semacam ini tidak banyak.

Solusinya adalah dengan mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Pelatihan dapat dilakukan langsung oleh lembaga pemberdayaan dengan merekrut masyarakat yang berpotensi dan berminat dari beberapa desa. Alternatif lainnya, pendamping dapat melakukan mediasi antara masyarakat dengan instansi terkait yang memiliki program pelatihan seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Perindustrian.



Gambar 7. *Produk lahan gambut (misal purun, rotan dan pandan) memberi alternatif usaha bagi masyarakat. Bahan baku, rumput purun (kiri) dapat dijadikan tikar lampit dan rotan/pandan dijadikan keranjang (Dokumentasi oleh: Alue Dohong (kiri); Marcel J. Silvius (kanan))*

5. Mengangkat kearifan budaya lokal

Para perencana pembangunan sering beranggapan bahwa norma-norma yang berkembang dalam masyarakat kurang mampu mendukung kemajuan. Untuk mempercepat perkembangan masyarakat, seluruh norma tersebut harus diganti dengan norma baru yang lebih modern. Mereka melupakan kearifan budaya lokal (*indigenous wisdom*) yang telah berkembang selaras dengan kondisi lingkungan setempat selama bertahun-tahun.

Sebagai contoh, dalam ritual upacara sebelum membuka lahan atau akan menanam terdapat ungkapan puja dan puji kepada Tuhan agar tanamannya bisa subur dan menghasilkan panen yang banyak. Dalam ritual tersebut terkandung nilai dan sikap luhur untuk tidak merusak alam yang telah memberikan kekayaan pada mereka. Di dalam kearifan lokal juga terdapat ikatan-ikatan atau kelompok tradisional di masyarakat yang telah diakui sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Contohnya dewan masyarakat adat atau sesepuh desa.

Norma-norma yang merupakan kearifan budaya lokal ini perlu dipertahankan. Jika memungkinkan budaya semacam ini dapat dimanfaatkan sebagai media atau pintu masuk bagi program-program pemberdayaan masyarakat.

6. Bantuan sarana

Untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaannya, seringkali diperlukan pemberian bantuan berupa sarana seperti modal stimulan dan sarana konservasi lahan. Diperlukan strategi khusus agar pemberian bantuan dalam bentuk sarana semacam ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mampu mendorong proses pemberdayaan.

a. *Bantuan modal stimulan*

Dalam konsep pemberdayaan, orang miskin dipandang sebagai subyek yang memiliki kemampuan meskipun serba sedikit. Mereka bukanlah “*the have not*”, melainkan “*the have little*”. Apabila pemberdayaan dalam bidang ekonomi hanya mengandalkan

kemampuan mereka yang serba sedikit, maka program akan berjalan lambat. Bisa saja mereka diorganisir dalam kelompok untuk melakukan pemupukan modal dengan cara menabung, yang selanjutnya dijadikan modal usaha dan dipinjamkan dengan model dana bergulir (*revolving fund*). Namun, prosesnya akan lambat. Untuk mempercepat proses pengembangan modal, maka diberikanlah modal stimulan dengan harapan percepatan pengembangan usaha. Perlu diingat pula, bahwa pemberian stimulan hanya mungkin dilakukan apabila mereka sudah memulai usaha dan tampak perkembangannya. Apabila stimulan diberikan melalui kelompok, maka kelembagaan di tingkat kelompok harus sudah mulai kuat. Indikatornya antara lain pengurus sudah berfungsi, kegiatan berjalan baik, pemupukan modal swadaya telah berjalan, administrasinya teratur dan transparan, serta keberadaan kelompok betul-betul dirasakan manfaatnya oleh anggota.

b. Bantuan konservasi lahan

Masyarakat di lahan gambut terutama petani sering tidak berdaya menghadapi marginalnya lahan gambut. Banjir di musim hujan, kekeringan dan kebakaran di musim kemarau, menurunnya kesuburan lahan; merupakan beberapa fenomena yang sering membuat petani putus asa. Pengadaan sarana secara swadaya murni seringkali berada di luar jangkauan kemampuan masyarakat. Bantuan berupa sarana konservasi lahan yang dapat mencegah banjir di musim hujan, mencegah kekeringan dan kebakaran di musim kemarau, atau meningkatkan kualitas lahan; sangat membantu petani meningkatkan kondisi perekonomiannya. Berbagai sarana yang sering dibangun antara lain tabat atau bendungan sebagai sarana pengatur tata air untuk mencegah banjir dan kekeringan, bantuan bibit tanaman tahunan, dan pengadaan sarana pemadam kebakaran.

Pemberian bantuan sarana konservasi lahan sebagaimana tersebut di atas, seringkali gagal apabila proses perencanaan dan pelaksanaannya kurang melibatkan masyarakat. Keterlibatan penuh masyarakat diperlukan dari sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Kontribusi masyarakat dalam bentuk

pemikiran, tenaga kerja, dan biaya akan membuat masyarakat merasa memiliki, membutuhkan, dan akhirnya akan memanfaatkan dan memelihara sarana tersebut meskipun kegiatan pemberdayaan sudah berakhir.



Gambar 8. Penabatan saluran di lahan gambut oleh masyarakat di Sumatera Selatan untuk mencegah kebakaran lahan di sekitarnya (Dokumentasi oleh: Ferry Hasudungan, 2004)

7. Dilaksanakan secara bertahap

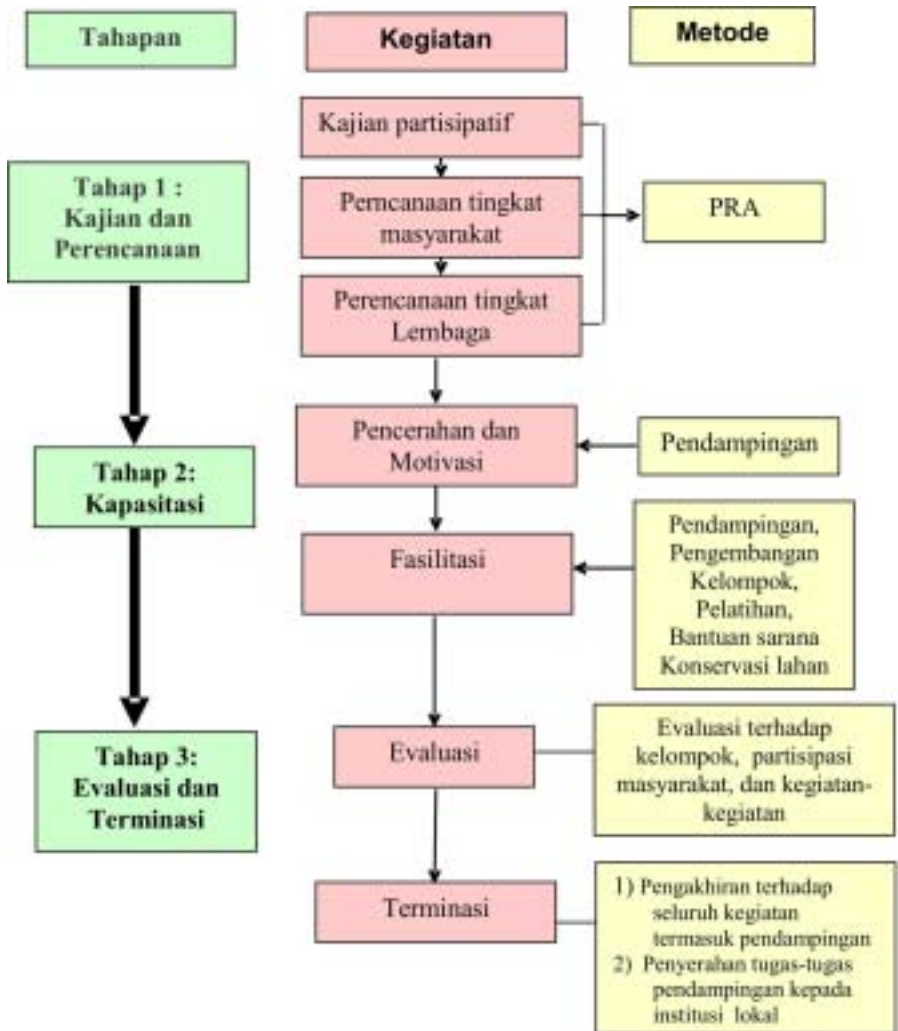
Para perencana pembangunan sering beranggapan bahwa untuk memperoleh hasil yang cepat, perlu dilakukan perubahan norma-norma secara drastis agar masyarakat mampu berkembang secara cepat. Anggapan ini keliru. Siapapun yang merasa terpenggil dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bisa belajar menyesuaikan dengan irama atau dinamika kehidupan masyarakat. Pendamping tidak bisa bertindak sesuai dengan irama atau pola pikirnya sendiri. Sekalipun hidup di daerah terpencil, masyarakat memiliki norma-norma yang sudah berlaku turun-temurun. Sebagian dari norma-norma tersebut dapat berubah cepat, sebagian lainnya secara gradual, dan sebagian lain telah mengurat-akar (*persisten*) sehingga sulit mengalami perubahan (Danarti *et al*, 2004). Norma dalam masing-masing kelompok atau komunitas berbeda antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya, masyarakat pendatang relatif lebih cepat dalam melakukan penyesuaian terhadap hal-hal baru, sehingga sangat mudah menerima perubahan. Sementara masyarakat setempat relatif lambat dalam menerima perubahan.

Pemberdayaan untuk mengubah norma kelompok secara cepat, biasanya dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan sarana yang dibutuhkan. Sedangkan pemberdayaan untuk mengubah norma secara gradual, perlu didahului dengan kesadaran dan motivasi. Meskipun demikian, waktu yang diperlukan untuk periode kesadaran dan motivasi relatif singkat.

Pemberdayaan untuk mengubah norma dalam kelompok yang persisten (sulit berubah) harus dilakukan melalui kesadaran dan motivasi dalam waktu yang relatif lama. Jika norma dalam kelompok ini “dipaksakan” untuk berubah secara cepat, pemberdayaan akan mengalami hambatan yang dapat berakibat pada kegagalan. Kegagalan semacam itu ditandai oleh beberapa indikasi. Contohnya, ketegangan antara pendamping dengan masyarakat karena pendamping terlalu berorientasi pada target, sementara perkembangan masyarakat berjalan sesuai proses yang dinamis. Tidak dimanfaatkannya sarana yang dibangun atau tidak efektifnya kegiatan kelompok yang dibentuk selepas pendamping meninggalkan lokasi juga merupakan indikator dari kegagalan pendampingan yang sering terjadi.

Mata pencaharian dan kebiasaan merusak atau melakukan konservasi lahan bagi komunitas tertentu, barangkali termasuk norma-norma yang dapat mengalami perubahan secara gradual. Demikian pula kebiasaan masyarakat untuk mengakumulasi modal atau menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Tapi, bagi masyarakat lainnya, hal semacam itu mungkin termasuk norma yang sulit mengalami perubahan. Sebagai contoh, sulit sekali untuk membudayakan tabungan dalam komunitas masyarakat yang merasakan bahwa memperoleh uang itu mudah. Hal ini dapat dilihat di lokasi-lokasi perusahaan penebangan kayu atau pertambangan. Disana terdapat berbagai fasilitas atau sarana untuk “menghabiskan” uang. Namun, bagi masyarakat yang sulit sekali memperoleh uang, tidak akan mudah untuk mengeluarkan uang, lebih-lebih untuk hal-hal yang tidak produktif. Oleh sebab itu, pada tahap animasi (kesadaran, pencerahan), setiap pendamping harus mempelajari norma dan karakter masyarakat yang akan didampingi agar tidak terjadi benturan dengan masyarakat.

Memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap (lihat Bagan Alir). *Pertama*, tahap kajian dan perencanaan. *Kedua*, tahap implementasi atau sering pula disebut “kapasitas”. Tahap kapasitas biasanya dilakukan dengan metode pendampingan yang secara garis besar meliputi tahap animasi dan fasilitasi. *Ketiga*, tahap akhir kegiatan, yaitu tahap evaluasi dan terminasi (penghapusan diri).



Gambar 9. Bagan alir tahapan pemberdayaan

D. BIAS ORANG LUAR DALAM MEMAHAMI KONDISI FAKTUAL MASYARAKAT

Ketika seorang pendamping atau fasilitator tinggal bersama masyarakat di sebuah lokasi, apakah dengan serta merta ia menjadi bagian dari masyarakat itu? jawabnya “ya” dan “tidak”. “Ya” dalam pengetahuan bahwa apa yang dialami oleh masyarakat akan pula dialami oleh pendamping. Misalnya, saat musim kemarau, pendamping dan masyarakat menghadapi kesulitan yang sama, yaitu sulit mencari air. Namun, kondisi yang sama itu memiliki dampak berbeda. Untuk menghadapi kekeringan tersebut, petani dan masyarakat duduk bersama dan membicarakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

Dari perspektif petani, diundang dalam sebuah pertemuan sama artinya dengan meninggalkan pekerjaan dan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Sementara pendamping justru memperoleh kompensasi ekonomis karena menerima imbalan (dari lembaganya) atas terselenggaranya pertemuan itu. Inilah yang menjadi alasan bahwa bagaimanapun juga, pendamping adalah “orang luar” bagi komunitas yang didampinginya. “Orang luar” adalah individu yang mewakili pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan. Kebanyakan dari mereka bukan dan tidak merasakan kemiskinan sebagaimana dialami oleh masyarakat yang didampingi. Selain pendamping, yang dikategorikan sebagai “orang luar” antara lain para peneliti, pengusaha, konsultan, aparat pemerintah, pekerja LSM, serta kelompok-kelompok profesi lainnya.

Sebagai orang luar, pendamping sering terjebak dalam “bias”. Mereka mengalami bias apabila memiliki prasangka atau asumsi tertentu yang sedemikian kuat sehingga menjadi sebuah “kebenaran” dalam perspektifnya. Hal seperti ini sedapat mungkin harus dihindari, agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai sesuai sasaran. Beberapa macam bias yang bisa terjadi sebagai berikut (Chambers, 1997):

1. Bias ruang

Karena berbagai alasan seperti jalanan rusak atau berlumpur, kenyamanan tempat tinggal, fasilitas penginapan, biaya transportasi, waktu dan sebagainya; banyak kegiatan penelitian atau pemberdayaan memilih lokasi yang mudah dijangkau. Akibatnya muncul bias yang mendahulukan

lokasi strategis seperti perkotaan, pinggir jalan utama, dan dekat darmaga. Padahal, realitanya sebagian besar masyarakat miskin bertempat tinggal jauh dari ruas jalan raya.

2. Bias proyek

Kegiatan pemberdayaan sering dilakukan di daerah-daerah yang telah tersentuh atau barangkali akan tersentuh oleh proyek. Padahal kondisi masyarakat yang telah tersentuh oleh proyek sering tidak mencerminkan kondisi asli sebagaimana saat mereka belum memperoleh fasilitas dan interaksi dengan orang luar. Warga yang sudah terbiasa dengan proyek bantuan, semakin “siap” dalam menerima kunjungan maupun menyediakan jawaban yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka.

Bias proyek juga kerap mengakibatkan dilema antara target proyek yang harus selesai dalam jangka waktu tertentu dengan implementasi strategi pemberdayaan yang memerlukan waktu relatif lama.

3. Bias kepentingan

Tak jarang pendamping dihadapkan pada 2 kepentingan yang saling berseberangan, yaitu kepentingan instansi (lembaga yang memberi tugas mendampingi atau memfasilitasi) dan kepentingan masyarakat. Jika terjebak dalam situasi demikian, pendamping sering kali lebih memilih mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan masyarakat.

4. Bias belas kasihan

Pendamping juga sering terjebak pada rasa belas kasihan kepada orang miskin. Ia cenderung memberikan bantuan secara karitatif (*charity*) seperti yang dikehendaki masyarakat tanpa memperhatikan kesiapan sang penerima bantuan. Ujung-ujungnya, bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat tidak berkembang karena digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif (meskipun pada awalnya direncanakan untuk kegiatan produktif). Mulailah dari apa yang mereka punya, gali potensi dan kemampuannya sekecil apapun.

5. Bias kelompok sasaran

Kemanakah masyarakat miskin ketika peninjau, peneliti, atau lembaga pemberdayaan masyarakat datang berkunjung? Biasanya mereka tidak termasuk rombongan penyambut. Mereka menyembunyikan diri atau asyik bekerja memenuhi kebutuhan. Sementara para penyambut rombongan adalah mereka yang biasanya mempunyai kedudukan, mapan dalam satus sosial ekonomi, dan bisa berbahasa Indonesia sehingga kepercayaan dirinya besar. Umumnya kelompok seperti ini yang justru menjadi sasaran pemberdayaan, dengan alasan mudah diajak kompromi dan berkomunikasi.

Para peninjau pun tak terlepas dari bias kelompok sasaran dalam bentuk yang lain. Misalnya, mendahulukan kaum laki-laki daripada perempuan, mendahulukan yang sehat daripada yang sakit, mendahulukan para penerima gagasan baru daripada yang menolak, atau mendahulukan kelompok yang aktif dan hidup.

6. Bias musim

Peneliti dan pendamping sering memilih waktu musim kemarau untuk mengumpulkan data. Padahal pada musim kemarau, umumnya panen baru selesai dan pesta baru diselenggarakan. Sedangkan pada musim penghujan, musim dimana peneliti dan fasilitator enggan datang, justru sering lebih menggambarkan keadaan kemiskinan masyarakat. Ini terlihat dari kondisi banjir, terputusnya jalur komunikasi dan transportasi, bibit tanaman banyak yang mati, dan sebagainya.



***Gambar 10.** Suasana banjir di desa lahan gambut Sungai Aur, Jambi. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam program pemberdayaan (Dokumentasi oleh: Indra Arinal, 2004)*

7. Bias diplomatis

Pada proses penelitian dan pendampingan, para peneliti dan pendamping lebih banyak mengutamakan perasaan nyaman, tidak menyinggung, sopan santun, dan malu-malu daripada mengemukakan pendapat yang sebenarnya.

8. Bias profesi

Para peneliti mengukur dan memahami permasalahan berdasar kriteria yang mereka tetapkan sebagai standar keilmuan yang dimiliki dari pada menangkap kenyataan faktual, sekalipun itu berada di luar keilmuannya.

Kotak 9

Banjir di hari raya qurban (sebuah renungan)

Sehari menjelang Hari Raya Qurban, Hari Raya Idul Adha 1425 H. suasana Jakarta mendung. Dan seperti biasa, seperti yang terjadi tiap tahun di Ibu Kota, hari ini Jakarta banjir di beberapa tempat. Menyaksikan tayangan TV tentang ribuan warga yang terpaksa mengungsi, sewaktu makan siang di atas gedung bertingkat yang tentunya bebas banjir, penulis teringat kejadian banjir di Jambi pada awal tahun 2004 yang lalu dimana penulis terlibat secara fisik dan emosional dengan masyarakat di beberapa desa di sana dalam menghadapi banjir yang berlangsung berbulan-bulan lamanya. Dan bagaimana hubungannya banjir ini dengan Hari Raya Qurban?

Ditengah dinginnya mendung di siang hari, tiba-tiba ada SMS masuk dari Jambi mengucapkan selamat Idul Adha 1425 H. Karena pada suasana banjir di Jakarta, penulis membalas SMS tersebut sambil menanyakan bagaimana khabar di Jambi saat ini, apakah banjir pula? Dan di Jawab, "betul beberapa desa di sini sudah mulai tergenang dan jeruk yang dibeli mereka kemaren ini sudah tergenang pula, sungguh teriris hati melihatnya". Kata-kata tersebut datang dari seorang mantan implementor/pendamping program pemberdayaan masyarakat di desa-desa pinggir hutan di Jambi.

Dalam konteks ini paling tidak ada dua hal yang terbayang bagi penulis yakni masyarakat desa dengan banjir dan besok adalah Hari Raya Qurban berarti sudah setahun berlalu banjir besar melanda sebagian wilayah di Provinsi Jambi tahun lalu (2003/04).

Kotak 9 (Lanjutan)

Dalam hal konteks pertama, masyarakat desa. Sepintas lalu orang melihat tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi di desa-desa di pinggir hutan. Semua orang bekerja dan berusaha sebagaimana layaknya masyarakat agraris. Hari-hari mereka habiskan di sawah dan ladang mungkin juga sebagian mereka ada yang mengurus kandang ayam, kandang itik atau kandang kambing. Tentu ada juga beberapa orang yang bekerja di hutan mencari kayu atau apa saja yang dapat diambil di hutan untuk penyambung hidupnya.

Dihitung secara matematis dari apa yang mereka usahakan seharusnya cukup untuk hidup sederhana, menyekolahkan anak dan membangun rumah serta membeli alat-alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi dalam kenyataannya bukanlah demikian. Mereka hidup sehari-hari dalam serba kekurangan. Orang menyebutnya hidup pada garis kemiskinan. Oleh sebab itu diadakanlah program pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat mengentas kemiskinan tersebut. Program pun dijalankan, tetapi hasilnya sulit untuk bertahan lama.

Penulis pernah merenung apa yang meyebabkan semua yang diupayakan masyarakat dalam bertani seolah-olah tidak meninggalkan jejaknya? Adakah sesuatu yang tidak terlihat yang menelan semua hasil bumi penduduk? Kalau menurut dongeng nenek di waktu kecil dulu konon ada seekor garuda raksasa, kalau dia bangun dari tidurnya dan menelan semua yang ada di kampung: termasuk padi, terung dan anak-anak kecil yang bandel. Aneh! kenapa penulis ingat akan dongeng itu.

Setelah kejadian banjir tahun lalu baru lah penulis sadar bahwa memang ada sesuatu yang menyebabkan daya upaya masyarakat seolah-olah tidak berarti apa-apa, ternyata bukan garuda di udara yang bangun tidur, tetapi banjir yang 'terbangun' dan terusik dari tidur nyenyaknya yang menelan semua jerih payah masyarakat.

Seperti biasa tidak ada orang yang mau secara voluntr dan sportif mengakui penyebab datangnya banjir tersebut. Sehingga diciptakanlah mitos bahwa banjir ini siklus tahunan kalau tidak 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun bahkan kalau banjirnya sangat luar biasa dicari-cari sejarah masa lalu sehingga ditemukan lah bahwa ini siklus 50 tahunan. Sungguh mengherankan kenapa kita tiba-tiba tertarik untuk mempelajari sejarah.

Kalau banjir itu datangnya sekali dalam beberapa tahun mungkin ini siklus yang berasal dari 'langit' tentunya diluar kemampuan manusia mengatasinya, jadi wajar! Tetapi kalau datangnya tiap tahun, dan bahkan dalam tahun kemaren ini terjadi tiga kali dalam setahun dan itu berlangsung berbulan-bulan siklus apa pula yang akan dipersalahkan?

Kotak 9 (Lanjutan)

Banjir telah menelan apa-apa yang diupayakan anak negeri. Dengan maksud tidak akan membandingkan dengan Tsunami yang terjadi di Nanggro Aceh Darusalam dan Sumatera Utara, banjir telah menelan apa saja yang diupayakan dengan susah payah oleh masyarakat dengan cara:

Pertama, secara langsung banjir menghanyutkan semua isi sawah dan ladang, bahkan ternak-ternak yang tidak sempat mengungsi bersama pemiliknya. Pada hal modal untuk sawah, ladang dan ternak-ternak tersebut adalah sebagian dari hasil jerih payah petani di musim sebelumnya yang sengaja disisihkan. Hasil dari usaha berbulan-bulan habis seketika.

Kedua, karena selama musim banjir tersebut mereka tidak bisa bekerja, terpaksa mereka memakai tabungan (kalau ada) untuk makan sehari-hari. Tabungan tersebut tidak hanya berupa uang, (mungkin sebagian besar petani belum ada yang menabung dalam bentuk uang) lebih banyak berupa padi, jagung kacang-kacangan yang disimpan yang sesungguhnya ini adalah juga merupakan modal benih buat mereka saat musim tanam berikutnya tiba.

Ketiga, untuk memulai kembali usaha pertanian dan untuk memperbaiki sawah, ladang bahkan rumah yang rusak, petani memerlukan sejumlah modal baru.

Dari tiga masalah tersebut di atas saja sudah membuat masyarakat tidak berdaya. Setiap mereka bangun pukulan tiba berulang-ulang. Banjir telah menyebabkan orang selalu kembali ke titik nol bahkan bagi sebagian besar masyarakat jatuh sampai kebawah titik nol.

Setiap kejadian ini berlangsung menghasilkan sejumlah orang yang tidak mampu bertahan, pindah meninggalkan kampung dan pergi ke kota atau ke luar negeri (menjadi TKW?). Ini lah yang akan menjadi tenaga kerja murahan kurang pengetahuan dan keterampilan. Dan ini pula lah yang selalu dijadikan alasan untuk mengundang investor membuka lapangan pekerjaan.

Kembali kepada program pemberdayaan, menghilangkan penyebab orang tidak berdaya sama nilainya dengan pengembangan alternatif usahabaru. Karena itu, membuat keputusan yang tidak menyebabkan terjadinya banjir tidak kalah penting nilainya dari pada mengatasi banjir itu sendiri dan membuat berbagai kegiatan untuk mengatasi dampak banjir, hanya saja perlu pengorbanan.

Kotak 9 (Lanjutan)

Inilah yang terbayang bagi penulis dalam hal banjir dan relevansinya dengan hari raya qorban. Akan sangat berat bagi siapa saja, baik dari kalangan pemerintah maupun kalangan swasta, untuk mengambil keputusan yang menyebabkan 'kepentingannya' terganggu dan kalau pun ada yang kuat dan mampu berbuat demikian pasti akan ditentang oleh banyak orang yang 'kepentingannya' terganggu pula. Hanya orang yang mempunyai ketaqwaan dan semangat berkorban kuatlah yang mampu untuk itu.

Hari ini kita berkorban binatang ternak karena Tuhan telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing, ini pertanda bahwa jangan ada lagi diantara umat manusia yang satu mengorbankan yang lainnya demi sebuah gagasan dan keinginan. Tidak ada lagi yang lemah terpaksa berkorban untuk yang kuat. Sebaliknya, yang mampulah berkorban untuk yang kurang mampu. Dengan semangat itu pula mari kita merenung sejenak untuk beberpa hal berikut ini:

Pertama, diantara begitu banyak bencana yang melanda negeri ini, berapa yang disebabkan oleh kesalahan kita yang selama ini kita tutup-tutupi dengan berbagai alasan?


Kedua, tidakkah lebih tinggi dan agung nilai pengorbanan untuk tidak mengambil keputusan yang menyebabkan penderitaan orang banyak dibandingkan dengan berkorban seekor kambing bahkan dengan berkorban seekor sapi?

Ketiga, belum tibakah saatnya untuk kita melihat dan mempelajari dengan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi di depan mata kita dan berhenti membuat rekayasa-rekayasa untuk berbagai alasan? Dan patut juga direnungkan bahwa bagi orang-orang yang terkena bencana tidak perlu berkecil hati, bersabarlah dan terus berusaha mudah-mudahan dengan kesabaran dan ketaqwaannya Tuhan Yang Maha Pengatur akan menjadikan kesabaran itu sebagai Qorban. Sebagai pengganti seekor kambing yang memang tidak mampu untuk dibeli.


Ditulis oleh : Indra Arinal, dalam WKLB Vol 13 no. 1 edisi Januari 2005.

Bab 5

Mengkaji dan Menyusun Rencana Secara Partisipatif



Bab ini memuat kajian dan penyusunan rencana secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA dan metode penyusunan rencana yang berorientasi hasil. Pengkajian dan penyusunan rencana tersebut biasanya digunakan untuk mengawali proses pemberdayaan masyarakat.



Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun serba sedikit (Verhagen, 1996). Sebagai subyek, masyarakat harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun, karena kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian dan perencanaan masih serba sedikit, mereka harus dibantu, didorong, didampingi, dan ditingkatkan kemampuannya agar lebih mampu menganalisis dan mengenali kebutuhan-kebutuhannya. Dalam banyak kasus, patut diakui bahwa masyarakat acapkali belum dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dengan demikian, proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rencana dapat berjalan lancar dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian dan penyusunan rencana bersama masyarakat merupakan langkah awal dalam melakukan pemberdayaan. Banyak metode dan teknik yang dapat digunakan. Yang akan diuraikan dalam bagian-bagian berikut adalah metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini sudah teruji dan banyak diterapkan oleh praktisi pemberdayaan. Sebagai tambahan, sekilas akan disajikan pula mengenai metode *Participatory Wealth Ranking* (PWR) sebagai salah satu pengembangan metode PRA, serta metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA). Dalam bab ini juga disajikan tentang metode perencanaan partisipatif yang berorientasi hasil.

A. DASAR PERTIMBANGAN

Perencanaan secara partisipatif dilatarbelakangi oleh gagal dan terbengkalainya sebagian besar program pembangunan masyarakat yang perencanaannya dilakukan secara *top down*. Melalui perencanaan dari atas, terbukti partisipasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan menjadi sangat rendah. Mereka tidak merasa memiliki sehingga merasa tidak perlu bertanggung jawab. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan swadaya yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan oleh masyarakat justru jarang terbengkalai.

Berikut beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pentingnya kajian dan perencanaan partisipatif:

1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungannya, karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berada di lingkungannya. Meskipun sering belum menyadari dan belum mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut, tetapi dengan didampingi oleh fasilitator, mereka terbukti akan mampu mengenalinya.
2. Masyarakat memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki, meskipun belum mampu mengidentifikasinya secara eksplisit. Melalui pendampingan, mereka akan mampu mengidentifikasi kemampuan tersebut secara jelas dan tepat sesuai kemampuannya.

3. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam memilih arah serta melaksanakan kegiatan pembangunan yang menyangkut dirinya dan lingkungannya.
4. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek, masyarakat menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan.
5. Masyarakat akan lebih merasa bangga dan lebih memiliki, sehingga turut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan pembangunan.

B. KONSEP PRA

PRA pada dasarnya merupakan metode penelitian atau kajian untuk menggali potensi dan permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Kajian ini pertama-tama dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat, serta merumuskan alternatif pengembangan dan solusi permasalahan. Kedua, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ambil bagian dalam proses analisis kondisi, potensi, masalah, dan perencanaan. Ketiga, kajian dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar mampu dan trampil dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan membuat rencana untuk dirinya maupun pembangunan desanya.

Namun satu hal yang sangat mendasar, PRA bukanlah sekadar metode untuk mengkaji atau meneliti saja, meskipun itu dilakukan oleh masyarakat. Mengapa demikian, alasannya dipaparkan dalam beberapa prinsip PRA berikut (Driya Media dan KPDTNT, 1996):

1. Keberpahaman

Fasilitator PRA mengutamakan masyarakat yang terabaikan yaitu mereka yang biasanya tidak “menampakkan” dirinya manakala peninjau datang di desanya.

2. Penguatan masyarakat

PRA memiliki maksud meingkatkan keberdayaan masyarakat, sehingga mereka bisa memiliki akses dan kontrol terhadap dinamika kehidupannya.

3. Masyarakat sebagai pelaku utama

Sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya, fasilitator hanya berperan sebagai “orang luar”, sedangkan masyarakat menjadi “pelaku utama”.

4. Saling belajar dan menghargai perbedaan

Pengakuan akan pengalaman dan pengalaman masyarakat (kearifan lokal) merupakan satu hal yang penting. Masyarakat memiliki posisi yang setara dengan pendamping yang menjadi salah satu anggota tim fasilitator PRA. Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat benar dan dibiarkan tidak berubah.

5. Santai dan informal

Kegiatan PRA diselenggarakan dalam situasi yang informal, luwes atau tidak kaku, terbuka, tidak memaksa, dan santai (relaks). Tujuannya untuk menciptakan keakraban dan tidak ada lagi yang merasa terasing.

6. Triangulasi

Perlu dilakukan triangulasi atau *check and recheck* atas berbagai temuan selama proses PRA berlangsung. Bisa dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam atau observasi lapang.

7. Optimalisasi hasil

Sudah cukupkah informasi yang digali ataukah justru terjadi banjir informasi? Perlu dilakukan optimalisasi informasi, sehingga dapat dirumuskan mana yang benar-benar terkait dengan permasalahan dan isu yang sedang dihadapi bersama.

8. Orientasi praktis

PRA berorientasi praktis, yaitu pengembangan kegiatan. Hasil dari kajian PRA akan menjadi dasar atau pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan langkah atau kegiatan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

9. Keberlanjutan dan selang waktu

Kepentingan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat bukanlah suatu hal yang stagnan. Dinamika dan pergeseran dapat setiap saat terjadi. Oleh sebab itu, PRA tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dapat dan perlu dilakukan kembali pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, teknik-teknik PRA juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program di tingkat masyarakat.

10. Belajar dari kesalahan

Melakukan kekeliruan dalam proses PRA merupakan hal yang lumrah. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Meskipun demikian, PRA perlu dilakukan secara cermat, tidak sekadar coba-coba (*trial and error*), supaya dapat menekan tingkat kesalahan dan memperoleh informasi yang akurat.

11. Terbuka

PRA bukanlah “harga mati”. PRA terbuka terhadap berbagai macam teknik yang berkembang, selama memiliki semangat partisipasi dan pemberdayaan di dalamnya.

C. SIKAP FASILITATOR

Sikap dan perilaku fasilitator sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses PRA. Beberapa sikap yang seharusnya dimiliki dan ditunjukkan oleh fasilitator ketika memandu jalannya PRA sebagai berikut:

1. Bersikap sabar

Masyarakat pada umumnya belum memiliki ketrampilan dalam melakukan pengumpulan, analisis data, dan perencanaan. Mereka baru belajar sehingga proses PRA memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini membutuhkan kesabaran. Fasilitator yang tidak sabar cenderung mengarahkan dan mendominasi pembicaraan agar proses PRA cepat selesai. Jika hal itu terjadi, masyarakat kehilangan kesempatan untuk belajar. Hasil PRA pun biasanya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Menghargai peserta tanpa memihak

Di lapangan, fasilitator akan bertemu dengan berbagai karakter masyarakat. Ada yang banyak bicara dan kritis, merasa lebih pintar, hingga yang enggan dan kurang lancar bicara. Perbedaan pendapat dalam suatu diskusi merupakan sesuatu yang wajar dan perlu. Untuk itu, fasilitator harus bisa menghargai pendapat masyarakat dan tidak memihak. Kepada yang sungkan bicara, fasilitator harus dapat memotivasi agar mereka mau dan mampu mengemukakan pendapatnya.

3. Kreatif dan humoris

Fasilitator harus dapat membawa proses PRA menjadi serius tapi santai, sekaligus menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Apabila diskusi menjadi tidak menarik dan menjenuhkan, fasilitator perlu mengeluarkan jurus-jurus yang dapat membuat peserta kembali segar dan suasana tidak beku lagi. Cerita lucu, permainan kreatif dalam kelompok, bernyanyi bersama, atau olah raga sejenak sering dapat membawa suasana hidup dan mengurangi kejenuhan. Trik-trik ini biasa disebut "*icebreaking*" atau "*energizer*".

Somesh Kumar, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat dari Asia Selatan yang bekerja dalam sebuah program penanggulangan masalah kekeringan, meringkas sikap-sikap yang harus ditampilkan oleh seorang fasilitator dalam 2 singkatan kata, yaitu REAL (Bahasa Inggris yang artinya “nyata”) dan LEARN (berarti “belajar”). Berikut uraian dari singkatan tersebut:

- R : *Respect the people* (hormati masyarakat)
- E : *Encourage the people to share ideas* (dorong masyarakat untuk berbagi gagasan)
- A : *Ask questions* (ajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menggali lebih dalam)
- L : *Listen carefully* (dengarkan dengan penuh perhatian)

- L : *Listen* (mendengarkan)
- E : *Encourage* (mendorong)
- A : *Ask* (bertanya)
- R : *Review* (meninjau ulang)
- N : *Note* (membuat catatan)

D. KETERAMPILAN FASILITATOR

Fasilitator perlu memiliki ketrampilan psikologi sosial agar proses memfasilitasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ketrampilan yang diperlukan antara lain:

1. Metode analisis sosial

Fasilitator perlu memiliki kemampuan menganalisis dan memahami dinamika realitas sosial khususnya hubungan hubungan sosial yang perlu dikembangkan, struktur kemiskinan, ketergantungan dan keterikatan proses-proses sosial pada tingkat mikro dan makro, serta perspektif kemandirian dan partisipasi.

2. Ketrampilan komunikasi dua arah

Fasilitator perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dua arah dengan masyarakat sehingga tercipta atmosfer kesetaraan. Ini akan membuat masyarakat maupun fasilitator merasa nyaman dan tidak canggung dalam berinteraksi.

3. Ketrampilan memfasilitasi

Ketrampilan memfasilitasi merupakan kemampuan membantu masyarakat untuk menangani rintangan praktis dalam mengelola tindakan menuju perubahan. Ketrampilan ini mencakup kemampuan membantu masyarakat dalam menemukan akses terhadap informasi, permodalan, teknis dan manajemen, sumberdaya yang legal, serta membantu hubungan mereka dengan instansi yang relevan.

4. Kemampuan menangani situasi ketegangan dan konflik

Fasilitator sering dihadapkan pada masyarakat heterogen dengan kepentingan yang berbeda. Dari situlah ketegangan-ketegangan acap kali muncul. Mereka yang menolak perubahan atau merasa dirugikan oleh inisiatif mandiri masyarakat, mungkin akan memilih fasilitator sebagai target serangan. Fasilitator perlu memiliki kebijaksanaan dan ketrampilan memadai untuk menangani situasi yang ditanggung oleh kepentingan tertentu yang berpotensi memicu konflik.

E. PERANGKAT PRA

Perangkat PRA merupakan teknik visual yang dapat digunakan sebagai media atau alat untuk melakukan kajian desa. Penggunaan perangkat ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kajian. Beberapa teknik yang sering digunakan antara lain penyusunan kalender musim, pola penggunaan waktu, diagram Venn, pemetaan, dan hubungan input-output. Apabila dikaji lebih jauh, masih banyak teknik-teknik partisipatif yang bisa digolongkan dalam metode PRA seperti teknik penelusuran sejarah desa, teknik kajian kecenderungan dan perubahan,

teknik pembuatan gambar kebun, teknik kajian mata pencaharian desa, teknik wawancara semi terstruktur, teknik bagan alur, dan teknik bagan urutan atau matriks ranking. Tetapi berikut hanya disajikan teknik-teknik yang sering digunakan.

1. Kalender musim

Kalender musim digunakan untuk menggambarkan kondisi, aktivitas, atau kejadian yang berulang dalam daur kehidupan di desa. Sebagai contoh, kalender musim tanam dan musim panen, kalender musim hujan dan kemarau, serta kalender penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun.

Kalender ini disusun antara lain dengan cara membuat tabel yang berisi kolom jenis tanaman dan waktu tanam (lihat Tabel 3). Dari situ dapat diketahui kapan musim tanam dan musim panen, kapan masyarakat memerlukan banyak tenaga kerja dan modal, kapan masyarakat memiliki banyak penghasilan dan tidak. Apabila ada peserta yang buta huruf, pembuatan kalender musiman sebaiknya menggunakan gambar-gambar sehingga dapat dipahami seluruh masyarakat.

Tabel 3. Contoh kalender musim untuk kajian musim tanam Desa Sukatani

Jenis Tanaman	Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Padi	★	★									★	★
Jagung			★	★	★	★						
Kedelai				★	★	★	★					
Kacang Tanah				★	★	★	★					
Ubi kayu		★	★	★	★	★	★	★	★			

Ringkasan diskusi:

- Jika diperlukan, dapat ditambahkan, pada bulan apa saja setiap jenis tanaman menghasilkan kontribusi hasil panen yang besar atau kecil, bulan keberapa terjadi musim kekeringan (paceklik), banjir; kapan waktu yang cocok untuk pemasaran jenis hasil bumi tertentu, dan lain-lain.
- Aspek gender juga dapat ditonjolkan dengan sejauh mana intensitas keterlibatan perempuan dalam proses kerja di sawah pada bulan-bulan tertentu dan seberapa besar porsi peran mereka.

2. Pola penggunaan waktu

Dalam beberapa kasus, pola penggunaan waktu dalam satu hari oleh masyarakat perlu diketahui untuk mengambil keputusan mengenai program apa dan kapan dilaksanakannya. Pada Tabel 4 berikut dipaparkan mengenai pola penggunaan waktu nelayan dalam mencari ikan, dan pola penggunaan waktu pengrajin skala rumah tangga dalam memproduksi bahan setiap hari.

Tabel 4. Pola penggunaan waktu nelayan di TN. Berbak

Kategori	Jam																	21 s/d 4 pagi
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Persiapan	Menangkap ikan					Memasak dan makan		Istirahat									
2	Persiapan	Menangkap ikan					Memasak dan makan		Mencari kayu			Istirahat						
3	Persiapan	Menangkap ikan					Memasak dan makan		Penanaman pohon konservasi			Istirahat						

Teknik ini dapat dimanfaatkan fasilitator untuk mendorong keterlibatan masyarakat lebih dalam lagi tanpa meninggalkan kegiatan sehari-harinya. Dengan kata lain, fasilitator tidak membuat jadwal-jadwal kegiatan pertemuan secara sepihak.

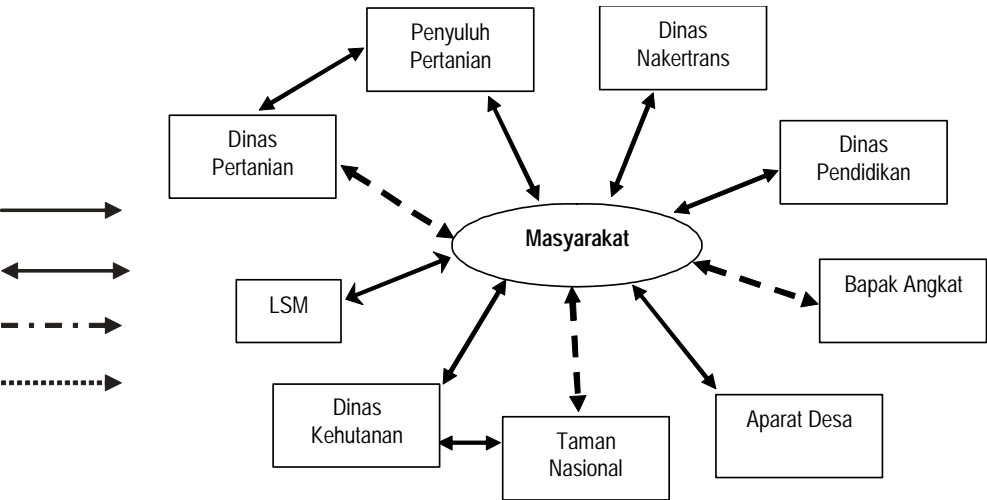
3. Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan)

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat harus mampu memandang pihak-pihak lain sebagai mitra kerjasama dengan prinsip kesetaraan. Mitra kerjasama dalam masyarakat dapat digambarkan dengan menggunakan Diagram Venn (Gambar 11).

Untuk menyusun diagram, hubungan yang serasi perlu dibedakan dengan hubungan yang kurang serasi. Demikian juga hubungan yang sering ataupun jarang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat segera memahami hubungan mana yang perlu diperbaiki.

Simbolisasi dapat dilakukan melalui lambang, ukuran, dan jarak. Kotak atau lingkaran atau apapun bentuknya yang memiliki ukuran besar dapat diartikan memiliki peran atau kontribusi yang besar pula bagi masyarakat. Sedangkan yang letaknya jauh mengindikasikan pihak yang bersangkutan sulit dijangkau dalam dinamika interaksi bersama masyarakat.

Selain mengetahui pihak mana yang punya peran dan kontribusi bagi masyarakat, manfaat Diagram Venn adalah membahas bentuk peningkatan apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan pihak mana yang perlu diprioritaskan untuk dilobi (didekati). Bagi lembaga terkait, teknik ini bisa digunakan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat.



Keterangan :

- : Hubungan searah dan sering
- : Hubungan timbal balik
- : Hubungan kurang serasi
- : Hubungan jarang

Gambar 11. Contoh Diagram Venn

4. Peta potensi

Potensi lokasi biasanya lebih jelas dan mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta. Beberapa peta yang sering digambarkan dalam program pemberdayaan masyarakat antara lain peta sarana dan prasarana desa, peta banjir atau kebakaran, peta penggunaan lahan, peta komoditas unggulan, dan sebagainya. Penyusunan peta biasanya diikuti dengan kunjungan lapang sebagai langkah observasi untuk memastikan kondisi lapang. Untuk menggambarkan sarana atau informasi di dalam peta, digunakan gambar visual untuk memudahkan pemahaman (lihat Gambar 12).



Gambar 12. Contoh peta potensi desa

Proses pemetaan bisa dilakukan di atas tanah atau di halaman rumah yang keras dengan menggunakan kapur. Penyimbolan juga dapat dilakukan. Misalkan untuk lokasi kebun diberi simbol biji kacang tanah, areal persawahan dilambangkan dengan butiran beras, sedangkan hutan dilambangkan dengan daun atau ranting. Usai dikerjakan di atas tanah dengan melibatkan masyarakat, peta yang dihasilkan kemudian dipindahkan ke atas kertas *flipchart* (Gambar 13). Umumnya teknik ini digunakan sebagai pemicu awal pendalaman isu-isu lain di masyarakat.



Gambar 13. Suasana kegiatan pemetaan di lapangan (kiri), lalu dipindahkan ke atas kertas flipchart (kanan). (Dokumentasi oleh: Bina Swadaya dan WI-IP)

5. Transek

Transek adalah teknik penelusuran lokasi untuk mengamati secara langsung keadaan sumberdaya dan lingkungan desa. Arti harfiah dari “transek” adalah bagian potongan atau irisan dari bentang lahan yang disurvei/kaji. Teknik ini dilakukan dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang telah disepakati bersama.

Biasanya, lintasan dipilih sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan perubahan suatu obyek berdasarkan kondisi lingkungan fisiknya. Sebagai contoh, lintasan untuk membuat transek pemanfaatan lahan biasanya mengikuti topografi dari dataran yang lebih rendah sampai ke tinggi atau dari yang dekat sungai ke arah menjauhi sungai atau dari tepi garis pantai menuju darat.

Setelah berjalan menelusuri lintasan dan mencatat hal-hal yang diperlukan, masyarakat diminta untuk membuat bagan transek yang memuat temuan-temuan selama penelusuran lintasan. Selanjutnya bagan tersebut didiskusikan untuk menggali potensi, harapan, permasalahan, dan solusi yang diperlukan.

Transek dapat disusun untuk menggambarkan berbagai situasi (lihat Gambar 14 pada halaman sebelumnya). Jenis-jenis transek yang sering dibuat antara lain:

- a. Transek sumberdaya alam. Biasanya memuat topografi, jenis tanah, ketebalan gambut, kedalaman air tanah, ketinggian banjir, luapan air, pemanfaatan lahan, pola usaha tani, kepemilikan lahan, penerapan teknologi, dan sebagainya.
- b. Transek sarana dan prasarana desa. Biasanya memuat letak perumahan, puskesmas, sekolah, kantor desa, atau fasilitas MCK.

Transek lain untuk tujuan khusus juga dapat dibuat, seperti transek kebakaran lahan, dan transek sebaran hama atau penyakit dan sebagainya.

6. Participatory Wealth Ranking (PWR)

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu prinsip PRA adalah keterbukaan terhadap berbagai teknik baru atau pengembangan lainnya, sepanjang didalamnya terdapat semangat partisipasi dan pemberdayaan. *Participatory Wealth Ranking* (PWR, diterjemahkan sebagai “Pemeringkatan Kesejahteraan (Sosial-Ekonomi) Masyarakat secara Partisipatif” yakni sebuah metode yang merupakan pengembangan dari teknik-teknik PRA sebelumnya. Sebagai sebuah metode, PWR ingin menjawab salah satu permasalahan bias, yakni bias kelompok sasaran, sebagaimana disebutkan dalam sub bab 4.4. Metode ini dirintis oleh SEF (Small Enterprise Foundation), sebuah LSM yang bergerak di bidang keuangan mikro, di Afrika. Secara global, PWR telah dikampanyekan oleh *Microcredit Summit Campaign*, sebuah gerakan keuangan mikro internasional, dan telah diterapkan pula oleh beberapa LSM di Indonesia.

Dalam menentukan kelompok yang menjadi target program pemberdayaan, sering kali sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat atau instansi pemerintah sekalipun, mengalami kesulitan. Sering kali orang yang justru tidak seharusnya menjadi kelompok target pemanfaat program malah menjadi peserta program, sementara yang seharusnya layak malah tertinggal.

PWR dilakukan dengan 4 langkah berikut:

a. Pemetaan desa

Setelah melakukan sosialisasi dengan desa yang disasar, fasilitator bersama warga melakukan kegiatan pemetaan desa. Tujuannya untuk mengidentifikasi jumlah keluarga dan berbagai karakteristik yang terkait dengan keluarga-keluarga tersebut.

b. Diskusi penentuan definisi kemiskinan lokal

Setelah melakukan kegiatan pemetaan, fasilitator melibatkan beberapa warga yang dipandang paling mengenal seluruh warga desa lainnya dan memahami kondisi kehidupan keluarga-keluarga di desa tersebut. Mereka dibagi dalam minimal 3 kelompok referensi yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Dalam tiap-tiap kelompok, mereka akan mendiskusikan tentang karakter kemiskinan atau kesejahteraan berdasarkan perspektif mereka.

c. Diskusi pemeringkatan

Selanjutnya setiap kelompok referensi diajak membuat peringkat tingkat kesejahteraan seluruh keluarga yang ada di desanya, dimana data-data mengenai kepala keluarga di desa telah diperoleh melalui kegiatan pemetaan sebelumnya. Setiap kelompok sangat mungkin memperoleh hasil pemeringkatan yang berbeda.

d. Analisis peringkat

Hasil dari pemeringkatan tersebut dianalisis oleh tim fasilitator dengan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran secara kuantitatif yang memberikan gambaran lebih tajam mengenai perbedaan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat di desa tersebut.

Bekerja sama dengan *Microcredit Summit Campaign*, LSM Bina Swadaya telah menyosialisasikan metode PWR. Sebuah perusahaan pertambangan besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menerapkan metode tersebut untuk mengidentifikasi kelompok sasaran dalam program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

F. TAHAPAN KAJIAN

Pada dasarnya PRA merupakan perangkat untuk mengkaji kondisi desa oleh masyarakat. Lingkup kajian yang biasa dilakukan bersama masyarakat tergantung dari tujuan kegiatan. Contohnya adalah perekonomian masyarakat, kondisi lingkungan, sosial budaya, dan kehidupan politik di desa. Kajian tersebut selanjutnya menemukan masalah yang dirasakan oleh penduduk desa dan alternatif solusinya. Seluruh hasil kajian tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk sebuah perencanaan kegiatan. Perencanaan rencana kegiatan bersama masyarakat secara partisipatif inipun dapat dikategorikan sebagai sebuah pendekatan yang partisipatif pula. Secara keseluruhan, proses kajian dapat dibagi dalam beberapa tahap berikut.

1. Pembentukan tim

Apabila kegiatan PRA dilakukan di sebuah lokasi “baru”, diperlukan tahap sosialisasi, termasuk didalamnya adalah prosedur perizinan kepada aparat desa setempat dan pendekatan terhadap tokoh-tokoh informal yang biasanya memiliki peran kunci dalam masyarakat. Namun, jika fasilitator sudah akrab atau sudah bersosialisasi beberapa waktu sebelumnya di wilayah atau lingkungan tersebut, maka yang dilakukan adalah membentuk tim PRA.

Tim PRA terdiri atas fasilitator (peneliti/pendamping/pelaksana program) dan wakil masyarakat. Apabila diperlukan (misalkan, di antara fasilitator tidak ada yang memiliki pengetahuan tertentu), fasilitator dapat menambah narasumber yang memahami kondisi fisik lokasi atau teknologi yang diperlukan. Narasumber tersebut dapat berasal dari instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Nakertrans, perguruan tinggi, LSM setempat, atau bahkan anggota masyarakat sendiri. Wakil masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat dan perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, seperti kelompok tani, RT, dan lain-lain. Perwakilan kelompok sedapat mungkin mencerminkan komposisi anggotanya berdasarkan klasifikasi kondisi perekonomian atau status sosial.

2. Penyesuaian persepsi

Sebelum proses kajian dimulai, masyarakat memerlukan penyadaran agar termotivasi dalam melakukan perencanaan secara sungguh-sungguh, serta memerlukan transfer pengetahuan agar mampu melakukan proses pengkajian sesuai kebutuhan.

3. Analisis data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang dihimpun secara langsung oleh pihak lain dan dapat dimanfaatkan untuk memperkaya kajian yang dilakukan tim PRA. Data sekunder yang biasanya dihimpun dan dianalisis antara lain potensi fisik, sosial-ekonomi, dan sosial budaya (biasanya dalam bentuk monografi desa). Analisis data ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami kondisi desa secara umum. Sesudah data sekunder dikumpulkan, masyarakat diminta menguraikan, menjelaskan, dan mengomentari data tersebut. Ada kalanya data sudah tidak valid lagi, sehingga masyarakat dapat memberikan informasi data yang lebih baru.

4. Observasi lapang

Ada kalanya, pengumpulan data, seperti untuk menyusun peta atau melakukan transek, memerlukan kunjungan atau observasi lapang. Pada setiap titik tertentu, tim berhenti, dan masyarakat diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi obyek pengamatan serta mencatatnya di dalam kertas. Hasil observasi ini selanjutnya disusun dalam peta atau bagan transek untuk didiskusikan dalam kelompok. Jika memerlukan dokumentasi, mintalah salah satu wakil masyarakat untuk mengambil foto atau membuat gambar.

5. Diskusi kelompok

Diskusi diawali oleh fasilitator dengan menjelaskan maksud dan tujuan kajian bersama serta lingkup kegiatan serta cara-cara yang digunakan. Wakil-wakil masyarakat selanjutnya dibagi dalam 3-4 kelompok sesuai kebutuhan. Selanjutnya, masing-masing kelompok diminta mendiskusikan topik kajian atau membuat peta sesuai lingkup kegiatan yang telah disepakati atau ditentukan oleh fasilitator. Hasil kajian atau peta tersebut

digambarkan dalam sehelai kertas *flipchart* yang dibagikan di awal diskusi. Selanjutnya masing-masing kelompok menunjuk juru bicara untuk mempresentasikan hasil kajiannya dan ditanggapi oleh kelompok lain.

Materi yang didiskusikan dimulai dari potensi, harapan, masalah yang dihadapi, serta solusi yang perlu dan memungkinkan untuk dilakukan. Seluruh materi tersebut selanjutnya diperingkatkan untuk memperoleh prioritas program unggulan.

Dalam memfasilitasi diskusi kelompok, fasilitator tidak boleh mendominasi pembicaraan. Namun, ia dapat bertindak selaku narasumber, sejauh cara menyampaikannya tidak bersifat menggurui, melainkan informatif. Dalam hal ini, narasumber menginformasikan pengetahuan yang belum dipahami atau berbagai kemungkinan pemecahan masalah yang dapat dipilih oleh masyarakat. Bisa jadi masyarakat juga memiliki alternatif pemecahan masalahnya sendiri.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam memberdayakan masyarakat berikut alternatif solusinya, disajikan dalam Tabel 5. Informasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mendikte masyarakat, melainkan agar fasilitator siap menjadi narasumber seandainya diperlukan.

Tabel 5. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan oleh masyarakat di lahan gambut dan alternatif solusinya

Aspek	Masalah	Alternatif Solusi
Lingkungan	Banjir	1. Perbaikan saluran dan pintu-pintu air 2. Penanaman jenis tanaman yang sesuai
	Kekeringan	1. Pembuatan bendung/tabat 2. Pembuatan dan perbaikan pintu-pintu air 3. Penanaman tanaman tahunan
	Tingginya frekuensi kebakaran	1. Pembuatan bendung/tabat 2. Penanaman tanaman tahunan dan semusim dengan sistem tumpangsari/wanatani 3. Penggunaan metode pembukaan lahan tanpa bakar 4. Pembuatan sekat bakar 5. Pembentukan regu pemadam kebakaran dan pelatihan pemadaman
	Gambut tebal	Lahan gambut lebih dari 3m dihutankan
	Illegal logging	1. Sistem penanaman berkelanjutan 2. Mengorganisir diri untuk melakukan advokasi dalam bentuk kampanye dan dialog ke lembaga terkait (BPD, DPRD, pemkab)

Tabel 5 (Lanjutan)

Aspek	Masalah	Alternatif Solusi
Ekonomi	Lapangan kerja terbatas	1. Memotivasi untuk pengembangan usaha mikro
	Keterbatasan modal	1. Pemupukan modal swadaya 2. Pengembangan permodalan melalui kelompok swadaya atau menjembatani akses dengan LKM 3. Penyaluran modal stimulan melalui Kelompok
	Teknologi tidak dikuasai	Diseminasi teknologi budidaya pengolahan hasil yang ramah lingkungan
	Produktivitas rendah	Diseminasi teknologi budidaya yang ramah lingkungan
	Pemasaran terbatas	1. Pengembangan komoditas unggulan 2. Mencari mitra usaha
	Tidak menguasai manajemen usaha	1. Pelatihan manajemen usaha 2. Pendampingan dan konsultasi usaha
	Hama/penyakit sulit dikendalikan	Diseminasi teknologi pengendalian hama/penyakit
Organisasi	Belum ada kelompok	Penumbuhan, pembentukan, dan pengembangan kelompok
	Kelompok tidak berfungsi	Pengembangan dan aktifkan kelompok
Sosial-budaya	Modal Sosial rendah	Pengembangan modal sosial atau sikap saling-percaya antar masyarakat melalui kelompok
	Potensi konflik	Resolusi konflik
	Sering terjadi wabah penyakit	1. Peningkatan efektivitas penyuluhan, misalnya dengan cara <i>door to door</i> 2. Melakukan kerja sama monitoring kesehatan dengan instansi terkait seperti puskesmas dan dinas kesehatan

6. Penyusunan laporan

Laporan dibuat di lapang oleh masyarakat dipandu oleh fasilitator. Sistematikanya dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat desa. Sedapat mungkin laporan dibuat rangkap dua. Satu buah ditinggal di lokasi dan lainnya dibawa oleh fasilitator.

G. RAPID RURAL APPRAISAL (RRA)

RRA merupakan salah satu metode kajian partisipatif yang diselenggarakan karena keterbatasan waktu. Kajian ini dimaksudkan untuk menangkap aspirasi masyarakat dalam waktu yang relatif cepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh- dan solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Perbedaan utama antara PRA dengan RRA hanya terletak pada pelaksana kajian. Dalam PRA, peneliti atau pendamping hanya bertindak selaku fasilitator. Sedangkan masyarakat bertindak sebagai pelaku. Dalam RRA, kajian dipandu langsung oleh peneliti sedangkan masyarakat bertindak sebagai peserta atau anggota diskusi. Oleh sebab itu, hasil RRA cenderung bias kepentingan (peneliti) dibandingkan hasil PRA. Tetapi apabila peneliti betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat, hasilnya tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan PRA. Hanya saja, karena masyarakat merasa bukan “pelaku” kajian, rasa memiliki terhadap program yang akan dilaksanakan relatif kurang. Oleh sebab itu, hasil RRA sebaiknya hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk program-program yang berbentuk sarana seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, bendungan, dan sebagainya yang pelaksanaannya tidak membutuhkan partisipasi penuh dari masyarakat.

Perangkat-perangkat PRA dapat digunakan dalam melaksanakan RRA, tetapi RRA biasanya dilaksanakan dengan menggunakan teknik diskusi terfokus. Topik diskusi biasanya sudah ditentukan sebelumnya sehingga diskusi terfokus pada masalah tertentu. Sebelum diskusi, peneliti sudah mempelajari data sekunder terlebih dahulu sehingga dapat turut memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan jika aspirasi masyarakat ternyata tidak sesuai dengan data yang ada. Peserta diskusi biasanya adalah tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang komposisinya dapat merepresentasikan stratifikasi sosial yang ada.

H. PERENCANAAN PARTISIPATIF BERORIENTASI HASIL

Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Jika sebuah kegiatan kolektif menjadi sulit diukur, mungkin persoalannya bukan terletak pada metodologi evaluasinya. Kesulitan pengukuran terjadi karena perencanaan itu tidak dirancang untuk memudahkan proses pengukuran sejak awal. Kata-kata seperti “menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kesadaran petani” tampaknya sangat ideal. Namun pernyataan tersebut mendatangkan kesulitan pada proses pengukuran. Mengapa demikian? Karena unsur-unsur seperti motivasi dan kesadaran bukanlah sesuatu yang secara konkret bisa diukur.

Sebuah rencana yang dihasilkan oleh berbagai metode perencanaan perlu mengacu kepada kaidah-kaidah rencana yang efektif, yaitu kaidah “SMART” (istilah Bahasa Inggris yang berarti “pandai”). Berikut uraian mengenai kaidah SMART:

- S : **Specific** (spesifik). Sebuah rencana perlu disusun secara spesifik, artinya lugas dan jelas bagi siapapun yang membacanya serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
- M : **Measurable** (terukur). Rencana yang efektif harus dapat diukur sejauh mana tingkat pencapaian atau keberhasilan butir-butir kegiatan yang direncanakan didalamnya.
- A : **Attainable** (dapat dicapai) dan **agreed** (disepakati). Rencana bukanlah suatu khayalan yang hanya bisa dibayangkan namun tidak dapat dicapai. Sasaran yang dicapai haruslah sejalan dengan kapasitas dan sumberdaya masyarakat. Proses perencanaan itu sendiri juga memerlukan kesepakatan atau persetujuan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga bisa diterima sebagai suatu pedoman bersama.

- R : **Realistic** (realistis). Hendaknya sasaran yang ingin dicapai merupakan sesuatu yang riil, bukan hanya di awang-awang saja.
- T : **Timebound** (batasan waktu). Untuk mengukur sejauh mana efektivitas kerja, diperlukan batasan waktu dalam setiap tahap kegiatan. Dalam setiap tahap tersebut dapat dilakukan kegiatan monitoring.

1. Proses perencanaan

Secara substantif, bagan berikut (Gambar 15) menggambarkan proses yang perlu dilalui agar sebuah perencanaan menjadi partisipatif. Memenuhi unsur dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta mudah diukur.



Gambar 15. Bagan alur perencanaan

a. Identifikasi kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan tahap mengenali segala hal yang diperlukan oleh masyarakat atau kelompok untuk kegiatan internal maupun pelayanan eksternal. Pengenalan ini dilakukan bersama-sama dalam sebuah forum setingkat rapat anggota. Kebutuhan juga dapat digali dari identifikasi masalah. Yang disebut “masalah” adalah segala hal yang bersifat menyimpang dimana penyimpangan tersebut dapat bersifat mengganggu, menghambat, memperkecil, ataupun merusak. Masalah yang ditemukan selanjutnya diformulasikan menjadi bentuk kebutuhan.

b. Seleksi prioritas

Seleksi prioritas adalah tahap memberi tanda identitas pada seluruh kebutuhan yang muncul sehingga dapat diidentifikasi. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemendesakan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut.

- i). **Kebutuhan utama**, memenuhi semua syarat: kegawatan, penyebaran tinggi, dan ketersediaan sumberdaya
- ii). **Kebutuhan kedua**, memenuhi salah satu dari syarat: kegawatan dan penyebaran, ditambah dengan ketersediaan sumberdaya.
- iii). **Kebutuhan ketiga**, hanya memiliki unsur ketersediaan sumberdaya.

Bagaimana dengan kebutuhan yang memiliki tingkat kegawatan dan penyebaran namun tidak ada unsur ketersediaan sumberdaya? Kebutuhan semacam ini tidak boleh dimasukkan dalam skala prioritas. Disini letak kunci pemberdayaan, partisipasi dan kemandirian. Masyarakat akan mengalami kendala dalam mengupayakan rencana kerja secara mandiri, jika mereka tidak memiliki sumberdaya. Suatu kebutuhan dapat dimasukkan dalam perencanaan setelah terlebih dahulu dibuat “rencana antara” (prakondisi). Rencana tersebut dilaksanakan untuk mengupayakan sumberdaya yang dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi secara swadaya.

Dalam contoh Tabel 6 tampak bahwa sekalipun secara obyektif sebuah kebutuhan dirasakan tak dapat ditunda dan dirasakan diperlukan oleh banyak orang (seperti pada kebutuhan nomor 1,3,4) tetap tak dapat diangkat sebagai bahan perencanaan. Kecuali mereka bersepakat terlebih dahulu mengupayakan sumberdayanya sehingga skor berubah menjadi 111. Anggap saja, dalam kasus tersebut masyarakat sedang atau belum memiliki uang sehingga sumberdaya mereka terbatas.

Tabel 6. Contoh bagan seleksi prioritas kegiatan

No	Kebutuhan	Kriteria Seleksi Prioritas Kegiatan			Skor	Keterangan prioritas
		Gawat	Penyebaran tinggi	Kepemilikan sumber daya		
1	Pelatihan bagi bendahara kelompok	1	1	0	110	X
2	Studi banding ke Kabupaten X	0	1	1	011	Kedua
3	Peningkatan tabungan	1	1	0	110	X
4	Perbaikan saluran air	1	1	0	110	X
5	Penanaman tanaman konservasi	1	1	1	111	Pertama
6	Membentuk regu pemadam kebakaran hutan	1	1	1	111	Pertama
7	Pelatihan poco-poco	0	0	1	001	X
8	Penyempurnaan PD/PRT	1	1	1	111	Pertama

Prioritas pertama justru jatuh pada kebutuhan nomor 5, 6, dan 8. Inilah yang harus diangkat dalam rencana kerja. Pelatihan menari *poco-poco*? Tentatif boleh ya, boleh tidak. Kalaupun ya, perlu dipertimbangkan, apakah dengan kegiatan tersebut dapat diperoleh pemasukan sejumlah dana sehingga dapat mendukung penyelesaian kebutuhan yang lain? Kalaupun tidak, analisis lain dapat digunakan. Misalnya, seberapa jauh *poco-poco* berkontribusi kepada kemandirian, pencapaian tujuan, atau hanya sekadar keinginan sesaat (bukan kebutuhan)?

c. Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan adalah rumusan hasil yang hendak dicapai dalam satuan-satuan yang terukur (Tabel 7). Kita sering terjebak untuk merumuskan rencana kerja dalam bentuk “proses”, bukan “hasil”. Akibatnya, rencana kerja menjadi sulit diukur.

Tabel 7. Perbandingan pernyataan sasaran

Proses	Hasil
Menanam tanaman tahunan	Ditanamnya 5.000 pohon tanaman tahunan dalam waktu 5 bulan
Mengadakan rapat anggota	Diselenggarakannya rapat anggota pada awal tahun 200X dimana tercapai kesepakatan tentang formasi kepengurusan yang baru
Mengadakan penyuluhan konservasi lahan gambut bagi petani	Diselenggarakannya 4 kali penyuluhan bagi 100 petani lahan gambut di mana mereka sesudah kembali ke lahannya masing-masing dan dapat menanam 3.000 pohon penghijauan yang telah disalurkan, dan tanaman tersebut menunjukkan tanda keberhasilan hidup pada 3 bulan berikutnya

d. Perencanaan monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah kegiatan “penginderaan sedekat mungkin” secara berkala dan berkelanjutan. Melalui kegiatan itu, pendamping atau pelaksana program pemberdayaan masyarakat dapat memastikan bahwa segala hal menyangkut input dan proses mengarah kepada hasil yang direncanakan.

Evaluasi adalah kegiatan membandingkan rencana dengan hasil. Jika rencana telah disusun berdasarkan hasil yang hendak dicapai, maka evaluasi menjadi kegiatan yang menantang, menyenangkan, dan mengundang minat keingintahuan. Dengan hasil evaluasi, dapat ditentukan aktivitas lebih lanjut. Karena itu pula, evaluasi lazim juga disebut identifikasi kebutuhan baru.

Berdasarkan rentang waktu, monitoring (pemantauan) umum dilakukan pada akhir dari setiap tahap kegiatan. Hasilnya bisa menjadi masukan bagi tahap kegiatan berikutnya. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir program, sehingga hasilnya pun bisa menjadi masukan untuk menyusun kelanjutan program. Kegiatan monitoring maupun evaluasi dapat pula dilakukan secara partisipatif dengan memanfaatkan teknik-teknik PRA.

2. Skala perencanaan

Dilihat dari skalanya, perencanaan pemberdayaan yang dibuat oleh masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu perencanaan skala rumah tangga, skala kelompok, dan skala desa.

a. Perencanaan skala rumah tangga

Dalam proses pemberdayaan, setiap individu dipahami memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap rumah tangga diharapkan mampu menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Bagaimana agar setiap rumah tangga senang dan dapat melakukan perencanaan, tergantung dari tujuan perencanaan dan keluwesan pendamping. Berikut adalah contoh tahapan proses memotivasi dan mentransfer pengetahuan agar masyarakat mampu melakukan perencanaan pengembangan kegiatan ekonomi skala rumah tangga.

- i). Adakan pertemuan dengan kelompok keluarga. Pertemuan sebaiknya dihadiri oleh suami, istri, dan anak yang sudah dewasa. Jumlah keluarga sebaiknya mempertimbangkan kapasitas ruang. Biasanya maksimal 10 keluarga.
- ii). Lakukan penyadaran seperti diuraikan dalam Bab 8.
- iii). Mintalah masing-masing keluarga untuk menginventaris daftar pemasukan dan pengeluaran.
- iv). Mintalah masing-masing keluarga mencermati hasil inventarisnya. Apakah pemasukannya lebih kecil dibandingkan pengeluarannya atau sebaliknya? Adakah pengeluaran-pengeluaran yang masih dapat dihemat?
- v). Mintalah masing-masing keluarga membuat perencanaan pengeluaran.
- vi). Mintalah masing-masing keluarga menempelkan dokumen rencana tersebut di rumahnya masing-masing .

b. Perencanaan skala kelompok

Setiap kelompok diharapkan dapat membuat rencana kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum dalam PD/PRT (Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga). Berikut adalah contoh memotivasi dan mentransfer pengetahuan agar masyarakat mampu melakukan perencanaan kegiatan konservasi lahan.

- i). Buat pertemuan yang dihadiri oleh anggota kelompok.
- ii). Buat suasana santai mungkin dan laksanakan proses penyadaran kondisi lingkungan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8.
- iii). Mintalah peserta diskusi untuk mengemukakan teknik-teknik konservasi lahan.
- iv). Lengkapi teknik-teknik yang belum diketahui oleh masyarakat.
- v). Mintalah ketua kelompok memimpin diskusi dengan topik membangun lingkungan, seperti:
 - Membuat peta atau transek lahan milik anggota kelompok.
 - Membuat kalender musim.
 - Memasukkan posisi lahan yang mengalami masalah banjir, kekeringan, kebakaran, atau sulit ditanami ke dalam peta.
 - Melakukan observasi atau kunjungan lapang secara bersama-sama. Bila memungkinkan, buatlah dokumentasi.
 - Membuat rangking masalah.
 - Menyusun alternatif kegiatan pemecahan masalah yang paling memungkinkan agar kondisi lingkungan tetap lestari. Misalnya dengan penanaman tanaman tahunan, pembuatan sekat bakar, dan pembuatan tabat. Jika terdapat perbedaan solusi untuk masing-masing lahan, cantumkan dalam peta.

- Susun kendala yang dihadapi untuk melaksanakan solusi tersebut. Misalnya, membutuhkan bimbingan teknis atau memerlukan dukungan dana.
 - Membuat anggaran yang diperlukan.
 - Menyusun jadwal kegiatan.
- vi). Mintalah peserta untuk menandatangani peta dan dokumen perencanaan.
- vii). Berikan pujian bila mereka sudah menyelesaikan diskusi dan membuat rencana.
- viii). Tempelkan peta dan rencana yang telah dibuat tersebut di sekretariat kelompok sebagai acuan kegiatan kelompok dalam konservasi lahan.

c. *Perencanaan skala desa*

Perencanaan di tingkat desa biasanya dilakukan untuk kegiatan dengan skala yang lebih luas dan melibatkan kepentingan hampir seluruh penduduk desa. Peserta diskusi biasanya terdiri atas tokoh masyarakat dan perwakilan dari kelompok tani, RT/RW, atau komunitas-komunitas lainnya.

Setiap kelompok yang hadir memperoleh giliran untuk membuat peta masalah, potensi pengembangan, dan program pembangunan yang diusulkan. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan potensi pengembangan, harapan, masalah, dan usulan program tersebut dalam rapat pleno desa untuk ditanggapi oleh kelompok lainnya. Setelah ditanggapi dan disempurnakan, hasilnya akan menjadi dokumen perencanaan.

Ketua diskusi ditunjuk oleh peserta diskusi. Ketua memfasilitasi jalannya diskusi hingga menghasilkan dokumen perencanaan yang disepakati bersama.

Kotak 10

Hasil PRA di Desa Sungai Rambut, Provinsi Jambi

Desa Sungai (Sei) Rambut berada di dalam kawasan penyangga Taman Nasional Berbak dan masuk dalam wilayah Kecamatan Rantau Rasau Provinsi Jambi. Jumlah penduduk desa ini sekitar 1300 jiwa dengan mata pencaharian umumnya sebagai nelayan penangkap ikan, berladang, bersawah dan menebang kayu di hutan (secara illegal). Lahan di desa ini umumnya bergambut tipis (kurang dari 1 meter) dan pada beberapa lokasi sering mengalami banjir di musim hujan dan kebakaran (akibat pembakaran ladang) di musim kemarau panjang.

Pada tahun 1997-2000, penduduk Desa Sei Rambut mendapatkan bantuan bibit berbagai jenis tanaman (sekitar 20 jenis, diantaranya rambutan, mangga, jeruk, sengon, kelapa, pinang, nangka dsb) dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) untuk ditanam pada lahan mereka.

Belajar dari kelemahan dan kelebihan yang dialami kegiatan yang dilaksanakan oleh JICA di lokasi ini pada tahun 1997-2000, maka dalam rangka penyelamatan lahan gambut di Desa Sei Rambut ini dilakukan kegiatan lanjutan oleh LSM lokal (Pinse) bersama WI-IP. Hasil PRA (participatory rural appraisal) yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut pada tahun 2002 hasilnya adalah sebagai berikut:

Masyarakat mengusulkan agar program pemberian bibit tanaman yang dahulu dilakukan JICA dapat diteruskan. Namun pola pendekatannya kali ini harus diubah, yaitu masyarakat dilibatkan dari awalnya dalam hal pengadaan/penyiapan benih sehingga masyarakat yakin bahwa benih yang ditanam adalah benih unggul yang nantinya akan tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Selain itu perlu dipertimbangkan agar waktu yang digunakan bagi masyarakat dalam menyiapkan dan menanam benih dapat diberi kompensasi dalam bentuk upah (di bayar)

Masyarakat mengusulkan agar fasilitas gedung (sumbangan JICA kepada TN Berbak) dapat dikelola oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama seperti mengelola ekowisata di sekitar TN Berbak.

Masyarakat memandang perlunya dilakukan kegiatan pertanian terpadu yang dilakukan bersama. Untuk itu, masyarakat mengusulkan agar WI-IP disatu sisi dapat membantu pengadaan bibit ternak sapi, kambing, ayam dan kerbau, serta karamba untuk memelihara ikan. Sedangkan disisi lain, masyarakat akan melakukan program penanaman berbagai pohon buah-buahan dan bersawah. Usulan untuk melakukan kegiatan pertanian terpadu secara bersama-sama di sebuah pulau (Pulau Tanjung Putus) yang terletak di tengah

Kotak 10 (Lanjutan)

Sungai Batang Hari merupakan hal yang menarik. Hal ini karena kegiatan akan mampu memberi alternative income bagi masyarakat, tapi secara tidak langsung mereka akan menjadi pengawas bagi keluar masuknya orang ke dalam kawasan TN Berbak dan sekaligus sebagai pengawas terhadap adanya kebakaran hutan di sekitarnya. Di depan pulau ini bermuara dua sungai kecil (*Sungai Serdang dan Rambut*) yang sering dijadikan lalu lintas transportasi angkutan kayu hasil penebangan liar. Selain itu, di pulau ini juga terdapat menara pengamat kebakaran (*fire observation tower*) yang dibangun JICA pada tahun 2000 yang lalu, tetapi tidak pernah digunakan oleh pihak pengelola TN Berbak. (Sumber: Suryadiputra, 2002)

I. TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PRA bukan merupakan kegiatan yang berhenti setelah pengumpulan data selesai. PRA harus ditindaklanjuti oleh implementasi program yang berkelanjutan. Agar implementasi program tersebut dapat dikerjakan, maka sebelumnya harus dilakukan kegiatan *crosscheck* (pemeriksaan silang) dan penyusunan laporan.

1. Penyidikan kelayakan

Penyidikan kelayakan dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat betul-betul didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sumberdaya itu terdiri atas sumberdaya alam, manusia, dan dukungan dari pihak terkait lainnya.

Penyidikan dilakukan oleh peneliti, pendamping, atau wakil dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Metode penyidikan yang digunakan tergantung dari lingkup kegiatan yang direncanakan. Namun, pada prinsipnya, penyidikan ini merupakan *crosscheck* melalui pihak-pihak terkait dan kunjungan lapang berdasarkan observasi sebelumnya. Pihak-pihak itu terdiri atas masyarakat yang akan melakukan kegiatan (masyarakat yang mengikuti dan tidak mengikuti diskusi kelompok), aparat

desa, serta instansi teknis yang terkait. *Crosscheck* dengan pihak-pihak tersebut dilakukan melalui wawancara secara individu. Hal yang sama juga dilakukan terhadap instansi teknis terkait untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan sudah diprogramkan pada instansi tersebut. Dengan demikian, *overlap* (tumpang-tindih) kegiatan dapat dihindari. Atau jika memungkinkan, kegiatan dapat diintegrasikan dengan kegiatan instansi lain.

Apabila berdasarkan penyidikan kelayakan, suatu rencana yang disusun oleh masyarakat dianggap layak, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan dan diusulkan kepada lembaga terkait atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang bermaksud menjalankan program di wilayah tersebut. Apabila dinilai tidak layak, masyarakat harus diberitahu dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh masyarakat. Tujuannya untuk menghindari kekecewaan dan munculnya persepsi bahwa rencana yang sudah dibuat tidak ditanggapi secara serius. Sekali masyarakat memiliki persepsi seperti itu, program-program penyusunan rencana berikutnya tidak akan memperoleh respon hangat dari masyarakat.

2. Penyusunan laporan

Dalam hal ini, laporan yang dibuat berbeda dengan laporan yang disusun oleh masyarakat, karena pembacanya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat dan penyandang dana. Laporan yang dibuat oleh masyarakat dijadikan sebagai salah satu lampiran dalam laporan ini.

Format laporan biasanya mengikuti kebiasaan lembaga atau instansi yang bersangkutan. Umumnya yang dimuat sebagai berikut:

- a. Pendahuluan. Mencakup latar belakang pemberdayaan, alasan pemilihan lokasi, dan tujuan pemberdayaan.
- b. Kondisi umum lokasi
 - i). Letak desa dan aksesibilitasnya, seperti letak administrasi (nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi), jarak (jarak

desa dengan hutan, kecamatan, pasar terdekat, kabupaten), sarana transportasi (jenis sarana, biaya, waktu, dan jarak tempuh).

- ii). Kondisi fisik desa, mencakup luas lahan, tipe lahan dan jenis tanah (termasuk kisaran ketebalan gambut), iklim, pola penggunaan lahan, kerusakan lahan, sistem tata air, dan drainase lahan.
 - iii). Kondisi ekonomi: jumlah penduduk sesuai mata pencaharian, komoditas yang diusahakan, tingkat teknologi yang digunakan, perkiraan pendapatan, dan kendala pengembangan usaha.
 - iv). Kondisi sosial-budaya.
 - v). Organisasi, mencakup jenis dan kegiatan kelembagaan yang sudah ada (organisasi ekonomi, sosial, dan budaya).
- c. Proses PRA
 - d. Hasil PRA sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
 - e. Program yang diusulkan (sesuai dengan usulan masyarakat setelah dilakukan penyidikan).
 - f. Kebutuhan pendampingan. Perlu dirumuskan apakah dalam implementasi program yang diusulkan, masyarakat membutuhkan pendampingan, serta kriteria pendamping seperti apa yang sesuai.
 - g. Lampiran-lampiran yang terdiri atas laporan dan perangkat PRA yang disusun oleh masyarakat.

Kotak 11

Hasil PRA di Desa Merang


Desa Merang terletak kawasan penyangga Taman Nasional Sembilang. Desa Merang dahulunya berupa hutan gambut lebat yang kaya ikan air tawar. Kini hutannya telah sangat berkurang (bahkan rotanpun sudah sulit didapat) dan ikannya sudah sulit ditangkap karena jumlahnya yang semakin sedikit. Di dekat Desa Merang terdapat perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dari Malaysia. Terdapat tiga dusun dalam desa ini yaitu dusun Bakung (jumlah penduduk 600 jiwa), dusun Bina Desa (212 jiwa) dan dusun Kepahyang (696 jiwa). Sejak tahun 2000 yang lalu, sekitar 105 orang dari ketiga dusun ini hidup dari kegiatan penebangan kayu secara illegal di hutan-hutan dekat Sungai Merang, Sungai Kepahyang dan di dalam dusun Bakung. Kegiatan penebangan ini biasanya mereka lakukan pada saat musim penghujan (banjir) sekitar bulan Oktober hingga Juni untuk mempermudah pengangkutan kayu keluar dari hutan. Namun demikian, pada musim kemarau (sekitar Juli hingga September) masih ada juga penduduk yang masuk ke dalam hutan untuk menebang pohon. Kayu hasil tebangan ini selanjutnya akan diangkut keluar hutan pada saat musim hujan (banjir). Selain penduduk Desa Merang, para penebang liar ini kebanyakan (sekitar 2000 orang) berasal dari desa lain (yaitu dari Kecamatan Selapan, Kabupaten Kayu Agung). Para penebang pendatang ini umumnya hidup tidak menetap. Ada yang tinggal di dalam hutan, di tepi sungai dan ada pula yang pulang ke kampung halamannya pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan di lokasi Desa Merang pernah terjadi pada tahun 1997 lalu selanjutnya rutin terjadi hampir setiap tahun pada musim kemarau.

Dari kegiatan PRA yang dilakukan oleh LSM lokal (Wahana Bumi Hijau) bersama WI-IP pada tahun 2000 menghasilkan masukan berikut: Selain mengambil kayu dari hutan, terdapat berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Merang. Diantaranya adalah kerajinan tenun, pembuatan tikar dan topi dari tanaman rumbai, dan pembuatan kerupuk. Potensi lahan yang sangat luas dan terlantar di dusun Kapahyang (pada tahun 1997 pernah terbakar) sangat berpotensi untuk dijadikan sumber pengidupan masyarakat dan sekaligus program rehabilitasi lahan gambut melalui penanaman berbagai jenis tanaman seperti karet, jelutung, ramin, sengon, sungkai, jeruk dan pisang.


Kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dari ketiga desa di atas, berpotensi untuk mengatasi problema kebakaran di lahan rawa gambut. Karena dengan usulan yang sedemikian kuatnya dari masyarakat diharapkan daerah-daerah yang saat ini merupakan "fire prone" (mudah terbakar) nantinya akan diawasi dan di rawat oleh masyarakat itu sendiri (karena di atasnya ditanami berbagai tanaman yang memiliki nilai ekonomis penting). Sementara menunggu tanaman yang ditanami ini memberikan hasil yang dapat dipanen, masyarakat diberikan alternative kegiatan-kegiatan lain yang mampu memberikan hasil secara cepat (misal dari usaha beternak, pembuatan kerajinan tangan dan produk makanan yang siap dijual di pasar). Dengan cara-cara tersebut diharapkan fungsi lahan gambut sebagai penyimpan karbon dan mendukung keanekaragaman hayati juga dapat dipertahankan. (Sumber: Suryadiputra, 2002)

Bab 6

Pendampingan Masyarakat



Uraian dalam bab ini diawali dengan pemaparan mengenai pertimbangan menggunakan metode pendampingan yang dirangkai dengan tujuan pendampingan, fungsi, dan kompetensi pendamping, serta tahapan yang dilalui dalam proses pendampingan. Bab ini dilengkapi dengan beberapa catatan pengalaman pendampingan.



Pemberdayaan masyarakat memerlukan sebuah “pendampingan”, yaitu kegiatan memfasilitasi proses pembelajaran secara nonformal untuk mencapai keberdayaan masyarakat. Selama proses pendampingan, masyarakat belajar, berlatih sambil bekerja (*on the job training*), dan berlatih terus-menerus (*on going process*) seiring dengan perkembangan kegiatan pemberdayaan. Dalam proses tersebut mereka akan berkembang, semakin berdaya, dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan dari pengalamannya.

A. PERTIMBANGAN PENGGUNAAN METODE PENDAMPINGAN

Proses pembelajaran melalui metode pendampingan dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Masyarakat di lahan gambut pada umumnya memiliki standar perekonomian yang terbatas. Contohnya, memiliki tabungan yang relatif kecil, baik dalam bentuk hasil produksi, barang, ataupun uang. Pendidikan mereka rendah, karena jauh dari sekolah atau tidak adanya dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Dalam kondisi seperti itu, mereka memerlukan tambahan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan yang dapat dilakukan sambil bekerja. Untuk itu, pendamping dapat melakukan bimbingan dan panduan secara rutin di lokasi pemukiman sehingga tidak banyak menyita waktu bekerja masyarakat.
2. Pendamping akan tinggal bersama-sama dengan masyarakat agar lebih menghayati permasalahan dan mengenali kemampuan masyarakat. Dengan demikian, penelusuran kebutuhan pelatihan menjadi lebih tepat sasaran. Di samping itu, materi pelatihan akan langsung menjawab kebutuhan atau permasalahan, karena pendamping turut merasakan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Pendamping sendiri tidak harus menguasai materi pelatihan yang dibutuhkan masyarakat. Yang dibutuhkan darinya adalah kemampuan untuk mengakses sumberdaya yang ada dalam masyarakat sendiri maupun dari lembaga-lembaga lain melalui pendekatan individual maupun kelembagaan.
3. Kemampuan masyarakat dalam menerapkan materi bimbingan atau pelatihan dapat dipantau dan dievaluasi secara terus menerus dan segera ditindaklanjuti bila muncul kendala atau bahkan jika terdapat potensi pengembangan yang baru. Hal ini dapat dimungkinkan apabila pendamping selalu dekat dengan mereka, bukan saja dari aspek fisik, melainkan juga memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat.
4. Pelatihan dengan metode pendampingan bersifat non formal dan bertahap sehingga materinya lebih mudah dipahami dan diterapkan.

5. Pendamping yang sudah memperoleh kepercayaan masyarakat akan lebih mudah memotivasi, menumbuhkan kesadaran, dan mentransfer pengalaman, pengetahuan, serta keahliannya.
6. Spektrum pelatihan dengan metode pendampingan lebih luas, mencakup sasaran masyarakat yang lebih beragam, dan dalam jumlah yang lebih banyak. Pelatihan dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat yang bersifat umum (dirasakan atau dialami banyak orang) dapat dilakukan melalui pertemuan formal. Sedangkan permasalahan yang sifatnya individual (hanya dirasakan atau dialami individu) dapat dilakukan melalui kunjungan-kunjungan khusus.

B. TUJUAN PENDAMPINGAN

Tujuan pendampingan pada dasarnya mencakup 2 elemen pokok, yaitu tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat.

Kemandirian merupakan kemampuan untuk pelepasan diri dari keterasingan, atau kemampuan untuk bangkit kembali pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena adanya ketergantungan, eksploitasi, dan sub ordinasi.

Kemandirian merupakan cermin adanya kepercayaan seseorang pada kemampuan sendiri yang menjadi suatu kekuatan pendorong untuk kreativitas manusia, otonomi untuk mengambil keputusan, bertindak berdasarkan keputusan sendiri, dan memilih arah tindakan yang tidak terhalang oleh pengaruh luar seperti keinginan orang lain.

Kemandirian dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu kemandirian material, intelektual, dan pembinaan. *Kemandirian material* tidak sama dengan konsep sanggup mencukupi kebutuhan sendiri. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar dan cadangan serta mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis. *Kemandirian intelektual* adalah kemampuan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk

dominasi yang lebih halus dari luar kontrol terhadap pengetahuan itu. *Kemandirian pembinaan* adalah kemampuan otonom masyarakat untuk membina diri mereka sendiri, menjalani, serta mengelola tindakan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan mereka.

Partisipasi merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif. Partisipasi aktif merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah yang bertolak dari kemampuan memutuskan, bertindak, dan berefleksi atas tindakan mereka sebagai subyek yang sadar. Berbeda dengan partisipasi aktif, dalam partisipasi pasif, masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan, dirancang, dan dikontrol oleh orang lain.

C. FUNGSI PENDAMPING

Pendamping dalam program-program pengembangan masyarakat atau sering pula disebut "*Community Development (CD) worker*" memiliki fungsi yang kompleks, yakni sebagai edukator, motivator, fasilitator, dinamisator, mediator, dan konselor. Peran mana yang perlu lebih ditonjolkan sangat bergantung dari kondisi masyarakat. Namun, dalam segala peran yang dimainkannya, pendamping harus memosisikan dirinya sejajar atau setara dengan masyarakat. Beberapa fungsi pendamping sebagai berikut:

1. Fungsi edukator

Inti pendampingan adalah mendidik masyarakat dengan cara yang tidak otoriter, dengan memberikan ruang gerak bagi berkembangnya pemikiran dan kreativitas masyarakat untuk secara aktif belajar dan berlatih atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam. Pada saat memotivasi masyarakat, pendamping sedang melatih pola pikir, kesadaran, dan kepercayaan diri masyarakat. Ketika sedang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan instansi teknis, lembaga keuangan, dan mitra usaha, pendamping sedang melatih masyarakat untuk memanfaatkan

potensi layanan pemerintah dan melatih kemampuan masyarakat dalam menjalin kerja sama. Semua itu dilakukan agar pada saatnya masyarakat mampu secara mandiri memanfaatkan seluruh potensi yang ada bagi pengembangan dirinya. Kemudian pendamping secara perlahan dan terencana akan menyerahkan pada masyarakat untuk mengorganisir diri dalam menghadapi permasalahannya.

2. Fungsi motivator

Sebagai motivator, pendamping berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat. Pendamping memotivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan, seperti melakukan pengembangan usaha, pelestarian lingkungan, membangun kelompok, memupuk modal, menabung, dan sebagainya. Karena itu, pendamping harus peka terhadap kondisi dan karakter masyarakat. Kapan masyarakat membutuhkan motivasi sangat tergantung pada kepekaan dan kemampuan menangkap kondisi masyarakat secara tepat. Tidak jarang pendamping menghadapi daya tolak yang tinggi dari masyarakat, karena ia tidak mampu menangkap sinyal-sinyal yang tepat untuk memotivasi masyarakat. Belum lagi dibarengi dengan teknik yang tidak tepat pula.



Gambar 16. Memfasilitasi diskusi kelompok merupakan salah satu fungsi pendamping (Dokumentasi oleh: Lilis H., 2004)

3. Fungsi fasilitator, dinamisator, dan inspirator

Pendamping juga dapat berfungsi sebagai fasilitator. Istilah “fasilitator” berasal dari kata “fasilitas” yang berarti sarana. Maka “memfasilitasi” berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan. Sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan, seperti memfasilitasi proses agar kegiatan diskusi berjalan lancar. Memfasilitasi bisa pula dalam bentuk pelatihan, konsultansi atau bantuan teknis lainnya seperti mengembangkan kelompok dan mendorong sumbang saran dari masyarakat untuk memecahkan sebuah masalah. Selain itu, pendamping juga berfungsi sebagai dinamisator dan inspirator, yakni mendorong masyarakat dan kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Fungsi konselor

Dalam hal-hal tertentu, masyarakat akan berkonsultasi dan meminta bimbingan pendamping. Misalnya dalam hal mengelola kelompok, melakukan aktivitas usaha, atau melakukan pekerjaan. Sejauh menguasai materinya, pendamping dapat langsung membimbing masyarakat. Apabila permasalahan itu berada di luar kapasitas atau kompetensi pendamping, maka ia pun perlu berendah hati dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa memperoleh jawaban, misalnya dengan berkonsultasi dengan pihak lain atau menghadirkan seorang atau beberapa narasumber.

5. Fungsi mediator

Sebagai mediator, peran pendamping diantaranya adalah menjembatani masyarakat dan kelompok dengan instansi teknis untuk memperoleh bimbingan teknis atau fasilitas lainnya, menjembatani dengan lembaga keuangan untuk memperoleh fasilitas permodalan usaha, menjembatani dengan mitra usaha, serta menjadi perekat hubungan antar anggota masyarakat sehingga tercipta iklim yang kondusif.

6. Fungsi advokasi

Masyarakat dapat saja mengalami sengketa dengan berbagai pihak dalam kaitannya dengan hal-hal yang masih dalam spektrum pembinaan. Sengketa ini dapat terjadi antara penduduk dan dapat pula dengan pihak-pihak lain di luar komunitas yang didampingi seperti dengan mitra usaha atau bahkan dengan instansi pemerintah. Dalam kondisi tingkat keberdayaan yang masih terbatas, masyarakat sering tidak memiliki posisi dan daya tawar, sehingga sering kalah bila bersengketa dengan pihak yang lebih memiliki kekuasaan. Untuk itu, pendamping dapat melakukan pembelaan dalam batas-batas kebenaran dan kewajaran. Fungsi ini bisa diwujudkan antara lain dengan memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan para pemimpin formal di daerah untuk membicarakan implikasi kebijakan terhadap masyarakat atau kelompok.

D. KOMPETENSI PENDAMPING

Kompetensi pendamping dapat dilihat dari dua sisi yaitu *attitude* atau sikap serta penguasaan ilmu dan keterampilan.

1. Sikap Pendamping

Seorang pendamping harus mampu menumbuhkan motivasi dan meraih kepercayaan masyarakat. Untuk itu, pendamping harus mempunyai sifat dasar dan kemampuan sebagai berikut:

a. *Jujur dan ikhlas*

Kesuksesan pertama seorang pendamping adalah memperoleh kepercayaan dari komunitas dampungannya. Untuk memperoleh kepercayaan itu, pendamping harus memiliki sifat dasar jujur dan ikhlas dalam mendampingi masyarakat. Pendamping harus menunjukkan komitmennya untuk kegiatan pemberdayaan, misalnya dengan bersedia hadir dalam pertemuan sesuai waktu yang disepakati bersama warga dan bersedia membagi pengalaman suksesnya kepada masyarakat.

b. Ramah, tapi tegas dan tegas

Di lapang, pendamping akan dihadapkan pada masyarakat yang memiliki perilaku dan sifat beraneka ragam. Dalam banyak kasus, masyarakat akan banyak bertanya, curiga, bahkan tak jarang menolak kedatangan pendamping. Penolakan biasanya dilakukan oleh sebagian orang yang merasa terancam kepentingannya oleh aktivitas pendamping. Para pelaku *illegal logging* biasanya curiga terhadap pendamping yang membawa bendera pelestarian lingkungan. Para tengkulak (biasa juga disebut pengijon, rentenir, atau bang plecit) merasa terancam dengan kehadiran pendamping, karena bisa saja masyarakat meninggalkan jasa mereka. Kondisi semacam ini, biasanya ditemui pendamping selama proses orientasi dan penyadaran, ketika masyarakat belum memahami maksud dan manfaat pendampingan.

Kecurigaan dan penolakan dalam bentuk sikap maupun perilaku dapat menyebabkan pendamping yang tidak tegas mengalami keputusasaan. Bila ia tidak sabar dalam menghadapi persoalan semacam itu, ketegangan-ketegangan pun akan muncul. Sifat ramah dan sabar terhadap masyarakat akan memudahkan pendamping untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan melayani pertanyaan masyarakat. Sedangkan ketegaran akan menjadikan pendamping tidak cepat putus asa, sehingga terus-menerus mencari solusi dan kiat-kiat tertentu untuk menyadarkan masyarakat. Dalam kondisi semacam itu, improvisasi pendamping untuk terus mengembangkan teknik-teknik penyadaran dan penumbuhan motivasi sangat diperlukan.

Terkadang kesabaran pendamping “dimanfaatkan” oleh masyarakat untuk tidak mematuhi komitmen. Contohnya, masyarakat sudah berjanji untuk menanam tanaman tahunan sebelum memperoleh bantuan modal stimulan. Sering kali yang terjadi justru masyarakat sudah meminta modal, sementara tanaman belum juga ditanam. Disini ketegasan pendamping diuji. Pendamping harus tegas agar kebiasaan masyarakat yang tidak mematuhi komitmen tersebut tidak terulang dan ditiru oleh yang lain.

c. Demokratis

Pendampingan merupakan proses pembelajaran dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk dapat seluas-luasnya mengembangkan pemikiran dan merumuskan keputusan yang terbaik bagi dirinya. Kondisi semacam itu akan tercipta apabila pendamping bersikap demokratis, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dilakukan secara partisipatif. Sikap ini juga akan tercermin ketika pendamping sadar bahwa keputusan penyelesaian masalah kemiskinan bukanlah wewenangnya, melainkan masyarakat sendiri. Ia harus sadar bahwa perannya hanya sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan.

d. Rendah hati dan tidak suka mencela

Pendamping harus dapat mengambil simpati serta mampu membangkitkan semangat dan kepercayaan diri masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila pendamping senantiasa mengembangkan sikap rendah hati dan bisa membesarkan hati. Kepercayaan diri dan meningkatnya motivasi biasanya akan timbul ketika hasil karya seseorang atau masyarakat dihargai. Dihargai tidak harus berarti dinilai dengan ukuran uang. Penghargaan dalam bentuk pujian sering kali mampu membesarkan hati dan memotivasi orang untuk bertindak.

e. Mempunyai komitmen kuat pada kemajuan masyarakat

Pendamping yang baik harus memiliki komitmen pada kemajuan masyarakat dampingannya. Memiliki komitmen berarti memiliki kesanggupan yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan masyarakat. Ia memiliki semangat, tidak cepat putus asa, dan selalu mencari solusi jika masyarakat mengalami masalah. Ia selalu mengembangkan kreativitasnya dan senantiasa berimprovisasi secara tulus semata-mata agar masyarakat mampu mencapai kemajuan.

f. Mengenal dan menghormati adat-istiadat setempat

Norma atau adat-istiadat yang berkembang di masyarakat merupakan warisan leluhur dan sudah berkembang secara turun-temurun. Beberapa komunitas cenderung mensakralkan secara fanatik beberapa norma sehingga mudah tersinggung apabila orang luar tidak menghormatinya. Pendamping perlu mengenali norma-norma semacam ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Sebagai contoh, masyarakat Dayak biasa membuat ritual bagi anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Mereka meyakini bahwa roh keluarganya masih ada di sekitar lingkungan mereka. Maka mereka pun “mengantarnya” ke “gunung lumut” dengan sebuah upacara khusus. Mereka melakukan selamatan bagi orang yang meninggal karena jatuh dari pohon atau musibah lain. Mereka juga membuat upacara penerimaan tamu dengan berbagai tarian dan tabuh-tabuhan. Dengan mengenali dan sekaligus menghormati norma dan budaya masyarakat, dengan sendirinya pendamping akan memperoleh simpati dari masyarakat.

Selama tinggal di lokasi, pendamping harus dapat menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat. Sejauh tidak melanggar larangan agama, kebiasaan sehari-hari sedapat mungkin mendekati pola yang digunakan oleh masyarakat. Perbedaan mencolok yang menimbulkan kesan eksklusif hanya akan menjauhkan pendamping dari masyarakat. Artinya, pendamping juga harus dapat memilih waktu dan frekuensi interaksi yang paling tepat dan sesuai dengan siklus kehidupan masyarakat.

g. Semangat belajar

Pendamping harus senantiasa belajar dari buku, pengalaman diri sendiri atau orang lain, termasuk dari masyarakat. Melalui cara seperti ini, pendamping akan menjadi lebih arif dan handal seiring berjalannya waktu.



Gambar 17. *Transportasi air. Pendamping harus dapat mengikuti gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal menggunakan sarana transportasi (Dokumentasi oleh: Telly, 2004)*

2. Pengetahuan dan keterampilan

Pendamping bukanlah manusia super yang memiliki kemampuan dalam semua aspek kehidupan. Namun, ia perlu memiliki sebagian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat. Pendamping yang tidak memiliki keterampilan menjadi kurang peka terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. Meskipun demikian, pendamping juga harus berani mengatakan tidak tahu, kalau memang ia tidak tahu. Jangan sampai karena ingin memperoleh simpati atau kepercayaan masyarakat, pendamping selalu melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat, padahal ia sendiri tidak menguasai apa yang diperlukan. Untuk hal ini, pendamping hendaknya berterus terang serta mengupayakan agar masyarakat dapat memperoleh akses untuk pemenuhan kebutuhan mereka.

Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang pendamping yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat di lahan gambut sebagai berikut:

a. Pengetahuan dan keterampilan teknis

Dalam hal ini, pendamping harus memiliki keterampilan untuk mengenali tipe dan sifat lahan gambut serta menguasai teknik-teknik konservasinya. Pendamping juga perlu menguasai minimal satu kemampuan teknis di bidang usaha yang banyak dikembangkan oleh masyarakat setempat, seperti budidaya tanaman, pembibitan, peternakan, dan perikanan di lahan gambut.

b. Wawasan konseptual dan praktis tentang metode pemberdayaan masyarakat

Pendamping diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep pemberdayaan dan memiliki keterampilan seperti keterampilan psikologi sosial, keterampilan dalam penumbuhan, pembentukan, pendampingan, pengelolaan, dan pengembangan kelompok; serta keterampilan animasi (penyadaran dan penumbuhan motivasi).

Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tersebut, seorang pendamping harus memiliki kemauan kuat untuk belajar terus menerus, baik secara formal atau non formal. Ia tidak menganggap dirinya bekerja pada tingkat kesadaran tertentu sehingga tugasnya hanyalah membawa masyarakat kepada tingkat kesadarannya. Ia harus mau dan bisa memperbaiki kemampuan pengetahuan dan kualitas tindakannya dengan belajar dari pengetahuan serta tindakan masyarakat, refleksi kritis atas tindakannya sendiri, membagi dan menganalisis pengalaman sesama pendamping dalam usaha belajar kolektif, serta selalu peka terhadap perubahan.

E. TAHAP-TAHAP PENDAMPINGAN

Agar fungsi pendampingan berjalan lancar, tugas seorang pendamping dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan tahap persiapan atau orientasi, kemudian tahap kapasitas, dan tahap pengakhiran atau penghapusan diri.

1. Tahap persiapan

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping pada tahap persiapan atau orientasi adalah melakukan perkenalan dengan pejabat dan tokoh masyarakat sekaligus memberitahukan maksud dan tujuannya. Dalam tahap yang juga dikenal sebagai masa sosialisasi ini, pendamping juga meminta pejabat atau tokoh masyarakat setempat untuk mengumpulkan masyarakat dan membantu memperkenalkan diri, lembaga, maksud dan tujuan, serta kegiatan awal yang akan dilakukan.

Perkenalan dengan masyarakat sebaiknya dibantu oleh salah satu tokoh yang disegani masyarakat guna menghindari kecurigaan dan memperoleh dukungan masyarakat. Keberadaan kelompok-kelompok kegiatan seperti kelompok arisan, kelompok tani, kelompok keagamaan, atau karang taruna sangat baik untuk dioptimalkan sebagai media pemberdayaan. Namun akan lebih baik jika mereka yang tidak tergabung dalam salah satu kelompok itupun diikuti-sertakan.

Proses perkenalan dilakukan dalam acara pertemuan khusus. Agar masyarakat merasa nyaman, pilih tempat dan waktu yang tepat, yaitu ketika sebagian besar masyarakat tidak sedang bekerja, misalnya malam hari. Kadang-kadang, baik juga untuk membuat pertemuan terpisah antara laki-laki dan perempuan guna menghindari dominasi laki-laki. Buatlah pertemuan sesantai mungkin sehingga semua dapat berpartisipasi aktif.

Dalam pertemuan ini, pendamping meminta tokoh masyarakat untuk membuka dan memperkenalkan pendamping secara singkat. Kemudian pendamping menambahkan atau mempertegas apa yang sudah disampaikan tokoh tersebut. Dalam acara ini perlu diciptakan suasana terbuka dan kekeluargaan lalu diikuti dengan memperkenalkan identitas diri, agar masyarakat menjadi lebih akrab mengenal pendampingnya. Perlu disampaikan bahwa pendamping ingin mendampingi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan membantu mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan. Mintalah masyarakat untuk memperkenalkan diri dan ingat-ingatlah nama-nama mereka. Tunjukkan penghormatan dan jangan mendominasi pembicaraan. Dengarkan dan respon keluh kesahnya.

Tanyakan dan dengarkan keinginan, harapan, serta pengalamannya dalam mencapai kesuksesan atau kegagalan, apa saja masalah yang dihadapi, dan apa yang dibutuhkan. Lontarkan pujian bila diperlukan. Berikan semangat dan dorongan bahwa banyak jalan untuk mencapai keberhasilan, bila kita bersungguh-sungguh. Catat semua informasi yang dirasakan penting.

2. Tahap kapasitas

Menurut Tilakaratna (1994), tahap pendampingan dilaksanakan dalam kerangka besar yang disebut “**kapasitas**”. Kapasitas adalah proses pembentukan kemampuan untuk berpartisipasi agar masyarakat memiliki peluang berpindah dari status obyek (dimanipulasi oleh kekuatan eksternal dan korban pasif suatu proses sosial) ke status subyek. Dengan demikian, kapasitas merupakan kesempatan masyarakat untuk membangun kemampuan mereka sendiri guna berpindah dari status obyek menjadi status subyek (dibimbing oleh kesadaran diri) dan menjadi agen aktif untuk suatu perubahan. Kapasitas digunakan sebagai istilah bagi proses pembentukan kemampuan untuk partisipasi.

Dalam proses kapasitas, pada dasarnya akan terjadi 3 proses yang saling berhubungan. Pertama, perkembangan keterampilan intelektual dan dasar pengetahuan. Kedua, perkembangan kemampuan untuk organisasi dan manajemen diri dalam tindakan. Ketiga, memperoleh jalan masuk menuju sumberdaya materi guna mengembangkan kegiatan produktif.

Tahap kapasitas dilaksanakan dengan menggunakan media kelompok dan diselenggarakan melalui dua rangkaian kegiatan, yaitu animasi dan fasilitasi.

Kegiatan animasi merupakan proses penyadaran (pencerahan) dan penumbuhan motivasi untuk membangun kemampuan intelektual dan dasar pengetahuan masyarakat, agar dapat berpikir, berefleksi, dan bertindak secara otonom. Dalam tahap ini, peran pendamping yang menonjol adalah sebagai motivator dan dinamisator. Dalam melakukan animasi, pendamping melakukan:

- a. Bantuan proses penyadaran awal yang melibatkan rangsangan terhadap masyarakat agar dapat berefleksi secara kritis melalui penyelidikan diri yang memungkinkan mereka menerima perubahan. Mengingat kompleksnya tahap ini, metode animasi akan dibahas secara khusus dalam bab berikutnya.
- b. Bantuan memperkuat dasar pengetahuan melalui penyusunan kembali pengalaman masyarakat dan penyampaian pengalaman baru.
- c. Bantuan pengembangan pengetahuan hak-hak masyarakat
- d. Alih pengetahuan mengenai situasi sosial yang lebih luas

Fasilitasi merupakan langkah peningkatan kemampuan praktis masyarakat. Tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan keterampilan praktis agar mampu mengakses sumberdaya materi sehingga akhirnya berpeluang memainkan peran untuk melindungi, memanfaatkan, dan berusaha secara mandiri. Peran pendamping yang menonjol disini adalah sebagai fasilitator, mediator, dan pembimbing teknis (konsultan), seperti:

- a. Membantu masyarakat membangun dan mengembangkan kelompok.
- b. Meningkatkan keterampilan dasar seperti melek huruf, manajemen sederhana seperti pembukuan dan pemeriksaan keuangan.
- c. Melakukan transfer teknologi, seperti teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan konservasi lahan.
- d. Menjembatani hubungan kelompok dengan mitra usaha, lembaga keuangan, instansi pemerintah, atau pihak-pihak lain dalam rangka peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, atau pelestarian lingkungan.
- e. Memberikan informasi baru tentang peluang pasar, komoditas-komoditas, teknologi baru, dan peluang kerja.
- f. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok jika diminta.
- g. Mendampingi kelompok melakukan kegiatan-kegiatan seperti konservasi lahan.

3. Tahap terminasi

Setelah jangka waktu tertentu, masyarakat dianggap sudah mencapai tahap mandiri sehingga proses pemberdayaan harus diakhiri. Namun demikian, pendamping harus yakin bahwa proses pemberdayaan akan terus berlanjut meskipun masyarakat tidak lagi didampingi. Dalam hal ini, kelompok harus dapat secara mandiri menjadi pendamping bagi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap terminasi atau penghapusan diri atau tahap berakhirnya kegiatan pendampingan, adalah berupa penyerahan pengelolaan atau program kegiatan sepenuhnya kepada masyarakat karena mereka dinilai sudah mencapai taraf mandiri. Kriteria masyarakat yang sudah mandiri sehingga pendampingan perlu diakhiri antara lain:

- a. Masyarakat sudah sadar bahwa proses kapasitas (animasi dan fasilitasi) dari orang luar (pendamping) tidak dibutuhkan lagi.
- b. Kelompok masyarakat dampingan sudah mandiri dan mampu bertindak sebagai pendamping bagi anggotanya (pendamping internal).
- c. Kelompok sudah mampu menjadi fasilitator bagi kegiatan usaha dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh anggota.

Jika masyarakat sudah mandiri, pendamping dapat meninggalkan lokasi atau sesekali datang ke lokasi. Dalam hal ini, pendamping berperan sebagai mitra dengan tugas sebatas:

- a. Memberikan informasi baru tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha dan lingkungan seperti teknologi usaha tani yang ramah lingkungan, atau metode baru tentang cara pemadaman api, dan peluang kerja (lihat Bab 3).
- b. Menjembatani hubungan kelompok dengan mitra usaha, pemerintah, dan mitra lain terkait issue lingkungan.

- c. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok jika diminta.

Menarik diri dari keterlibatan secara langsung boleh jadi merupakan kegiatan akhir pendamping di lokasi tertentu. Namun, bagi masyarakat justru menjadi titik awal dimana mereka harus mengelola kegiatan secara mandiri, berkelanjutan, dan berhadapan dengan persoalan nyata yang lebih kompleks. Tahap berikutnya yang perlu dilakukan oleh pendamping dari luar adalah menggarap “lahan baru” dengan menjadi pendamping di desa lain atau melanjutkan ke jenjang perjuangan yang lebih luas, misalnya berupaya mempengaruhi kebijakan publik setempat agar memberikan dukungan kepada upaya-upaya pertanian lestari dan konservasi lahan. Untuk itu jejaring yang ada diperluas, misalnya dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, media massa, perbankan, koperasi, pengusaha, LSM, dan LKM.

F. PENYUSUNAN LAPORAN

Kegiatan pendampingan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang bernaung di bawah instansi pemerintah, lembaga independen (LSM), maupun sektor swasta (perusahaan yang memiliki divisi pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka). Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus bertanggung jawab kepada lembaganya.

Guna mengetahui kinerja pendamping, lembaga pemberdayaan masyarakat memerlukan laporan yang secara berkala dibuat pendamping. Dengan adanya laporan tersebut, lembaga dapat mengetahui kinerja pendamping dan kendala yang dihadapi sehingga dapat turut memberikan solusi dan dukungan apabila diperlukan. Laporan tersebut biasanya terdiri atas laporan pendahuluan, laporan berkala, laporan insidental, dan laporan akhir.

1. Laporan pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi kondisi awal desa dampingan serta tujuan pemberdayaan. Laporan ini dibuat setelah pendamping melakukan orientasi dan PRA. Jika sebelum pendampingan sudah dilakukan PRA, maka pendamping tidak perlu membuat laporan PRA. Laporan tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: latar belakang pemberdayaan, alasan pemilihan lokasi, dan tujuan pemberdayaan.
- b. Kondisi umum lokasi (secara garis besar)
- c. Kendala: perkiraan kendala pendampingan yang akan dihadapi, solusi/kegiatan yang akan dilakukan, dan dukungan yang diperlukan dari lembaga.
- d. Rencana pendampingan: jumlah kelompok yang akan didampingi, jadwal pendampingan, serta usulan biaya/dana/sarana yang diperlukan, baik dana stimulan yang akan disalurkan kepada masyarakat maupun untuk operasional pendampingan.
- e. Hal-hal lain yang belum tercantum pada butir-butir di atas, tapi cukup menarik atau penting untuk dilaporkan

2. Laporan berkala

Laporan berkala dibuat dengan periode waktu sesuai permintaan lembaga. Biasanya, laporan dibuat setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun sekali, tergantung dari lamanya proses pendampingan. Semakin lama kegiatan pendampingan, jangka waktu pembuatan laporan berkala semakin lama.

Laporan berkala memuat perkembangan proses pemberdayaan yang sudah dilakukan, meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan pendampingan: sejauh mana proses animasi dan fasilitasi dilaksanakan, apa yang telah dikembangkan, jumlah kelompok yang dikembangkan, kegiatan penyadaran dan motivasi, kegiatan mediasi, pelatihan teknis (budidaya ramah lingkungan, rehabilitasi lahan, dan lain-lain) yang telah dan sedang dilakukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pendampingan.
- b. Perkembangan kegiatan pelestarian lingkungan: jumlah, jenis, dan kondisi pohon yang ditanam, pembuatan tabat, pembuatan sekat bakar, perubahan cara tanam yang ramah lingkungan (misalnya, dari membuka lahan dengan cara bakar menjadi pembukaan lahan tanpa bakar), pembuatan kompos, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelestarian lingkungan.
- c. Perkembangan kelompok: jumlah anggota, kepengurusan, aturan, kegiatan, permodalan, dan kendala pengembangan.
- d. Perkembangan perekonomian anggota: perkembangan kondisi usaha dan pendapatan, serta kendala perkembangan perekonomian masyarakat.
- e. Dukungan yang diperlukan dari lembaga untuk memperlancar proses pendampingan, termasuk usulan anggaran biaya bila diperlukan.

3. Laporan insidentil

Selama proses pemberdayaan, pendamping pastilah menemukan kejadian-kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kinerja kegiatan di lapang dan dipandang perlu untuk segera melaporkannya kepada lembaga. Kejadian tersebut bisa berupa bencana alam, kerusakan lingkungan, konflik antar masyarakat atau antara masyarakat dengan pendamping, serta masuknya program pembangunan lain secara mendadak, terutama yang menyangkut masalah perekonomian masyarakat dan atau kualitas lingkungan.

Laporan berisi penyebab kejadian, jenis kejadian, eskalasi (penyebaran) dampak dari kejadian tersebut, pihak-pihak yang terkait, langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi kejadian dan dampaknya, serta dukungan yang diperlukan dari lembaga.

4. Laporan akhir

Laporan akhir merupakan dokumen yang dibuat pada akhir proses pemberdayaan atau pendampingan. Selain sebagai bahan pertanggungjawaban kepada lembaga pelaksana program pemberdayaan, laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut oleh pihak lain.

Laporan ini merupakan integrasi dari berbagai laporan sebelumnya (laporan pendahuluan, laporan berkala, dan laporan insidental) yang telah disusun. Namun, laporan ini disajikan secara komprehensif dan sistematis dengan memperhatikan kronologi kegiatan-kegiatan pendampingan di lapang, capaian yang diperoleh (*output*, *outcome*, maupun *impact*), hambatan-hambatan, dan solusi yang telah dikerjakan.

Apabila penyusunan rencananya sudah memperhatikan kaidah-kaidah SMART, maka hal penting berikutnya yang perlu dikaji dalam laporan tersebut adalah sudahkah yang direncanakan dan yang diimplementasikan bisa menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact*. *Output* atau keluaran merujuk pada hasil akhir sebuah kegiatan yang bisa langsung dilihat saat kegiatan itu selesai. Sedangkan *outcome* dapat dilihat dari perubahan yang tampak (terukur) di masyarakat, khususnya perubahan pola perilaku/produktivitas, yang salah satunya didukung oleh tercapainya output kegiatan. *Impact* diterjemahkan sebagai dampak, merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam sebuah program pemberdayaan. Biasanya baru dapat dilihat dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang.

G. CATATAN UNTUK PENDAMPING

Tidak serta-merta sebuah impian bersama yang diharapkan oleh pendamping dan masyarakat dapat terwujud. Terlalu banyak faktor eksternal yang ada di luar kendali pendamping. Dalam realitasnya, pendamping akan menemukan banyak kejadian dan masalah yang tidak dapat dicari jawabnya dalam teori. Kejadian demi kejadian, kegagalan demi kegagalan, menjadi pelajaran dan pengalaman yang membuat pendamping menjadi lebih dewasa, trampil, dan bijak. Berikut adalah beberapa catatan pengalaman pendampingan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendampingi masyarakat.

1. Mendampingi kelompok tidak pernah dapat dilepaskan dari upaya menghormati setiap anggota kelompok sebagai manusia yang dengan segenap tenaga dan pikirannya telah berupaya namun belum berhasil. Mereka belum berhasil menemukan jalan karena masalahnya memang jauh lebih rumit dari apa yang terlihat dan tak dapat diatasi oleh perseorangan atau bahkan mungkin kelompok.
2. Diperlukan sebuah kesadaran, bahwa kita secara langsung atau tidak telah memiliki kontribusi kepada perusakan alam. Misalnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap perusakan itu sendiri, namun memilih menggunakan produk yang tidak hemat energi, produk yang tidak dapat didaur ulang, mengkonsumsi bahan makanan yang diambil dari sumber yang sarat pupuk kimia dan pestisida, kebijakan menekan harga produk pertanian semurah-murahnya di bawah batas kewajaran, dan sebagainya. Lalu, siapakah kita yang kemudian merasa perlu memotivasi dan menyadarkan orang lain tentang perusakan alam?

Jika kesadaran itu telah menjadi milik bersama, maka pada tingkat selanjutnya adalah membangun pemahaman bahwa penyadaran dan pengembangan motivasi merupakan “gerakan” bersama antara pendamping dan masyarakat. Karena itu, pada titik tertentu masyarakat dan fasilitator akan mengalami perubahan bersama menuju tingkat yang lebih bermakna. Jadi, benarlah pernyataan

bahwa upaya memotivasi dan mengupayakan penyadaran bagi orang lain tak dapat dipisahkan dari upaya memotivasi dan penyadaran diri sendiri secara terus-menerus.

3. Apa yang dicapai oleh kelompok dampingan boleh jadi sama dengan apa yang dicapai oleh masyarakat yang tidak didampingi. Lantas apa manfaat pendampingan selama ini ?? Namun kejadian demikian harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan.
4. Keberhasilan pendampingan kelompok tak dapat diperkecil menjadi sekadar kelompok yang memiliki karakteristik mudah diorganisir, mengadakan pertemuan rutin, rajin menabung, taat pada aturan, dan sebagainya. Yang menjadi lebih bermakna adalah terlepasnya mereka dari jeratan lingkaran setan yang semakin memiskinkan, proses marginalisasi yang semakin meminggirkan, dan kerusakan alam yang mengharuskan mereka semakin merusak untuk sekadar bertahan hidup. Keberhasilan itu mesti juga tercermin pada peningkatan motif perilaku mereka dari semata-mata bertahan hidup menuju pemenuhan diri. Sesuatu yang berlaku umum atas seluruh umat manusia, termasuk pendamping mereka.
5. Keinginan secara sadar agar kelompok berkembang secara optimal tidak perlu dibarengi dengan perasaan was-was, bahwa kemampuan kelompok suatu saat akan melampaui pendampingnya. Kalau energi diarahkan untuk membatasi perkembangan kelompok, maka pendamping pun akan kehilangan energi untuk bertumbuh bersama kelompok.

Kotak 12

Guru yang arif, petani itu sendiri


Berikut ini beberapa motto petani yang perlu dipahami:

- o *Jangan puas bisa memanen semangka yang banyak dan besar pada saat musim semangka. Tantangan petani adalah memanen semangka bukan pada musimnya. Tak peduli kecil dan sedikit, karena pasti harganya mahal.*
- o *Menawarkan semangka pada pedagang, jangan sekaligus mempertontonkan jumlah semangka yang menumpuk. Pedagang akan tahu kelemahan. Tanyakan jumlah yang dipesan, berusaha untuk memenuhinya.*
- o *Lahan di pekarangan yang kecil sedapat mungkin ditanami bermacam tanaman harian, mingguan, dan musiman. Jangan lupa mengupayakan tanaman bibit. Karena harga bibit lebih mahal.*
- o *Jika suatu saat ada tanaman favorit lainnya, berpikirlah untuk bagaimana menyiapkan bibitnya. Jangan ikut arus untuk beramai-ramai menanam tanaman favorit ini.*
- o *Perilaku efisiensi perlu diterapkan saat bertanam. Apa yang dikerjakan dengan jumlah tenaga manusia yang banyak selama 1 hari penuh, sesungguhnya setara dengan bekerja rutin selama setengah jam sendirian tiap hari tanpa biaya.*
- o *Begitu bayi lahir, tanamlah tanaman keras atau peliharalah ternak berkaki empat. Kalau anak sudah besar dan perlu biaya sekolah, kayu tanaman keras itu siap dijual, demikian juga ternaknya.*
- o *Jangan memelihara sapi kalau belum ada pohon kelapa yang tingginya melewati rumah. Ternak itu pasti akan mati. (setelah ditelusuri hakekatnya, ternyata latar belakang pernyataan ini adalah belum stabilnya kondisi lingkungan, sehingga pakan ternak pun belum tersedia)*




Bab 7

Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat



Bagian ini menjelaskan aspek-aspek pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan manfaat kelompok, ukuran, syarat penumbuhan, penyusunan PD/PRT, struktur organisasi, dan pembiayaannya serta peran kelompok dalam upaya pelestarian lingkungan.



Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui individu maupun kelompok. Ditinjau dari berbagai segi, pemberdayaan melalui kelompok lebih efisien, strategis, dan berkelanjutan sehingga pendekatan ini sering menjadi acuan bagi pemerintah maupun LSM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

A. MANFAAT KELOMPOK

Kelompok yang dibentuk atau dikembangkan dapat memudahkan dan meningkatkan efektivitas pendampingan. Namun, itu bukanlah tujuan utama pembentukan kelompok. Masyarakat miskin yang termarginalisasi (bahkan

teratomisasi) tak dapat membantu diri mereka sendiri secara individu. Kelompok memiliki kekuatan yang unik, yaitu kekuatan pembangun dan kekuatan pengubah. Kekuatan inilah yang dimainkan dalam proses kapasitas. Dalam beberapa kasus, kelompok memang dapat menimbulkan masalah baru, terutama apabila fungsi kelompok sudah mulai diselewengkan dan berakibat ketidakpercayaan, konflik, dan permusuhan.

Secara lebih rinci, manfaat kelompok dapat dilihat dari sisi masyarakat dan dari sisi pelaksana pemberdayaan (pendamping). Sebagaimana disebutkan dalam Bab 4, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan wadah proses pembelajaran bagi anggotanya, sarana berinteraksi untuk saling berbagi pengalaman dan pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan mitra usaha, meningkatkan posisi tawar, melakukan aktivitas gotong royong, memupuk modal (melalui kegiatan simpan-pinjam), serta mengakses sumber modal dan informasi.

Bagi pegiat pemberdayaan masyarakat, kelompok merupakan pintu masuk berbagai program yang akan dilaksanakan, seperti penyadaran dan penumbuhan motivasi, diseminasi teknologi dan informasi, pelestarian lingkungan, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Kelompok juga merupakan sarana untuk menggali informasi yang berkembang di lokasi. Selain itu, pemberdayaan melalui kelompok juga akan meringankan beban pendamping dalam menghadapi berbagai kendala selama proses pendampingan. Sulit bagi seorang pendamping untuk melakukan pendampingan secara individual dalam sebuah desa. Demikian sebaliknya, pendamping juga akan mengalami kesulitan apabila harus sekaligus mendampingi seluruh masyarakat dalam satu desa.



Gambar 18. Suasana diskusi kelompok di Desa Sungai Merang, Sumatra Selatan (Dokumentasi oleh: Wibisono, 2004)

B. UKURAN KELOMPOK

Dilihat dari ukurannya, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kelompok. Pendekatan pertama melalui kelompok kecil beranggotakan 20-30 orang dan sifatnya tidak formal. Pendekatan seperti ini telah dilakukan oleh LSM Bina Swadaya pada lebih dari 3.000 KSM yang tersebar di seluruh Indonesia. Departemen Pertanian juga menggunakan kelompok kecil, yaitu kelompok tani, sebagai pintu masuk diseminasi teknologi dan informasi. Sementara WI-IP menggunakan kelompok tani yang sudah ada (baik yang masih aktif maupun tidak) atau membentuk kelompok baru sebagai pintu masuk bagi program pemberdayaan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan semacam ini relatif memerlukan banyak pendamping dan dapat diterapkan pada masyarakat yang pendidikan, ekonomi, dan ketrampilannya masih terbatas. Namun, berdasarkan pengalaman, pendekatan kelompok-kelompok kecil ini cenderung kurang cepat perkembangannya karena perputaran modal yang lambat dan akses pasar yang kurang terbuka. Oleh karena itu, Bina Swadaya telah mencoba meramu KSM-KSM ini kedalam wadah yang lebih besar dengan membentuk BKKSM (Badan Koordinasi Kelompok Swadaya Masyarakat). Terbentuknya BKKSM memungkinkan KSM untuk dapat mengakses modal atau pinjaman dari KSM lain melalui pengembangan program yang disebut “Tabungan Setia Kawan” (TSK) dan “Kredit Setia Kawan” (KSK).

Pendekatan kedua adalah penumbuhan kelompok dengan skala besar. Pada awal penumbuhannya, kelompok ini hanya berskala kecil saja, tapi secara perlahan berkembang menjadi kelompok besar dan formal. Kelebihannya, secara bertahap masyarakat (pengurus atau pengelola kelompok) akan melakukan pendampingan secara mandiri terhadap kelompok yang lebih kecil atau individu. Namun, kelompok besar ini memerlukan pengelolaan yang lebih serius dengan dukungan sistem administrasi, sarana, dan manajemen yang relatif lebih kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan seperti ini dapat dilakukan pada masyarakat yang tingkat pendidikannya sudah relatif baik serta kondisi perekonomian yang relatif sudah stabil.

C. SYARAT PENUMBUHAN KELOMPOK

Sekerumunan orang yang terlihat sering ngobrol bersama sering kali disebut sebagai “kelompok”. Namun bukan itu yang dimaksud dengan “kelompok” dalam pembahasan buku ini. Kelompok yang dimaksud adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam kegiatan tertentu, memiliki tujuan yang sama, memiliki norma dan pola hubungan tertentu, serta bertemu dan berinteraksi secara teratur.

Di pedesaan, pengembangan kelompok secara formal maupun non formal telah banyak dilakukan. Antara lain adalah Koperasi Unit Desa (KUD), kelompok tani, Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, arisan, pengajian, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, sebagian kelompok yang dibentuk masyarakat tidak dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, bahkan bubar. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut dibentuk dan dikembangkan tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan kelompok.

Syarat penumbuhan dan pembentukan kelompok antara lain:

1. Tumbuh dari kesadaran masyarakat.
2. Dibentuk dan diawasi oleh anggota.
3. Adanya saling kepercayaan antara anggota dan pengurus.
4. Modal awal bersumber dari keswadayaan anggota.
5. Mempunyai faktor perekat berupa kepentingan bersama atau manfaat yang nantinya dapat dipetik dari terbentuknya kelompok.
6. Memiliki kejelasan aturan atau norma yang merupakan hasil kesepakatan bersama anggota-anggotanya dan bersifat mengikat
7. Kepemimpinan yang efektif.
8. Memperoleh pendampingan yang efektif.

Delapan persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kelompok yang dibentuk dapat tumbuh seperti yang diharapkan.

1. Tumbuh atas kesadaran masyarakat

Banyak kelompok dibentuk karena adanya target pembentukan kelompok yang sudah diatur oleh pemerintah atau LSM. Tanpa melalui proses penyadaran terlebih dahulu, masyarakat “terpaksa” ikut menjadi anggota dengan aturan main yang sudah ditentukan oleh lembaga. Sering terjadi, seorang petugas datang ke desa, mengajak masyarakat membentuk kelompok dalam tempo 1 hari, lalu meninggalkan lokasi. Masyarakat bersemangat menjadi anggota kelompok, karena petugas tersebut menjanjikan sejumlah bantuan apabila kelompok dan kepengurusannya sudah terbentuk. Beberapa waktu kemudian, petugas datang kembali dan membawa bantuan seperti yang pernah dijanjikan. Kasus ini menggambarkan bahwa kelompok dibentuk dengan tujuan hanya untuk menangkap bantuan berupa kucuran dana segar atau menangkap pinjaman yang disalurkan oleh lembaga yang bersangkutan. Masyarakat mau berkumpul dan menjadi anggota karena mendengar janji petugas atau lembaganya, tanpa memahami konsekuensinya. Mereka sering kali justru tidak paham mengenai manfaat dan aturan pembentukan kelompok yang mendasar. Tak sedikit pula masyarakat yang berebut menjadi pengurus karena peluang untuk memperoleh porsi bantuan biasanya lebih besar. Biasanya, kelompok semacam ini hanya bertahan hidup seumur jagung. Apabila proyek usai dan petugas meninggalkan lokasi, kelompok sudah tidak aktif lagi. Buntutnya, acap kali ditemukan pengurus yang melakukan penyelewengan dana, sementara masyarakat tidak lagi peduli karena tidak merasa memiliki. Pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi di masa-masa lalu ini sering menjadi hambatan dalam memotivasi masyarakat untuk mau berkelompok atau membentuk sebuah koperasi, meskipun tujuan dan kegiatannya lebih baik dan jelas.

Sepintas, model pembentukan kelompok tersebut tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat. Namun, jika dikaji lebih jauh, ternyata ada pengaruh negatif yang muncul. Pertama, masyarakat menjadi apatis terhadap upaya-upaya pembentukan kelompok. Kedua, tipisnya tingkat kepercayaan masyarakat dan berakibat pada terhambatnya perkembangan

modal sosial. Lebih jauh lagi, masyarakat menjadi saling curiga, bertengkar, dan pecahlah konflik. Pada masyarakat yang sudah terlanjur dalam kondisi seperti ini, program penumbuhan kesadaran memakan waktu relatif lebih lama. Oleh sebab itu, kelompok harus dibentuk sesudah masyarakat sadar betul tentang manfaat pembentukan kelompok.

2. Dibentuk dan diawasi oleh masyarakat

Kelompok yang baik dibentuk dari, oleh, untuk, dan diawasi oleh masyarakat (anggota). Pendamping dapat memberikan gambaran tentang struktur organisasi yang bisa dikembangkan, tapi biarlah masyarakat yang menentukan modifikasinya sesuai kebutuhan dan bidang kegiatannya. Contohnya: apabila kelompok mengembangkan kegiatan simpan pinjam, maka perlu dibentuk seksi kredit; atau jika kegiatan kelompok dalam bidang usaha, maka diperlukan sebuah seksi usaha.

Pendamping boleh memberikan saran dalam memilih pengurus yang bisa mengelola kelompok dengan baik, namun biarlah masyarakat yang mengambil keputusan yang dianggapnya terbaik. Strategi ini bukan untuk menghindarkan pendamping dari tanggungjawab atas ketidakberhasilan pengembangan kelompok di masa depan, melainkan sebagai pembelajaran bagi anggota kelompok agar bertanggung jawab atas pilihan dan keputusannya. Itu juga menjadi implementasi semangat filosofi “dari, oleh, dan untuk” anggota.

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang sistemnya dirumuskan dan dilaksanakan oleh anggota. *Punishment* atau sanksi yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh masyarakat terbukti lebih dipatuhi daripada sanksi yang dirumuskan oleh orang lain. Sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat biasanya lebih tegas dan membuat si pelanggar aturan menjadi lebih segan atau malu untuk tidak mematuhi. Biasanya, masyarakat lebih takut bila dikucilkan oleh tetangga daripada ditegur atau diberi sanksi oleh pejabat.

Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai penguat agar setiap anggota berkepentingan untuk melakukan pengawasan ialah adanya investasi materiil yang ditanamkan oleh anggota untuk kelompok.

Contohnya, iuran pokok dan iuran wajib. Beberapa LSM seperti PINBUK juga mengembangkan investasi dalam bentuk saham. Dengan sistem ini, anggota sebagai pemilik saham akan berusaha keras mempertahankan kelompok. Karena, jika kelompok bubar atau pengurusnya menyeleweng, sebagian dari simpanannya akan hilang pula.

Pengawasan kegiatan kelompok bisa dikembangkan dengan membentuk lembaga yang disebut “badan pengawas” atau “badan pemeriksa”. Fungsinya tidak hanya mengawasi keuangan atau investasi anggota, melainkan juga menangkap aspirasi anggota dan menyampaikannya kepada pengurus, serta mengawasi kinerja kepengurusan. Pengawasan juga bisa dilakukan melalui sistem administrasi yang ketat dan transparan, sehingga semua anggota dapat melihat perkembangan kelompoknya.

3. Sikap saling percaya

Sikap saling percaya di antara anggota dan pengurus merupakan modal sosial utama bagi keberlangsungan kelompok. Suasana itu hanya dapat diciptakan apabila semua anggota menaati peraturan, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Banyak kelompok, terutama yang bergerak di bidang keuangan dan ekonomi, mengalami stagnasi atau bubar karena penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus. Tindakan seperti itu akan menyebabkan sikap saling curiga dan tidak jarang menimbulkan konflik. Jika hal ini terjadi, biasanya masyarakat mengalami trauma untuk kembali bergabung dalam kelompok.

4. Modal swadaya

Sebagian besar kelompok yang sejak awal pembentukannya langsung dibiayai oleh pihak lain tidak mampu berkembang seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa tidak menanam investasi, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai anggota kelompok tidak besar. Kesiediaan masyarakat menyisihkan sebagian hartanya untuk mengembangkan kegiatan kelompok merupakan indikasi tumbuhnya kesadaran masyarakat yang mudah dilihat. Semakin besar investasi yang ditanamkan seorang anggota dalam kelompok, semakin

besar pula rasa memiliki dan rasa ingin mempertahankan kelompoknya. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak memulai dengan bantuan uang saat proses penumbuhan kelompok. Strategi pengucuran dana ini mengabaikan sumberdaya yang dimiliki masyarakat dan biasanya meruntuhkan motivasi untuk berinvestasi dalam kelompok.

5. Faktor perekat

Motivasi berupa kepentingan anggota untuk menarik manfaat dari terbentuknya kelompok akan menjadi perekat (*cohesiveness*) bagi setiap anggota untuk terus terlibat aktif dalam setiap kegiatan kelompok. Perekat dapat berupa manfaat ekonomi, lingkungan, sosial, dan keagamaan. Sebagai contoh, KSM dapat memberikan manfaat berupa dukungan permodalan bagi petani atau para pelaku usaha mikro melalui kegiatan simpan-pinjam. Kelompok tani dapat memberikan manfaat berupa peningkatan ketrampilan dan pengetahuan. Kelompok pemadam kebakaran gambut dapat memberikan rasa aman dari bahaya kebakaran yang menyerang lahan dan pemukiman. Demikian pula halnya dengan kelompok pengajian yang dapat meningkatkan keimanan dan pengetahuan masyarakat tentang agama.

Sebuah kelompok dapat dibentuk karena satu atau lebih kepentingan (manfaat) yang dapat dirasakan oleh anggotanya. Kelompok tani, selain bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan ketrampilan, juga dapat memberikan manfaat lain seperti permodalan, apabila didalamnya juga dilakukan kegiatan simpan-pinjam. Kelompok itu juga dapat menjadi sarana mempertebal keimanan apabila sepakat untuk melakukan pengajian bersama sebulan sekali. Kepentingan atau manfaat apa yang akan menjadi fokus pembentukan sebuah kelompok tergantung pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta tujuan program pemberdayaan.

Beberapa LSM memiliki spesifikasi dalam mengembangkan kelompok. Contohnya, KSM-KSM yang didampingi Bina Swadaya dan PINBUK lebih memfokuskan kegiatannya pada pengembangan aspek permodalan. Perekat berupa penyediaan permodalan tersebut bisa juga menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi program-program pemberdayaan lainnya, seperti kesehatan, pertanian, maupun advokasi. Bina Swadaya pernah melakukan

program pendidikan untuk pemilih pemula (*voter education*) menjelang pemilu dan bagaimana mengkritisi pelayanan publik. WI-IP, misalnya, lebih terfokus pada konservasi lahan basah. Namun, kelompok dampungannya juga dapat memfasilitasi pemberian modal bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi sebagai pintu masuk untuk mencapai tujuan konservasi.

Dengan adanya faktor perekat tersebut, anggota akan merasa tidak rela jika kelompoknya bubar, mengalami kemunduran, atau diselewengkan oleh pengurus. Rasa memiliki (*sense of belonging*) dan kebanggaan sebagai anggota kelompok pun terbangun dengan mantap. Lebih-lebih bila kelompok memiliki prestasi yang menonjol.

Keikatan kelompok dapat dilihat pada pekatnya kadar hubungan dan perasaan antaranggota, semangat serta kebersamaannya. Keikatan yang tepat dapat mengatasi emosi serta ketegangan para anggota. Dalam keadaan demikian, peluang mencapai efektivitas yang tinggi dapat menjadi milik kelompok.

6. Memiliki norma yang jelas dan dipatuhi

Norma kelompok merupakan aturan yang jelas dan disepakati oleh sesama anggota kelompok. Kesepakatan ini harus diikuti oleh adanya kesanggupan (komitmen) anggota maupun pengurus untuk mematuhi aturan yang sudah disusun bersama. Komitmen dapat dideteksi melalui kesediaan anggota mematuhi aturan dan melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Komitmen yang meningkat dari waktu ke waktu akan mengarah pada peningkatan efektivitas.

7. Kepemimpinan yang efektif

Pemimpin akan mampu menggerakkan kelompok secara efektif apabila mampu menanamkan rasa percaya atas kepemimpinannya kepada para anggota kelompok sehingga anggota mau menerima dan mengakui kedudukannya. Pemimpin seperti ini harus memiliki sifat jujur, terbuka, dan mampu memotivasi anggota kelompok maupun pengurus lainnya untuk melaksanakan fungsinya dan mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati.

8. Pendampingan yang efektif

Pendampingan yang baik dan efektif menjadi kunci keberhasilan pengembangan kelompok swadaya di pedesaan (Najiyati, 2003). Namun, untuk menciptakan pendamping yang baik, tidaklah mudah. Tidak ada pendamping yang siap pakai. Seorang pendamping dipandang baik apabila mau belajar bersama masyarakat yang didampinginya. Pendamping yang memiliki kriteria sebagaimana diuraikan dalam Bab 6, biasanya mampu memotivasi dan mendampingi masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan kelompok. Jika pendamping hanya memiliki target terbentuknya kelompok secara instan, maka kelompok tidak akan memiliki akar kuat, cenderung berhenti apabila proyek atau program pendampingan selesai.

D. UNSUR-UNSUR DALAM KELOMPOK

Beberapa unsur yang perlu terdapat dalam kelompok antara lain:

1. Organisasi

Struktur organisasi kelompok yang terbentuk harus memberikan kejelasan kedudukan, hubungan, dan fungsi anggota maupun pengurus.

2. Administrasi

Dalam arti sempit, merupakan sistem tata buku yang disepakati untuk memberikan jaminan bahwa segala sesuatunya diproses, didokumentasikan, dan dapat diakses oleh seluruh anggota secara terbuka. Dengan sistem tersebut, aset dapat diketahui, diamankan, dan dikelola. Bertolak dari situ pula, perkembangan dapat dipastikan terjadi.

3. Modal

Segala hal yang menjadi sumberdaya kelompok, meliputi uang, natura, keahlian, komitmen, dan dukungan.

4. Kegiatan produktif

Segala hal yang diupayakan dan menjadi hasil yang dapat diabdikan untuk kepentingan anggota maupun masyarakat luas. Usahanya dapat berupa produk maupun jasa seperti jasa simpan-pinjam. Dengan itu keberadaan kelompok dapat memberi arti dan memperteguh alasan mengapa kelompok dibentuk.

5. Akseptasi dan jejaring

Segala hal yang menyangkut upaya perluasan hubungan dengan pihak luar, pemberian manfaat yang meluas, mulai kepada anggota hingga masyarakat luas. Apabila kelompok bisa berakar atau diterima dengan baik oleh masyarakat (*acceptable*), maka kelompok akan memperoleh dukungan dan legitimasi. Jejaring pun dapat dikembangkan.

Untuk mengetahui seberapa jauh unsur-unsur dalam kelompok berjalan sesuai dengan yang diharapkan, biasanya dilakukan *checklist* (Tabel 8). Checklist tersebut dapat memandu seluruh anggota untuk meninjau kelengkapan perangkat kelompok. Sudahkah perangkat tersebut berfungsi secara rutin? Sudahkah ia menghasilkan sesuatu yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, termasuk partisipasi dan kemandirian? Sudahkah ia berlangsung/terjadi secara berkelanjutan dan meluas? Sudahkah ia memberikan manfaat seperti meningkatnya dukungan terhadap kelompok atau kegiatan-kegiatannya? Kolom-kolom dalam tabel berikut dapat senantiasa ditambahkan kesamping sesuai kebutuhan maupun tingkat perkembangan kelompok sekaligus menjadi pedoman penyusunan rencana kerja.

Tabel 8. Contoh instrumen untuk melakukan *checklist* unsur-unsur kelompok

Bidang Hasil Pokok (1)	Ada (2)	Berfungsi (3)	Mendatangkan hasil (4)
Organisasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga ▪ Organogram / Struktur ▪ Fungsionaris ▪ Uraian tugas ▪ Pertemuan berkala 			
Administrasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi organisasi ▪ Administrasi keuangan ▪ Laporan Kegiatan ▪ Dokumentasi 			
Modal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tabungan kolektif ▪ Tabungan pribadi ▪ Dana penyertaan ▪ Keuntungan usaha yang tidak dibagi 			
Kegiatan produktif <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pelayanan sosial untuk anggota (arisan, pengajian, dll) ▪ Kegiatan usaha (simpan-pinjam, penyediaan saprotan, saprodi) ▪ Kegiatan pendukung (pendidikan, kursus, pelatihan) 			
Akseptasi dan jejaring <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan jejaring ▪ Hubungan kemitraan baru ▪ Kontribusi / dukungan pihak luar ▪ Pemberian bantuan untuk pihak luar 			

E. PENYUSUNAN PERATURAN KELOMPOK

Pedoman Dasar (PD) dan Pedoman Rumah Tangga (PRT) merupakan perangkat organisasi kelompok. Penyusunan PD/PRT sangat mungkin untuk tidak rampung secara sempurna dalam satu kali proses penyusunan. Biasanya perangkat tersebut dibuat oleh para pendiri, pengurus, dan anggota kelompok dalam forum “rapat anggota”.

PD/PRT merupakan aturan tertulis yang menjadi panduan bagi pengurus dan anggota (fungtionaris) kelompok dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. PD merupakan peraturan yang hanya dapat diubah oleh Rapat Anggota sebagai forum musyawarah sekaligus pengambilan keputusan tertinggi dalam kelompok. Peraturan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Nama organisasi/kelompok
- ❖ Alamat lengkap dan tempat kedudukan
- ❖ Azas dan tujuan organisasi
- ❖ Struktur organisasi
- ❖ Ketentuan keanggotaan
- ❖ Ketentuan pemilihan pengurus
- ❖ Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan rapat
- ❖ Pembiayaan
- ❖ Lingkup kegiatan/ usaha
- ❖ Pembentukan dan pembubaran pengurus
- ❖ Ketentuan-ketentuan dalam program pelestarian lingkungan

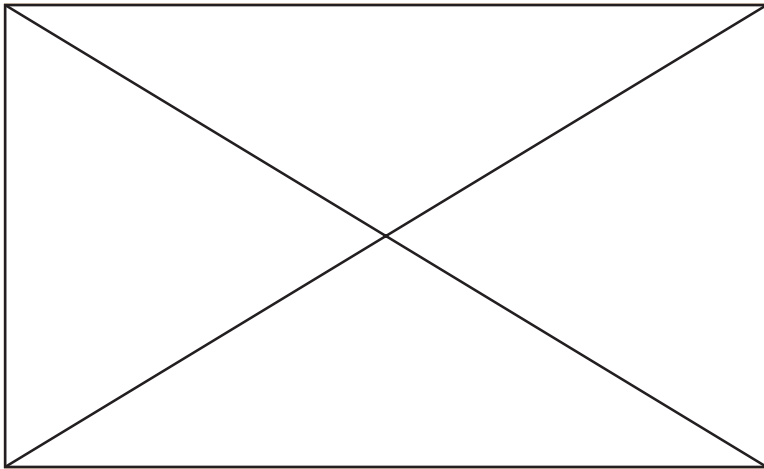
Sedangkan PRT merupakan penjabaran dari PD yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Peraturan tersebut biasanya memuat hal-hal yang lebih teknis dan operasional.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi kelompok dapat dirancang sesuai kebutuhan dan aspirasi anggota. Besar-kecilnya organisasi biasanya disesuaikan dengan jumlah kegiatan dan anggota. Semakin banyak jumlah kegiatan dan anggota, biasanya membutuhkan pengurus yang lebih banyak. Berikut ini adalah bentuk beberapa contoh organisasi kelompok yang banyak digunakan.

1. Struktur organisasi KSM dampingan Bina Swadaya

Struktur organisasi KSM yang disebut sebagai “organogram” cukup sederhana (Gambar 19). Kelompok biasanya terdiri atas 20-25 orang anggota. Setidaknya terdapat 4 perangkat organisasi, yaitu Rapat Anggota, Badan Pengurus, Badan Pemeriksa, dan Anggota.



Keterangan:

- : Garis pertanggung jawaban
- : Garis pelayanan
- : Garis kontrol atau pengawasan

Gambar 19. Bagan organogram KSM

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan keorganisasian KSM antara lain:

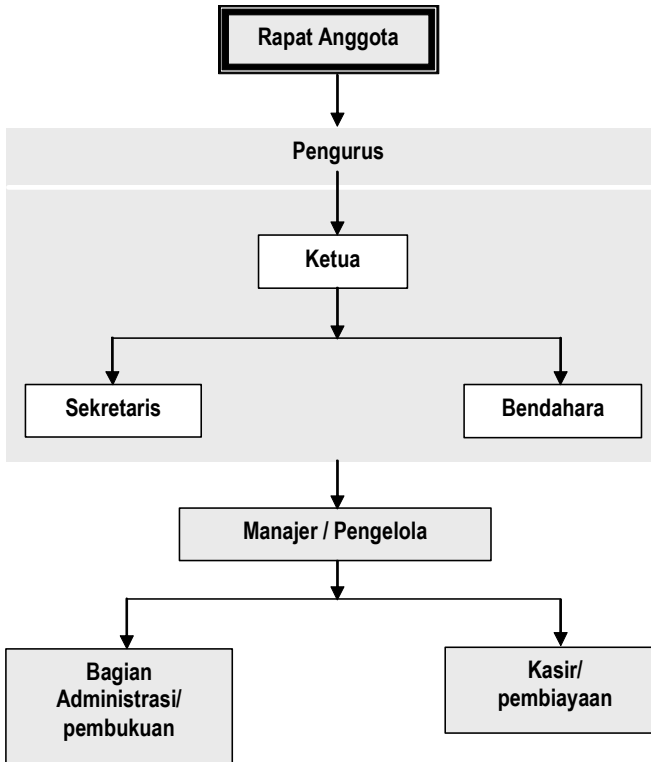
- ❖ Kebutuhan pengembangan organisasi dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan atau potensial untuk dijalankan.
- ❖ Tingkat kesadaran dan perkembangan pengetahuan anggota, khususnya mereka yang diharapkan memegang fungsi-fungsi keorganisasian tersebut.

2. Struktur organisasi LKM model PINBUK

Struktur organisasi kelompok Lembaga Keuangan Mikro (LKM) binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), Gambar 20, dirancang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pengurus. LKM binaan Pinbuk biasanya menggunakan nama depan “*Baitul Maal Wat Tamwil*” atau “*Balai Mandiri Terpadu*” (BMT) dengan struktur organisasi yang memisahkan pengurus dengan pengelola. LKM ini biasanya dikembangkan menjadi kelompok besar dan formal meskipun pada mulanya mungkin hanya didirikan oleh sekelompok orang yang jumlahnya kecil.

Pengurus kelompok yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara, dipilih dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Pengurus biasanya terdiri atas pemegang saham dan pendiri kelompok. Pengurus mempunyai tugas memilih dan memberhentikan pengelola (manajer dan staf manajer), membuat program kerja, dan melakukan pengawasan.

Pengelola terdiri atas manajer, bagian administrasi, dan kasir. Semuanya bertanggung jawab kepada pengurus. Mereka digaji setiap bulan atau memperoleh insentif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.



Gambar 20. Bagan struktur LKM BMT binaan PINBUK

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pertama bagi pembentukan dan pengembangan kelompok harus berasal dari keswadayaan masyarakat. Pembiayaan dari luar hanya menjadi modal stimulan yang diberikan sesudah masyarakat mau dan mampu menunjukkan keswadayaannya.

Unsur pembiayaan untuk pengembangan kelompok terdiri atas:

1. Modal swadaya yang terdiri atas:
 - a. Simpanan pokok yang diberikan pada saat seseorang masuk menjadi anggota.

- b. Simpanan sukarela atau simpanan saham sesuai dengan kemampuan.
 - c. Simpanan wajib yang diberikan setiap bulan.
 - d. Simpanan dalam bentuk tabungan anggota.
2. Keuntungan dari usaha kelompok seperti simpan pinjam.
 3. Hutang yang biasanya dalam bentuk kredit mikro dari lembaga keuangan atau modal stimulan berupa kredit dari program pemerintah atau LSM / LKM.
 4. Hibah yang berasal dari donatur.

H. TAHAP PERKEMBANGAN KELOMPOK

Terdapat 3 tahap yang bisa dicermati dalam proses perkembangan kelompok sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Tahap pertumbuhan atau pembenahan kelompok

Tahap penumbuhan diawali dengan pencerahan dan pemberian motivasi pentingnya berkelompok. Jika masyarakat telah menyadari manfaatnya dan berkeinginan membentuk kelompok, pendamping perlu menyampaikan bagaimana cara membentuk kelompok. Selanjutnya, anggota (kelompok) masyarakat yang melakukan pemilihan pengurus dan menyusun PD/PRT.

Jika kelompok sudah ada sebelumnya tapi tidak aktif, dapat dilakukan pembenahan menyangkut perubahan organisasi, pengurus, PD/PRT, administrasi, dan aktivitas kelompok. Kelompok yang umumnya sudah terdapat di desa, antara lain: kelompok tani, PKK (kelompok dasa wisma), pengajian, persekutuan doa, arisan, dan lain-lain.

2. Tahap perkembangan kelompok

Pada tahap ini, kelompok sudah mulai melakukan aktivitasnya. Anggota dan pengurus melakukan tugas sesuai dengan aturan yang telah disusun. Tugas pendamping pada tahap ini antara lain memberikan informasi tentang cara menyusun administrasi kelompok, mengelola dana kelompok, menyusun rencana usaha, mengakses sumber-sumber permodalan, serta melakukan mediasi dengan lembaga-lembaga teknis atau mitra usaha untuk memperoleh dukungan lainnya.

3. Tahap kemandirian

Dalam jangka waktu tertentu setelah didampingi, terutama pada tahap terminasi (penghapusan diri), kelompok diharapkan sudah mampu mandiri. Kriteria kelompok yang sudah mandiri antara lain:

- a. Kelompok sudah mampu menyelenggarakan sistem administrasi yang baik dan benar.
- b. Kelompok sudah mampu memupuk modal swadaya.
- c. Kelompok sudah mampu mengadakan kegiatan simpan pinjam dan tidak bermasalah.
- d. Kelompok sudah mengadakan rapat rutin dan dihadiri oleh lebih dari separuh anggota.
- e. Kelompok sudah mampu menjadi sarana pembelajaran dan menjadi pendamping bagi anggotanya.
- f. Anggota sudah mampu membuat rencana usaha dan mengelola usahanya dengan baik.
- g. Anggota sudah tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.
- h. Kelompok sudah mampu memotivasi anggota untuk melakukan program kelestarian lingkungan. Misalnya, tanaman tahunan yang ditanam oleh anggota sebagai kompensasi bantuan, sudah tumbuh dengan baik.
- i. Sudah tidak ada anggota kelompok yang berprofesi sebagai pembalok atau penebang liar, atau melakukan aktivitas lain yang merusak lingkungan.

Jika kelompok sudah mandiri, pendamping dapat meninggalkan lokasi atau tetap menjadi pendamping yang sekali-kali datang ke lokasi untuk memberikan informasi atau sekadar bersilaturahmi.

I. PENGEMBANGAN LKM

Budaya memupuk modal umumnya belum dimiliki oleh masyarakat petani gambut karena tidak ada sarana pemupukan modal yang dapat diakses. Akibatnya, masyarakat sering terjerat rentenir atau cukong kayu untuk memenuhi kebutuhan modal atau kebutuhan mendadak. Kondisi demikian, sering memaksa masyarakat untuk mencari pekerjaan yang secara instan dapat menghasilkan uang tunai, yaitu dengan menebang kayu di hutan atau mengambil hasil hutan secara berlebihan. Upaya untuk mendorong masyarakat menggeluti pekerjaan atau usaha alternatif umumnya berbenturan dengan ketersediaan akses keuangan untuk dukungan permodalan. Pilihan alternatif untuk bisa menjembatani kebutuhan tersebut adalah melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

LKM merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa pelayanan keuangan bagi pengusaha berskala sangat kecil atau sering disebut pengusaha mikro. Yang menjadi sasarannya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat miskin yang mau produktif dan bersemangat keras untuk maju (*economically active poor*). LKM menjadi alternatif jawaban atas permasalahan permodalan masyarakat miskin, karena kalangan perbankan formal seperti bank tidak menjangkau segmen tersebut. Kebutuhan merekapun tidaklah besar. Nilai satu kali pinjaman biasanya hanya ada pada kisaran 50 ribu hingga 1 juta rupiah. Hambatan yang mereka hadapi jika harus berhubungan dengan lembaga keuangan formal (bank) adalah persyaratan administratif yang harus dipenuhi (mereka buta huruf tapi punya usaha mikro yang prospektif) dan kolateral (jaminan).

Bambang Bintoro (2003) dan Rudjito (2003) membagi LKM menjadi tiga kelompok. Pertama adalah LKM yang bersifat formal dan tunduk pada Undang Undang perbankan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kedua adalah LKM

formal non perbankan yang tunduk pada Undang Undang Koperasi seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan BMT yang berbadan hukum koperasi. Ketiga adalah LKM yang bersifat non formal yang tumbuh di masyarakat seperti arisan, kelompok simpan pinjam, dan tukang kredit.

Dewasa ini banyak instansi-instansi pemerintah, LSM, bahkan kalangan perbankan sekalipun mendorong terbentuknya LKM-LKM di tingkat desa maupun kecamatan. Biasanya kita akan menjumpai Badan Kredit Desa (BKD), LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan), LPD (Lembaga Perkreditan Desa), KSP (Koperasi Simpan-Pinjam), Kopdit (Koperasi Kredit), dan lain-lain. Meskipun demikian, sebenarnya secara tradisional sudah banyak LKM-LKM yang telah dibentuk oleh masyarakat. Hanya saja, untuk bentuk-bentuk LKM informal, belum memiliki payung undang-undang yang mengaturnya secara khusus. Yang perlu digali adalah potensi kelembagaan yang berakar dari kearifan lokal yang bisa dikembangkan lebih jauh dalam wadah LKM yang berbaju formal, misalnya dalam bentuk koperasi kredit atau lembaga BMT (*Baitul Maal Wat Tanwil*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuhkan dan membentuk LKM sebagai berikut (Ismawan, 2003):

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi sebenarnya juga menjadi kebutuhan masyarakat miskin. LKM perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat miskin, apapun bentuknya.

2. Melayani masyarakat miskin

LKM hidup dan berkembang karena melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal. Oleh karenanya, karakteristiknya perlu disesuaikan dengan masyarakat miskin itu sendiri sehingga benar-benar bisa dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Sebagai konsekuensi dari melayani kelompok masyarakat miskin, prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro harus selalu kontekstual dan fleksibel.

Wawasan masyarakat yang selama ini masih minim tentang eksistensi dan manfaat LKM perlu dibuka lebar-lebar. Masih banyak pintu lain yang bisa diakses selain melalui bank. Ini merupakan bagian dari tugas pendamping untuk melemparkan informasi tersebut. Dan jika memang terdapat dukungan dalam hal sumberdaya finansial maupun kapasitas, wacana untuk menggagas LKM yang berakar dari keunikan dan kearifan lokal pun perlu dibangkitkan.

LKM dapat merupakan kelompok swadaya yang fokus kegiatannya sebagai sarana memupuk dan mengakses sumber modal, wahana penyediaan sarana produksi, dan sarana pembelajaran manajemen usaha. Setiap anggota yang akan mengajukan pinjaman, harus membuat rencana usaha sederhana agar diketahui untung dan ruginya. Usaha yang diperkirakan tidak menguntungkan tidak akan dibiayai oleh LKM. Dalam hal ini, LKM dapat memberikan alternatif usaha/komoditas lain agar anggota dapat memiliki usaha yang menguntungkan.

Pinjaman dapat diatur melalui sistem bunga atau bagi hasil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sistem bagi hasil biasanya lebih sesuai untuk membiayai kegiatan usahatani karena pengembalian pinjaman modal dapat dilakukan setelah panen dan resiko kegagalan ditanggung bersama antara LKM dan peminjam. Dengan demikian, LKM akan turut berkepentingan terhadap kesuksesan usahatani sehingga dalam beberapa kasus juga menjadi pendamping bagi petani. Di lingkungan masyarakat yang taat pada ajaran Islam, biasanya sistem ini cenderung menjadi pilihan dari pada sistem bunga.

Sistem bunga lebih memberikan kepastian penghasilan bagi LKM dan mudah penghitungannya. Tetapi biasanya petani akan sulit menyediakan uang angsuran karena panen yang tidak dapat dilakukan setiap bulan. Kelebihan dan kekurangan sistem bunga dan sistem bagi hasil perlu diinformasikan kepada masyarakat, tetapi biarlah masyarakat yang memutuskan sistem mana yang digunakan.

J. KETERKAITAN PENGEMBANGAN KELOMPOK DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Mengingat karakteristik lahan gambut yang unik dan sangat rentan terhadap kerusakan (lihat Bab 1) maka pengembangan kelompok di wilayah lahan gambut harus dikaitkan dengan upaya kelestarian lingkungan. Upaya-upaya tersebut secara eksplisit diwujudkan dalam hal-hal berikut:

1. Spektrum kelestarian lingkungan mewarnai tujuan kelompok

Spektrum kelestarian lingkungan mewarnai tujuan pembentukan kelompok. Sebagai contoh, tujuan dirumuskan dalam pernyataan “Pembentukan kelompok bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui proses pembelajaran, penyediaan modal, dan pelestarian lingkungan”.

2. Pelestarian lingkungan sebagai salah satu kegiatan kelompok

Pelestarian lingkungan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan kelompok. Sebagai contoh, kegiatan kelompok dirumuskan sebagai berikut, “penyediaan modal bagi anggota”, “pembelajaran teknis dan pengelolaan usaha”, dan “pelestarian lingkungan melalui penanaman jenis tanaman X”.

3. Pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan pelestarian lingkungan.

Sejak tahun 1998, WI-IP menerapkan pemberian modal stimulan dalam bentuk uang/ modal kerja atau sarana produksi kepada petani melalui kelompok. Modal tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan terpadu dengan program pelestarian lingkungan. Kegiatan pelestarian lingkungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti penanaman pohon, pembuatan sekat bakar, pembuatan sekat parit/bendung/tabat, dan sebagainya. Berikut beberapa contoh kegiatan yang dilakukan WI-IP yang disesuaikan dengan kondisi lokasi dan didiskusikan bersama masyarakat.

a. **Rehabilitasi pantai**

Hingga saat ini telah banyak kegiatan yang ditujukan bagi usaha rehabilitasi lahan di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah RI, badan internasional, LSM lokal maupun internasional serta masyarakat setempat. Penyelenggaraan oleh pemerintah, misalnya untuk rehabilitasi pantai dengan tanaman bakau, diantaranya dilakukan oleh Direktorat RLKT-Departemen Kehutanan (misal di Desa Lawang Rejo, Pemalang); oleh Perum Perhutani (di Cikeong, Jawa Barat); oleh JICA (Japan International Corporation Agency) di pantai Benoa (Desa Suwung), Bali; oleh Yayasan Mangrove (di beberapa lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan dsb.), Yayasan Bentara Karya (di Kabupaten Belu, NTT), Yayasan Pinang Sebatang/PINSE (di pantai Timur Sumatera), Kelompok Pencinta Alam Desa Karangsong/KELOPAK (di Indramayu) dsb. Dari semua contoh yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat di nyatakan bahwa tingkat keberhasilan penanaman (*survival rate*) dari tanaman sangat bervariasi (sekitar 5% - 75%). Tingkat keberhasilan yang paling rendah (5%), pernah terjadi di pantai Indramayu. Kondisi demikian diakibatkan oleh tingginya tingkat kesulitan yang dihadapi (terutama alam yang keras, seperti arus, gelombang pasang serta tingkat sedimentasi yang tinggi di lokasi penanaman). Arus dan gelombang menyebabkan tercerabutnya bibit bakau dari substratnya, sedangkan sedimentasi yang tinggi menyebabkan bibit bakau terkubur substrat (umumnya pasir) hingga mati. Selain kondisi alam, kambing juga merupakan hama bagi program penanaman bakau di Indramayu. Satwa ini dengan rakusnya dapat menghabiskan daun-daun bibit bakau dalam waktu singkat. Tapi pada umumnya, beberapa dari kegiatan penanaman bakau di atas lebih bersifat Proyek dan dilakukan dengan kurang/tidak melibatkan masyarakat setempat dalam tahap perencanaan, penanaman maupun perawatannya. Kondisi seperti ini menyebabkan dampak yang dihasilkan proyek bersifat kurang optimal bagi tujuan utama dari rehabilitasi.

Untuk mencari alternatif model rehabilitasi pantai yang akhirnya dapat memberikann hasil berkelanjutan (*sustainable*), maka Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP) sejak tahun 1998 telah

menyelenggarakan program kemitraan dalam rangka rehabilitasi pantai bersama kelompok masyarakat (seperti Koperasi dan Kelompok Tani) di beberapa desa di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Hingga kini (Juni 2005), tidak kurang dari 350,000 bibit bakau dan tanaman pantai lainnya telah ditanam dan masih bertahan hidup dengan baik di pematang-pematang tambak, tepi sungai dan disepanjang 3,5 km pantai di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Pemalang. Konsep yang diterapkan adalah dengan cara membuat suatu ikatan formal (perjanjian kontrak) antara WI-IP dengan Kelompok Tani/Koperasi. Isi ikatan tersebut secara garis besar adalah bahwa:

- WI-IP memberikan sejumlah “pinjaman” dana kepada Kelompok Tani (KT)/Koperasi untuk jangka waktu 5 tahun dan tanpa bunga. Sedangkan sebagai kompensasinya, KT/Koperasi akan melakukan penanaman sejumlah bibit bakau atau jenis tanaman pantai lainnya. [banyaknya bibit tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan jumlah bantuan dana yang diberikan, yaitu ditetapkan secara musyawarah antara WI-IP dengan KT/Koperasi untuk memperoleh kesepakatan bersama].
- Bantuan dana yang disalurkan tersebut hanya dapat digunakan untuk meningkatkan modal usaha KT/Koperasi (seperti pengadaan pupuk, pakan ikan, beternak, alat-alat pertanian sederhana, modal untuk pembuatan terasi dsb.) . Bukan untuk membeli bibit tanaman, karena bibit dapat diperoleh dari lingkungan pantai di sekitarnya.
- Untuk memperoleh bantuan dana tersebut, seluruh anggota KT/Koperasi harus berjanji (dibuat tertulis dengan saksi pemuka masyarakat setempat) melakukan kegiatan penghijauan (baik di tepi pantai, sungai, saluran-saluran dan pematang tambak).
- Program penanaman dan pemantauan didampingi oleh staff teknis WI-IP di lapangan dan kegiatan pemantauan dilakukan sebulan sekali. Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengetahui kondisi bibit yang ditanam, jika ada yang mati maka kegiatan penyulaman akan segera dilakukan.

- Jika pada tahun kelima sejak perjanjian ditandatangani, sedikitnya 70% dari tanaman bakau (*Rhizophora spp*) atau 40% dari tanaman keras (seperti cemara pantai, mengkudu, waru laut) yang ditanam masih bertahan hidup maka kepada KT/Koperasi yang bersangkutan akan dihadiahi uang sebanyak/sejumlah “pinjaman” dana yang semula diberikan oleh WI-IP. Tapi jika target keberhasilan hidup kurang dari yang diharapkan di atas, maka dana yang dipinjamkan oleh WI-IP kepada KT/Koperasi bersangkutan akan ditagih kembali. Besarnya tagihan disesuaikan secara proporsional dengan persentase tanaman yang mati. Kumpulan uang hasil tagihan ini selanjutnya dapat diberikan kepada KT/Koperasi yang mampu mempertahankan hidupnya tanaman lebih dari 70%. Cara-cara demikian dimaksudkan agar terbentuk motivasi yang kuat pada masing-masing KT/Koperasi dalam mempertahankan hidupnya tanaman yang ditanam hingga sekurangnya sampai tahun kelima.



Gambar 21. Program rehabilitasi pantai dengan tanaman cemara laut (*Cassuarina sp*) oleh KT Mitra Bahari di Pemalang-Jawa Tengah (binaan WI-IP) sejak tahun 1998. Kegiatan ini dipadukan dengan usaha ternak kambing oleh anggota KT MB. (Dokumentasi oleh: Jill Heyde, 2005)



Gambar 22. Program rehabilitasi tambak dan pantai dengan tanaman bakau (*Rhizophora* sp) oleh KT Desa Belendug, Pemalang-Jawa Tengah (binaan WI-IP) sejak tahun 2001. Kegiatan ini dipadukan dengan usaha pembuatan terasi oleh anggota kelompok. (Dokumentasi oleh: Jill Heyde, 2005)

Dari uraian di atas lantas dapat saja timbul pertanyaan sebagai berikut:

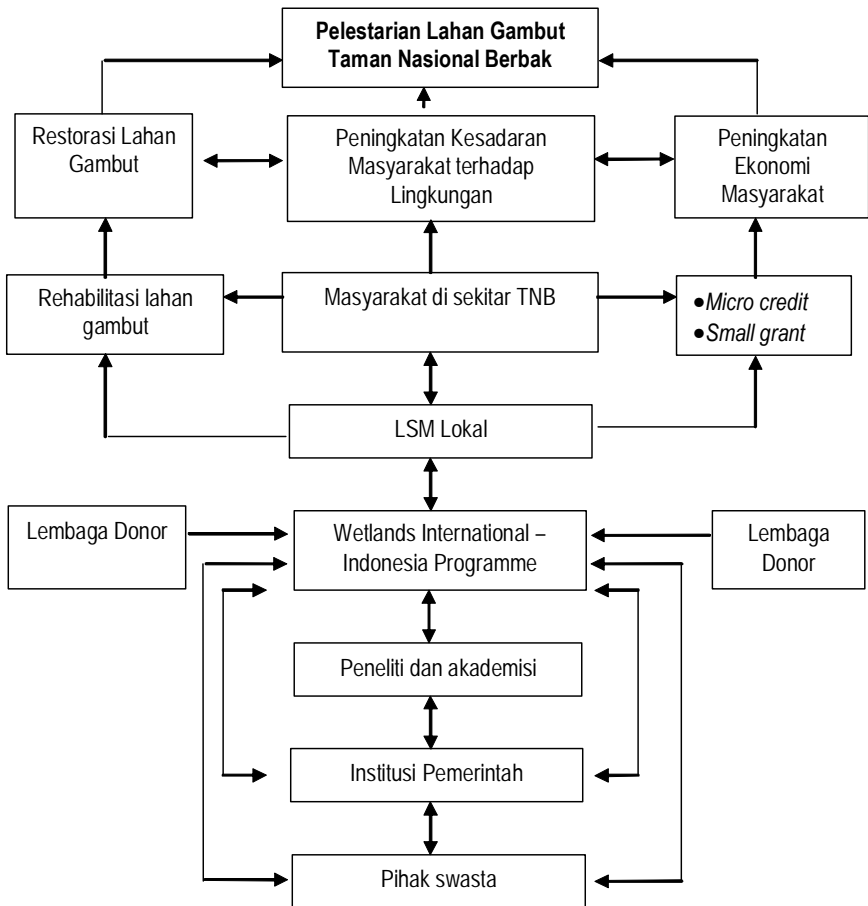
Apa bedanya konsep ini dengan proyek-proyek penanaman mangrove sebelumnya ?

- Konsep ini lebih mengutamakan kemitraan antara lembaga pemberi dana dengan pelaksana (KT/Koperasi). Dalam hal ini, pemberi dana (diwakili staf lapangannya) juga melakukan pendampingan dan tinggal di lapangan (dalam artian memberikan bantuan/bimbingan teknis) dan pengawasan terhadap keberhasilan program
- Jika program penanaman gagal, misalnya dikarenakan komitmen yang rendah dari anggota KT/Koperasi dalam merawat tanaman maka bantuan dana yang diberikan ke masyarakat tidak akan hilang atau habis tanpa bekas. Kondisi demikian juga tidak merugikan KT/Koperasi, karena disisi lain mereka telah sempat menikmati/memanfaatkan bantuan/pinjaman dana tanpa agunan dan tanpa bunga tersebut selama lima tahun (misalnya menggunakan dana bantuan tersebut sebagai modal beternak kambing atau membuat terasi seperti terlihat pada Gambar 21 dan 22).
- KT/Koperasi juga akan diuntungkan karena jika pada tahun ke-lima, persentase tanaman yang bertahan hidup cukup memadai, maka modal bantuan ini pada akhirnya bisa menjadi suatu HADIAH (tidak perlu dikembalikan kepada donor) bagi mereka.
- Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dimaksudkan agar KT/koperasi mampu memanfaatkan dana pinjamannya secara efektif dan tetap bertanggung jawab merawat bibit tanaman yang ditanam hingga 5 tahun. Karena setelah lima tahun bibit telah menjadi pohon yang kuat dan tahan terhadap kekuatan-kekuatan alam.

- Konsep ini berusaha memadukan usaha-usaha pelestarian lingkungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup/pendapatan masyarakat. Karena pada kondisi masyarakat yang terpuruk keadaan perekonomiannya, sulit dapat diharapkan kepedulian mereka terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keduanya sebaiknya dilakukan secara serentak.

b. Rehabilitasi lahan gambut

Mengacu pada keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat pesisir di Pemalang, selanjutnya WI-IP melalui proyek CCFPI yang didanai pemerintah Kanada (CIDA) sejak awal tahun 2003 hingga kini menerapkan cara-cara serupa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di lahan gambut Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah. Namun dalam proyek CCFPI, pihak WI-IP tidak secara langsung terlibat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan, tapi kegiatan ini sepenuhnya ditangani oleh beberapa LSM lokal (misalnya Yayasan Pinang Sebatang/Pinse di Jambi dan Wahana Bumi Hijau/WBH di Sumsel) yang merupakan mitra kerja WI-IP. Pada kondisi demikian, WI-IP hanya memberikan fasilitasi/arahan teknis rehabilitasi, konsep/pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dan menyediakan dana (misal berupa kredit mikro/*micro credit* dan hibah kecil/*small grant*) untuk nantinya disalurkan oleh LSM lokal kepada masyarakat binaannya. Selain bermitra dengan LSM lokal, dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di lahan gambut, WI-IP juga bermitra dengan pihak swasta, lembaga penelitian gambut, perguruan tinggi, Unit Pengelola Teknis/UPT taman nasional Berbak di Jambi dsb nya. Kemitraan dengan mereka ini dimaksudkan agar pola pengelolaan gambut oleh masyarakat nantinya dapat dilandasi/didukung oleh pendekatan-pendekatan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam pemilihan jenis tanaman untuk rehabilitasi lahan gambut, teknik silvikultur yang diterapkan, tipe tanah yang akan direhabilitasi dsb. Diagram di bawah ini menggambarkan suatu pola pemberdayaan masyarakat yang melibatkan multipihak dalam rangka menyelamatkan kondisi lahan gambut di Taman Nasional Berbak, Jambi.



Gambar 23. Bagan multipihak dalam rangka menyelamatkan kondisi lahan gambut di Taman Nasional Berbak, Jambi.

Dari diagram di atas, terlihat bahwa selain berperan dalam menjembatani penyaluran dana dari berbagai donor kepada LSM lokal, WI-IP juga melibatkan berbagai mitra kerja (peneliti, akademisi, pemerintah dan swasta) untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di lahan gambut TN Berbak dan sekitarnya. Para peneliti mengkaji aspek hidrologi dan tipologi tanah yang terdapat di lokasi rehabilitasi, swasta mendukung/ menyiapkan pengadaan bibit tanaman asli gambut (*indigenous species*) untuk nantinya ditanam masyarakat, instansi pemerintah

terkait (melalui permintaan LSM) memberikan pelatihan-pelatihan teknis kepada masyarakat binaan LSM dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan perekonomian (misal: pelatihan tentang cara beternak itik, ayam, kambing, membuat anyaman dsb). Sedangkan disisi lain, pihak UPT-TN Berbak memberikan pelatihan tentang tehnik pemadaman api jika terjadi kebakaran di lahan gambut (lihat Kotak 5, tentang: Pembentukan Tim Pemadam Kebakaran di Desa Pematang Raman, Jambi. Dan Kotak 6, tentang Pengalaman rehabilitasi hutan bekas terbakar di Taman Nasional Berbak (TNB), Jambi pada Bab 3).

Kotak 13

Small Grant Funds Sumatera

Wetland International – Indonesia Programme melalui proyek CCFPI (Climate Change, Forest and Peatland Indonesia) yang didanai oleh CIDA (Canadian Internasional Development Agency) antara tahun 2002-2004 memberikan sejumlah dana hibah (Small Grant Funds) kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan konservasi di lahan gambut. Setelah melalui beberapa tahap (Sosialisasi, pengajuan proposal, seleksi administrasi dan verifikasi di lapangan) maka ditetapkan kelompok pemenang small grant, diantaranya yaitu Kelompok Masyarakat Desa Jebus (Kelompok Tani Suka Maju) yang berjumlah 16 orang Kepala Keluarga. Desa Jebus terletak di Kecamatan Kumpe Hilir Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Berbak. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah bertani dan nelayan. Namun bentuk lahan pertanian penduduk tidak menguntungkan yakni terendam pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Sehingga untuk mengatasinya perlu dicarikan alternative usaha lain yang lebih tepat. Bentuk usaha yang dikembangkan oleh kelompok petani penerima small grant ini adalah usaha peternakan ayam kampung dan sebagai kompensasi atas dana yang diberikan CCFPI, kelompok melakukan penanaman dan merawat sejumlah pohon/tanaman keras di area gambut di seberang desa dan ikut berperan aktif dalam rangka menanggulangi bahaya kebakaran yang terjadi di lahan gambut dekat desa mereka.

c. Pembuatan sekat bakar

Sekat bakar (*fire break*) adalah bagian lahan yang diperuntukkan bagi pembatas antara lahan yang akan dibakar untuk keperluan pembukaan lahan dengan lahan di sekitarnya. Tujuannya untuk melokalisir kebakaran lahan sehingga tidak meluas ke lahan lain. Menurut Adinugroho *et al* (2004), sekat bakar ini dibedakan atas : (1) sekat bakar alami, seperti: jalur vegetasi hidup yang tahan api, jurang, sungai dan sebagainya, atau (2) sekat bakar buatan, yaitu yang sengaja dibuat oleh manusia seperti: menanam tanaman tahan api, jalan, parit-parit yang disekat/ditabat (lihat Kotak 14), kolam memanjang/*beje* (lihat Kotak 7 dalam Bab III), waduk dan lain-lain. Kedua jenis sekat bakar di atas berguna untuk memisahkan bahan bakar dan mengendalikan/mencegah penyebaran api dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sekat bakar buatan di lahan gambut yang dapat berfungsi cukup efektif biasanya berupa kolam berair yang mengelilingi lahan yang akan dibakar atau berupa parit/saluran yang disekat. Dengan kolam/parit berair ini, kebakaran lahan diharapkan tidak merembet ke lahan lain melalui kebakaran bawah permukaan, kebakaran tajuk, maupun kebakaran permukaan tanah. Tapi angin kencang tetap harus diperhitungkan, karena dapat menerbangkan percikan api jauh ke lokasi lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek CCFPI yang didanai sepenuhnya oleh CIDA dan diselenggarakan oleh Wetlands International Indonesia Programme sejak tahun 2002-2005 di lahan gambut Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, tidak kurang dari 26 buah saluran/parit telah ditabat/disekat dengan total tabat yang dibangun ada 57 buah. Semua kegiatan penabatan ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa di sekitar lokasi saluran/parit melalui suatu pemberian dana stimulan oleh pihak WI-IP kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat. [Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini telah dituangkan dalam sebuah buku panduan berjudul: Panduan Penyekatan Parit dan Saluran di Lahan Gambut Bersama Masyarakat, oleh Suryadiputra *et al*, 2005].

Kotak 14

Penabatan parit di Sumatra Selatan & Kalimantan Tengah

Pembuatan parit secara ilegal juga dilakukan oleh masyarakat di S. Merang-Kepahiyang Kab. Musi Banyuasin, Sumatra Selatan dengan tujuan untuk mengeluarkan kayu hasil tebangan disaat musim hujan. Di sepanjang sungai Merang dijumpai sekitar 113 parit dan 83 diantaranya terdapat di lahan gambut. Parit dibuat dengan menggunakan chainsaw dan berukuran lebar 1.7 – 3 m, kedalaman 1.5-2,5 m dan panjang 1.5-5 km. Beberapa parit ini kini sudah tidak digunakan lagi dan diindikasikan telah menyebabkan terjadinya erosi dan pengeringan yang berlebihan disaat musim kemarau. Untuk mencegah keringnya/terbakarnya gambut di daerah ini, Proyek CCFPI Wetlands International bekerjasama dengan LSM setempat (WBH , Wahana Bumi Hijau) pada bulan Mei – Desember 2004 telah memfasilitasi penyekatan parit sebanyak 8 buah yang dilakukan oleh para pemiliknya. Selain di Sumsel, kegiatan serupa juga dilakukan pada 18 buah parit/saluran yang terdapat di lahan gambut eks PLG-sejuta hektar - Kalimantan Tengah. Seluruh kegiatan penyekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan atas dukungan pemerintah daerah setempat.



Penyekatan parit di S. Merang-Musi
Banyuasin-Sumsel



Penyekatan saluran primer utama di eks
PLG-sejuta hektar, Mentangai-Kalteng

4. Pembangunan jalur hijau terpadu

Jalur hijau terpadu adalah areal diantara kawasan budidaya dan kawasan penyangga yang ditanami berbagai jenis tanaman produktif guna mencegah menjalarnya kebakaran dari dan ke hutan. Jalur hijau terpadu umumnya dilengkapi sekat bakar berupa parit berair, ditanami dengan tanaman tahunan yang ditumpangsarikan dengan tanaman semusim, dan disertai dengan pagar. Tanaman tahunan dimaksudkan untuk mengurangi sinar matahari, sehingga jalur hijau tidak ditumbuhi semak-

belukar yang potensial sebagai umpan api (bahan yang mudah terbakar). Tanaman tahunan dipilih yang produktif agar memperoleh perawatan dari masyarakat. Tanaman semusim dimaksudkan agar areal terpelihara dan tidak ditumbuhi semak belukar.

Bagi masyarakat, jalur hijau terpadu bermanfaat sebagai pagar untuk mencegah masuknya hewan pengganggu dari hutan ke lahan budidaya seperti babi dan macan, serta merupakan areal produktif yang dapat memberikan penghasilan. Dari aspek lingkungan, jalur hijau terpadu bermanfaat sebagai sekat bakar, agar tidak terjadi penjarangan api dari dan ke hutan. Selain itu, jalur tersebut juga menjadi penanda batas agar masyarakat dapat memahami batas lahan budidaya dan lahan hutan. Tujuannya agar tidak terjadi penjarangan hutan secara tidak sengaja yang disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap batas kawasan budidaya.

5. Pelatihan konservasi lahan gambut

Berbagai pelatihan konservasi lahan gambut seperti pelatihan pemadam kebakaran gambut, pelatihan pembuatan sekat bakar, pelatihan teknis budidaya di lahan gambut, dan pelatihan pembuatan kompos dapat dilaksanakan dengan menggunakan kelompok sebagai media.

6. Pembentukan regu pemadam kebakaran


Sebagaimana diketahui bahwa kebakaran merupakan bencana rutin yang terjadi di lahan gambut dan sangat ditakuti oleh petani, terutama pemilik tanaman tahunan. Jika kebakaran terjadi, investasi besar dalam bentuk pohon yang sudah ditanam bertahun-tahun dapat hilang dalam sekejap. Oleh sebab itu, kelompok tani di lahan gambut sangat berkepentingan untuk memiliki regu pemadam kebakaran.

Sarana yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran yang sulit disediakan oleh masyarakat seperti pompa pemadam dapat difasilitasi oleh instansi pemerintah atau LSM yang memiliki perhatian pada masalah ini. Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat juga dapat difasilitasi oleh instansi teknis (pemerintah) terkait atau langsung oleh pendamping dari LSM. (lihat Kotak 5, Pembentukan Tim Pemadam Kebakaran di Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Rambut, Jambi, pada Bab 3).




Bab 8

Pencerahan dan Penumbuhan Motivasi Dalam Tahap Animasi



Dalam proses pemberdayaan, seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat harus didasarkan atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Bagian ini akan membahas tentang pencerahan (penyadaran) dan penumbuhan motivasi masyarakat diikuti dengan alternatif strategi yang digunakan.



Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan di lahan gambut akan berhasil apabila masyarakat telah menyadari dan termotivasi untuk mengembangkan kemandirian dan menjaga kelestarian lingkungannya. Kesadaran masyarakat tersebut akan tumbuh apabila mereka memahami pentingnya kemandirian dan kelestarian lingkungan. Mereka juga akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut apabila menyadari bahwa kemandirian dan pelestarian lingkungan memiliki dampak positif bagi kehidupan dan penghidupannya.

A. TINJAUAN TEORITIS

Beberapa teori tentang kepribadian dan motivasi sengaja dimunculkan untuk mengawali uraian dalam bab ini. Penyajian teori-teori tersebut bukan dimaksudkan untuk dikaji, melainkan sebagai upaya pengayaan wawasan dalam rangka pemahaman tingkah laku dan motivasi masyarakat dalam melakukan tindakan.

1. Kepribadian dalam teori psikoanalisa

Teori kepribadian psikoanalisa dikembangkan oleh Sigmund Freud pada abad XIX. Dalam teori tersebut, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri atas 3 unsur yang disebut *id*, *ego*, dan *superego*. Ketiga unsur tersebut masing-masing memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda, namun saling berkaitan dan membentuk suatu totalitas.

Id adalah unsur kepribadian paling dasar dan merupakan sistem yang didalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Terhadap 2 sistem kepribadian lainnya, *id* bertindak sebagai penyedia dan penyalur energi. *Id* memiliki kelengkapan berupa 2 macam proses, yakni refleks dan tindakan-tindakan primer. Refleks merupakan tingkah laku yang mekanisme kerjanya bersifat otomatis dan segera. Sedangkan tindakan primer adalah perilaku untuk mengurangi ketegangan dengan cara membentuk bayangan.

Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu yang berdasarkan pada kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan kenyataan yang dapat dicerna oleh akal. Dalam memainkan perannya, *ego* melibatkan fungsi psikologis, yakni kognitif dan intelektual.

Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya baik dan buruk. Fungsi utama *superego* adalah sebagai pengendali dorongan-dorongan naluri *id* agar naluri tersebut disalurkan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Fungsi berikutnya, mengarahkan *ego* pada tujuan yang sesuai dengan moral dan mendorong individu pada kesempurnaan.

2. Teori kepribadian behaviorisme

Teori kepribadian *behaviorisme* digagas pertama kali oleh John B. Watson pada tahun 1993, Namun kemudian BF Skinner menjadi lebih dikenal karena lebih produktif dalam membahas dan memunculkan teori tersebut. Menurut Skinner, tingkah laku seseorang dapat berubah melalui pengkondisian lingkungan. Tingkah laku tersebut akan cenderung diulang apabila diberi penguatan berupa stimulus yang bersifat positif maupun negatif.

3. Kebutuhan berjenjang

Secara sadar ataupun tidak, setiap tingkah laku manusia didorong oleh adanya motivasi berupa dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi seseorang dapat berubah jenisnya, dan dapat pula meningkat atau menurun intensitasnya. Semakin tinggi motivasi seseorang, semaikin besar peluangnya untuk berprestasi. Teori motivasi digagas oleh banyak ahli psikologi. Meskipun cara pandang masing-masing ahli berlainan dan terkadang saling berlawanan, pada dasarnya memiliki arah yang sama.

Abraham Maslow, bapak psikologi humanistik termasyhur, mempelajari kebutuhan dasar manusia untuk menjelaskan teori motivasi. Manusia memiliki keinginan yang berjenjang. Segera setelah keinginan yang satu terpenuhi, maka timbul keinginan yang lain. Suatu motif tidak akan mempengaruhi seseorang bilamana kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Teori ini dikenal dengan nama "Hirarki Kebutuhan Maslow". Lima tingkat kebutuhan menurut Maslow adalah:

a. Kebutuhan fisiologi

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang paling mendesak untuk keberlangsungan hidup. Contohnya antara lain makan, minum, temperatur, istirahat, dan seks. Apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi atau belum terpuaskan, seseorang tidak termotivasi untuk ***bertindak mencukupi kebutuhan lainnya***.

b. *Kebutuhan terhadap rasa aman*

Kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memperoleh ketentraman, kesehatan, perlindungan, dan jauh dari bahaya.

c. *Kebutuhan terhadap cinta dan rasa memiliki*

Kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif dan emosional dengan individu lain di lingkungan keluarga atau kelompok di masyarakat. Manusia akan menderita bila kesepian dan terasing dari lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini akan memotivasi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan cenderung membentuk kelompok sosial.

d. *Kebutuhan terhadap rasa harga diri*

Rasa harga diri diperoleh dengan adanya penghargaan dari diri sendiri dan orang lain. Penghargaan dari diri sendiri merupakan hasrat untuk memperoleh kekuatan pribadi dalam menghadapi tantangan, kemandirian, dan kebebasan. Sedangkan penghargaan dari orang lain berupa pengakuan, dukungan, atau pujian karena prestasi yang dicapainya. Kepuasan terhadap kebutuhan ini akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, dan berguna. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan ini, akan menyebabkan seseorang menjadi rendah diri, frustrasi, merasa tidak berguna, dan ragu-ragu. Orang-orang seperti ini cenderung agresif, menyalahkan orang lain, kekanak-kanakan, atau apatis dan pasrah dengan keadaan.

e. *Kebutuhan aktualisasi diri*

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Merupakan hasrat seseorang untuk menjadi seperti yang diinginkan sesuai potensi yang dimilikinya. Orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan ini berada pada puncak prestasinya. Mereka biasanya spontan, sederhana, dan wajar,

Walaupun banyak kritik yang dilontarkan oleh ahli psikologi lainnya, teori Maslow hingga saat ini masih banyak digunakan, terutama untuk mengembangkan motivasi pada individu, komunitas, atau masyarakat secara luas.

4. Perkembangan kesadaran komunitas

Masing-masing komunitas memiliki perkembangan kesadaran yang berbeda. Berdasarkan tingkat kesadarannya, komunitas dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu (lihat Gambar 24): apatis, ketergantungan, prakritis, dan kritis (Simanjuntak, 2004).

- a. **Komunitas apatis** ditandai oleh sikap yang memandang segala sesuatu tidak ada masalah dan cenderung sekedar untuk bertahan hidup.
- b. **Komunitas ketergantungan** ditandai oleh sikap yang memandang adanya masalah namun merasa tidak mampu mengatasi, dan menyerahkannya kepada lingkungan atau pemerintah.
- c. **Komunitas prakritis** ditandai oleh sikap yang memandang adanya masalah, dirinya merupakan bagian dari solusi, serta kesadaran akan perlunya usaha.
- d. **Komunitas kritis** ditandai oleh sikap dan pandangan yang peduli untuk bekerja sama dengan orang lain, mendukung pembaruan dan kesadaran akan pentingnya aktualisasi diri.

Fokus pemberdayaan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kesadaran dan perilakunya. Pada komunitas apatis dan ketergantungan, pemberdayaan difokuskan pada upaya perubahan perilaku agar mencapai tahap kesadaran sebagai komunitas prakritis dan kritis. Apabila pada kelompok tersebut langsung diberikan bantuan dalam bentuk material, mereka hanya akan menggunakannya secara konsumtif dan pada akhirnya akan meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain.



Gambar 24. Empat tahap perkembangan kesadaran komunitas

B. KESADARAN DALAM REALITAS

Menurut Maslow, motif adalah alasan untuk bertindak. Setiap manusia memiliki motif yang sama. Bahwa kita bekerja atau bertindak adalah dalam rangka memenuhi satu atau lebih dari 5 jenis kebutuhan sebagaimana digambarkan dalam teorinya di atas. Dapatkah dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh petani miskin di lahan gambut tidak kurang berharganya dari apa yang dilakukan oleh orang lain yang jauh lebih berpendidikan dan diberi kewenangan?

Apa yang dilakukan oleh orang senantiasa berkait langsung dengan jenis kebutuhan yang dirasakan. Masalahnya, apa yang menjadi kebutuhan seseorang sering berbeda tingkatan dengan orang lain. Kebutuhan memperoleh penghasilan merupakan cara untuk bertahan hidup bagi seseorang dan menjadi upaya mencari pengakuan bagi yang lain.

Katakanlah, perilaku merusak alam yang dilakukan petani lahan gambut memiliki akibat yang sama dengan perilaku merusak alam (dalam arti sesungguhnya) yang dilakukan oleh oknum pelaku *illegal logging*. Meskipun sama-sama melakukannya untuk bertahan hidup, perilaku keduanya tidaklah dapat disejajarkan.

Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan kelestarian lingkungan dalam konteks realitas di lapang tidaklah sesederhana yang digambarkan. Ibarat hutan, didalamnya terdapat beraneka macam tanaman dengan umur yang berlainan pula. Secara hipotetis, masyarakat di lahan gambut dapat dikelompokkan dalam 5 kategori berikut:

1. Kategori pertama adalah **orang-orang yang mengandalkan hidup dari lingkungan dan bertani secara sederhana**. Mereka tidak berambisi untuk mengembangkan usaha serta tidak bermaksud untuk merusak atau melestarikan lingkungan. Cara mereka memperlakukan lingkungan merupakan warisan leluhur yang tidak disadari benar apa maksud yang terkandung didalamnya. Menurut penilaian kalangan modern, komunitas semacam ini hidup jauh dibawah standar kesejahteraan dan rentan terhadap fluktuasi kondisi lingkungan. Meskipun demikian, mereka tidak menyadari hal itu, karena beranggapan bahwa memang begitulah cara hidup (*way of life*) yang sudah dijalani oleh orang tua dan leluhurnya.
2. Kategori kedua adalah **orang-orang yang sudah menyadari pentingnya pengembangan potensi diri dan kebutuhan hidup yang mendesak, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan**. Biasanya mereka gagal atau tidak mau mencoba untuk bertani karena menganggap pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama dan tenaga kerja yang banyak. Orang-orang seperti ini cenderung tidak menyadari atau tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, tawaran uang kontan sebagai imbalan menebang atau mengangkut kayu disambut dengan sukacita. Sebagian dari mereka sebetulnya menyadari bahwa mata pencahariannya mengandung risiko yang besar dan turut memberikan andil bagi rusaknya lingkungan. Namun mereka tidak peduli, karena tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.
3. Kategori ketiga adalah **mereka yang mata pencahariannya tidak merusak lingkungan secara langsung meskipun hidupnya hanya pas-pasan**. Mereka memiliki semangat dan berkeinginan untuk mengembangkan potensi diri, namun tidak mau ikut-ikutan

memperoleh uang dengan cara melanggar aturan. Mereka tidak mampu mengembangkan potensi usahanya, karena tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan.

4. Kategori keempat adalah **mereka yang hidupnya sudah mapan, tapi mata pencahariannya memicu terjadinya kerusakan lingkungan**. Biasanya mereka adalah pendukung pelaku *illegal logging* seperti para toke, bandar kayu, dan pemilik *sawmill* (penggergajian kayu). Mereka bukannya tidak sadar bahwa tindakannya melanggar peraturan, tapi keinginan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya lebih dominan dibandingkan kesadarannya untuk taat peraturan.
5. Kategori kelima adalah **mereka yang hidupnya sudah mapan, sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan, dan tidak ikut-ikutan melakukan perusakan lingkungan**. Meskipun ada pengecualian, sebagian besar dari mereka umumnya adalah para tokoh masyarakat, petani yang sudah mapan, pemuka agama, serta pegawai pemerintah di tingkat desa seperti guru dan perangkat desa. Namun, kadang kala kelompok ini secara sadar ikut pula berperan secara tidak langsung dalam kegiatan merusak lingkungan karena desakan perekonomian maupun karena hal-hal lain.

Dalam satu komunitas, kategori tersebut umumnya tidaklah bersifat homogen. Sebagian penduduk masih dalam kategori pertama, sebagian lainnya bisa masuk dalam kategori-kategori yang lain. Namun, antara satu kelompok kategori dan kelompok lainnya saling mempengaruhi.

C. PENDEKATAN

Kesadaran merupakan titik masuk dan tolok ukur kesiediaan dan keterbukaan masyarakat untuk menerima perubahan. Sedangkan pencerahan atau penyadaran merupakan dasar pijak pendamping untuk membawa dan menanamkan perlunya perubahan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sentuhan awal seorang pegiat pemberdayaan masyarakat

merupakan sentuhan terhadap kesadaran masyarakat itu sendiri. Pendamping akan betul-betul menjadi agen perubahan, apabila ia sanggup membawa masyarakat pada perubahan.

Memerintahkan atau mengajak orang untuk melakukan perubahan memang mudah. Tapi, apakah hal tersebut dijalankan itu persoalan lain. Melarang orang untuk tidak terlibat dalam perusakan lingkungan sangatlah mudah, namun apakah mereka dengan serta-merta dan sukacita mematuhinya, tentu bukan perkara yang mudah. Bagaimanapun juga, mereka mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pengalaman, logika, dan jalan pikiran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Masyarakat mau dan bisa berubah apabila menyadari bahwa apa yang dibawa dan dihembuskan pegiat pemberdayaan masyarakat (pendamping) itu dapat membawa manfaat untuk perbaikan kondisi. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pendamping dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat akan suatu perubahan.

1. Pendekatan psikologis

Mengingat kesadaran merupakan pintu masuk bagi perubahan, maka pendamping harus berupaya untuk menciptakan atau membuat pintu masuk itu. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat menyentuh kesadaran masyarakat hingga mereka mau menerima perubahan. Salah satunya adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui sentuhan nurani, logika berpikir, sentuhan emosi, dan pengakuan terhadap eksistensi.

a. Sentuhan nurani

Menyadarkan masyarakat untuk mau berubah, tidak harus dilakukan dengan banyak berbicara. Cukup dengan tindakan yang dapat menyentuh inti hidup manusia yang paling dalam, yaitu hati nurani. Pendekatan ini sederhana, namun mampu mendorong seseorang untuk bertindak atau berbuat sesuatu. Sebagai contoh, perhatikanlah kejadian pada tanggal 26 Desember tahun 2004 lalu, saat televisi menyiarkan berita tentang musibah tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari jam ke jam, dari hari ke hari.

Tayangan itu menyentuh hati semua orang yang menyaksikannya, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi dunia pun tersentak dibuatnya. Jutaan orang terketuk hatinya untuk mau membuka dompetnya dan mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk membantu mereka yang tertimpa musibah.

Televisi juga menayangkan peristiwa banjir bandang di tepian Sungai Bahorok (Sumatra Utara), yang meluluhlantakkan perkampungan. Berita itu terus-menerus ditayangkan untuk menyadarkan masyarakat, bahwa karena ulah mereka yang tidak bertanggung jawab, banyaknya jiwa yang melayang dan betapa besar kerugian material yang diderita.

Hal yang juga berpotensi untuk dilakukan bagi masyarakat di lahan gambut adalah dengan mengajak mereka berkunjung ke wilayah lahan gambut lain yang hancur karena terbakar. Kunjungan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa peristiwa kebakaran telah mematahkan semangat hidup masyarakat, karena kondisi hidupnya kian terpuruk. Dengan mengajak mereka untuk mengkaji dan memahami kerusakan lahan gambut, diharapkan tumbuh suatu kesadaran bahwa tindakan yang tidak bertanggung jawab bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Kajian ini kemudian menjadi bahan perenungan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari berbagai bencana yang bisa ditimbulkan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

b. *Sentuhan logika berpikir*

Memberikan informasi bagi masyarakat di lahan gambut tidaklah sulit. Namun, mungkin kita akan terheran-heran jika masyarakat di sana justru bersikap santai-santai saja dan merasa tidak ada masalah. Mereka sudah begitu akrab dengan kondisinya, sehingga gerakan atau dorongan untuk berubah tidak tampak.

Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap hal semacam ini, pendamping bisa mengajak masyarakat menemukannya permasalahan mereka. Misalnya dengan

memperlihatkan gambar yang mencerminkan lingkungan kumuh, kotor, tidak tertib, atau gersang. Mereka diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang terlukis pada gambar itu. Setelah sejumlah informasi diperoleh, pendamping mengajak untuk menarik benang merah dari gambar tersebut dengan menanyakan, apakah kondisi seperti itu juga terjadi atau ada di sekitar mereka, apakah itu baik, serta bagaimana mengatasinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendamping mengajak masyarakat mengenali masalahnya dan mendorong mereka untuk berubah. Tentulah perubahan kondisi itu akhirnya menjadi kebutuhan mereka juga manakala mereka tersadar.

Pendamping bisa juga memperlihatkan sebuah gambar yang bercerita tentang komunitas miskin. Komunitas itu sedang bingung karena sebagian besar warganya belum merasa menemukan pekerjaan yang cocok. Pekerjaan lama dianggap tidak memuaskan, sementara pekerjaan yang baru tidak memberikan kepastian. Pekerjaan mereka hanyalah mondar-mandir dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Semuanya tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tidak dikerjakan dengan sepenuh hati. Pendamping mengajak masyarakat untuk menanggapi pertanyaan penggerak yang dilontarkannya. Apakah kondisi semacam itu juga terjadi di desa mereka, apa penyebabnya, apakah mereka ingin kondisinya senantiasa seperti itu, bagaimana kondisi ideal yang diinginkan, serta bagaimana cara mewujudkannya.

c. Sentuhan emosi

Kesadaran seseorang biasanya muncul ketika emosinya tersentuh. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyadarkan orang, bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak benar, seperti membakar hutan atau *illegal logging*. Sentuhan emosi bisa dilakukan di dalam ruangan/kelas dengan memperdengarkan lagu-lagu atau membacakan puisi-puisi yang relevan untuk membangkitkan kesadaran. Lagu dan puisi tersebut sebaiknya diperdengarkan dalam suasana yang tenang dan bila perlu mencekam. Untuk menciptakan suasana seperti itu, biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam hari dengan

mematikan lampu. Jika ada alat penerang yang dihidupkan, biasanya hanya untuk sekadar menerangi kertas yang akan dibaca. Ada baiknya bila lagu-lagu dan puisi tersebut diciptakan oleh kalangan masyarakat sendiri. Memperdengarkan ayat-ayat suci yang relevan juga efektif untuk menyentuh perasaan. Tentunya disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masyarakat setempat.

Apabila kesadarannya sudah mulai muncul, ajaklah masyarakat untuk merenungkan kesalahan apa yang sudah dilakukan, mintalah mereka menceritakan pengalamannya, harapan, serta rencana/tujuan hidupnya. Sebagai pengingat dan pengobar semangat untuk mewujudkan harapan dan rencana yang muncul dalam suasana penuh kesadaran, baik pula jika masing-masing kelompok membuat lagu mars atau slogan yang diciptakannya berdasarkan kretaitas mereka. Pada acara-acara tertentu, lagu-lagu ini dapat diperlombakan untuk membuat suasana menjadi lebih bersemangat dan menyenangkan.

d. Pengakuan terhadap eksistensi

Banyak orang yang tidak melakukan apa-apa karena patah semangat. Berbuat ini salah, berbuat itupun salah. Mereka merasa hasil karyanya tidak diakui dan tidak dihargai. Untuk memotivasi agar mereka bangkit kembali, pendamping perlu memberikan pengakuan atas hasil karya mereka. Pujian perlu diberikan setiap kali masyarakat menghasilkan karya atau merayakan sebuah keberhasilan sekecil apapun. Oleh sebab itu, pendamping “ditabukan” untuk mencela masyarakat karena akan mematahkan semangat dan motivasinya.

Sebagai contoh, ketika masyarakat sudah selesai memilih pengurus kelompok, pendamping dianjurkan untuk memberikan pujian dan semangat bagi masyarakat yang telah berhasil membuat langkah awal bagi perbaikan kehidupannya. “Bermil-mil perjalanan yang panjang, pastilah diawali dengan satu langkah kecil saja,” demikian ungkapan orang bijak yang mungkin bisa dikutip untuk menyemangati masyarakat.

e. Memberikan Tantangan

Ada orang yang tidak mau berubah karena berbagai alasan, antara lain sudah merasa puas dengan kondisinya, menganggap bahwa kemiskinan sudah menjadi nasib yang harus diterimanya, atau merasa tidak ada tantangan untuk berubah atau maju. Menghadapi kondisi ini, pendamping harus bisa memperkenalkan hal-hal baru. Misalnya, memperkenalkan alat-alat baru yang bisa memberikan kemudahan dan meningkatkan efektivitas atau kegiatan pemupukan yang dapat meningkatkan hasil produksi. Pendamping juga bisa memperkenalkan sosok seseorang atau komunitas masyarakat lain yang dipandang sukses. Harapannya, harga diri dan dorongan untuk maju dari masyarakat semakin meningkat. Dengan menampilkan hal-hal itu, diharapkan masyarakat bisa tergerak dan mau mencoba melakukan terobosan-terobosan baru.

Adakalanya, seseorang merasa apatis karena merasa keterlibatannya dalam suatu kegiatan tidak dibutuhkan. Kegairahan orang semacam ini akan muncul manakala yang bersangkutan disertai tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

Gambaran berikut ini dapat juga dijadikan rujukan. Beberapa petani di sebuah desa, memperoleh bantuan cuma-cuma dalam bentuk sarana produksi untuk mengembangkan usahanya. Anehnya, usahanya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Padahal, petani tersebut sering betul memperoleh bantuan semacam itu. Petani di desa lainnya, memperoleh bantuan tidak cuma-cuma. Bantuan sarana produksi yang diberikan harus dikembalikan sesudah panen. Bila tidak mengembalikan, sangsinya cukup tegas karena akan dikucilkan oleh masyarakat. Herannya justru usaha tani di desa ini maju lebih pesat. Mengapa demikian? Setelah dikaji, ternyata petani di desa pertama kurang mendapat tantangan untuk mensukseskan usahanya karena setiap kali gagal akan memperoleh bantuan. Sementara petani di desa kedua, merasa memperoleh tantangan karena setiap rupiah pinjamannya harus dikembalikan.

2. Pendekatan fisik

Pendekatan fisik dapat dilakukan melalui berbagai hal. Apa yang diuraikan berikut ini hanyalah sebagian kecil dari strategi yang dapat diimplementasikan. Pendamping dapat melakukan improvisasi berdasarkan kreativitasnya masing-masing untuk mengembangkan strategi-strategi lain sesuai dengan kondisi masyarakat.

a. Kebutuhan

Seringkali orang bersedia melakukan sesuatu karena akan memperoleh imbalan dalam bentuk barang atau uang. Dalam konsep pemberdayaan, memberikan barang atau bantuan dengan sistem cuma-cuma tidak dianjurkan karena akan memacu ketergantungan. Tetapi bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan sesudah masyarakat menunjukkan prestasi atau memberikan kontribusi, dapat menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan.

Sebagai contoh, masyarakat kekurangan modal untuk memperbesar kolam ikan atau mengembangkan usaha tani lainnya. Untuk itu, mereka termotivasi untuk membangun Kelompok Swadaya Masyarakat dengan kegiatan simpan pinjam, karena selain mereka memang membutuhkan modal tambahan juga termotivasi oleh adanya program bantuan modal stimulan bagi kelompok yang memiliki kegiatan simpan pinjam untuk mendukung permodalan usaha anggotanya. Syaratnya adalah pengembalian pinjaman (oleh anggota) selalu lancar, administrasi kelompok baik, dan modal stimulan harus dikembalikan.

b. Demonstrasi plot

Sebagian orang baru sadar akan adanya manfaat suatu program atau perubahan serta termotivasi untuk bertindak apabila program tersebut telah memberikan bukti yang tampak mata. Pendekatan demonstrasi plot (biasa disingkat “demplot”, lihat Gambar 25) ini banyak digunakan untuk memperagakan teknologi di bidang pertanian atau konservasi lahan. Misalnya, untuk menyadarkan dan meyakinkan masyarakat

bahwa bertani dengan sistem tumpang sari antara tanaman tahunan dan tanaman semusim bisa dilakukan di lahan gambut, pendamping sebaiknya membuat demonstrasi plot sistem pertanaman tersebut. Demonstrasi plot sebaiknya dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari instansi terkait atau LSM yang bergerak dalam bidang yang sejalan dengan masalah yang dihadapi masyarakat. Kegiatan ini sebaiknya dibuat di lokasi yang strategis agar mudah dilihat dan diamati banyak orang.



Gambar 25. *Demonstrasi plot (demplot) digunakan untuk memperagakan teknologi di bidang pertanian (Dokumentasi oleh: Najiyati)*

c. Kunjungan

Sebagian masyarakat telah berhasil mengembangkan mata pencaharian atau usaha yang ramah lingkungan dan menghasilkan pendapatan yang cukup memadai. Mereka menerapkan cara-cara yang didasarkan pada pengalamannya sendiri atau belajar dari keberhasilan pihak lain. Pendamping perlu mendatangi orang-orang tersebut, memperkenalkan diri, dan meminta izin untuk sewaktu-waktu mengajak orang lain (kelompok dampungannya) berkunjung dan belajar dari apa yang mereka lakukan.

Masyarakat di desa dampingan dapat diajak untuk berkunjung ke tempat-tempat seperti itu untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi, sekaligus menyerap teknologi yang sudah diimplementasikan oleh orang lain.

Kotak 15

**Studi banding petani gambut Kalimantan Tengah ke Jambi dan Sumatra
Selatan dan sebaliknya**

Kegiatan studi banding untuk beberapa petani gambut dari Kalimantan Tengah ke Jambi dan Sumatera Selatan (juga sebaliknya) telah diselenggarakan oleh WI-IP pada tahun 2004 melalui proyek CCFPI. Kegiatan ini dimaksudkan agar petani gambut dari daerah yang berbeda dapat langsung melihat dan belajar tentang praktek-praktek pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan di daerah yang dikunjungi dan kemudian menerapkannya ketika mereka kembali ke daerah asalnya. Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 petani gambut dan pendamping masyarakat dari kedua pulau yang berbeda. Selain kunjungan lapangan, kepada mereka juga diberikan "kuliah" di dalam kelas dalam rangka membangkitkan kesadaran mereka akan unik dan rentannya lahan gambut di mana mereka tinggal dan bekerja, sehingga diperlukan adanya suatu pemahaman yang mendalam untuk mengelolanya.

Gambar di bawah memperlihatkan beberapa kegiatan peserta yang dilakukan saat kunjungan lapangan. Diantaranya adalah mengunjungi lahan petani yang berhasil mengembangkan sistem budidaya ramah lingkungan seperti tumpang sari tanaman kehutanan dan tanaman pangan di lahan gambut, pembuatan bokasi, pertanian organik, dan pengaturan tata air di lahan gambut dengan sistem tabat/sekat. Selain itu, peserta juga berkesempatan untuk berkunjung pada lahan gambut yang mengalami kerusakan berat akibat pengeringan yang berlebihan dan kebakaran. Pada akhir kegiatan, kepada beberapa peserta terpilih diberikan bantuan dana/modal kerja untuk mengembangkan praktek-praktek pertanian ramah lingkungan di daerah asalnya.



Program pertukaran pengalaman/kunjungan petani lahan gambut dari Kalimantan Tengah ke Jambi dan sebaliknya (Dokumentasi oleh: Telly, 2004)

Bab 9

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat

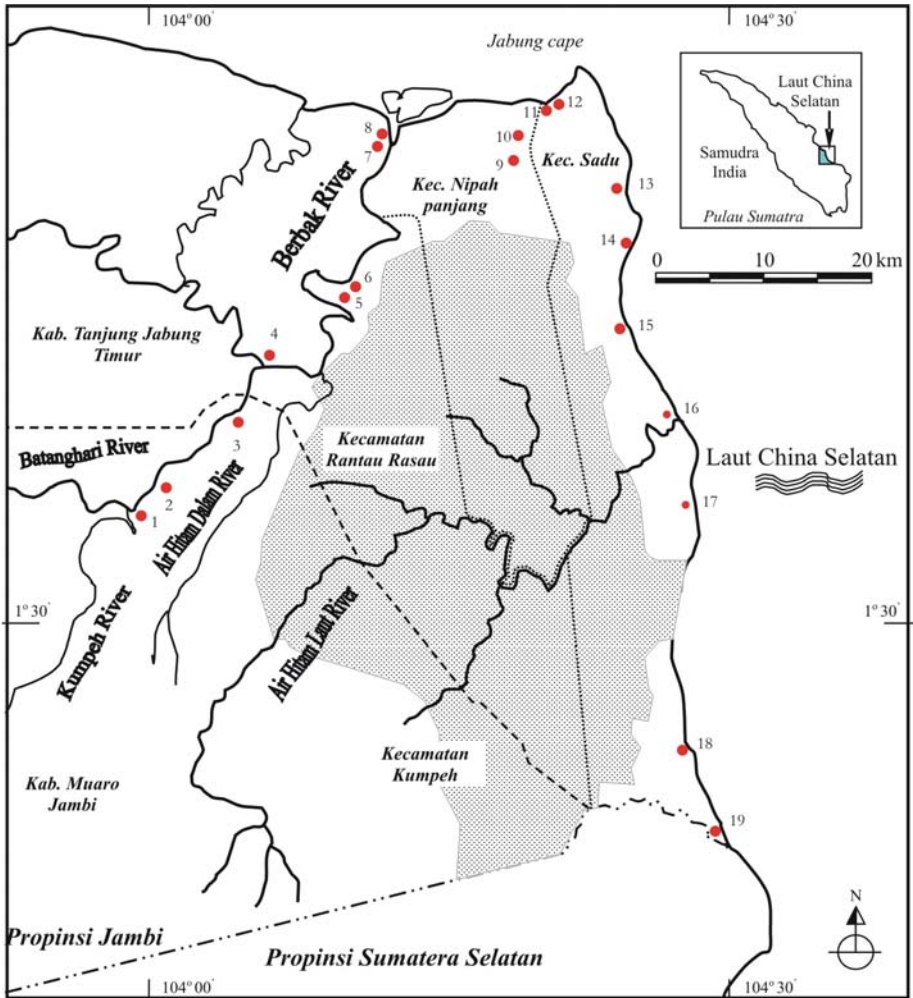
Sebagai penutup, bab ini menyajikan pengalaman memberdayakan masyarakat oleh beberapa LSM di wilayah pedesaan. Sebagian dari kisah-kisah tersebut memang tidak dilaksanakan di lahan gambut, namun dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan pemberdayaan di lahan gambut.

Selama hampir 18 tahun berkiperah di Indonesia, Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) telah melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai lokasi lahan basah, termasuk di lahan gambut Kalimantan dan Sumatera. Pengalaman tersebut dipandang perlu untuk disajikan dalam buku ini sebagai salah satu rujukan untuk berbagai kegiatan sejenis di kemudian hari. Uraian dibawah ini menyajikan potret masyarakat yang hidup di lahan gambut serta beberapa pengangalaman WI-IP dalam bekerja sama dengan mitra LSM lokal, yaitu Yayasan Pinang Sebatang (PINSE) di beberapa desa dampingan di Provinsi Jambi. Beberapa desa dampingan terletak di di mintakat penyangga Taman Nasional Berbak, Jambi. Disamping itu, untuk menambah wawasan pembaca, disajikan pula beberapa pengalaman dari Yayasan Bina Swadaya dalam melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di lokasi lain.





A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI AUR - JAMBI

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional Berbak (selanjutnya disingkat “TNB”), luas 162.700ha, sebagai salah satu diantara sekian banyak taman nasional di Indonesia, merupakan hutan lindung dengan kawasan lahan gambut (sekitar 50.000 ha) terluas di Asia Tenggara dan cukup rawan terhadap proses perusakan. Di samping penebangan liar, kebakaran lahan gambut dalam skala yang cukup luas di TNB menjadi fenomena rutin yang terjadi hampir setiap tahun. Kondisi semacam ini menarik perhatian WI-IP dan PINSE untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Aur, salah satu dari 19 desa yang berbatasan langsung dengan TNB (lihat Gambar 26). Desa ini merupakan salah satu dari 5 desa di sekitar kawasan TNB yang memperoleh sentuhan pemberdayaan dari WI-IP pada periode tahun 2002-2005.

Terletak di pinggiran Sungai Batanghari (lihat Peta), Desa Sungai Aur membentang di dataran lahan pasang surut seluas 12 km² atau 1.200 ha. Lokasi ini dapat ditempuh selama kurang lebih 3 jam dari ibukota provinsi (Jambi) melalui jalan darat dan/atau jalan air. Sesudah melalui jalan darat selama 2 jam dari kota Jambi ke ibukota kecamatan (Suak Kandis) dengan biaya Rp 7.000/orang, perjalanan dapat dilanjutkan melalui transportasi air dengan menyusuri Sungai Batanghari. Perjalanan tersebut ditempuh menggunakan *speedboat* selama setengah jam dengan biaya Rp 10.000/orang. Jika melalui jalan darat, tersedia ojek dari Suak Kandis menuju desa ini dengan ongkos Rp 10.000/orang selama 0,5-1 jam, tergantung dari kondisi jalan. Pada waktu musim hujan, jalan tersebut agak sulit dilalui karena masih berupa jalan tanah yang sangat licin.



LEGENDA

-  Taman Nasional Berbak
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas kecamatan

Nama Desa

- | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gedung Karya | 8. Nipah Panjang I | 15. Remau Bakutuo |
| 2. Jebus | 9. Simpang Datuk | 16. Air Hitam Laut |
| 3. Sungai Aur | 10. Simpang Jelita | 17. Sungai Cemara |
| 4. Simpang | 11. Sungai Lokan | 18. Labuhan Pering |
| 5. Sungai Rambut | 12. Sungai Itik | 19. Sungai Benuh |
| 6. Rantau Rasau | 13. Sungai Jambat | |
| 7. Nipah Panjang II | 14. Sungai Sayang | |

Gambar 26. Lokasi desa-desa di sekitar Taman Nasional Berbak, Jambi

1. Kondisi fisik lahan

Lahan di Desa Sungai Aur merupakan lahan pasang surut dengan tipe luapan bervariasi dari A hingga D tergantung musim dan letak lokasi. Pada musim hujan, lokasi yang dekat dengan sungai atau saluran memiliki tipe luapan A atau B. Sedangkan lokasi yang agak tinggi memiliki tipe luapan C atau D. Banjir sedalam 0,5-1,5 m biasanya berlangsung secara terus-menerus selama 1-1,5 bulan dan terjadi pada musim hujan antara bulan November sampai Februari.

Perlu diketahui, lahan rawa dengan tipe luapan A adalah lahan rawa di bagian terendah, yang selalu terluapi air pasang harian, baik pasang besar maupun pasang kecil, selama musim hujan dan kemarau. Lahan rawa dengan tipe luapan B adalah lahan rawa yang hanya terluapi oleh air pasang besar saja, tetapi tidak terluapi oleh pasang kecil atau pasang harian. Lahan rawa dengan tipe luapan C adalah lahan rawa yang tidak pernah terluapi walaupun oleh pasang besar dengan kedalaman air tanah kurang dari 50 cm dari permukaan tanah. Lahan rawa dengan tipe luapan D adalah lahan rawa yang paling kering, tidak pernah terluapi oleh air pasang besar dan kecil dengan kedalaman air tanah lebih dari 50 cm dari permukaan tanah.

Tanah yang terdapat di dekat tanggul sungai desa sungai Aur, cenderung merupakan tanah aluvial yang tidak berpirit. Tidak ada tanda-tanda adanya lapisan pirit, baik di saluran-saluran maupun di lahan. Mengarah ke dalam, sebagian tanah merupakan tanah bergambut atau gambut tipis dengan kedalaman kurang dari 1 m. Dengan pola semacam ini, musim tanam padi (lokal) biasanya terjadi pada bulan September dan panen pada bulan Februari/Maret.

Tata air dikembangkan secara tradisional oleh masyarakat berupa saluran-saluran kecil (handil) yang dibiayai secara gotong royong sepanjang 1,5 km pada tahun 1992 dan dibiayai melalui dana Bantuan Desa (Bandes) sepanjang 1 km pada tahun 2003. Saluran primer juga dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 1997 di sepanjang jalan sejajar dengan Sungai Batanghari menuju Suak Kandis. Di dalam saluran-saluran ini tidak terlihat adanya pintu-pintu air sehingga pasang-surut air di lahan betul-betul mengikuti kondisi musim dan naik-turunnya air sungai.

Desa Sungai Aur terbagi dalam 6 Rukun Tetangga (RT) dan berdasarkan pemanfaatannya, komposisi lahan di Desa Sungai Aur terdiri atas 400 ha persawahan, 200 ha perkebunan, dan 600 ha hutan rakyat. Dari luas tersebut, 200 ha masih tumpang-tindih dengan Hutan Tanaman Industri (HTI).

2. Kondisi sosial

Sebagian besar penduduk desa merupakan etnis Melayu Jambi yang sudah sejak tahun 1920-an menghuni lokasi tersebut. Pada mulanya, mereka memiliki mata pencaharian sebagai penangkap ikan, mencari kayu dan rotan di hutan, dan sebagian lagi berdagang. Pada tahun 1987, atas pertimbangan dan persetujuan masyarakat setempat, kepala Desa Sungai Aur memberikan peluang kepada pendatang untuk mengelola lahan di desa ini. Tujuannya, agar pendatang dapat menularkan keterampilan bertani kepada penduduk dan memotivasi penduduk untuk bertani.

Tawaran kepala desa disambut baik oleh pendatang dari luar desa. Sebagian dari mereka merupakan pecahan keluarga dari etnis Jawa yang telah lama bermukim di Desa Rantau Rasau, tapi ada juga orang Melayu yang datang dari daerah lain di Provinsi Jambi. Pada tahun 1987, kurang lebih 30 keluarga datang dan secara bertahap jumlahnya semakin bertambah.

Setiap keluarga pendatang memperoleh lahan seluas 1 kavling atau 2 ha. Lahan itu ditanami berbagai macam tanaman sesuai dengan kondisinya. Lahan yang tergenang, biasanya ditanami padi di musim hujan. Lahan yang tidak tergenang ditanami palawija atau tanaman tahunan. Ada 2 jenis pendatang di lokasi ini. Pertama, pendatang yang sifatnya menetap, dan secara resmi menjadi penduduk di desa ini. Kedua, pendatang yang hanya berada di desa pada waktu musim tanam padi, kemudian datang sesekali untuk memelihara dan panen. Di luar musim tersebut, mereka kembali ke desa asalnya.

Pada saat ini, menurut catatan kepala desa jumlah penduduk yang menetap di Desa Sungai Aur sebanyak 578 keluarga atau 2.120 jiwa. Penduduk tersebut dilayani oleh fasilitas sosial berupa Perangkat Desa, Sekolah Dasar, Madrasah, dan Puskesmas Pembantu.

Kondisi rumah penduduk asli tampak cukup baik dengan rumah-rumah permanen bertembok bata plester dan beratap genteng. Perkampungan asli ini dibangun di sepanjang pinggiran Sungai Batanghari. Perkampungan pendatang cenderung ke arah dalam dengan kondisi rumah yang belum permanen dengan dinding kayu dan beratap rumbia.

3. Kondisi perekonomian

Penduduk Desa Sungai Aur umumnya bermata pencaharian sebagai pencari kayu/pembalok, petani, pencari ikan, peternak, dan pedagang. Semula, hampir seluruh penduduk asli (60-70%) bermata pencaharian sebagai pencari kayu. Tapi, belakangan ini, pencari kayu hanya tinggal 10%, itupun hanya untuk konsumsi lokal. Berkurangnya jumlah pembalok juga diikuti oleh berkurangnya jumlah tempat pengggergajian kayu. Dulu jumlah pengggergajian kayu ada 3 unit, sekarang tinggal 2 unit. Berkurangnya jumlah pencari kayu dikarenakan ketatnya pengawasan oleh pihak berwajib, terbatasnya sisa kayu di hutan, mahalnya biaya, dan sebagian karena meningkatnya kesadaran warga terhadap kelestarian lingkungan (lihat Kotak 16). Persoalannya, sebagian besar penduduk belum memiliki mata pencaharian alternatif yang mampu menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan ketika mencari kayu seperti selama ini dilakukan.

Bagi mereka, membalok adalah masalah tuntutan perut. Bahkan sebagian dari mereka terpaksa melakukan penebangan kayu karena terlanjur terjerat hutang yang tidak kunjung habis. Bila ada alternatif pekerjaan lain yang lebih aman, pekerjaan tersebut pasti akan ditinggalkan, demikian hasil investigasi dengan beberapa pembalok. Di dalam hutan, mereka tinggal di gubuk-gubuk sederhana yang beratapkan rumbia atau perkemahan dari terpal, kedinginan, terpisah dari keluarga, teracam penyakit malaria, terkaman harimau, dan tertimpa kayu (baca juga Kotak 4 dalam Bab 3).

Dulu, membalok memang menguntungkan, tutur beberapa eks pembalok. Keuntungan sebanyak Rp 2-3 juta dapat diraih sesudah 2-3 minggu melakukan penebangan pohon di hutan. Sekarang, ceritanya lain lagi. Mereka bekerja secara berkelompok sebanyak 3-4 orang dan menghasilkan kayu sebanyak kurang lebih 10 m³ selama 15-20 hari. Harga yang diterima untuk setiap kubik kayu sebanyak Rp 500 ribu. Biaya yang dikeluarkan untuk hidup selama melakukan pembalokan sebanyak Rp 450 ribu, dengan rincian Rp 75 ribu untuk bensin, upah gesek Rp 125 ribu, upah menurunkan kayu ke sungai 150 ribu, sewa pongpong Rp 50 ribu, dan biaya makan selama di hutan Rp 50 ribu. Dengan demikian, mereka hanya dapat membawa pulang uang sekitar Rp 125-175 ribu/orang setelah bekerja selama 15-20 hari atau kurang dari Rp 10.000/hari, hal ini hampir sama dengan kondisi para penebang liar di rawa gambut Sumatera Selatan (Kotak 4 dalam Bab 3).

Petani di desa sungai Aur umumnya menanam komoditas padi lokal yang relatif tahan genangan. Padi ditanam di lahan yang terluapi air di musim hujan. Penyiapan lahan semula dilakukan dengan cara tebas-bakar. Belakangan, cara-cara semacam itu sudah banyak ditinggalkan. Sebagian besar petani menggunakan metode semprot (herbisida), lalu tanam atau tebas-kumpul-bakar. Penanaman dilakukan sekali pada bulan September dan panen pada bulan Februari/Maret dengan produksi 2-3 ton gabah/ha. Dua bulan sesudah panen pertama, panen susulan dapat dilakukan dengan produksi 500-700 kg gabah/ha. Sebagian kecil petani melanjutkan tanam padi dengan yang berumur pendek, namun karena serangan hama/penyakit cukup banyak, hal ini tidak banyak dilakukan. Pada lahan yang agak tinggi, petani melanjutkannya dengan menanam palawija atau sayuran. Petani pendatang, biasanya menanam padi lebih dari 1 ha dan sebagian besar produksinya dijual untuk biaya hidup. Sedangkan penduduk asli biasanya hanya menanam padi dalam jumlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri. Untuk melayani petani padi dalam mengolah gabah, di desa ini terdapat 5 unit penggilingan padi.

Bertani dan mencari ikan dilakukan oleh hampir semua penduduk di Desa Sungai Aur. Ikan dapat dikumpulkan melalui berbagai cara. Pertama, menggunakan kolam jebakan. Pada musim hujan air sungai meluap dan

ikan akan masuk dalam kolam [hal demikian mirip dengan kolam-kolam Beje yang banyak dibangun di lahan gambut Kalimantan Tengah, lihat Kotak 7 dalam Bab 3]. Ketika air surut, ikan akan tetap tinggal di dalam kolam sehingga mudah ditangkap. Kedua, dengan menggunakan peralatan tangkap seperti bubu, jaring, dan pancing. Musim kemarau, terutama saat bulan gelap (bukan sekitar bulan purnama), merupakan waktu yang sangat baik untuk menangkap ikan. Pada musim seperti ini, hampir semua penduduk turun untuk menangkap ikan dengan pendapatan bervariasi antara Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu/hari. Pada musim hujan, hanya 10% penduduk yang menangkap ikan. Bekerja di bidang angkutan air, juga dilakukan oleh sebagian kecil penduduk. Menurut catatan kepala desa, terdapat 98 perahu pongpong dan 3 unit *speedboat* yang digunakan untuk angkutan umum.

Kotak 16

Pak Izak Insyaf

Sejak kanak-kanak, Pak Izak (49 th) telah hidup di lingkungan pembalok hingga akhirnya membalok menjadi pilihan mata pencaharian utamanya. Menurut bapak dari 7 anak itu, membalok merupakan pekerjaan yang diwariskan oleh orang tua. Banyak orang tua di desanya yang melarang anaknya untuk bertani, karena selain pekerjaannya berat, beresiko dan tidak banyak mendatangkan uang. Selain itu, lingkungan untuk membalok juga mendukung. Para toke memberi banyak kemudahan bagi pembalok. Kebutuhan sehari-hari dicukupi, kebutuhan bekal ke hutan juga dipenuhi. Tentunya dengan sistem hutang. Tapi, dibalik kemudahan tersebut, tentu ada maksudnya. Mau tidak mau mereka harus membayar dengan cara mencari kayu di hutan. Akibatnya membalok pun menjadi mata pencaharian yang sulit dihindarkan.

Sesudah perhitungan hasil kayu, biasanya masih tersisa uang untuk dibawa pulang dan diberikan kepada keluarga. Namun, dengan semakin berkurangnya kayu di hutan dan mahalnya biaya membalok, sisa hasil yang dibawa pulang tidak sebanding dengan tenaga maupun risiko yang ditanggung. Pekerjaan membalok menurut pengakuannya, kini sudah mulai ditinggalkan. Selain karena mahalnya biaya, lokasinya pun semakin jauh dari tempat tinggalnya. Di samping itu, dia juga sudah menyadari bahwa pekerjaan yang sudah digeluti selama 25 tahun tersebut ternyata melanggar aturan negara dan merusak lingkungan.

Kotak 16 (Lanjutan)

Penyesalan memang selalu datang belakangan. Masa-masa emas sebagai pembalok telah usai. “Kalau saja dulu saya menanam karet atau tanaman tahunan lainnya, sekarang saya pasti sudah bisa panen,” sesal Pak Izak. Penyesalan sering kali muncul dalam benaknya. Dia juga mengaku menyesal pernah menolak tawaran dari WI-IP berupa bantuan usaha untuk kegiatan perekonomian yang dikompensasikan dengan penanaman pohon. Tapi, tidak ada suatu kebaikan yang terlambat, demikian prinsipnya. Sekarang, bapak yang mengaku sudah insyaf ini telah memiliki banyak bibit karet untuk ditanam, meskipun tidak mengikuti program tanaman kompensasi yang dicanangkan WI-IP. Bahkan dia berjanji akan mengarahkan anaknya untuk tidak menjadi pembalok. Persoalannya, dia tidak memiliki sumber penghidupan dalam jangka pendek selain sebagai pencari ikan dan buruh menyadap karet.

4. Proses pemberdayaan

Lokasi yang berdekatan dengan TNB dan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai pembalok menarik perhatian LSM lokal (Yayasan PINSE) dan WI-IP untuk memilih Desa Sungai Aur sebagai salah satu lokasi pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2002, seorang pendamping yang direkrut PINSE ditempatkan di lokasi ini. Tantangan yang dihadapi pendamping di lokasi ini cukup besar, terutama rasa curiga yang ditunjukkan oleh penduduk yang berprofesi sebagai pembalok yang cenderung sensitif terhadap pihak-pihak yang mempermasalahkan kegiatan penebangan liar.

Menghadapi kondisi demikian, pendamping tidak langsung mengangkat masalah lingkungan. Isu pertama yang diangkat adalah masalah peningkatan ekonomi masyarakat. Harapannya, sesudah kondisi perekonomian membaik, masyarakat tidak lagi tertarik untuk menerima tawaran para cukong kayu untuk menjadi pembalok. Untuk itu, strategi awal yang diterapkan pendamping adalah dengan melakukan pendekatan kepada ibu-ibu dan remaja, yaitu dengan membuka cakrawala mereka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Pendekatan kepada kedua golongan ini diharapkan agar melalui merekalah nantinya issue-issue

lingkungan diteruskan keanggota keluarga di rumah, termasuk kepada laki-laki dewasa seperti kepada ayah atau pamannya. Langkah selanjutnya, pendamping melakukan pertemuan terhadap orang dewasa yang membahas perlunya pengembangan kelompok tani untuk kerjasama dibidang perekonomian. Setelah minat berkelompok timbul/aktif kembali, lalu pendamping mulai menyisipkan isu-isu pelestarian lingkungan yang dikaitkan dengan adanya rencana pemberian dana stimulan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Awalnya, di desa Sungai Aur sudah ada kelompok tani, namun kelompok itu belum berfungsi secara efektif, belum memiliki pembukuan, dan belum memiliki AD/ART. Pemahaman terhadap manfaat kelompok masih relatif rendah. Untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang teknis usaha dan pemahaman akan pentingnya konservasi lahan gambut, kepada mereka juga diberikan pelatihan-pelatihan yang relevan oleh instruktur atau petugas penyuluh lapangan (PPL) yang diundang oleh pendamping dari PINSE ke lokasi pemukiman kelompok. Selain itu, pihak WI-IP melalui proyek CCFPI juga memberikan beberapa buku/brosur panduan tentang teknik budidaya pertanian ramah lingkungan dilahan gambut, cara-cara mencegah dan menanggulangi kebakaran, pengaturan tata air dan tehnik menyiapkan benih tanaman di lahan gambut dan sebagainya. Selama proses pendampingan, juga dilakukan peningkatan kompetensi kelompok, meliputi pelatihan manajemen dan keuangan kelompok, pelatihan alih ketrampilan seperti budidaya tanaman, peternakan, kerajinan anyaman (bagi kelompok PPK), dan pembentukan kader konservasi. Beberapa bentuk pelatihan keterampilan di atas dimaksudkan agar ketika kelompok memperoleh dana stimulan dari proyek CCFPI (disalurkan melalui PINSE), para anggotanya telah siap dan memiliki keterampilan yang memadai. Sehingga dana stimulan yang disalurkan untuk kegiatan berusaha nantinya dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat guna.



Gambar 27. Hasil kerajinan anyaman produksi anggota PKK di Sungai Aur (Jambi) sesudah memperoleh pelatihan kerajinan anyaman (Dokumentasi oleh: Telly, 2004)

Oleh Proyek CCFPI, melalui PINSE, kepada empat kelompok tani di Desa Sungai Aur (total jumlah anggota 81 orang) telah diberikan modal kerja (total Rp 83.591.500) sebagai stimulan untuk berusaha dan sekaligus agar mereka berperan aktif dalam mengatasi isu-isu pelestarian lingkungan di desanya, khususnya terkait dengan penghijauan lahan gambut bekas terbakar/rusak. Jadi, modal stimulan yang diberikan kepada kelompok tidak dibagikan secara cuma-cuma, tapi dikaitkan dengan program penanaman pohon. Yaitu bantuan dana stimulan digunakan untuk modal usaha, tapi sebagai jaminan/kompensasinya, penerima dana akan melakukan penanaman tanaman kehutanan dilahan gambut yang rusak/terlantar dan merawatnya. Tanaman yang ditanam ini (bibitnya diperoleh dari hutan) mesti bertahan hidup hingga persentase tertentu sesuai kesepakatan antara penyalur dana (PINSE) dengan kelompok masyarakat penerimanya. Untuk memperoleh dana stimulan ini, setiap anggota kelompok tani diminta membuat proposal rencana kegiatan (nantinya ditujukan kepada pengurus kelompok) yang memuat kegiatan penanaman tanaman kompensasi (berupa tanaman kehutanan seperti

jelutung, ramin, duren, pulai, sungkai dll) dan kegiatan usaha jangka pendek yang dapat memberikan alternatif pendapatan (*income*) bagi masing-masing anggota. Selanjutnya rencana kerja anggota kelompok disusun menjadi satu proposal terpadu kelompok yang kemudian diajukan kepada PINSE. Tahap selanjutnya, PINSE mengkaji dan merekomendasikan proposal tersebut untuk dapat didanai oleh proyek CCFPI yang dikelola oleh WI-IP.

Dalam implementasinya, sebagian dana stimulan (sebagai modal usaha untuk dapat memberikan alternatif pendapatan) digunakan untuk membeli bibit tanaman sayuran atau palawija dan sebagian lagi untuk membeli bibit ternak. Sedangkan bibit tanaman tahunan (sebagai kompensasi) umumnya diperoleh dari lingkungan sekitar termasuk dari hutan. Dana stimulan tidak boleh digunakan untuk membeli bibit tanaman kompensasi ini, meskipun kenyataannya, ada juga anggota kelompok yang menggunakan dana stimulan untuk membeli bibit tanaman kompensasi.

Tanaman kompensasi umumnya berfungsi sebagai “tabungan hidup”. Jenis tanaman yang banyak dipilih warga (disesuaikan dengan ketebalan gambutnya) adalah karet, kemiri, duren, sungkai, coklat, jeruk, ramin, randu, jelutung, dan kakao dengan pertimbangan bahwa tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi serta sesuai dengan lingkungan. Tanaman tersebut sebagian ditanam di lahan usahanya masing-masing yang biasanya ditanami tanaman semusim atau ditanam di lahan gambut desa bekas kebakaran tahun 1997. Hasil pengamatan di lapang menunjukkan bahwa penggunaan varietas unggul bagi tanaman perkebunan seperti karet, agaknya belum banyak memperoleh perhatian masyarakat maupun pendamping. Bibit karet biasanya disemaikan sendiri dari biji yang diambil dari hutan atau tanaman milik masyarakat. Dikhawatirkan, tanaman tersebut nantinya kurang memberikan produksi yang optimal sehingga mengecewakan masyarakat di kemudian hari.



Gambar 28. Bibit tanaman kompensasi yang siap di tanam di lahan kelompok tani diletakkan dalam perahu untuk mencegah hanyut oleh banjir (kiri) dan tanaman kakao, berumur 1 tahun, sebagai kompensasi yang telah ditanam anggota kelompok masyarakat binaan PINSE di muara sungai Air Hitam Dalam, Desa Sungai Rambut, Jambi. (Dokumentasi oleh: Wibisono, 2004)

Bibit tanaman tahunan yang kualitasnya kurang baik juga banyak digunakan oleh masyarakat di luar peserta program dana kompensasi. Sudah banyak masyarakat yang menyadari pentingnya menanam tanaman tahunan. Jenis tanaman yang paling banyak diminati adalah kelapa sawit. Mereka membuat bibit sendiri dengan cara menyemaikan benih atau kecambah yang ditawarkan oleh penjaja benih keliling. Dikhawatirkan, benih yang dijual oleh pedagang keliling tersebut adalah benih tidak unggul sehingga nantinya tidak akan memberikan produksi yang optimal. Perlu diketahui, produktivitas kelapa sawit yang rendah di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh penggunaan benih tidak unggul yang persentasenya mencapai hampir 50%.

Kotak 17

Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Desa Sungai Aur

Selain beberapa pelatihan keterampilan yang dilakukan di Desa Sungai Aur, kepada anggota kelompok yang dibina PINSE juga diberikan pelatihan tentang cara-cara penanggulangan kebakaran di lahan gambut. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini dan sebagai wujud kepedulian mereka akan bencana kebakaran yang sering terjadi di desa mereka, akhirnya mereka membentuk satuan brigade pemadam kebakaran di Desa Sungai Aur. Brigade ini beranggotakan kelompok yang di bina oleh pendamping PINSE, seperti halnya juga yang terbentuk di Desa Pematang Raman dan Sungai Rambut (lihat Kotak 5 dalam Bab 3), dan diharapkan dapat menggerakkan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kebakaran di desanya dan sekaligus sebagai tenaga pemadam kebakaran yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran di areal TNB.

Untuk meningkatkan keterampilan dan kewaspadaan dalam melaksanakan pemadaman kebakaran, selanjutnya PINSE dan TNB (dengan dukungan dana dari CCFPI dan pihak-pihak lain) melaksanakan kegiatan pertemuan bersama yang diadakan pada bulan Maret 2005 di desa sungai Aur. Kegiatan yang berjudul "Berkumpul, Bergerak, Bersama" (B3) tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menyatukan dan mensinergikan potensi masing-masing anggota kelompok dalam upaya untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNB sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak. Selain itu, diharapkan bahwa kegiatan tersebut akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota kelompok dalam mengendalikan dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut diantaranya meliputi penjelasan dan penerapan tentang tehnik-tehnik

Kotak 17 (Lanjutan)

pemadaman yang diberikan oleh tim instruktur pemadam kebakaran pemerintah, diskusi antar anggota kelompok serta permainan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan serta meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Kegiatan diikuti oleh 9 regu pemadam kebakaran dari 3 desa (yaitu Desa Sungai Aur, Pematang Raman dan Sungai Rambut), perwakilan masyarakat dari 14 desa penyangga TNB serta perwakilan dari perkebunan sawit di sekitarnya.



Tim Brigade Pemadaman Kebakaran dari 3 desa (Pematang Raman, Sungai Aur dan Sungai Rambut) berlatih dalam rangka mempersiapkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kawasan TN Berbak yang diantisipasi akan berlangsung pada musim kemarau pada bulan Juli – September 2005. (Dokumentasi oleh: PINSE, 2005)

Pada saat ini, rata-rata umur tanaman kompensasi sudah mencapai 1,5 tahun, tapi sebagian mati karena bencana pada tahun 2003. Rupanya, puntukan-puntukan tanah yang digunakan untuk menanam tanaman kompensasi tidak mampu menahan banjir yang ketinggiannya mencapai 1-2 m. Walaupun demikian, karena masyarakat sudah menyadari

pentingnya tanaman tersebut bagi lingkungan dan adanya kesepakatan yang menyatakan kesanggupan untuk menanam dan memelihara tanaman kompensasi, mereka pun secara konsekuen melakukan penanaman kembali sebagai pengganti tanaman yang mati.

Kondisi kelompok di Desa Sungai Aur pada umumnya cukup baik dan aktif. Beberapa indikator untuk melihat aktifnya kelompok tersebut adalah adanya pertemuan rutin sesuai jadwal yang disepakati dengan tingkat kehadiran lebih dari 75% anggota, administrasi kelompok sudah dijalankan, kegiatan-kegiatan kelompok sudah berjalan sesuai program, serta dipatuhinya institusi atau norma-norma yang dibangun di dalam kelompok. Namun dari 10 kelompok yang ada, baru 4 kelompok (dengan jumlah anggota 81 orang) yang memperoleh dana kompensasi setelah didampingi selama 3 tahun. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari belum dipenuhinya kriteria kelompok sampai belum siapnya bibit tanaman kompensasi dan lahan.

Besarnya dana kompensasi disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam menanam tanaman tahunan seperti yang diajukan oleh masing-masing anggota kepada kelompok. Di desa Sungai Aur, besarnya dana stimulan berkisar antara 11 juta hingga 30 juta rupiah/kelompok (dengan total dana yang telah tersalurkan sebesar Rp 83.591.500) Penyaluran dana stimulan untuk kegiatan modal usaha jangka pendek disertai dengan perjanjian dan disalurkan melalui tiga tahap, yaitu:

- ❖ Tahap pertama sebesar 50% disalurkan apabila kelompok telah menyiapkan bibit tanaman tahunan sesuai yang tercantum dalam proposal.
- ❖ Dana tahap kedua (25%) disalurkan apabila bibit sudah ditanam, dan
- ❖ Tahap ketiga, sisanya, disalurkan apabila tanaman sudah tumbuh dengan baik serta tidak rawan lagi terhadap risiko kematian akibat banjir.

Hingga 2,5 tahun pembinaan, modal stimulan yang telah dapat disalurkan baru 75%. Penyebabnya bervariasi, berbeda antar masing-masing petani, ada yang karena tanaman kompensasinya belum tumbuh secara baik,

kelompok yang belum memenuhi persyaratan keaktifan, hingga usaha jangka pendek yang belum berkembang. Sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati antara kelompok dengan PINSE, maka sisa modal stimulan sebanyak 25% belum disalurkan oleh PINSE kepada mereka. Hal ini dimaksudkan agar anggota kelompok menjadi lebih disiplin dalam mematuhi aturan yang sudah disusun bersama serta menjadi pemicu agar petani lebih termotivasi dalam menyelesaikan/ memenuhi tanggung jawabnya.

Sesudah 2,5 tahun memperoleh pendampingan, terdapat beberapa perubahan perilaku anggota kelompok. Hal demikian terlihat dari adanya dinamika kelompok yang menjadi lebih aktif (misalnya menghadiri pertemuan bulanan yang rutin untuk membahas hal-hal teknis), meningkatnya kesadaran kelompok dalam pelestarian lingkungan (misal ditanamnya tanaman tahunan dan terbentuknya tim pemadam kebakaran), serta meningkatnya keterampilan teknis dan manajemen usaha (terlihat dari adanya pembukuan yang baik) dan sebagainya.



Gambar 29. Pembibitan tanaman tahunan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat (Dokumentasi oleh: Telly, 2004)

Selain itu, dari aspek kesadaran anggota kelompok terhadap kelestarian hutan, telah terjadi pergeseran pandangan terhadap mata pencaharian. Yaitu sebelumnya banyak dari mereka bekerja sebagai penebang kayu liar di hutan, kini jumlah mereka telah berkurang secara nyata. Walaupun hal tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar aspek pendampingan, seperti misalnya oleh ketatnya pengawasan oleh pemerintah, terbatasnya kayu di hutan, dan keuntungan yang sangat menurun. Meskipun demikian, peran gerakan pencerahan yang dibawa oleh program pemberdayaan di lokasi ini tidak dapat diabaikan. Kesadaran masyarakat (diluar kelompok binaan) terhadap lingkungan juga mulai berkembang, hal demikian terlihat dari banyaknya anggota masyarakat desa Sungai Aur yang mulai melakukan pembibitan tanaman tahunan sendiri, meskipun mereka tidak menerima dana stimulan dari proyek CCFPI/ WI-IP. Indikasi lain juga tampak dari semakin berkurangnya petani yang membuka lahan untuk pertanaman padi dengan cara tebas-bakar. Sebagian petani sudah menerapkan metode tebas-semprot-kumpul-bakar atau semprot-tanam dengan cara tugal. Pelatihan dan pembentukan brigade pemadam kebakaran di lokasi ini sedikit-banyak telah membawa dampak terhadap norma-norma bertani di kalangan petani [*catatan: informasi ini dihimpun penulis dari para pejabat dan masyarakat Desa Sungai Aur*].

Dalam hal ketrampilan dibidang kerajinan tangan, tampak adanya perubahan nyata. Kondisi demikian terlihat dari kemampuan sebagian anggota kelompok yang telah mengembangkan usaha anyaman seperti tikar dan topi dari daun pandan. Sebanyak 10 warga secara rutin telah memiliki mata pencaharian sampingan sebagai pengrajin anyaman selepas pelatihan ketrampilan anyaman yang diberikan oleh PINSE dalam program pemberdayaan. Selain itu, sebagian petani juga sudah mulai bisa melakukan pembibitan tanaman meskipun secara teknis tampak belum seluruhnya benar. Dari aspek manajemen usaha, setidaknya sebagian petani sudah mampu membuat rencana usaha sebagaimana dipersyaratkan untuk memperoleh dana stimulan.

Namun demikian, disadari pula bahwa tidak seluruh kegiatan telah memberikan hasil maksimal sesuai dengan harapan. Kejadian banjir besar pada akhir tahun 2003 (lihat juga Kotak 6 dalam Bab 3) telah membuat kegiatan pendampingan menjadi tersendat sehingga dibutuhkan dukungan dan motivasi yang lebih kuat terhadap anggota kelompok binaan untuk

tetap bersemangat dalam menjalankan komitmennya terhadap dana stimulan yang telah mereka terima. Isu utama yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat di Sungai Aur adalah sifat keberlanjutan dari program stimulan Vs tanaman kompensasi yang dijalankan PINSE, sehingga ke depan masyarakat dapat menjadi mandiri dalam melaksanakan kegiatan ekonominya meskipun tanpa stimulan dari pihak luar.

Kotak 18

Pak Mahyudin dan Semangatnya

Sejak 8 tahun lalu, Pak Mahyudin dan keluarganya menetap di Desa Sungai Aur. Oleh kepala desa, bapak berusia 40 tahun yang berasal dari Desa Rantau Rasau ini, diberi lahan 1 kavling atau 2 ha untuk dibuka dan ditanami.

Selama hampir 6 tahun mengelola lahannya, Pak Mahyudin hanya menanam padi. Walaupun demikian, dalam angan-angannya pak Mahyudin berharap agar pada suatu saat ia dapat menanam tanaman tahunan. Akhimya angan-angan tersebut dapat terwujud ketika WI-IP menawarkan modal stimulan dengan kompensasi tanaman tahunan. Pucuk dicita, ulam tiba. Bersama kelompoknya, bapak dari 3 anak ini kemudian berembung dan berketetapan untuk memilih tanaman jeruk, coklat, dan kopi sebanyak 330 batang sebagai tanaman kompensasi. Sedangkan dana stimulan yang diterimanya digunakan sebagai modal usaha jangka pendek berupa kegiatan beternak ayam dan itik. Sesudah proposal dibuat dan disetujui oleh pendamping, bibit tanaman kompensasi pun disiapkan. Untuk itu, Pak Mahyudin memperoleh modal stimulan sebesar Rp 700 ribu atau 50% dari rencana modal yang akan disalurkan sebesar Rp 1,4 juta. Sebagian uang tersebut digunakan untuk membeli induk ayam, itik, dan sebagian untuk melunasi pinjaman bibit jeruk.

Sesudah bibit tanaman kompensasi ditanam, selanjutnya 25% dari total dana stimulan atau sebesar Rp 350 ribu disalurkan lagi kepadanya. Dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk, benih padi, dan sebagian untuk modal usaha dagang. Bibit jeruk, coklat, dan kopi ditanam di tempat yang agak tinggi pada lahan usaha seluas 2 ha yang dimilikinya. Di sela-sela lahan tersebut, ia tetap menanam padi.

Semangat bapak asal Jawa Barat ini untuk bertanam tanaman perkebunan tampaknya cukup tinggi. Terbukti dengan upayanya untuk kembali membuat bibit kelapa sawit. Sayangnya, semangat untuk bertani tersebut kurang didukung oleh pemahaman tentang varietas tanaman yang baik. Kecambah kelapa sawit yang dibelinya seharga Rp 350/biji dari pengecer, kemungkinan besar bukan bibit unggul. Peralnya, saat ini kecambah bibit kelapa sawit yang baik biasanya berharga lebih dari Rp 2 ribu rupiah/biji. Itupun melalui inden atau antrean pemesanan yang cukup lama. Jika dugaan ini benar, semangat yang menggebu ini kelak akan membuahkan kekecewaan setelah 5 tahun bibit ditanam. Namun, hal ini tentu saja masih membutuhkan suatu pembuktian.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG RAMAN

Desa Pematang Raman juga merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan TNB. Kurang lebih 80 orang penduduknya bermata pencaharian sebagai pencari ikan di dalam kawasan perairan TNB. Kegiatan mencari ikan di kawasan ini dilakukan pada musim hujan, yaitu pada bulan September hingga Februari. Di musim kemarau, ikan di TNB tidak banyak, namun kondisi sebaliknya terjadi di desa, yaitu pada musim kemarau justru banyak ikan di perairan dekat desa, sehingga mereka mencari ikan di desa. Selama di desa, mereka juga menanam palawija dan padi. Meskipun mereka menyadari bahwa mencari ikan di dalam kawasan Taman Nasional melanggar peraturan, tetapi tuntutan hidup memaksa mereka untuk melakukan kegiatan tersebut.

1. Kegiatan mencari ikan

Kegiatan dalam sekali mencari ikan di TNB berlangsung selama kurang lebih 18-25 hari. Pencari ikan berangkat secara berkelompok antara 3-4 orang. Untuk sampai di perbatasan TNB, mereka menggunakan perahu dengan membawa bekal berupa beras, cabe, garam minyak sayur, sabun mandi, sabun cuci, rokok, dan minyak tanah. Sesampainya di perbatasan TNB, mereka beristirahat, kemudian dengan perahu lebih kecil melanjutkan perjalanannya ke pedalaman TNB dengan menyusuri sungai selama 3-4 jam. Pada tempat-tempat tertentu, umumnya di sepanjang Sungai Air Hitam Laut (melintas di dalam kawasan TNB), mereka sudah memiliki pondok-pondok kecil yang terbuat dari kayu beratap rumbia, berukuran sekitar 2 x 3 m (lihat Gambar 30). Di tempat itulah mereka bermalam, memasak, dan menghabiskan sebagian waktu siangya selepas jam 11 pagi. Sebagian dari mereka mengisi waktu luang dengan mencari kayu di hutan TNB .

Mencari ikan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan bubu, kail, serta tangkul. Bubu merupakan alat penjebak ikan yang diberi sedikit pakan untuk menarik ikan memasuki alat tersebut. Ikan yang sudah masuk ke dalam alat perangkap tersebut tidak dapat keluar lagi. Sedangkan tangkil adalah semacam jaring berukuran 4 m x 4 m hingga 10 m x 10 m.

Sesudah memperoleh hasil kurang lebih 1 kuintal, mereka akan segera pulang. Ikan-ikan hasil tangkapannya ditempatkan dalam beberapa jirigen yang masing-masing mampu memuat 12 kg ikan. Ikan-ikan tersebut dipasarkan ke Jambi dengan ongkos transportasi dari dermaga (perbatasan TNB) sebesar Rp 8.000-10.000,-/jirigen. Harga ikan di Jambi sekitar Rp 7 ribu hingga 10 ribu/kg.



Gambar 30. *Pemukiman sementara para penangkap ikan di dalam TN Berbak (kiri), hasil tangkapan (tengah) dan alat tangkap (kanan).
(Dokumentasi oleh: Pieter van Eijk and Jill Heyde, 2004)*

2. Proses pemberdayaan

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa kegiatan mencari ikan di dalam TNB dilakukan sejak pukul 7 pagi hingga jam 11 siang. Sesudah itu, kegiatan tersebut dihentikan karena ikan kepanasan dan berlindung di sarangnya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh para pencari ikan selepas jam 11 hanya tiduran dan istirahat. Hal demikian membuat mereka jemu dan tidak produktif. Kondisi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh WI-IP untuk membuat mereka memiliki kegiatan yang lebih produktif dan sekaligus berguna bagi lingkungan, yaitu dengan melibatkan mereka untuk merehabilitasi lahan bekas terbakar dan menjadi pengawas dan pemadam kebakaran di dalam kawasan TNB. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak pengelola TNB (Taman Nasional Berbak) dan HPH PT. PIW (Putra Duta Indah Wood), lihat Kotak 6 dalam Bab 3 sebelumnya.

Sebagai tenaga kerja rehabilitasi lahan, para nelayan ini dibagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok memperoleh jatah penanaman yang berkisar antara 360 sampai 1.200 batang dengan jenis tanaman yang

beraneka macam. Kegiatan 'ekstra' yang dilakukan oleh para nelayan tersebut adalah membuat gundukan atau puntukan tanah agar tanaman tidak tergenang air, menanam bibit, dan menyulam. Pada tahapan berikutnya, mereka juga dibebankan tugas untuk memantau tingkat pertumbuhan tanaman rehabilitasi. Upah yang diterima terdiri atas Rp 4.000,- untuk pembuatan 1 unit gundukan tanah, Rp 2.000,- untuk penanaman 1 bibit, dan Rp 2.000,- untuk penyulaman 1 batang bibit.

Pada kegiatan rehabilitasi tahap pertama yang dilakukan di dalam TNB, hasilnya sangat tidak memuaskan karena hampir seluruh tanaman terendam oleh banjir yang cukup besar dan lama. Namun pada kegiatan penanaman tahap kedua, hasilnya cukup baik dimana persentase tanaman yang hidup berkisar antara 40-55%. Jenis tanaman hidup berturut-turut didominasi oleh ramin (*Gonysytilus bancanus*), rengas (*Mellanorhoea walichi*), punak (*Tetramerista glabra*) dan perepat (*Combretocarpus rotundatus*). Faktor yang mempengaruhi tingkat kematian tersebut antara lain genangan air, gulma, dan umur bibit. Sebagian besar bibit yang mati merupakan tanaman muda yang masih belum siap tanam (tinggi <20 cm) dan tidak tahan genangan. Sedangkan sebagian besar bibit yang hidup merupakan bibit yang telah siap tanam dan memiliki tinggi 50-80 cm, sehingga relatif tahan genangan.

Selain melakukan rehabilitasi hutan yang rusak di TNB, kepada mereka juga dilatih menjadi regu pemadam kebakaran. Pertimbangannya adalah karena frekuensi keberadaan mereka lebih banyak berada di hutan dan sudah mengenal seluk-beluk hutan TNB secara baik, sehingga kepada mereka akan lebih mudah dalam menanggulangi kebakaran hutan.

Secara umum, tujuan pelibatan para nelayan di taman Nasional Berbak tersebut adalah untuk:

- ❖ Membantu mempercepat pemulihan kondisi ekologis Taman Nasional Berbak akibat kebakaran, yaitu dengan melakukan intervensi melalui kegiatan penanaman kembali (rehabilitasi) pada lahan gambut bekas terbakar.
- ❖ Mendidik mereka agar lebih sadar, bertanggung jawab dan mampu melakukan perlindungan dan pelestarian ekosistem lahan dan hutan gambut di Taman Nasional Berbak (terutama terhadap bahaya api)

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI RAMBUT DAN RANTAU RASAU

Pada tahun 1997 hingga 2000, JICA (*Japan International Cooperative Agency*) bekerja sama dengan Departemen Kehutanan melakukan pemberdayaan masyarakat di 3 dusun yang terletak di Desa Sungai Rambut dan Rantau Rasau yang melibatkan 17 kelompok tani. Ketiga dusun tersebut terletak di sekitar kawasan penyangga TNB. Kawasan penyangga (*buffer zone*) merupakan kawasan yang terletak antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi di dalamnya (seperti: pertanian, perikanan, perkebunan, pemukiman, industri kecil, pariwisata dan lain lain), sehingga tekanan terhadap Taman Nasional Berbak dapat dibatasi (Ministry of Environment, 2002). Dalam kawasan ini, masyarakat lokal, pihak pengelola, peneliti, LSM, dan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) bekerjasama untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada secara bijaksana sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. [catataan: Walau pengelolaan kawasan penyangga TNB berada di bawah Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, kawasan ini tetap merupakan bagian integral dari TNB dan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang terpisah dari taman nasional itu sendiri. Dalam buku Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga Taman Nasional Berbak (Amythas & WI-IP, 2000), daerah ini dibagi menjadi 4 wilayah besar (wilayah I, II, III dan IV). Masing-masing wilayah kemudian dibagi menjadi 3 sub-zona yaitu Jalur Hijau, Jalur Interaksi dan Kawasan Budidaya. Jalur hijau berfungsi untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati sehingga kawasan ini dipelihara sebagai suatu ekosistem hutan alamiah. Jalur interaksi merupakan areal kontak antara hutan dan penduduk. Di jalur ini dikembangkan melalui program agroforestry dan hutan kemasyarakatan dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. Sementara itu, kawasan budidaya memang dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat].

1. Kondisi lokasi

Kondisi alam di 3 dusun (Dusun Sungai Palas, Rasau Jaya, dan Bunga Desa) pada dasarnya hampir sama. Bentang alamnya terdiri atas pemukiman penduduk yang berjajar atau mengelompok di pinggir sungai/parit, pekarangan rumah, kebun dan sawah, lahan kosong berupa semak belukar, dan areal berhutan.

Padi merupakan komoditas utama yang ditanam di 3 dusun tersebut. Khusus di Dusun Palas, padi ditanam di areal dekat kawasan penyangga TNB. Pada areal yang jauh dari kawasan penyangga, petani menanam tanaman tahunan seperti kelapa. Di dusun lainnya, lahan bersemak banyak ditemukan di dekat kawasan penyangga karena petani kekurangan tenaga dan modal untuk menggarapnya, serta seringnya terjadi serangan hama dan penyakit.

Ketiga dusun tersebut dihuni oleh etnis yang berbeda, tetapi mayoritas beragama Islam. Kepala desa memiliki pengaruh yang cukup kuat, demikian pula pemimpin informal, terutama di kalangan etnis Bugis. Mayoritas penduduk Dusun Sungai Palas adalah Suku Bugis yang sebagian bekerja sebagai penangkap ikan dan petani. Komoditas tanaman tahunan yang banyak dikembangkan adalah kelapa, jeruk, dan coklat. Sementara Dusun Rasau Jaya dihuni oleh Suku Jawa yang umumnya sebagai petani, peternak, dan penangkar bibit. Dusun Bunga Desa mayoritas ditempati oleh Suku Melayu yang bermata pencaharian sebagai penangkap ikan, petani, serta mencari kayu dan rotan. Permasalahan utama yang menjadi kendala pengembangan usaha tani di ketiga dusun ini adalah banjir dan serangan hama babi.

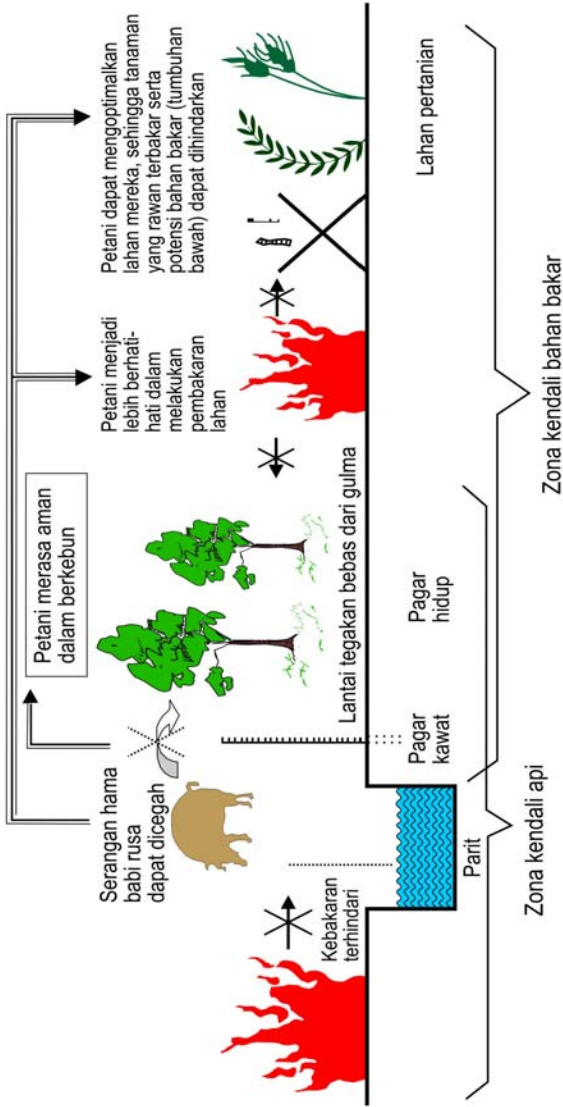
Di dua desa tersebut tidak terdapat tanah adat ataupun lahan milik bersama. Semua lahan dimiliki individu, sedangkan lahan-lahan kosong yang terlantar dan lahan hutan dimiliki oleh pemerintah desa. Rata-rata penduduk memiliki lahan seluas 2 ha yang diperoleh dengan cara membuka sendiri, warisan, atau membeli dari orang lain. Untuk lahan-lahan kosong dan terlantar, jika selama 3 tahun tidak digarap pemiliknya, maka ia akan kehilangan status hak kepemilikannya. Lahan seperti itu kemudian dikuasai oleh pemerintah desa dan dapat dijual kepada yang berminat.

2. Proses pemberdayaan

Sesudah dilakukan proses PRA di ketiga dusun dari dua desa di atas, kemudian disepakati untuk membangun jalur hijau terpadu sepanjang 14,5 km (terrealisasi 15,3 km) sebagai pembatas kawasan budidaya dan kawasan penyangga. Pada jalur ini, masyarakat menaman berbagai jenis tanaman tahunan. Bagi masyarakat, jalur hijau terpadu (disertai dengan pagar) bermanfaat untuk mencegah serangan hama babi yang merajalela dan menyerang tanaman penduduk di kawasan budidaya. Tanaman produktif yang ditanam merupakan salah satu sumber pendapatan. Dari aspek lingkungan, jalur hijau terpadu juga bermanfaat sebagai sekat bakar untuk mencegah penjarangan ke dalam/luar hutan. Jalur tersebut juga berfungsi sebagai penanda batas agar masyarakat dapat memahami batas lahan budidaya dan lahan hutan. Tujuannya, supaya tidak terjadi penjarangan hutan secara tidak sengaja yang disebabkan oleh ketidakpahaman/ketidakjelasan masyarakat terhadap batas kawasan budidaya (lihat Gambar 31).

Jenis tanaman tahunan yang ditanam pada jalur hijau ini diantaranya terdiri atas sengon, lamtoro, dan pinang. Sedangkan tanaman semusimnya adalah padi dan hortikultura. Disepakati pula bahwa masyarakat menyediakan tenaga kerja, sedangkan JICA menyediakan bibit tanaman tahunan, benih tanaman semusim, bahan-bahan lain yang diperlukan terutama untuk membuat pagar, serta teknologi penanaman yang diperlukan. Sebagian bibit tanaman tahunan dibibitkan oleh masyarakat atas bimbingan dari pihak pelaksana proyek. Tujuannya agar masyarakat trampil dalam membuat bibit sehingga dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk masyarakat lain di sekitarnya.

STRUKTUR JALUR HIJAU TERPADU



- ✓ Petani menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan mereka sendiri
- ✓ Kemauan petani dalam membuat jalur hijau di dekat Taman Nasional meningkat setelah mengetahui fungsi dan pengembangan teknologi di lahan mereka

Gambar 31. Struktur jalur hijau terpadu di sekitar TNB (Otsuka, M. 1997)



Gambar 32. Tanaman pohon pinang di jalur hijau dan parit pengatur muka air tanah juga berfungsi sebagai sekat bakar di Desa Sungai Rambut, Jambi (Dokumentasi oleh: Yus Rusila Noor, 2003)

Persentase tumbuh tanaman lamtoro, karena genangan, relatif lebih rendah dibandingkan dengan pinang. Di samping itu, lamtoro dan sengon ternyata kurang diminati oleh masyarakat karena pemanfaatannya yang kurang jelas. Pemilihan jenis tanaman yang tahan terhadap genangan air (seperti jelutung) dan pembuatan guludan/gundukan untuk mengatasi genangan (lihat Kotak 6 dalam Bab 3), merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan bagi kegiatan penanaman diketiga dusun ini ke depan. Kegagalan karena terendamnya tanaman dalam waktu lama dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang bergairah untuk menanam kembali.

Belajar dari pengalaman di atas, pada tahap berikutnya, jenis tanaman tahunan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, yaitu lebih bervariasi dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar, seperti tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, dan beberapa jenis tanaman kehutanan seperti jelutung, aren dan mahoni.

Dilihat dari aspek keswadayaan, kegiatan ini didukung oleh partisipasi dana swadaya yang cukup besar dari masyarakat meskipun nilainya cukup bervariasi antara desa yang satu dengan desa lainnya. Misalnya, masyarakat Desa Rantau Rasau memberikan kontribusi dalam bentuk *in kind* dalam partisipasi kegiatan pembuatan parit sebesar 12,5 kali lebih besar dari dana bantuan JICA.

Dilihat dari sisi usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat, pemagaran mempunyai dampak yang cukup nyata, karena serangan hama babi menjadi jauh berkurang. Dampaknya, tenaga yang dikeluarkan petani untuk memburu babi dan jaga malam juga sangat berkurang. Tanaman yang dibudidayakan pun lebih terjaga dan tumbuh dengan lebih baik.

Kegiatan pengembangan jalur hijau di atas juga melibatkan kaum perempuan yang mana dalam kehidupan sehari-harinya mereka juga memiliki peranan penting dalam perekonomian rumah tangga maupun pelestarian lingkungan. Di desa ini, pada kelompok masyarakat Bugis, perempuan berperan aktif dalam kegiatan pengembangan jalur hijau dan juga dalam kegiatan pemadaman kebakaran, meskipun mereka agak malu-malu berbicara di depan laki-laki pada acara diskusi terbuka. Sedangkan pada kelompok Suku Jawa, perempuan kurang berperan aktif untuk hal-hal di atas, karena pengelola kegiatan cenderung hanya melakukan pendekatan pada laki-laki. Namun demikian, pada pemukiman suku Jawa, perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan usaha tani, terutama pada proses tanam dan penyiangan. Selanjutnya pada kelompok orang Melayu, perempuan dan laki-laki berperan aktif dalam acara diskusi kelompok dan kegiatan pemadaman kebakaran.

Setelah kegiatan yang didukung oleh JICA di desa Sungai Rambut dan Rantau Rasau selesai, Yayasan PINSE dengan dukungan dana dari Proyek CCFPI menggagas kegiatan pengembangan ekonomi lain yang dilaksanakan cukup komprehensif dan melibatkan berbagai *stakeholders* dalam rangka mendukung pelestarian ekosistem gambut di Taman Nasional Berbak. Sebagaimana halnya dengan desa Sungai Aur, di desa inipun pola yang diterapkan PINSE adalah berupa perpaduan antara pemberian bantuan ekonomi (modal stimulan) yang dikaitkan dengan kegiatan penanaman pohon dan dukungan pelestarian kawasan serta pembentukan brigade pemadam kebakaran.

Khusus untuk kegiatan pemberdayaan di Desa Sungai Rambut, dana stimulan yang diberikan (umumnya digunakan sebagai modal usaha pengembangan tanaman cabe, kacang tanah, kacang hijau dan perikanan karamba) tidak saja dikompensasikan dengan menaman tanaman tahunan dan buah-buahan (seperti jelutung, kakao, durian, duku, rambutan, jeruk

dan sebagainya), tapi ia juga diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kebun bibit, membangun kembali fasilitas pos jaga dan pintu gerbang Taman Nasional Berbak di Resort Air Hitam Dalam yang selama ini rusak dan terbengkelai. Kondisi ini menggambarkan adanya suatu peningkatan perbaikan hubungan yang sangat baik antara masyarakat dengan pihak pengelola TNB yang mana dalam tahun-tahun sebelumnya renggang dan kurang harmonis. Dari kegiatan ini juga terwujud suatu pola kemitraan dalam rangka pengamanan TNB, dimana beberapa anggota masyarakat dari Desa Sungai Rambut diangkat sebagai tenaga pengawas (pengamanan swakarsa) taman nasional oleh Unit Pengelola Teknis TNB. Keberhasilan dari kemitraan ini juga telah diwujudkan dengan disitanya ratusan batang kayu tebangan liar yang berasal dari kawasan TNB dan kini menyebabkan jeranya para penebang liar untuk masuk ke dalam kawasan hutan di TNB (setidaknya dari kawasan sungai Air Hitam Dalam).

Secara umum, data kelompok masyarakat yang dibina oleh PINSE di seluruh Desa Sungai Rambut dan Sungai Aur, dimana dana stimulannya didukung oleh Proyek CCFPI adalah meliputi:

- ❖ Jumlah kelompok : 36 kelompok
- ❖ Jumlah rata-rata anggota aktif per kelompok : 15 orang
- ❖ Jumlah total anggota kelompok : 440 orang
- ❖ Rata-rata luas lahan kompensasi per anggota kelompok : 1,5 hektar
kelompok :
- ❖ Total luas lahan yang dijadikan areal tanaman kompensasi : 660 hektar
- ❖ Jenis utama tanaman kompensasi : Jelutung,
Ramin, Pulai,
Cokelat,
Nangka, Jeruk,
Mahoni, Pinang



Gambar 33. Bupati Tanjung Jabung Timur dan Kepala TN Berbak (kiri, tengah) meresmikan fasilitas Taman Nasional Berbak (kanan) yang dibangun oleh masyarakat Desa Sungai Rambut atas dukungan dana proyek CCFPI. (Dokumentasi oleh: Jane Madgwick, 2004)



Gambar 34. Kepala Taman Nasional Berbak (baju abu-abu) bersama masyarakat menyaksikan peresmian fasilitas TNB di Resort Air Hitam Dalam (kiri). Tugu peringatan dibangun dari hasil tangkapan kayu tebangan liar (kanan). (Dokumentasi oleh: Jane Madgwick, 2004)

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SUNGAI GELAM, JAMBI

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sungai Gelam 2 merupakan pemukiman transmigrasi pola PIR Trans yang mulai ditempati pada tahun 2001 oleh 300 KK. Dihentikannya Kredit Lunak Bank Indonesia (KLBI)

sejak tahun 1999 menyebabkan penyaluran kredit di beberapa pemukiman transmigrasi pola PIR termasuk di Sungai Gelam juga terhenti. Akibatnya, sebanyak 148 keluarga transmigran di lokasi itu tidak memperoleh bantuan kredit dan jatah kebun sawit. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sebagai petani di lahan pekarangan yang luasnya hanya 0,5 ha, buruh tani, dagang, dan sebagian kecil sebagai pembalok dan buruh pengangkut kayu.

Lahan di lokasi ini merupakan lahan gambut dengan ketebalan 4-7 m, sehingga cukup rawan terhadap kebakaran. Pada tahun 2002, tercatat sebanyak 48 rumah transmigran terbakar. Peristiwa kebakaran ini terulang lagi di tahun 2004. Memperhatikan kondisi perekonomian warga yang memprihatinkan dan tebalnya lahan gambut yang ada di lokasi ini, Yayasan PINSE (didukung oleh dana WI-IP) tertarik untuk memberdayakan masyarakat yang dikaitkan dengan program pelestarian lingkungan.

Kepada dua kelompok tani yang terdapat di desa ini (masing-masing beranggotakan 30 orang), oleh PINSE dijadikan pintu masuk bagi program pemberdayaan melalui pemberian dana stimulan yang berasal dari Proyek *“Promoting the river basin and ecosystem approach for sustainable management of SE Asian lowland peat swamp forests”, a case study of the Air Hitam Laut river basin in Jambi Province Indonesia*” yang dikelola oleh WI-IP pada tahun 2003-2005. Hampir seluruh anggota kelompok tersebut adalah warga transmigran yang belum memperoleh lahan kelapa sawit. Seorang pendamping dari PINSE yang didampingi pula oleh pendamping lokal (anggota transmigran), mulai bekerja aktif di desa ini sejak tahun 2004 untuk melakukan program pemberdayaan. Yaitu dimulai dari pengembangan kelompok, pelatihan penyusunan rencana usaha, kemudian diteruskan dengan budidaya peternakan ayam.

Setelah memenuhi persyaratan tertentu, meliputi rencana kerja kelompok yang jelas dan kesiapan bibit tanaman tahunan (sebagai kompensasi), lalu kepada setiap kelompok diberikan dana stimulan sebesar Rp 20 juta. Tanaman tahunan yang dipilih warga terdiri atas jeruk, rambutan, kemiri, dan durian. Sedangkan dana yang diterima digunakan sebagai modal usaha peternakan ayam kampung. Jumlah bibit ayam yang dibeli sebanyak 800 ekor, dibagi atas 400 ekor untuk dikelola oleh kelompok

dan sisanya 400 ekor dibagikan merata kepada anggota kelompok. Beternak ayam di lokasi ini dinilai cukup menjanjikan. Di samping mudah dipasarkan, kotorannya cukup baik untuk memupuk lahan gambut bagi tanaman palawija yang diusahakan oleh petani.

Saat ini kegiatan kelompok adalah melakukan usaha peternakan ayam dan menyediakan sarana produksi peternakan bagi anggotanya. Panen ternak ayam sudah sekali dilakukan dengan keuntungan Rp 300 ribu/kelompok. Dampak secara ekonomi memang belum secara menyolok dapat dilihat dalam jangka pendek, tapi program pemberdayaan di lokasi ini telah membangkitkan semangat warga untuk terus menggali potensi tanpa harus merusak lingkungan.

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH WI-IP DENGAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG/ TANJAB BARAT - JAMBI

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan para petani di lahan gambut dangkal di Kabupaten Tanjab-Barat, WI-IP didukung oleh staff dari Dinas Pertanian setempat dan seorang Pendamping masyarakat. Di wilayah ini, terdapat 4 buah Kelompok Tani yang memperoleh bantuan pendanaan dari WI-IP. Keempat Kelompok Tani (KT) tersebut adalah: KT. Beringin Baru, KT. Sumber Jaya, KT. Karya Bakti dan KT Surya Gemilang. Karakteristik pendanaan yang diberikan oleh WI-IP kepada para Kelompok Tani di atas adalah berupa pemberian 'pinjaman dana sementara' yang bersifat mengikat tapi tanpa agunan dan tanpa bunga. Pinjaman dana sementara ini dapat digunakan KT sebagai modal usaha dalam melakukan alternatif kegiatan ekonomi jangka pendek (misal: bertani sayuran, beternak itik atau ayam dan sebagainya), tapi sebagai kompensasi terhadap pemberian dana tersebut (karena tanpa agunan dan tanpa bunga) maka kepada seluruh anggota KT diwajibkan menanam sejumlah tanaman tahunan yang bibitnya disiapkan oleh anggota KT (tidak boleh dibeli dengan dana pinjaman). Tanaman tahunan (juga dalam tulisan ini diistilahkan sebagai tanaman kompensasi) yang mereka tanam ini harus dirawat dan bertahan hidup, sekurangnya 70% hingga kurun waktu berlangsungnya masa pinjaman dana sementara', yaitu 3 tahun.

Jika pada tahun ketiga, 70% dari jumlah total tanaman yang ditanam KT berhasil hidup, maka 'dana pinjaman sementara' tersebut sepenuhnya menjadi hibah atau tidak perlu dikembalikan kepada WI-IP. Tapi jika persentase tanaman yang hidup kurang dari yang disyaratkan, maka dana pinjaman sementara tersebut harus dikembalikan kepada WI-IP secara proporsional.

Pendekatan di atas sesungguhnya memiliki sekurangnya 2 manfaat bagi KT, yaitu: (a) anggota KT dapat memperoleh modal usaha untuk kegiatan berjangka pendek (seperti bertani sayuran atau ternak ayam) dengan cara "mudah" tapi bertanggung jawab (yaitu wajib menanam pohon), dan (b) pohon tahunan yang ditanam selain bermanfaat dari sisi penghijauan lingkungan, ia juga dapat menjadi tabungan atau memberikan hasil bernilai ekonomis jangka panjang bagi anggota KT.

KT. Beringin Baru

Kelompok Tani Beringin Baru (beranggotakan 14 orang) terletak di Desa Pembengis Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Pada bulan Februari 2004, WI-IP memberikan 'dana pinjaman sementara' kepada kelompok ini sebesar Rp 7,000,000 yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan tanaman sayuran (kacang panjang dan ketimun). Sebagai konsekuensi atas pinjaman yang diberikan WI-IP ini (tanpa agunan dan tanpa bunga), seperti tercantum dalam perjanjian peminjaman, kepada Kelompok Tani ini diwajibkan menanam tanaman tahunan (mereka memilih menanam 3000 batang pinang dan jeruk sebagai tanaman kompensasi atas dana yang dipinjamkan) dan anggota kelompok wajib merawat dan mempertahankan hidup tanaman tersebut selama minimal 3 tahun. Apabila pada tahun ketiga, 80 % dari tanaman kompensasi tersebut hidup dengan baik, maka semua pinjaman tersebut di atas dihibahkan kepada Kelompok atau tidak perlu dikembalikan kepada WI-IP.

Pada siklus pertama dari pemberian modal, ternyata kegiatan bercocok tanam sayuran ini mendapat gangguan hama babi yang cukup serius. Tapi atas semangat dan ketekunan para anggotanya, hama babi tersebut kini dapat ditanggulangi dengan baik, yaitu dengan membuat pagar (dari

tiang kayu dan papan) di sekeliling lahan. Keberhasilan ini lantas diteruskan pada siklus penanaman tahap II dengan jenis tanaman yang sama ditambah dengan tanaman pisang, semangka, jagung dan cabe. Hasil kegiatan pada siklus kedua ternyata memberikan hasil memuaskan dan kini diteruskan dengan penanaman siklus ketiga. Keberhasilan kelompok Tani Baringin Baru tersebut kini ditiru para petani tetangganya yang bukan bagian dari kelompok ini.

Hal yang menarik dari pola pinjaman di atas adalah: KTBB dalam penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh WI-IP justru tidak pernah berfikir bahwa dalam tahun ketiga mereka bisa menjadikan dana pinjaman tersebut menjadi hibah (tidak perlu dikembalikan) asalkan tanaman tahunan (sebagai kompensasi atas pinjaman) bertahan hidup sekurangnya 80%. Tapi mereka bersepakat bahwa dana bantuan WI-IP tetap merupakan pinjaman dan dianggap sebagai piutang yang harus dikembalikan. Setiap selesai memenuhi siklus penanaman, mereka secara rajin mengembalikan sepenuhnya uang pinjaman tersebut kepada Sang Pendamping yang ditugaskan WI-IP di lapangan. Namun karena mereka khawatir akan ditinggalkan pergi oleh Sang Pendamping, maka setiap memasuki siklus penanaman baru, mereka meminjam kembali dana yang telah diserahkan tersebut untuk digunakan sebagai tambahan modal berusaha. [catatan: dari cerita yang disampaikan oleh Sang Pendamping kepada WI-IP, ternyata para anggota Kelompok ini merasa sangat dibantu/dibimbing baik dari segi teknis bercocok tanam maupun dalam menyampaikan berbagai informasi dari luar desa tentang diversifikasi pengembangan usaha pertanian, misalnya bertanam semangka yang kini memberikan hasil memuaskan]. Kini kegiatan bertani dengan menggunakan dana pinjaman telah memasuki siklus ketiga (berakhir pada bulan Desember 2005; lihat Tabel 9 di bawah), namun sebelum siklus ini berakhir ternyata KTBB menyatakan ingin meminjam kembali dana tersebut guna dipakai untuk membeli bahan-bahan pagar untuk lahan mereka yang kini telah bertambah luas [beberapa anggota KTBB, karena keberhasilannya kini telah mampu membeli lahan baru untuk memperluas usahanya].

Tabel 9. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTBB

Siklus	Tanggal	Jumlah dana yang dipinjam	Pengembalian
I	26 Februari 2004	7.000.000,-	26 Juni 2004
II	1 Juli 2004	7.000.000,-	24 Desember 2004
III	14 Februari 2005	7.000.000,-	25 Desember 2005

KT. Sumber Jaya

Kelompok tani Sumber Jaya terletak di Parit Lapis, Dusun Serdang Jaya, Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Oleh pihak WI-IP (melalui Pendamping lapangannya) telah disalurkan bantuan 'dana pinjaman sementara' kepada Kelompok Tani Sumber Jaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (a) Dana yang diberikan oleh WI-IP kepada KT SJ (yaitu sebesar Rp 8.000.000) merupakan dana pinjaman yang dapat digunakan oleh anggota KTSJ untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan bertani sayuran. Pinjaman ini diberikan tanpa jaminan dan tanpa dikenakan bunga. (b) Sebagai kompensasi dari pemberian dana tersebut, kepada KT SJ diwajibkan menanam tanaman kompensasi di lahan gambut dangkal milik mereka, yaitu berupa tanaman tahunan sebanyak minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) batang dan penerima pinjaman wajib memelihara tanaman kompensasi tersebut minimal 3 tahun.

Dari Rp 8 juta dana yang dipinjamkan, ternyata hanya Rp 2 juta yang diserap oleh anggota KTSJ (dana tersebut terutama digunakan untuk membeli sarana pendukung/peralatan pertanian), sisanya digulirkan kepada Kelompok Tani lainnya. Rendahnya minat petani dalam menggunakan dana bantuan dari WI-IP, terutama disebabkan oleh tingginya hama babi yang menyerang lahan pertanian mereka serta masalah kekeringan yang keduanya sulit di atasi. Namun demikian, dari sekitar 15 anggota petani

KTSJ, ada 4 anggota yang hingga tulisan ini dibuat masih menekuni kegiatan ini dan sebagai kompensasi atas pemberian dana oleh WI-IP, maka di atas lahan milik keempat anggota tersebut, kini selain ditanami kebun kopi, coklat dan pinang, juga mulai ditanami kelapa sawit.

Kekeringan lahan pertanian sayuran di lahan gambut Parit Lapis disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut : (a) Pengeringan lahan gambut (melalui pembuatan parit/kanal) dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat untuk mendapatkan kondisi lahan yang sesuai untuk perkebunan kopi; (b) Tidak adanya hujan selama 2 minggu lebih; (c) Tidak adanya sumber air (irigasi) ke lahan pertanian akibat terkurasnya air oleh pengerukan (pembuatan kanal) yang dilakukan oleh HTI-PT Wira Karya Sakti (WKS) untuk pengeringan lahannya secara besar-besaran. Saran-saran yang diberikan oleh pihak WI-IP (beserta Pendamping lapangan) kepada KTSJ di Parit Lapis pada saat itu adalah:

- ❖ Petani harus melanjutkan pembuatan pintu-pintu air agar air hujan yang turun dapat ditahan oleh lahan gambut dan dapat menjadi cadangan air sewaktu kekeringan berulang.
- ❖ Untuk bibit yang belum disemai, penyemaianya dilakukan setelah hujan turun.
- ❖ Bibit yang sudah tersemai agar ditanam dan penyiramannya dilakukan dengan menimba air dari parit-parit.
- ❖ Banyaknya bibit yang akan ditanam disesuaikan dengan kemampuan tenaga untuk menyiram dan ketersediaan air untuk menyiram

Sebagai tindak lanjut dari saran-saran yang diberikan oleh WI-IP di atas, ternyata oleh anggota KTSJ telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Pembuatan pintu air sudah dilakukan oleh petani, bahkan seorang dari mereka sudah memanfaatkan pasang naik dan manajemen air untuk pertanian palawijanya. Pembuatan pintu air dilakukan secara sederhana sebagaimana gambar berikut. Apabila petani ingin memasukan air, maka sewaktu pasang naik pintu air dibuka dan pada saat pasang surut pintu air ditutup kembali. Sayangnya tidak seluruh areal pertanian dipengaruhi oleh pasang surut.



Gambar 35. Permukaan air di parit sudah naik (kiri), sebagai hasil pengelolaan pintu air (kanan). (Dokumentasi oleh: Indra Arinal, 2004)

- ❖ Beberapa alternatif untuk mengatasi kekeringan yang dilakukan KTSJ adalah sbb:
 - ◆ Penyiraman manual, dengan memanfaatkan air dari parit-parit yang dibuat, petani menyiram sayur-sayurannya dengan menggunakan gembor (alat siram tanaman). Gembor diangkut dengan cara ditenteng atau dengan cara dipikul, dimana satu orang menenteng dua gembor satu di kanan dan satu di kiri.
 - ◆ Penyiraman semi mekanis, pada mulanya air dari parit dipompakan ke tangki air penampungan yang dibuat ditengah-tengah areal ladang. Dari tangki ini, kemudian air dibawa dengan gembor dan disiramkan ke tanaman.
 - ◆ Penyiraman Mekanis, dengan cara ini, air yang dipompa lalu ditampung di dalam tangki yang diletakkan pada menara (lihat Gambar), selanjutnya air secara gravitasi disemprotkan ke tanaman dengan menggunakan slang. Semua metoda di atas dilakukan dengan memanfaatkan air dari parit induk yang telah dibuatkan pintu-pintu airnya.



Gambar 36. Tangki penampungan air di lahan gambut yang dipompakan dari parit. (Dokumentasi oleh: Indra Arinal, 2004)

- ❖ Selain hambatan oleh kekeringan di atas, kepada petani juga diberikan arahan tentang teknis pola tanam yang memadai. Sebelumnya, para anggota KTSJ menanam kacang panjang dan cabe dengan pengolahan lahan yang cukup intensif dalam arti permukaan lahan dibersihkan sama-sekali dan jarak antar tanamanpun masih sangat jarang. Akibat dari cara ini, sinar matahari langsung mencapai/mengenai permukaan tanah gambut sehingga tanah menjadi panas, cepat kering dan akar tanaman kepanasan sehingga akhirnya tanaman menjadi layu dan mati. Untuk mengatasi hal demikian, kemudian kepada para petani tersebut disarankan untuk :
 - ◆ tidak melakukan pembersihan lahan terlalu bersih,
 - ◆ apabila telah terlanjur membersihkan lahan dianjurkan menutup kembali dengan menggunakan mulsa rumput kering (lihat Gambar 37 di bawah yang posisi mulsa ditunjukkan oleh panah putus-putus pada lahan gambut yang ditanami kacang panjang)
 - ◆ merapatkan jarak tanam, sehingga pada saat pertumbuhan tanaman sudah optimal, maka daun masing-masing tanaman saling bersinggungan dengan demikian sinarmatahari tidak dapat langsung mengenai tanah. Untuk itu disarankan menambah tanaman satu baris lagi di lokasi yang ditunjukkan panah pada gambar tanaman cabe di atas.



Gambar 37. Tanaman kacang panjang di lahan gambut. Tanpa tutupan mulsa (kiri), dengan tutupan mulsa (kanan).
(Dokumentasi oleh: Indra Arinal, 2004)

KT. Karya Bakti

Kelompok Tani Karya Bakti (KTKB) terletak di Desa Sialang, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Seperti halnya dengan KT Sumber Jaya di Parit Lapis di atas, maka kepada KTKB juga telah disalurkan 'dana pinjaman semetara' oleh Staff Pendamping lapangan WI-IP dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (a) Dana yang diberikan oleh WI-IP kepada KTKB (yaitu sebesar Rp 5.000.000) merupakan dana pinjaman yang dapat digunakan oleh anggota KTKB untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan bertani sayuran. Pinjaman ini diberikan tanpa jaminan dan tanpa dikenakan bunga. (b) Sebagai kompensasi dari pemberian dana tersebut, kepada KT KB diwajibkan menanam tanaman kompensasi di lahan gambut dangkal milik mereka, yaitu berupa tanaman tahunan sebanyak minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) batang dan penerima dana pinjaman wajib memelihara tanaman kompensasi tersebut minimal 3 tahun. Apabila pada tahun ke tiga 80 % tanaman kompensasi tersebut hidup dengan baik, maka hutang selama tersebut pada butir 2 diatas dianggap lunas.

Pada siklus penanaman pertama (dimulai pada bulan Oktober 2003), ternyata kegiatan bercocok tanam sayuran ini telah memberikan hasil yang cukup baik, karena hama babi yang dihadapi tidak terlalu serius. Keberhasilan ini lantas diteruskan pada siklus penanaman tahap II (dimulai bulan Mei 2004) dengan jenis tanaman yang sama tapi ditambah dengan kegiatan beternak ayam. Hasil kegiatan pada siklus keduanya ternyata memberikan hasil memuaskan dan kini diteruskan dengan penanaman siklus ketiga (dimulai bulan Oktober 2005). Kegiatan bertani sayuran tetap memberikan hasil yang cukup baik, tapi kurang memuaskan untuk ternak ayam. Dari 19 induk ayam yang dibeli dengan modal dana dari WI-IP tersebut, kini hanya menghasilkan keturunan baru tidak lebih dari 14 ekor (informasi diperoleh pada bulan Oktober 2005).

Seperti halnya dengan pola pinjaman yang diterapkan pada KTBB, maka pada KTKB juga berlaku kondisi bahwa anggota KTKB dalam penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh WI-IP tidak pernah berfikir bahwa dalam tahun ketiga mereka bisa menjadikan dana pinjaman tersebut

menjadi hibah (tidak perlu dikembalikan) asalkan tanaman tahunan (sebagai kompensasi atas pinjaman) bertahan hidup sekurangnya 80%. Tapi mereka bersepakat bahwa dana bantuan WI-IP tetap merupakan pinjaman dan dianggap sebagai piutang yang harus dikembalikan. Setiap selesai memenuhi siklus penanaman, mereka secara rajin mengembalikan sepenuhnya uang pinjaman tersebut kepada Sang Pendamping yang ditugaskan WI-IP di lapangan. Hingga laporan ini dibuat, ternyata jumlah tanaman kompensasi yang ditanam (total 2910 tanaman) telah melampaui kewajiban yang harus dilakukan (2500 batang), yaitu dengan jumlah tertanaman : pinang (1170 batang) dan kopi (1740 batang). Namun demikian, kegiatan penanaman masih terus mereka dilakukan terutama dengan tanaman pinang yang ditanam disepanjang parit-parit.

Kini kegiatan bertani KTKB dengan menggunakan dana pinjaman telah memasuki siklus ketiga (berakhir pada bulan April 2006; lihat Tabel 10 di bawah).

Tabel 10. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTKB

Siklus	Tanggal	Jumlah dana yang dipinjam	Pengembalian
I	23 Oktober 2003	5.000.000,-	23 April 2004
II	3 Mei 2004	5.000.000,-	28 September 2004
III	12 Oktober 2005	5.000.000,-	April 2006

KT. Surya Gemilang

Kelompok tani ini (beranggotakan 13 orang) terletak di Parit Burhan Dusun Serdang Jaya, Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepada KT Surya Gemilang (KTSG) ini, pihak WI-IP telah memberikan 'dana pinjaman sementara' sebesar Rp 7.500.000 pada bulan Maret 2005 dan sebagai kompensasinya, kepada anggota KTSG diwajibkan menanam 2000 batang tanaman kompensasi yang wajib dipertahankan hidup hingga minimal 80% sampai dengan berakhirnya masa pinjaman yaitu 3 tahu.

Sesungguhnya sejak tahun 2002, yaitu sebelum WI-IP masuk ke dusun Serdang, anggota Kelompok Tani Surya Gemilang telah melaksanakan usaha pemeliharaan ayam buras, disamping usaha lain seperti bertani (padi sawah pasang surut) dan berkebun (kelapa dan pinang) yang ditanam di lahan gambut. Usaha di atas dilakukan hampir merata oleh seluruh anggota kelompok tani. Namun usaha ternak ayam yang dilakukan masih dalam skala kecil dan sistem pemeliharaan umumnya masih bersifat tradisional. Upaya pengembangan usaha ayam buras ditingkat petani ini terus dilakukan, namun masih ditemui berbagai kendala diantaranya tingkat perkembangbiakan yang rendah disebabkan oleh: pemilihan bibit yang kurang baik, tingkat kematian yang tinggi, tata cara pemeliharaan masih tradisional, pemberian pakan yang umumnya masih tergantung pada alam dan pengendalian serta pencegahan penyakit yang belum maksimal.

Mengingat keberadaan dan kepemilikan ayam buras yang sudah umum di kalangan masyarakat tani di lokasi ini, maka usaha dan upaya untuk meningkatkan peranan serta produktivitas ayam buras serta pengembangan sistem produksi perlu terus dilakukan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan perbaikan mutu genetik melalui program seleksi, perbaikan mutu pakan dan sistem perkandangan serta program vaksinasi secara teratur. Selain faktor teknis, juga diperlukan adanya pembinaan motivasi petani dan fasilitas penguatan modal untuk lebih mengembangkan usaha tersebut sehingga lebih bernilai ekonomis.

Dalam rangka meningkatkan modal usaha beternak ayam buras di atas, kemudian kepada Kelompok Tani Surya Gemilang ini diberi dukungan 'dana pinjaman sementara' oleh Wetlands Internasional-Indonesia Programme. Kondisi/syarat dari dana pinjaman tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kepada masing-masing anggota KT-SG diberi bantuan dana pinjaman (tanpa jaminan dan tanpa bunga) oleh WI-IP yang masing-masing besarnya bervariasi (Rp 500.000 – Rp 1.000.000), total Rp 7.500.000, sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka untuk memanfaatkannya. Dana ini wajib dikembalikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang 5 bulan lagi jika masih diperlukan; (b) sebagai kompensasi terhadap dana pinjaman tersebut, kepada semua peminjam diwajibkan menanam tanaman tahunan di lahan gambut dangkal, yaitu pinang dan kelapa yang jumlah totalnya tidak kurang dari 2000 batang pohon.

Bibit tanaman ini disiapkan seiring dengan berlangsungnya kegiatan beternak. Hasil dari tanaman kompensasi ini juga diharapkan mampu memberi manfaat/penghasilan tambahan bagi petani dalam jangka panjang.

Hasil pemantauan terhadap kegiatan anggota KTSG di atas, setelah kegiatan berlangsung setahun, ternyata ternak ayam buras mereka semakin berkembang. Petani peternak mengucapkan terima kasih atas bantuan pinjaman yang diberikan WI-IP, karena dana yang diberikan sangat membantu berkembangnya usaha ternak ayam buras mereka. Pada Bulan Juni 2005, kelompok tani ini mendapat Juara I Kelompok Tani Teladan Tingkat Kabupaten dan Bulan Juli pada tahun yang sama, mendapat Juara II Kelompok Tani Teladan Tingkat Propinsi. Saat tulisan ini dibuat, disamping betemak ayam buras, mereka juga betemak sapi (dukungan diperoleh dari proyek penggemukan sapi Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat). Sebagai kompensasi dari dana bantuan yang diberikan WI-IP, kini sekitar 300 batang pinang dan kelapa telah ditanam di lahan gambut dangkal dan sekitar \pm 2.000 batang lagi telah disemaikan dan siap ditanam sebelum akhir tahun 2005 ini. Pada saat tulisan ini dibuat, dana bantuan sedang dimanfaatkan kembali oleh anggota kelompok.

Pada Tabel 11 di bawah diperlihatkan siklus peminjaman dan pengembalian dana oleh anggota KTSG. Pemahaman anggota KTSG terhadap bantuan 'pinjaman dana sementara' ini juga serupa dengan pola pikir anggota KT-KT lainnya seperti diuraikan sebelumnya di atas, yaitu mereka bersepakat bahwa dana bantuan WI-IP tetap merupakan pinjaman dan dianggap sebagai piutang yang harus dikembalikan. Setiap selesai memenuhi satu siklus perjanjian untuk beternak ayam (biasanya 5 bulan), mereka secara rajin mengembalikan sepenuhnya uang pinjaman tersebut kepada Sang Pendamping yang ditugaskan WI-IP di lapangan. Selanjutnya peminjaman ini dilanjutkan kembali pada siklus berikutnya.

[catatan penulis: pola berfikir semacam ini diduga karena anggota KT masih punya kewajiban merawat tanaman hingga tahun ketiga, sedangkan siklus-siklus usaha yang mereka lakukan masih berada di bawah/kurang dari periode tiga tahun. Sehingga untuk mengamankan modal kerja atau dana pinjaman sementara' ini, mereka merasa lebih tenteram jika setiap selesai menyelesaikan satu siklus usaha, modal pinjaman tersebut dikembalikan dulu kepada WI-IP untuk kemudian bermufakat kembali

dengan para anggota KT akan strategi peminjaman berikutnya. Cara ini dipandang cukup bijaksana, dilaksanakan penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab, karena kegagalan penanaman tanaman kompensasi (yaitu jika kurang dari 80% yang hidup pada tahun ketiga) akan berakibat terhadap pengembalian dari 'dana pinjaman sementara' ini. Sehingga dengan mengembalikan dana ini setiap satu siklus kepada WI-IP, anggota KT merasa aman karena mereka punya cadangan uang untuk mengembalikan pinjaman jika tanaman kompensasi yang mereka tanam gagal tumbuh]

Tabel 11. Siklus peminjaman dan pengembalian dana pinjaman oleh KTSG

Siklus	Tanggal	Jumlah dana yang dipinjam	Pengembalian
I	17 Maret 2005	7.500.000,-	17 Oktober 2005
II	April 2005	2.000.000,-	17 Oktober 2005
III	22 Oktober 2005	7.500.000,-	(bantuan untuk pembelian mesin penggilingan jagung untuk pakan ternak)

F. PROGRAM KEHUTANAN SOSIAL

Bina Swadaya bekerja sama dengan PT. Perhutani telah memberdayakan masyarakat tani sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan milik Perhutani ini didasarkan atas keyakinan bahwa masalah kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) memiliki potensi merusak hutan. Melalui program tersebut diharapkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat berkurang. Meskipun tidak di lahan gambut, salah satu contoh pemberdayaan masyarakat tani hutan di Desa Karang Tengah yang berada dalam kawasan RPH Babakan Madang-Kabupaten Bogor pada tahun 1991-1993 berikut dapat menjadi satu referensi yang mudah-mudahan bermanfaat.

1. Kondisi lokasi

Desa Karang Tengah terletak di wilayah Citeuruep, Kabupaten Bogor. Desa ini terbagi atas 3 dusun, yang masing-masing terbagi lagi menjadi 4 kampung. Desa ini berbatasan langsung dengan RPH Babakan Madang yang memiliki luas areal 3.900 ha. Areal tersebut memiliki komposisi 1.941 ha hutan lindung, 1.223 ha hutan produksi dan lahan kosong seluas 616 ha.

Secara sosial, desa ini dihuni oleh penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah (bahkan banyak yang buta huruf) dan bermata pencaharian sebagai petani padi dan palawija. Padi ditanam pada lahan yang datar, sedangkan palawija ditanam pada lahan yang bergelombang hingga berbukit. Karena terbatasnya lahan budidaya pertanian yang produktif, sebagian masyarakat mengalihkan kegiatannya ke hutan secara tidak terkendali, seperti penebangan pohon dan penggarapan lahan. Ditilik dari aspek kehutanan, interaksi masyarakat dengan hutan semacam ini dinilai negatif dan merugikan, karena kondisi hutan cenderung mengalami kerusakan akibat dari penjarahan tersebut.

2. Proses pemberdayaan

Pada tahun 1988, Perhutani melalui Program Perhutanan Sosial (PS) membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan hamparan yang anggotanya lintas kampung. Ternyata, pembentukan kelompok berdasarkan hamparan tidak berkembang karena lokasi tempat tinggal anggota kelompok saling berjauhan. Berdasarkan pengalaman tersebut dan atas usulan masyarakat, Bina Swadaya memfasilitasi reorganisasi dan pengembangan KTH. Selanjutnya, empat KTH pun dibentuk oleh masyarakat berdasarkan domisili, yaitu setiap kampung memiliki satu KTH. Dalam hal ini, perempuan juga membentuk "KTH wanita". Dengan demikian, terbentuk empat KTH yang terdiri atas tiga KTH laki-laki dan satu KTH wanita.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok antara lain pengorganisasian pengelolaan budidaya pertanian di lahan PS dan usaha simpan-pinjam. Di samping memiliki usaha tani di lahan PS, setiap anggota

juga memiliki kegiatan ekonomi di luar kawasan hutan dalam bentuk industri rumah tangga atau berdagang. Bahkan, beberapa kelompok tani mengembangkan kegiatan pembuatan kebun bibit desa. Selama proses pemberdayaan dilakukan, Perhutani memberikan dukungan berupa benih dan bibit tanaman buah-buahan serta menyalurkan bibit tanaman yang diproduksi oleh KTH.

Permodalan usaha simpan-pinjam digali dari simpanan anggota. Sedangkan modal lainnya diperoleh melalui jasa tenaga kerja angkutan bibit milik Perhutani. Pendapatan dari jasa angkutan tersebut dibagi sama rata bagi para pekerja dan kelompok untuk digunakan sebagai modal bersama. Hasil dari pembuatan kebun bibit desa juga digunakan sebagai modal kelompok. Keseluruhan modal tersebut digunakan untuk usaha simpan-pinjam dengan bunga sesuai kesepakatan masyarakat sebesar 2%/bulan. Hingga kini, KTH di desa ini (terutama KTH Wana Harapan) masih eksis sebagai kelompok tani yang mampu melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi bagi anggotanya. Dalam perkembangannya, kelompok tersebut dipercaya oleh pemerintah untuk mengucurkan kredit bagi pengembangan usaha tani anggotanya. Bahkan, pada tahun 1999 bersama dengan KTH lainnya berhasil membentuk koperasi dengan nama “Koperasi Wana Bina Warga”.

Selain melakukan reorganisasi, pengembangan kelompok, dan pengembangan perekonomian petani, Bina Swadaya juga melakukan upaya peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui program paket kelompok belajar (kejar) A dan B.

G. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENGEMBANGAN KSM DI HEURGEULIS

Desa Heurgeulis merupakan salah satu desa di Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, dan pedagang. Di salah satu bagian desa, terdapat komunitas buruh tani yang tidak memiliki lahan. Pada musim tanam, mereka menjadi buruh tani. Di luar musim

tanam, sebagian besar kaum laki-laki desa merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk memperoleh penghasilan. Pada tahun 1997, Bina Swadaya tertarik membantu mendampingi komunitas masyarakat ini mencari jalan keluar untuk perbaikan kondisi ekonominya. Pendekatan terhadap ibu-ibu rumah tangga dipilih oleh pendamping sebagai pintu masuk bagi proses pemberdayaan masyarakat.

Berkat ketekunan dan kesabaran pendamping, masyarakat tertarik untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM Sri Rejeki didirikan pada tahun 1997 oleh 20 orang anggota yang seluruhnya perempuan. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan. Umumnya anggota berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Bahkan ketua dan bendahara kelompok hanya berpendidikan kelas II SD. Pada saat terpilih menjadi pengurus, mereka belum bisa membaca dan menulis.

Melalui usaha simpan-pinjam dengan modal swadaya (simpanan pokok, wajib, dan sukarela), dalam usia yang kedua tahun, KSM Sri Rejeki dipercaya oleh BPR untuk mengambil kredit sebanyak Rp 4 juta. Setelah berumur 5 tahun, jumlah anggotanya berkembang menjadi 50 orang dengan aset Rp 114 juta. Saat ini, kelompok dipercaya untuk menyalurkan kredit (tanpa agunan) sebanyak Rp 6 juta dari Bank Karya Bersama dan Rp 70 juta dari Program Pengembangan Wilayah Terpadu. Kelompok ini pernah ditawari bantuan yang bersifat cuma-cuma dari pemerintah, namun ditolak karena dinilai akan merusak tatanan dan mental anggota kelompok.

Setiap anggota diberi kesempatan untuk meminjam/kredit ke kelompok dengan suku bunga 3,5% per bulan. Sedangkan bagi non anggota dikenakan bunga pinjaman sebesar 4% per bulan. Setiap peminjam diharuskan menabung sebesar 10% dari pinjaman yang dapat dicairkan apabila pinjaman lunas. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan, sedangkan pinjaman pokok diangsur 2 kali, yaitu pada bulan ke-6 dan bulan ke-12. Dengan sistem semacam itu, hampir seluruh aset berupa uang yang dimiliki kelompok selalu berputar. Bahkan anggota yang akan meminjam harus mendaftar beberapa hari sebelumnya.

Pengembalian pinjaman selalu berjalan lancar, karena peminjam yang terlambat membayar akan ditagih beramai-ramai. Apabila ada yang tidak membayar, terdapat mekanisme tanggung-renteng yang membuat keterlambatan itu harus ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok. Dampak positifnya, setiap anggota akan berkepentingan agar setiap pinjaman dikembalikan tepat pada waktunya.

Yang menarik, masyarakat dapat menggalang modal untuk pengembangan usahanya. Anggota yang semula menjadi buruh, saat ini telah berubah menjadi penggarap dengan sistem sewa lahan sawah yang bisa diusahakan 2-3 kali musim tanam per tahun. Rata-rata anggota mampu menyewa lahan seluas 0,7-1,5 ha. Beberapa anggota bahkan telah mampu mendirikan warung dengan omzet Rp 100-200 ribu per hari.

Setelah bertahun-tahun hanya mengandalkan pendapatan dari suami yang menjadi buruh tani atau buruh bangunan di kota, kini kaum perempuan di Desa Heurgeulis itu dapat berbangga hati karena telah menjadi penyokong perekonomian utama keluarga. Mereka tidak lagi menjadi buruh harian ketika panen padi, namun menjadi “majikan” meskipun tanah yang diusahakannya harus disewa dari orang lain.

Masyarakat yang semula sering terjerat hutang pada rentenir dengan bunga pinjaman 20-30% per bulan, saat ini bisa meminjam modal dengan mudah dan dengan suku bunga yang jauh lebih rendah. Anggota dapat memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap menjelang lebaran yang ditentukan bersama sebesar 30% dari laba bersih. Pengurus, di samping memperoleh pembagian SHU sebagai anggota, juga memperoleh *fee* sebesar 7,5% dari laba bersih. Anggota dapat belajar berorganisasi, mendiskusikan segala permasalahan usaha, dan belajar pembukuan.

Manfaat yang diperoleh dengan keberadaan KSM antara lain masyarakat menjadi terlatih untuk disiplin dalam mengelola keuangan keluarga, mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan, secara berkelompok bisa membangun akses ke perbankan dan tidak enggan berhubungan dengan lembaga ekonomi tersebut, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan usahanya.

H. PENGEMBANGAN LKM DI DESA MARGA SAKTI PROVINSI BENGKULU

Desa Marga Sakti merupakan salah satu dari tujuh desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Desa yang sering pula dinamai Kurotidur unit I ini sudah ditempati sejak tahun 1976 oleh sebanyak 477 keluarga transmigran. Pada tahun 2004, jumlah penduduk tersebut telah berkembang menjadi hampir 2000 keluarga. Masing-masing keluarga memperoleh lahan seluas 2 ha terdiri atas lahan pekarangan 0,25 ha dan lahan usaha 1,75 ha. Lahan di desa ini bukan merupakan lahan gambut, tetapi fenomena pengembangan LKM yang ada di desa tersebut dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk pengembangan LKM di lahan gambut.

Sesudah 24-26 tahun berkembang, struktur masyarakat di lokasi ini sudah nampak secara nyata sehingga sudah muncul tokoh-tokoh yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Tokoh masyarakat ini biasanya adalah pemuka agama, pegawai negeri, guru, dan pengusaha (termasuk petani) yang relatif sukses. Dalam kondisi seperti ini, mereka merasa tidak kesulitan ketika harus memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin bagi komunitasnya, termasuk dalam hal mengelola lembaga ekonomi. Meskipun demikian kecurangpercayaan masyarakat terhadap LKM yang dibentuk masih kelihatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kelompok simpan pinjam dan KUD yang sudah tidak berfungsi lagi karena seretnya pengembalian pinjaman atau dana dibawa lari oleh pengurus.

Walaupun penduduk di lokasi ini yang asli transmigran diperkirakan tinggal 50-60 persen, tetapi kekerabatan di antara penduduk sudah terbentuk dengan baik sehingga mereka umumnya sudah tidak merasa lagi sebagai perantau. Kehidupan sosial dirasakan sudah mendekati kondisi ketika masih di daerah asal.

Mata pencaharian penduduk di ketiga desa adalah sebagai petani, penyedia jasa (angkutan, tukang batu/kayu, tukang pijat, buruh tani), pedagang, pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga, dan buruh. Pemasaran komoditas pertanian dan industri rumah tangga selama ini

tidak mengalami kendala. Di sekitar kawasan ini terdapat tiga pasar mingguan yang terletak di Desa Marga Sakti, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Sido Mukti (Eks UPT unit V). Petani dapat langsung memasarkan produknya di pasar-pasar tersebut atau menjualnya ke pengumpul yang datang langsung ke lokasi pertanian. Komoditas yang diduga mengalami kendala pemasaran apabila ditingkatkan volumenya antara lain adalah buah-buahan dan ikan. Aksesibilitas dari Desa Marga Sakti ke pusat-pusat perekonomian relatif baik dengan kondisi jalan beraspal, jaraknya sekitar 10-13 Km ke Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara (Argamakmur) dan 86 Km ke Ibukota Provinsi Bengkulu.

Selain pasar, fasilitas perekonomian di desa ini adalah Bank (BRI dan BPR) yang terletak di Desa Marga Sakti. Masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit di lembaga keuangan tersebut tetapi syaratnya cukup ketat sehingga umumnya dirasakan berat dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang umumnya tidak memiliki agunan. Syarat yang dirasakan berat adalah adanya jaminan berupa surat-surat berharga dan kelayakan usaha.

Di Desa Marga Sakti terdapat lahan pertanian seluas 1.040 hektar yang terdiri atas lahan sawah beririgasi dan tanah tegalan atau perkebunan. Lahan sawah umumnya bertopografi datar, sedangkan lahan tegalan bertopografi bergelombang hingga berbukit. Lahan tersebut terletak pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun dan bulan kering 0-2 bulan. Luas lahan yang belum tergarap (bera) hampir merata di ketiga desa dan umumnya adalah lahan kering yang seluruhnya berjumlah sekitar 448 hektar. Apabila lahan bera ini dapat dikembangkan, akan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Sesudah hampir 25 tahun berkembang, usaha yang digeluti oleh penduduk di desa ini masih bertumpu pada usaha di sektor pertanian dengan komoditas yang cukup bervariasi mulai dari padi, palawija, ikan, dan ternak. Komoditas perkebunan seperti salak, kopi, pisang, dan durian serta tanaman industri seperti nilam dan sereh juga banyak diusahakan oleh transmigran terutama pada lahan-lahan kering yang bergelombang.

Sejak semula, di kawasan ini telah terbentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM), tetapi sebagian kurang aktif. Kelompok tani yang aktif umumnya memperoleh binaan Proyek P4K dari Departemen Pertanian melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian setempat. KUD di lokasi ini masih aktif tetapi kegiatannya hanya terbatas menarik piutang dari mitra usaha.

Usaha mikro di kawasan ini masih memungkinkan untuk dikembangkan karena lahan bera yang masih cukup luas dan subur dengan curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun, aksesibilitas yang cukup baik, serta minat masyarakat yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Kemampuan teknis usaha, terutama di bidang pertanian relatif cukup baik. Kurun waktu selama hampir 25 tahun telah menjadikan masyarakat cukup memahami kondisi lingkungan fisik dan jalur-jalur pemasarannya. Teknis usaha pada umumnya telah mereka kuasai. Demikian pula jalur-jalur pemasaran produksi. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan usaha.

Kendala yang dialami dalam pengembangan usaha adalah keterbatasan modal. Di lokasi memang sudah tersedia BRI dan BPR tetapi syaratnya cukup ketat, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar pengusaha mikro yang ada. Ketatnya penyaluran kredit dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet karena ketidakdisiplinan masyarakat. Hasil diskusi dengan tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengangsur kredit di lokasi ini tergolong rendah (Najiyati dkk, 2003). Oleh sebab itu diperlukan upaya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam mengembalikan pinjaman.

Kesulitan dalam memperoleh modal menyebabkan sebagian masyarakat yang melakukan mengembangkan usaha mikro, terutama candak kulak, beralih ke rentenir yang menawarkan modal secara mudah dan cepat. Bunga yang dikenakan oleh rentenir di lokasi ini berkisar antara 15-25 persen perbulan. Akibatnya, keuntungan peminjam menjadi kecil karena harus membayar bunga pinjaman yang cukup besar.

Guna membantu mengatasi kondisi demikian, pada tahun 2002 dilakukan ujicoba pengembangan LKM oleh Pusat Litbang Ketransmigrasian bekerjasama dengan PINBUK. Pengembangan LKM dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan yang dimulai dengan observasi. Setelah dilakukan observasi dan diskusi dengan tokoh masyarakat dan pelaku usaha mikro tentang kondisi usaha dan kendala-kendala pengembangannya, disimpulkan bahwa untuk tahap pertama diperlukan sarana simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Pengadaan lembaga tersebut saat ini mengalami kendala mengingat keterbatasan kemampuan untuk membangun sarana dan melakukan penyadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya mengelola pendapatan menjadi modal swadaya. Pengusaha mikro, terutama petani, sudah sangat terbiasa dengan bantuan cuma-cuma atau kredit program yang tanpa sanksi bila tidak dikembalikan. Oleh sebab itu, secara simultan perlu dilakukan penyadaran melalui pendampingan dan bimbingan manajemen keuangan. Pendampingan dilakukan pada tahun 2002 oleh dua orang yang menetap di lokasi Kurotidur. Mereka terdiri atas satu orang dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) cabang Bengkulu yang sudah mempunyai keahlian sebagai pendamping dan satu orang merupakan personil dari Balai Litbang TPT Kurotidur.

Sesudah dimotivasi oleh pendamping, disepakati oleh masyarakat untuk membentuk LKM yang melayani kebutuhan permodalan. Lembaga tersebut diberi nama LKMT (Lembaga Keuangan Mikro Terpadu) Sejahtera dengan pendiri sebanyak 19 orang. Lembaga ini sekaligus dapat menjadi sarana pelatihan manajemen usaha karena masyarakat pelaku usaha mikro yang mengajukan pinjaman akan dibimbing langsung oleh pengelola untuk membuat rencana usaha dan memperkirakan apakah usahanya layak atau tidak. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pengurus, struktur organisasi LKM disepakati menggunakan model BMT (lihat Bab 7), yaitu memisahkan pengurus dengan pengelola.

LKMT Sejahtera beroperasi mulai bulan Pebruari 2003 dengan modal swadaya sebanyak Rp 3,5 juta rupiah. Dengan dana swadaya yang berasal dari masyarakat, mereka atau pengurus akan benar-benar bertanggungjawab dan berusaha agar pengelolaan dana tersebut dapat

memberikan manfaat dan berkesinambungan. Keswadayaan akan menciptakan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat terhadap eksistensi LKMT yang dibentuknya. Selain itu, modal swadaya yang terkumpul menjadi bukti bagi keseriusan masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri dan sekaligus sebagai bukti bahwa mereka sudah siap untuk membentuk LKMT.

Dengan bantuan modal stimulan sebanyak Rp 1 juta rupiah, dalam waktu 6 bulan, modal tersebut telah berkembang menjadi Rp 8 juta rupiah. Semangat keswadayaan para pendiri dan anggota LKMT ternyata menarik minat beberapa pihak untuk memberikan bantuan sehingga pada tahun 2005, modal yang diputar mencapai Rp 21 juta dengan anggota sebanyak 65 orang. Pada tahun 2005, LKMT tersebut sudah memperoleh badan hukum dari Dinas Koperasi dan berubah namanya menjadi LKMT Bina Sejahtera.

Para peminjam di LKMT Bina Sejahtera terdiri atas petani, pedagang, pengusaha jasa dan industri rumah tangga. Jumlah pinjaman relatif kecil yaitu berkisar antara Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu karena modal LKMT ini masih terbatas. Pinjaman modal biasanya digunakan untuk biaya operasional berusaha. Meskipun jumlah pinjaman tidak sebesar permintaannya (hanya 11,4% dari modal sendiri), mereka merasa terbantu dengan adanya LKMT karena didampingi dari sisi manajemen usahanya dan sekaligus memperoleh pinjaman modal.

LKMT didirikan dengan sistem bagi hasil. Setiap anggota yang akan mengajukan pinjaman harus membuat rencana kerja sederhana yang dipandu oleh pengelola LKMT. Untuk menghindari penggunaan uang secara konsumtif atau kegiatan lain yang kurang menguntungkan, pinjaman tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk sarana produksi. Peminjam dapat mengambil barang di toko sarana produksi yang ada di lokasi, kemudian LKMT membayar biaya pembelian tersebut. Dengan demikian, pengelola LKMT juga menjadi pendamping usaha mikro. Dengan cara seperti itu, ternyata hingga saat ini tidak ada peminjam yang menunggak mengembalikan hutangnya.

Daftar Pustaka

- Alue Dohong, Sabirin dan Lilia. 2004. *Potret Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Sungai Mantangai, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*. WKLB Vol 13 no. 1 edisi Januari 2005.
- Adinugroho, W.C., Suryadiputra I N.N., E. Siboro and B. Hero. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP) dan Wildlife Habitat Canada (WHC).
- Amythas dan Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP). 2000. *Rencana Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional Berbak Volume I. Proyek Peningkatan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Berbak – ISDP*. xiv+236 h.
- Bambang Bintoro. 2003. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah dalam seminar Kemiskinan dan Keuangan Mikro, Gema PKM Indonesia, Jakarta.
- Bambang Ismawan (Ed: Chandra Gautama). 2000. *Pemberdayaan Orang Miskin: Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Jakarta: Puspa Swara.
- Bambang Ismawan dan Pamuji, Otok S. 1994. *LSM dan Program IDT*. Jakarta: Bina Swadaya, The Ford Foundation.

- Bambang Ismawan dan DE Susapto. 1994. *Program IDT: Kelompok Masyarakat dan Pendampingannya*. Jakarta: Bina Swadaya, The Ford Foundation.
- Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2004. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009*.
- Bina Swadaya, Paket Pelatihan Bagi Kelompok Masyarakat Penerima Program IDT, Penanggulangan Kemiskinan, Seri Paket Pendidikan Bagi Orang Dewasa.
- Broody dan Rogers. 1977. Motivation and Work Behaviour, dalam Sutrisno dan Slamet Widodo, 1994. *Hubungan antara Kreativitas dan Kemandirian dengan Motivasi Berwiraswasta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Chambers, Robert. 1997. *Participatory Rural Appraisal – Memahami Desa secara Partisipatif*. Terjemahan. Kanisius, Yayasan Mitra Tani, OXFAM. Jogjakarta.
- Danarti, Sri Najiyati, Nelson Pasaroan, dan Murdiatun. 2001. *Studi Penggalangan dan dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana dalam rangka Pengembangan Usaha Mandiri di Kawasan Transmigrasi*. Pusat Litbang Ketransmigrasian, Jakarta.
- Danarti, Anharudin, Slamet RT, dan Linton Damanik. 2004. *Kajian Pengembangan Kelembangan Komunitas Adat Terpencil di Permukiman Transmigrasi*. Puslitbang Ketransmigrasian, Jakarta.
- Daniel Murdiyarso, Upik Rosalina, Kurniatun Hairiah, Lili Muslihat, I.N.N Suryadiputra dan Adi Jaya. 2004. *Petunjuk Lapangan Pendugaan Cadangan Karbon Pada Lahan Gambut*. Kerjasama Wetlands International Programme, dan Wildlife habitat Canada, CCFPI, Bogor.
- Daniel Murdiyarso dan INN Suryadiputra. 2004. *Perubahan Iklim dan Peranan Lahan Gambut*. Kerjasama Wetlands International Programme, dan Wildlife habitat Canada, CCFPI, Bogor.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan. 1996. *Budaya Suku Banjar*. Pemda Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Dinas Sosial Jambi. 2004. *Sebaran Komunitas Adat Terpencil di Propinsi Jambi*. Dinas Sosial Jambi.
- Driya Media dan KPDNT. 1996. *Berbuat Bersama Berperan Setara – Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*. Jakarta: Driya Media – Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara.
- Egenther C. dan B. Sellato. 1992. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam*. Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan. Kerjasama PHPA, the Ford Foundation dan WWF.
- Gema PKM Indonesia. 2003. *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*. Jakarta: Gema PKM Indonesia.
- Gibbons, David S. et al. *Cost Effective Targeting: Two Tools to Identify the Poor – CASHPOR-SEF Operational Manual*. Malaysia: CASHPOR Technical Services.
- Giesen W. 1991. *Berbak Wildlife Reserve, dalam Iwan Tricahyo W, Labuani Siboro, dan INN Suryadiputra, 2004, Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Rawa Gambut*. Kerjasama Wetlands Internasional, CCFPI, dan Wildlife Habitat Canada.
- Giesen W. 2003. *Causes of Peatswamp Forests Degradation in Berbak National Park, Indonesia, and Recommendations for Restoration*. Water for Food and Ecosystems Programme. International Agricultural Center (IAC) in cooperation with Alterra, ARCADIS Euroconsult, Wageningen University / LEI, WL / Delft hydraulics and Wetlands International
- Ginanjar Kartasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Malang.

- Haryadi, EM. 2005. *Kaji Bersama Masyarakat Akar Rumput dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Modul Pelatihan)*. Jakarta: Bina Swadaya.
- Harry O Buckman dan Nyle C Brady (terjemahan Soegiman). 1982. *Ilmu Tanah*. Bhartara Karya Aksara, Jakarta.
- Iwan Tricahyo Wibisono, Labueni Siboro, dan Suryadiputra. 2004. *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Rawa Gambut*. Leaflet Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut. Kerjasama Wetlands International Programme, dan Wildlife habitat Canada, CCFPI, Bogor.
- _____. 2004. *Rehabilitasi Hutan/Lahan Rawa Gambut Bekas Terbakar*. Leaflet Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut. Kerjasama Wetlands International Programme, dan Wildlife habitat Canada, CCFPI, Bogor.
- Koenraad Verhagen. 1996. *Pengembangan Keswadayaan*. Pengalaman LSM di Tiga Negara. Puspawarna, Jakarta.
- Koeswara E. 1991. *Teori Teori Kepribadian*. PT Eresco Bandung.
- Koentjaraningrat, 1991, Pengantar Antropologi, UI Press, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Terjemahan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ministry of Environment. 2002. Integrated Wetland Conservation Area Management Plan for Sustainable Development and the Guidelines for the Implementation: a Case Of Berbak National Park. The Third Work Programme of Corporation in the Field of Environmental Management between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Norway.
- Onny S Priono dan Pranarka. 1997. *Pemberdayaan, konsep, kebijakan, dan implementasi*. Cides, Jakarta.

- Otsuka, M., 1997. Guidelines for Participatory Natural Resource Management for Forest Fire Prevention: A Case from Berbak National Park, Jambi, Indonesia. The International Workshop on National Guidelines on the Protection of Forests against Fire. Bogor December 8-9, 1997
- Peter Gubbels & Catheryn Koss, World Neighbors. *Dari Akar Rumput*. Buku Panduan Pengembangan Kapasitas, Memperkuat Kapasitas Organisasi melalui Proses Penilaian Diri Terpadu. Penerjemah Nazarudin & Nur Tjahyo, Studio Driya Media.
- _____. *Berbuat Bersama Berperan Setara*. Panduan Penerapan Participatory Rural Appraisal, untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara, Driya Media.
- _____. *Kebijakan dan Strategi Menerapkan PRA dalam Pengembangan Program, untuk Konsorsium Pengembangan Dataran Tinggi Nusa Tenggara*. Driya Media.
- Primahendra, R. 2004. *Menggagas Ulang Community Development*. Policy Paper. Biro Studi dan Komunikasi Bina Swadaya.
- _____. *Memahami Kekuasaan dan Pemberdayaan*. Biro Studi dan Komunikasi Bina Swadaya.
- Rudjito. 2003. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan*. Makalah dalam seminar Kemiskinan dan Keuangan Mikro, Gema PKM Indonesia, Jakarta.
- Rosita Ghalib dan Rahmadi Ramli. 1999. Herman Supriadi dkk, 1999, Yanti Rina dan Muhamad Djamhuri, 1999. *Laporan Lokakarya Wanita Tani Dalam Penelitian Sistem Usahatani*. Intitut Pertanian Bogor.
- Sahlan Asnawi. 2002. *Teori Motivasi dalam Pendekatan Psikologi Industri dan Organisasi*. Studia Press, Jakarta.

- Sitanggang H. Sagimun dan R. Abu. 1983. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Jambi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jambi.
- Skinner, B.F. 1938. *The Behavior of Organism dalam Koswara, E, Teori Teori Kepribadian, 1991*. Eresco. Bandung.
- Soil Survey staff. 1996. *Key to soil taxonomy, 7 th edition, USDA*. Washington DC.
- Sri Najiyati, Danarti, Pandiadi, dan Siti Fatimah. 2002. *Studi Pengembangan Masyarakat dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja*. Puslitbang Ketransmigrasian, Jakarta.
- Sri Najiyati, Lili Muslihat, dan INN Suryadiputra, 2005. *Panduan Pertanian di Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan*. Kerjasama Wetlands International Programme, dan Wildlife habitat Canada, CCFPI, Bogor.
- Suryadiputra, INN. 2003. *Nasib Penebang Liar di Rawa Gambut Sumatera Selatan*. Warta Konservasi Lahan Basah Volume 11 No 1 januari 2003. Wetlands Internasional.
- Tilakaratna S, ———. *Animator dalam Perkembangan Pedesaan Partisipatif*. Terjemahan, Program Tenaga Kerja Dunia, Kantor Buruh Dunia, Jeneva.
- Tim Bina Swadaya. 2001. *Pengalaman Mendampingi Petani Hutan. Kasus Perhutanan Sosial di Pulau Jawa*. Penebar Swadaya bekerjasama dengan The Fourd Foundation.
- Tim Diklat Bina Swadaya. 1994. *Seri Cara Membina Tanpa Banyak Bicara*. Bina Swadaya, Jakarta.
- Yekti Maunati. 2004. *Identitas Dayak*. Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, LKIS, Yogyakarta.
- Zulkifli Lubis. 1999. *Rekayasa Modal Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam: Studi Kasus Pengelolaan Lubuk Larangan di Kecamatan Kotanopan Tapanuli Selatan*. Jakarta.